

POTRET KESEJAHTERAAN DAN STRATEGI BERTAHAN HIDUP PEKERJA KONTRAK DAN ALIH DAYA SEKTOR INDUSTRI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

*Potrait of Welfare and Survival Strategy of The Contract and Outsourcing Workers
in the Information and Communication Technology Industry*

Anggi Afriansyah

afriansyah.anggi@gmail.com
Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kuningan Jakarta

Naskah diterima: 27 Februari 2017 | Naskah direvisi: 17 Mei 2018 | Naskah diterbitkan: 30 Juni 2018

Abstract: *The Information and Communication Technology (ICT) industrial sector requires two preconditions for its workers: higher education and skills appropriate areas of expertise. The problem, a high educational background which is owned does not necessarily correlate with the level of well-being, particularly for outsourcing and contract workers. Therefore, this paper examines the welfare of the workers of the three aspects, (i) socio-economic conditions, (ii) the rights acquired, and (iii) social security. To get a portrait of welfare and fulfillment strategy for contract workers and outsourcing of ICT field in DKI Jakarta, in-depth interviews conducted to ten workers, consisting of eight men and two women with the age range about twenty-three years old to forty years. This paper describes the condition of contract and outsourcing workers in the ICT sector who owns higher education degree still do not have adequate bargaining power and must hard work to sustain their livelihood. This condition causes them to devise strategies such as saving, selection of a place to stay, look for overtime, looking for additional work, and trying to live a healthy life. Given these findings, the government should actively collaborate with universities and industry so that workers who entered the industry have a better bargaining position.*

Keywords: *contract and outsourcing worker, welfare, survival strategy, information and communication technology*

Abstrak: Sektor industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mensyaratkan dua prasyarat bagi pekerjanya, yaitu: jenjang pendidikan tinggi dan keterampilan sesuai bidang keahlian. Permasalahannya, latar pendidikan tinggi yang dimiliki tidak selalu berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan, utamanya bagi pekerja kontrak dan outsourcing (alih daya). Oleh karena itu, tulisan ini menelaah kesejahteraan pekerja dari tiga aspek, (i) kondisi sosial ekonomi, (ii) hak yang diperoleh, dan (iii) jaminan sosial. Untuk mendapat potret kesejahteraan dan strategi pemenuhan kebutuhan hidup pekerja kontrak dan alih daya bidang TIK di DKI Jakarta, dilakukan wawancara mendalam kepada sepuluh pekerja, terdiri dari delapan orang laki-laki dan dua orang perempuan dengan rentang usia dua puluh tiga tahun sampai empat puluh tahun. Tulisan ini menjelaskan kondisi pekerja kontrak dan alih daya di sektor TIK yang meskipun memiliki pendidikan tinggi tetapi tidak memiliki posisi tawar memadai. Seperti halnya pekerja sektor lain, mereka pun harus bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan. Kondisi tersebut menyebabkan mereka harus berstrategi mulai dari berhemat, menabung, pemilihan tempat tinggal, mencari lemburan, mencari tambahan pekerjaan, dan berusaha hidup sehat. Merujuk pada temuan tersebut, pemerintah harus

secara aktif berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan industri agar pekerja yang masuk ke dunia industri memiliki posisi tawar yang lebih baik.

Kata Kunci: pekerja kontrak dan alih daya, kesejahteraan, strategi bertahan hidup, Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pendahuluan

Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu sektor industri dengan nilai investasi modal yang besar dan berbasis pemanfaatan teknologi modern. Ada dua karakteristik pekerja di bidang TIK; *pertama*, memiliki latar pendidikan tinggi (diploma maupun universitas). Data Badan Pusat Statistik (2014: 39) menunjukkan 96,3 persen pekerja TIK adalah lulusan pendidikan tinggi, mulai dari Diploma sampai S-3. *Kedua*, kriteria pendidikan formal saja tidak cukup untuk bekerja di bidang TIK. Para pekerjanya harus memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan bidang pekerjaan. Saat ini, bahkan pekerja dan praktisi sektor ini harus memiliki sertifikasi di bidang TIK. Hal tersebut merujuk pernyataan Menaker Hanif Dakhiri yang menyebutkan agar sertifikasi di bidang TIK menyesuaikan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang sudah diakui secara internasional.¹

Dua karakteristik yang telah disebutkan sebelumnya tentu saja tak membuat calon pekerja di sektor industri TIK secara otomatis terserap ke dunia kerja. Ijazah pendidikan tinggi bidang TIK tidak serta merta membuat lulusannya juga dapat bekerja di sektor TIK. Sering terjadi, pekerja dengan tingkat pendidikan tinggi harus menganggur terlebih dahulu ataupun mendapatkan pekerjaan yang jauh berbeda dengan kualifikasi akademik atau ijazah yang dimilikinya. Seleksi ketat dan berlapis-lapis menyebabkan tak semua calon pekerja yang berasal dari pendidikan

tinggi mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Tingginya persaingan di bidang TIK bisa jadi merupakan salah satu penyebab pekerja harus memilih menjadi tenaga kontrak atau alih daya. Ijazah pendidikan tinggi dan keterampilan khusus di bidang TIK yang sesungguhnya dapat menjadi keunggulan bagi pekerja untuk mendapatkan kesejahteraan yang memadai tidak selalu sesuai dengan harapan.

Kedua aspek itu tidak selalu berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan yang dimiliki oleh pekerja, terutama untuk mereka yang masih berstatus kontrak dan *outsourcing* (alih daya). Walaupun hingga saat ini boleh tidaknya menggunakan tenaga kerja dengan status alih daya di bidang TIK masih menjadi perdebatan. Perbedaan interpretasi tersebut mengemuka karena tafsiran yang berbeda terhadap penjelasan pasal 66 (1) UU No. 13 tahun 2003. Dari kajian Nawawi (2013 :4) maupun Tjandraningsih, dkk (2009: xix) misalnya, bahwa antara perusahaan pengguna/pemberi pekerjaan maupun serikat buruh/buruh masih berbeda pandangan terhadap interpretasi penjelasan pasal 66 (1) UU No. 13 Tahun 2003. Perbedaan itu berkaitan pada bidang apa saja perusahaan dapat menggunakan tenaga alih daya.

Data yang dirilis oleh BPS (2015) menunjukkan bahwa tidak sedikit penduduk dengan ijazah pendidikan tinggi menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian atau jenjang pendidikan yang telah ditamatkan. Hal ini kemudian menjadi salah satu penyebab sebagian lulusan pendidikan tinggi harus menjadi pengangguran. Saat ini, terdapat 905.127 atau 11,9 persen penduduk lulusan pendidikan tinggi (diploma dan universitas) dari total 7.560.822 penduduk yang berusia 15 tahun ke atas merupakan pengangguran terbuka (BPS, 2015:245). Pengangguran tenaga kerja dengan ijazah pendidikan tinggi tentu menjadi masalah yang perlu dicarikan solusinya. Laporan *International Labour Organization* (ILO) 2014-2015 misalnya, menyebutkan bahwa saat ini permintaan akan pekerja dengan

¹ "Menaker Minta Pekerja TIK Dilengkapi Sertifikasi Kerja." <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/02/02/nj5fuh-menaker-minta-pekerja-tik-dilengkapi-sertifikasi-kerja>. Diakses 25 Maret 2015.

kualifikasi tinggi telah melampaui suplai tenaga kerja yang ada. Hal ini memunculkan situasi di mana lowongan pekerjaan di Indonesia diisi oleh pekerja yang tidak memiliki persyaratan sesuai yang dibutuhkan dunia usaha. Laporan tersebut juga menjelaskan perlunya kesesuaian keterampilan lulusan pendidikan tinggi dengan dunia usaha agar daya saing dan produktivitas perekonomian Indonesia semakin meningkat. Apalagi, permintaan akan pekerja berpendidikan tinggi akan terus berkembang (ILO, 2015: xi). Menyoroti permasalahan itu tentu diperlukan upaya pemerintah dalam meningkatkan proses penyesuaian jenjang pendidikan, serta melakukan optimalisasi keterampilan tenaga kerja berpendidikan tinggi. Salah satu penyebab banyaknya pengangguran terutama bagi calon pekerja berpendidikan tinggi dikarenakan adanya ketidakcocokan antara kualifikasi pendidikan dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan kesulitan perusahaan mendapatkan pekerja yang keterampilannya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kalaupun perusahaan merekrut mereka, maka harus mengeluarkan biaya untuk melatih kembali calon pekerjanya itu.

Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi bagi para pekerja di perkotaan merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dikesampingkan. Pekerja harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Data BPS (2015: viii), perbulan Maret 2015 menunjukkan Provinsi DKI Jakarta sebagai wilayah dengan pengeluaran rata-rata per kapita tertinggi, yaitu Rp. 1.773.431/bulan. Penduduk DKI membelanjakan 34,7 persen pengeluarannya untuk makan dan 65,3 persen untuk yang bukan makanan. Kondisi ini dikuatkan oleh studi Ningrum, dkk (2014: 96) yang mengungkapkan bahwa penduduk kelas menengah perkotaan, baik yang sudah maupun belum menikah harus mengeluarkan banyak kebutuhan, seperti: makanan, hiburan, cicilan rumah maupun kendaraan; yang dapat mencapai hingga 50 persen dari pendapatan keluarga. Ada pula kebutuhan lain seperti

kesehatan dan pendidikan yang perlu dipenuhi. Semua hal tersebut kemudian dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat suku bunga maupun peningkatan harga pangan.

Pemenuhan gaya hidup perkotaan seperti kepemilikan gawai juga memengaruhi pengeluaran penduduk kelas menengah perkotaan. Merujuk pada Survei Indikator TIK 2015, sebanyak 60,5 persen pekerja swasta merupakan pengguna *smartphone*. Kebutuhan pengeluaran pulsa untuk pengguna *smartphone* adalah Rp122.000 per bulan. Berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi tentu menjadi beban berat bagi pekerja dengan status alih daya maupun kontrak. Apalagi penghasilan perbulan yang didapat tidak terlalu besar. Selain itu, pekerja tidak memiliki kepastian keberlangsungan kerja karena setiap saat kontraknya dapat saja berakhir. Jika dibandingkan dengan kondisi kesejahteraan pekerja yang berketerampilan (*skilled labour*) di beberapa negara ASEAN, posisi Indonesia memang masih jauh di bawah Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Data ILO (2015:28) menunjukkan saat ini rata-rata penghasilan perbulan pekerja di Indonesia sebesar 174 dolar AS. Sementara di Malaysia sebesar 609 dolar dan Singapura sebesar 3.547 dolar AS. Malaysia dan Singapura telah menempatkan pekerja yang memiliki keterampilan, termasuk yang memiliki keterampilan di sektor TIK, pada posisi yang cukup baik serta diiringi penghasilan yang cukup tinggi. Apabila dibandingkan dengan pekerja tetap, penghasilan yang diterima oleh pekerja kontrak dan alih daya sangat jauh berbeda. Belum lagi dengan adanya ketidakpastian keberlangsungan kontrak. Pekerja kontrak dan alih daya memiliki posisi tawar yang rentan jika dibandingkan dengan pekerja berstatus tetap.

Kesejahteraan pekerja tentu saja berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan yang dikeluarkan pemerintah. Selain itu, berhubungan juga dengan laju pertumbuhan ekonomi serta tingkat pendidikan penduduk.

Kesejahteraan dapat diukur melalui beberapa cara, misalnya berdasarkan tinjauan garis kemiskinan, analisa data tentang konsumsi dan pengeluaran melalui ukuran komparatif, dan ambang batas lain (ILO, 2015:7). Analisis kesejahteraan melalui pola pengeluaran sudah dilakukan oleh BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Tentu saja informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah dikumpulkan melalui Susenas memiliki cakupan yang luas karena digunakan sebagai dasar untuk memperoleh berbagai indikator pencapaian kesejahteraan rakyat. Indikator di atas meliputi: angka partisipasi sekolah dan angka melek huruf untuk bidang pendidikan; angka morbiditas, pemanfaatan fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan, pemberian ASI pada balita, dan imunisasi untuk bidang kesehatan, dan penolong persalinan; umur perkawinan pertama, partisipasi KB, dan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan untuk bidang fertilitas dan KB; kondisi tempat tinggal, sumber air untuk minum, memasak, mandi, dan mencuci untuk bidang perumahan, kepemilikan HP, akses internet dalam pemanfaatan teknologi informasi, serta bantuan/program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat (BPS, 2015: 7).

Dalam tulisan ini tidak secara menyeluruh melihat semua indikator yang tercakup pada Statistik Kesejahteraan Rakyat. Namun, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana potret kesejahteraan dan strategi pemenuhan kehidupan para pekerja kontrak dan alih daya pada sektor industri TIK di wilayah Jakarta. Pertanyaan penelitian dari tulisan ini, yaitu: *Pertama*, bagaimana potret kesejahteraan sepuluh pekerja kontrak dan alih daya di sektor TIK? *Kedua*, Bagaimana strategi pemenuhan kesejahteraan dan bertahan hidup yang dilakukan oleh pekerja kontrak dan alih daya di sektor TIK?

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif yang menurut Creswell (2006: 37) didasarkan pada asumsi, cara pandang, dan kemungkinan penggunaan perspektif teoritis dan studi dari masalah penelitian

yang menyelidiki individu-individu maupun kelompok mengenai permasalahan-permasalahan sosial yang ada. Metode kualitatif dipilih karena tulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai potret kesejahteraan dan strategi hidup pekerja kontrak dan alih daya pada sektor industri TIK di Jakarta. Pendekatan kualitatif yang digunakan pada penelitian ini menggunakan studi kasus di mana eksplorasinya dibatasi pada bagaimana kesejahteraan dan strategi bertahan hidup sepuluh pekerja kontrak maupun alih daya yang bekerja di sektor industri di Jakarta. Sebagian data tulisan ini merupakan data yang diambil dari penelitian DIPA 2015 Pusat Penelitian Kependudukan LIPI yang bertema Kebijakan Pasar Kerja Fleksibel dan Kesempatan Kerja di Era Global.

Informasi yang menjadi dasar tulisan ini merujuk pada hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap sepuluh pekerja kontrak dan alih daya bidang TIK dengan ijazah pendidikan tinggi (Diploma maupun Universitas) yang berasal dari empat perusahaan informatika dan telekomunikasi di DKI Jakarta. Mereka bekerja sebagai IT *helpdesk*, teknisi jaringan, dan teknik komputer, dan pemograman. Pekerja yang diwawancarai terdiri dari delapan orang lelaki dan dua orang perempuan. Lima orang pekerja sudah menikah dan sisanya belum menikah. Berikut merupakan profil singkat pekerja yang menjadi informan.

Latar belakang Informan

Jika merujuk pada kepemilikan ijazah atau kualifikasi pendidikan tinggi, pendidikan yang dimiliki pekerja masih belum banyak berkontribusi pada kemudahan mereka mendapatkan pekerjaan, memilih pekerjaan, maupun mendapatkan kesejahteraan. Kualifikasi pendidikan atau ijazah pendidikan tinggi yang dimiliki masih sebatas pada aspek kemampuan mereka masuk ke sektor industri TIK. Hal ini memang merupakan prasyarat agar calon pekerja dapat masuk ke sektor industri TIK.

Tabel 1 Profil Informan

No	Pekerja	Pendidikan	Jenis Kelamin	Status
1	A	D-3 Perbankan	L	Belum Menikah
2	B	D-3 Informatika	L	Menikah
3	C	D-3 Sastra Inggris	P	Menikah
4	D	S-1 Teknik Kimia	P	Belum menikah
5	E	S-1 Ilmu Komputer	L	Belum Menikah
6	F	D-3 Komputer	L	Menikah
7	G	D-3 Informatika	L	Menikah
8	H	S-1 Komputer	L	Menikah
9	I	S-1 Ilmu Komputer	L	Belum menikah
10	J	S-1 Ilmu Komputer	L	Belum menikah

Data Statistik Perusahaan Informasi dan Telekomunikasi (BPS, 2014:39) menunjukkan bahwa pekerja di sektor ini didominasi oleh pekerja yang berasal dari lulusan D-4/S-1. Jika merujuk data tersebut, total pekerja yang memiliki ijazah D-3 sampai S-3 sebesar 96,3 persen. Sisanya, 3,7 persen merupakan pekerja yang ijazahnya SMA sederajat ke bawah.

Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan salah satu perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP) alih daya mengungkapkan adanya gradasi tingkatan kualitas pekerja lulusan pendidikan tinggi mulai dari berkualitas baik, kualitas satu, kualitas dua dan sebagainya. Kemudian dari hasil wawancara dengan salah satu Manajer *Human Resource Departement* (HRD) di perusahaan telekomunikasi terungkap bahwa pekerja dengan latar pendidikan tinggi yang gagal menjadi pekerja di perusahaan tersebut diakibatkan karena lemahnya keterampilan di bidang *practical knowledge* atau pengetahuan praktis. Gambaran tersebut setidaknya dapat menjelaskan bagaimana ketatnya persaingan calon pekerja di sektor TIK.

Dengan pendidikan tinggi yang dimiliki ternyata posisi tawar yang dimiliki belum juga cukup baik terutama dalam menegosiasikan hak-hak yang seharusnya didapat oleh pekerja. Pekerja dengan pendidikan yang lebih tinggi belum tentu memiliki pemahaman yang baik mengenai hak-hak yang harus diperoleh. Kondisi ini menyebabkan posisi tawar yang rendah dalam proses negosiasi gaji maupun hak-hak dasar lainnya. Selain itu, yang menjadi masalah adalah ketidakpastian mereka dalam hal bekerja. Sampai

kapan mereka akan terus menerus mendapat perpanjangan kontrak. Usia terus bertambah, namun belum mendapatkan kepastian kerja tentu menjadi masalah serius bagi pekerja.

Dari sepuluh informan yang diwawancarai, lima pekerja merupakan lulusan Diploma, sedangkan lima pekerja lainnya memiliki ijazah S1. Menariknya, tidak semua pekerja merupakan lulusan program studi di bidang TIK. Beberapa pekerja berasal dari program studi non TIK seperti Perbankan, Teknik Kimia, dan Sastra Inggris. Pekerja lainnya merupakan bidang atau jurusan TIK seperti Teknik Informatika, Ilmu Komputer, maupun Teknik Jaringan.

Tiap pekerja memiliki posisi yang berbeda di tiap perusahaan, antara lain IT *helpdesk*, teknisi jaringan, dan teknik komputer, dan pemograman. Pekerja yang memiliki latar pendidikan Diploma berasal dari politeknik dan akademi. Sejak di dunia perkuliahan mereka memang telah dipersiapkan untuk bekerja di bidang masing-masing. Meskipun tidak semua pekerja memiliki bidang pendidikan TIK. Pekerja A, C, dan D, misalnya tidak berasal dari bidang TIK.

Pekerja yang tidak berlatar belakang pendidikan TIK memang harus bekerja keras agar bisa masuk ke perusahaan TIK. Untuk bidang teknis seperti teknisi jaringan, servis instalasi dan bidang langsung yang berkaitan dengan TIK memang harus pekerja yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang TIK. Akan tetapi untuk bidang pekerjaan seperti *IT helpdesk*, *customer service*, atau *call center*, pekerja tidak selalu memiliki latar belakang pendidikan TIK. Setelah lolos seleksi

mereka harus mendapatkan pelatihan mengenai *knowledge product* perusahaan. Kecepatan untuk beradaptasi dengan bidang TIK sangat diperlukan. Pekerja yang berasal dari jurusan non TIK yang bekerja di bagian *helpdesk*, di awal bekerja mereka sempat mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Setelah masuk pekerja akan diberi pelatihan mengenai tugas dan fungsi IT *helpdesk*, tata cara komunikasi, dan kerja sama tim.

Posisi sebagai IT *helpdesk* merupakan posisi yang sangat vital. Keluhan pelanggan diterima oleh bagian ini kemudian dikomunikasikan kepada teknisi komputer. Keluhan pelanggan harus mampu disampaikan secara detail kepada teknisi agar permasalahannya dapat diselesaikan dengan baik. Posisi mereka berada di tengah antara pelanggan dan teknisi. Mereka harus menangkap dengan cermat apa saja yang menjadi keluhan pelanggan, juga pada sisi lain harus mampu menyampaikan secara detail kepada teknisi. Penguasaan komputer dan *software* yang mendukung penyampaian informasi kepada teknisi komputer mutlak dimiliki oleh pekerja di bagian IT *helpdesk*. Selain itu tentu saja penguasaan bahasa asing menjadi sangat penting karena pelanggan yang melakukan komplain tidak hanya berasal dari Indonesia.

Temuan pada kajian ini memperkuat Laporan ILO dalam Tren Ketenagakerjaan dan Sosial Indonesia 2014-2015 yang mengungkap kurangnya tenaga kerja berpendidikan tinggi untuk mengisi dunia kerja. Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk usia kerja yang lebih tinggi dibandingkan penduduk usia tua yang mandiri. Pemerintah perlu memperluas investasinya di bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan, terutama karena pekerja dengan latar belakang pendidikan yang tinggi dapat menikmati upah yang lebih besar dan kesempatan kerja yang lebih baik. Namun kondisi yang terjadi, permintaan akan pekerja dengan kualifikasi tinggi melampaui suplai tenaga kerja yang ada.

Hal ini menimbulkan situasi di mana ada banyak lowongan kerja di Indonesia

yang diisi pekerja yang kurang memenuhi syarat. Harus ada penyesuaian pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan dengan kebutuhan perusahaan. Apalagi permintaan terhadap pekerja berpendidikan tinggi akan terus meningkat, sehingga saat ini diperlukan investasi di bidang pendidikan dan keterampilan yang tepat. Dengan demikian, upaya untuk memperkuat Balai Latihan Kerja (BLK) dan sistem magang, menjadi penting untuk menutup kesenjangan keterampilan ini. Di samping itu, kebijakan dan program yang memfasilitasi penempatan tenaga kerja juga merupakan faktor penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia (ILO, 2015: xi).

Salah satu pimpinan asosiasi perusahaan alih daya dalam FGD menyatakan saat ini kondisi lulusan sarjana dari perguruan tinggi yang memasuki industri TIK masih belum memuaskan. Lulusan perguruan tinggi yang masuk ke dunia kerja tidak mampu mengaplikasikan teori ke dalam praktik, lemah dalam keterampilan kepemimpinan dan analitis, buruk dalam bahasa Inggris, dan pengetahuan produk. Kekurangan lainnya adalah lemah dalam etos kerja. Terjadinya *turn over* (perpindahan) pekerja muda lebih dari 30 persen, sehingga menyulitkan perusahaan dalam perencanaan dan pengembangan tenaga kerja.

Kebijakan pemerintah berkaitan dengan penyiapan SDM Ketenagakerjaan memegang peranan penting. Pemerintah perlu menjalin relasi dengan pendidikan tinggi dan industri TIK, sehingga tidak sulit untuk mencari tenaga kerja berkualitas. Harus ada *link and match* antara pasokan tenaga kerja dari dunia pendidikan tinggi dengan perusahaan industri TIK.

Potret Kesejahteraan Sepuluh Pekerja Kontrak dan Alih Daya

Sejahtera atau tidaknya penduduk dapat didasarkan oleh beberapa aspek ataupun indikator. Pemerintah melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas menggunakan beberapa indikator mulai dari bidang

pendidikan, bidang kesehatan, bidang fertilitas dan KB, bidang perumahan, pemanfaatan teknologi informasi, serta bidang kesejahteraan masyarakat (BPS, 2015: 7). Kajian ini tentu saja tidak memotret keseluruhan bidang. Dalam kajian ini kesejahteraan dipotret dari aspek kondisi sosial ekonomi pekerja yang meliputi pendapatan, pengeluaran, kepemilikan aset, status tempat tinggal, beban tanggungan keluarga, kepastian kerja, dan ada tidaknya pekerjaan tambahan.

Untuk konteks Indonesia, tingkat inflasi pangan relatif tinggi berdampak sangat negatif terutama bagi pekerja miskin dan rentan miskin, karena pengeluaran untuk membeli makanan masih menjadi bagian terbesar dari pengeluaran mereka secara keseluruhan. Pada tahun 2014 misalnya, tingkat inflasi bahan pangan lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi rata-rata nasional. Dalam hal ini, pertumbuhan upah dan penghasilan, terutama untuk pekerja miskin perlu disesuaikan dengan fluktuasi harga makanan agar dapat mempertahankan daya belinya (ILO, 2015: 5). Status sebagai tenaga kerja kontrak dan alih daya tentu memengaruhi kondisi kesejahteraan para pekerja. Pekerja model ini seringkali tidak mendapatkan penghasilan yang memadai. Ditambah ketidakpastian mereka mengenai keberlangsungan kerja di masa yang akan datang, karena kontrak pekerjaan yang terbatas.

Beberapa kajian mengungkapkan bahwa praktek alih daya lebih banyak merugikan pekerja/buruh. Misalnya: kajian yang dilakukan oleh Tjandraningsih & Herawati (2009), Nawawi (2013), dan Utomo (2014) yang mengungkap bahwa pekerja alih daya mendapatkan upah lebih rendah/tidak layak, jaminan sosial yang terbatas, tidak adanya keamanan bekerja maupun jaminan pengembangan karir serta buruknya hubungan industrial. Kajian-kajian ini menegaskan bahwa kondisi pekerja kontrak dan alih daya di Indonesia belum sejahtera.

Salah satu hasil temuan penelitian ini yang menarik misalnya, walaupun pekerja sudah mengetahui statusnya sebagai pekerja alih daya, mereka masih bertahan di perusahaan tersebut.

Bahkan beberapa pekerja sudah mengalami perpanjangan kontrak berkali-kali tanpa ada kejelasan akan diangkat menjadi pekerja tetap. Pekerja dengan inisial H misalnya sudah lama menjadi pekerja alih daya. Ia bekerja dari satu PPJP ke PPJP lainnya sejak tahun 2006. Ia sepenuhnya sadar akan tidak adanya kepastian keberlangsungan kerja di PPJP yang dia ikuti. Namun, tidak ada pilihan karena dapur harus tetap mengepul. Selama gaji yang diperoleh sudah sesuai, ia “rela” terus menerus menjadi pekerja alih daya.

Pekerja lain juga memiliki pengalaman serupa dengan pekerja H, mereka mendapatkan perpanjangan kontrak terus menerus. Pekerja dengan inisial A misalnya mengalami kondisi yang tidak jauh berbeda dengan pekerja H. Walaupun harus mengalami perpanjangan kontrak terus menerus, selama penghasilan yang diterima masih memadai, ia harus tetap bertahan. Pekerja dengan inisial B, C, D, E, F, G pun demikian. Status sebagai pekerja alih daya sudah dipahami sejak awal. Selama PPJP memperpanjang kontrak dan memberikan penghasilan, status mereka sebagai pekerja alih daya bukan persoalan.

Pekerja dengan inisial I dan J memiliki kondisi yang berbeda dengan pekerja lainnya. Posisi sebagai pekerja magang membuat mereka memiliki jalur yang jelas menuju posisi pekerja tetap. Apabila kinerja dianggap bagus oleh perusahaan, maka otomatis mereka akan diangkat sebagai pekerja tetap. Kondisi ini sangat berbeda dengan para pekerja alih daya yang memiliki ketidakpastian dalam bekerja maupun kesejahteraan.

Kepasrahan para pekerja dalam menerima kondisinya, menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya memiliki posisi tawar yang rendah. Padahal, sikap seperti ini sangat berimplikasi pada tingkat penghasilan yang berujung pada kesejahteraan yang akan diperolehnya. Mereka seolah-olah merasa nyaman dengan kondisi yang dihadapinya saat ini. Kondisi tersebut membuat para pekerja tidak mau ambil risiko. Sulitnya mendapatkan pekerjaan membuat tawaran

menjadi pekerja kontrak dan alih daya dari perusahaan tetap diambil. Selain itu, kepasrahan tersebut menggambarkan bahwa mereka belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai statusnya sebagai pekerja alih daya ataupun kontrak. Hak-hak normatif mulai dari gaji pokok, bonus/insentif, uang makan, uang transport, maupun hak mendapat BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan merupakan kewajiban negara. Tetapi, tidak semua informan mendapatkan semua hak yang seharusnya mereka dapatkan, padahal perpanjangan kontrak secara terus menerus membuat terjadinya pelanggaran terhadap aturan ketenagakerjaan. Dalam konteks ini, kepemilikan ijazah pendidikan tinggi tidak berkorelasi dengan pemahaman mereka terkait hak pekerja secara menyeluruh.

Selain itu, kategori menikah dan belum menikah menjadi indikator yang cukup signifikan. Pekerja yang belum menikah, belum perlu mengeluarkan banyak uang untuk kebutuhan hidup. Bagi pekerja yang belum menikah, mereka sisihkan untuk menabung. Rentang gaji antara lima sampai enam juta perbulan yang didapatkan para pekerja TIK ini dianggap bisa menutupi kebutuhan harian pekerja lajang. Berbeda dengan pekerja yang sudah menikah. Jumlah gaji tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keseharian. Belum lagi ditambah keperluan pendidikan anak.

Peruntukan gaji yang didapat oleh pekerja lebih banyak dihabiskan untuk konsumsi, transportasi, biaya pendidikan anak (untuk yang sudah menikah) dan pemanfaatan teknologi informasi (*gadget* dan pulsa). Pekerja masih belum mampu membeli rumah dari uang yang mereka dapatkan selama bekerja. Mereka harus bergantung pada kontrakan/kosan/sewa. Untuk yang sudah menikah, mereka memilih tinggal bersama dengan orang tua atau mertua. Pendapatan yang didaptnya masih belum cukup untuk membayar uang muka rumah atau cicilan rumah.

Seperti yang diungkapkan oleh Pekerja B yang sudah menikah dengan dua orang anak misalnya. Setiap bulan ia mendapat

penghasilan sebesar lima sampai enam juta. Baginya, uang tersebut tidak selalu mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Isterinya tidak bekerja, sehingga pengeluaran bulanan harus dialokasikan secermat mungkin. Dikarenakan belum mampu membeli rumah, maka tinggal dengan orang tua merupakan pilihan terbaik untuk sementara ini. Hal yang sama dilakukan oleh pekerja C. Meskipun telah menikah dan memiliki seorang anak, ia tetap tinggal dengan orang tuanya. Ia belum mampu membeli rumah. Kondisi pekerja lainnya tidak jauh berbeda. Mereka harus tinggal di kontrakan/kosan/sewa rumah.

Rumah tinggal masih menjadi persoalan umum para pekerja di perkotaan, tidak hanya khusus bagi pekerja kontrak dan alih daya saja. Padahal, merujuk pada indikator kesejahteraan, tempat tinggal merupakan salah satu komponen penting yang harus ada pada penduduk yang sejahtera. Mahalnya harga perumahan saat ini menjadi salah satu alasan yang membuat para pekerja harus rela tinggal bersama orang tua/mertua ataupun mengontrak rumah. Apalagi jika merujuk pada survei yang dilakukan oleh Ningrum, dkk (2014) terungkap bahwa penduduk yang telah menikah menjadikan cicilan rumah dan kendaraan sebagai prioritas utama. Hal ini mengindikasikan bahwa biaya untuk menyicil rumah tidaklah ringan. Pekerja kontrak dan alih daya pada penelitian ini pun belum mampu mencicil rumah karena keterbatasan penghasilan yang diterima oleh mereka.

Pekerja dengan status lajang masih lebih beruntung karena bisa menyisakan penghasilannya untuk ditabung atau diinvestasikan. Sementara untuk pekerja yang sudah menikah, penghasilan bulanan yang didapat masih belum memadai. Walaupun penghasilan tersebut relatif lebih layak, jika dibandingkan dengan pekerja/buruh di sektor lainnya. Kondisi tersebut tetap masih jauh dari ukuran sejahtera. Terbatasnya pendapatan yang diterima tentu sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kualitas kehidupannya. Mereka harus berjuang agar

kebutuhan hidup dapat tercukupi. Kebutuhan konsumsi memang relatif bisa terpenuhi, tetapi kebutuhan rumah tinggal masih jauh dari harapan. Selain itu, beban kerja yang padat juga menyulitkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan tambahan.

Pekerja kontrak dan alih daya memang tidak memiliki banyak pilihan. Temuan dari Utomo (2014) menjelaskan bahwa hubungan industrial dalam praktek kerja alih daya menjadikan tidak jelasnya posisi pekerja/buruh dalam konteks pemenuhan hak-haknya. Pekerja/buruh dituntut untuk memenuhi persyaratan dalam alih daya, jam kerja yang padat, upah tak seimbang, tidak ada kesempatan bergabung dengan serikat pekerja/serikat buruh dan mudahnya pergantian pekerja jika terjadi suatu pelanggaran. Kondisi yang terjadi pada pekerja kontrak dan alih daya di sektor TIK yang menjadi informan memang tidak menyedihkan seperti pekerja alih daya sektor lainnya yang banyak haknya dilanggar.

Nasib pekerja TIK pada umumnya, lebih baik dibandingkan pekerja alih daya di sektor garmen dan tekstil. Temuan Tjandraningsih & Herawati (2009: vii) secara jelas mengungkapkan tentang kondisi pekerja alih daya sektor garmen dan tekstil yang mendapat upah tidak layak. Upah minimum yang diperoleh buruh tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup layak dan jauh dari pengeluaran riil buruh. Kondisi ini menyebabkan rendahnya daya beli kelompok buruh. Pada akhirnya, mereka harus melakukan penghematan, dan terjerat pula pada lingkaran hutang yang sulit terbayarkan.

Sistem alih daya memang seringkali dikritisi oleh beberapa pihak, karena dianggap tidak berpihak kepada kepentingan pekerja, serta lebih menguntungkan perusahaan. Kajian mengenai praktek kerja alih daya buruh yang dilakukan oleh AKATIGA bersama FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) misalnya, menyebutkan bahwa tindakan eksploitatif dan diskriminatif terhadap buruh alih daya di industri metal seringkali terjadi. Buruh/pekerja dikontrak secara terus menerus

tanpa kejelasan kapan mereka diangkat menjadi pekerja tetap. Dengan mekanisme kontrak terhadap buruh yang secara terus menerus dengan upah minimum telah menjadikan peluang kerja di perusahaan semakin terbatas. Hal ini disebabkan usia pekerja/buruh semakin terbatas dan peluangnya bekerja di perusahaan lain menjadi lebih sedikit, karena tidak semua rentang usia diterima. Terlebih banyak perusahaan yang memprioritaskan pekerjaannya dengan usia yang lebih muda ataupun *fresh graduate*. Hal ini hanya membuat rotasi pekerja terus menerus tanpa menciptakan lapangan kerja baru (Herawati dkk, 2011: xxv).

Di sisi lain, ada pihak yang masih mendukung praktek alih daya. Meskipun mereka menganggap bahwa praktek alih daya di Indonesia masih penuh dengan berbagai masalah. Pandangan ini menyatakan bahwa yang salah bukan pada sistem alih daya, tetapi lebih disebabkan pada pemahaman dan pengelolaan perusahaan alih daya yang sudah salah sejak awalnya (Priambada & Maharta, 2008: 110). Pihak-pihak yang mendukung menyatakan bahwa praktik alih daya bukan hanya mengenai biaya maupun keuntungan finansial, tetapi juga menyangkut masalah strategis dalam keputusan-keputusan pengelolaan sebuah perusahaan. Permasalahan terjadi karena perusahaan alih daya tidak memperhatikan etika bisnis alih daya. Oleh karena itu, perusahaan alih daya wajib menegakkan hukum ketenagakerjaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Perusahaan wajib memahami permasalahan upah minimum, jaminan kerja, jaminan kesehatan, asuransi jiwa, pajak penghasilan, cuti, dan lembur serta hak-hak pekerja lainnya (Priambada & Maharta, 2008: 113). Pandangan ini tetap saja hanya menegaskan sesuatu yang ideal, sementara praktik pelanggaran hak pekerja tetap saja terjadi.

Dari hasil kajian yang dilakukan oleh LIPI (2010) menyimpulkan tentang minimnya perlindungan yang diterima oleh pekerja kontrak dan alih daya. Kajian sektor metal (Tjandraningsih, dkk, 2010) dan sektor perbankan (Herawati, dkk, 2011)

Tabel 2. Potret Kesejahteraan Sepuluh Pekerja Kontrak dan Alih Daya

No	Pekerja	Jenis Kelamin	Status Pekerja	Kondisi
1	A	L	Berpindah sebagai pekerja alih daya dari satu perusahaan ke perusahaan lain.	Rentan karena setiap saat dapat diputus kontrak, penghasilan tiap bulan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup
2	B	L	Berpindah sebagai pekerja alih daya dari satu perusahaan ke perusahaan lain.	Rentan karena setiap saat dapat diputus kontrak, penghasilan tiap bulan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup
3	C	P	Berpindah sebagai pekerja alih daya dari satu perusahaan ke perusahaan lain.	Rentan karena setiap saat dapat diputus kontrak, penghasilan tiap bulan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup
4	D	P	Berpindah sebagai pekerja alih daya dari satu perusahaan ke perusahaan lain.	Rentan karena setiap saat dapat diputus kontrak, penghasilan tiap bulan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup
5	E	L	Berpindah sebagai pekerja alih daya dari satu perusahaan ke perusahaan lain.	Rentan karena setiap saat dapat diputus kontrak, penghasilan tiap bulan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup
6	F	L	Berpindah sebagai pekerja alih daya dari satu perusahaan ke perusahaan lain.	Rentan karena setiap saat dapat diputus kontrak, penghasilan tiap bulan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup
7	G	L	Berpindah sebagai pekerja alih daya dari satu perusahaan ke perusahaan lain.	Rentan karena setiap saat dapat diputus kontrak, penghasilan tiap bulan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup
8	H	L	Berpindah sebagai pekerja alih daya dari satu perusahaan ke perusahaan lain.	Rentan karena setiap saat dapat diputus kontrak, penghasilan tiap bulan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup
9	I	L	Sudah lebih jelas arah karirnya, sudah menjadi pekerja kontrak.	Arah karir lebih jelas
10	J	L	Sudah lebih jelas arah karirnya, sudah menjadi pekerja kontrak.	Arah karir lebih jelas

juga menemukan bahwa sejak adanya penerapan hubungan kerja kontrak dan alih daya telah terjadi pengurangan jumlah pekerja tetap secara signifikan, disertai pula dengan penurunan kepastian kerja dan kesejahteraan pekerja. Pada sektor perbankan Herawati dkk, (2011: 4) menemukan adanya kesenjangan yang cukup signifikan pada gaji dan fasilitas di antara pekerja tetap, pekerja kontrak langsung, dan pekerja alih daya.

Pelanggaran aturan ketenagakerjaan memang masih tetap berlangsung, juga pada sektor industri TIK. Beberapa pekerja mengungkapkan mendapatkan sudah beberapa

kali mengalami perpanjangan kontrak. Padahal mereka sudah bekerja beberapa tahun. Mereka hanya mendapatkan perpanjangan kontrak setiap enam bulan tanpa ada kejelasan status. Dengan alasan pemenuhan target perusahaan, maka kontraknya akan terus diperpanjang. Beberapa harus berhenti karena dianggap tidak memenuhi standar. Pergantian pekerja terjadi secara cepat. Jika mau bertahan mereka harus seminimal mungkin melakukan kesalahan. Standar yang diterapkan oleh perusahaan sangatlah tinggi. Mereka bisa dikeluarkan setiap saat.

Dari segi penghasilan/upah, pekerja kontrak dan alih daya di sektor TIK memang relatif lebih beruntung dibandingkan para pekerja/buruh di sektor metal, garmen dan tekstil, maupun perbankan. Pekerja masih mendapatkan gaji, bonus, tunjangan, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, juga kesempatan untuk mengembangkan diri. Walaupun tidak semua pekerja TIK tersebut mendapatkan jaminan kesehatan maupun ketenagakerjaan. Selain itu, dialog dengan perusahaan lebih dibuka. Salah satu PPJP misalnya memiliki manajer harian yang menampung setiap saran maupun keluhan pekerja.

Temuan mengenai potret pekerja TIK dengan status kontrak dan alih daya secara jelas mengungkapkan dua hal. *Pertama*, tingkat pendidikan tinggi belum tentu berkorelasi dengan kemudahan mendapatkan pekerjaan. *Kedua*, tingkat pendidikan yang ada, tidak menyebabkan mereka mendapatkan kesejahteraan yang cukup. Sepuluh pekerja kontrak dan alih daya masih sebatas memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keseharian, tetapi belum sampai pada tahapan sejahtera.

Carlson D.S & Kacmar, K.M. (1994:235) dalam *Learned Helplessness as a predictor of employee outcomes: An Applied Model* mengemukakan bahwa ada lima faktor yang memengaruhi seorang individu dalam keberhasilan atau kegagalannya pada bidang pekerjaannya yaitu ekstroversi, emosi yang stabil, rasa setuju, ketelitian, dan keterbukaan terhadap beragam pengalaman (Barrick & Mount 1991; Tett, Jackson, & Rothstein 1991 dalam Carlson D.S & Kacmar K.M, 1994). Kondisi yang terjadi pada pekerja kontrak dan alih daya ini perlu mendapatkan perhatian dari pihak perusahaan, sebab para pekerja ini memang mendapatkan perhatian yang amat terbatas. Akibatnya, tidak dapat disalahkan jika mereka hanya bekerja tidak optimal, sebatas kewajiban kerja yang dibebankan kepada para pekerja, yang penting, mereka tidak sampai diputus kontrak atau dikeluarkan

dari tempat mereka bekerja. Mereka hanya menjadikan kerja sebagai rutinitas untuk mempertahankan hidupnya. Perusahaan harus memperhatikan kondisi pekerja dan memotivasi pekerja agar mau mengeluarkan segala potensi yang ada pada individu tiap pekerja.

Strategi Pemenuhan Kesejahteraan dan Bertahan Hidup Pekerja Kontrak dan Alih Daya

Strategi yang digunakan oleh pekerja untuk mencapai kesejahteraan dan strategi pemenuhan hidup sehari-hari tentu saja merupakan pilihan paling rasional yang dapat dilakukan. Terlebih ketika keterdesakan kebutuhan dan gaya hidup terus menerpanya. Para pekerja dalam melakukan pilihan pekerjaan serta upayanya dalam mempertahankan kehidupannya akan berusaha mengoptimalkan setiap pendapatannya, mulai dari gaji, bonus, maupun uang lembur. Di sisi lain, mereka pun secara ketat harus melakukan pengaturan pengeluaran seminimal mungkin.

Para pekerja berusaha mengoptimalkan setiap potensi yang dimilikinya, tetapi di sisi lain mereka pun berusaha meminimalisir setiap pengeluaran maupun tindakan yang membuatnya harus menambah pengeluaran rutin maupun temporer. Seperti yang dilakukan oleh pekerja yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan, ia berusaha agar dirinya tetap sehat agar tidak mengeluarkan biaya berobat. Itulah satu-satunya pilihan di saat ada keterbatasan pemenuhan hak dari perusahaan. Meminjam teori *rational choice* (pilihan rasional) yang dinyatakan oleh James Coleman, apa yang dilakukan oleh pekerja disebut optimasi. Pekerja bertindak secara rasional, dengan memaksimalkan keuntungan atau menekan pengeluaran, ketika mereka harus memilih rangkaian tindakan untuk dilakukan (Abercrombie, Hill & Turner, 2010: 318).

Teori pilihan rasional yang dinyatakan oleh Coleman jelas berpijak pada gagasan bahwa setiap individu bertindak secara sadar atau sengaja untuk mencapai suatu tujuan

maupun tindakan yang dibangun oleh nilai dan preferensi (Ritzer, 2004; Scott, 2007). Pemenuhan kehidupan sehari-hari pasti menjadi tujuan para pekerja. Kesejahteraan secara ekonomi merupakan target jangka panjang yang harus dicapai meskipun di tengah beragam keterbatasan. Para pekerja harus mengoptimalkan setiap potensi yang ada. Mereka juga berusaha untuk memutuskan pilihan-pilihan berdasarkan kecenderungan pribadi maupun kebutuhan-kebutuhan prioritas yang harus dipenuhi. Pekerja dengan status pekerja kontrak dan alih daya menyadari bahwa posisi mereka lebih terbatas dibandingkan dengan pekerja tetap.

Kompetisi global membuat setiap individu harus memiliki strategi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui proses kerja, setiap pekerja berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Strategi yang tepat sangat dibutuhkan agar mereka tetap mampu bertahan di tengah meningkatnya kebutuhan sehari-hari maupun tawaran gaya hidup.

Teori kebutuhan yang disampaikan oleh Maslow masih relevan dalam menganalisa kondisi yang dihadapi pekerja dalam upayanya memperoleh pekerjaan dan bertahan memenuhi kebutuhan keseharian. Dari hirarki kebutuhan yang disampaikan Maslow, para pekerja kontrak dan alih daya masih berkuat pada upaya pemenuhan *physiological needs (survival)*. Kondisi di mana para pekerja masih berjuang agar mendapatkan gaji yang memadai, mendapatkan tunjangan pensiun, bekerja dengan durasi jam kerja yang tidak terlalu panjang, ada perlindungan dan keselamatan kerja, mendapatkan transportasi yang mudah dan hal yang terkait kebutuhan dasar. Dalam beberapa hal mereka juga masih berkuat pada hirarki kedua dari teori Maslow, yaitu: terkait dengan *security* (rasa aman). Persoalan rasa aman ini berkenaan dengan keinginan adanya rasa aman dari aspek regulasi, keamanan, ketertiban, stabilitas penghasilan

dan unsur lainnya. Tentu saja para pekerja kontrak dan alih daya sangat memperhatikan unsur keamanan dalam bekerja ini. Dikarenakan setiap saat mereka dapat saja selesai atau putus kontrak kerjanya. Mereka harus siap dengan konsekuensi terburuk ketika tidak dibutuhkan lagi oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Motivasi mereka bekerja setidaknya masih sebatas pada dua hirarki ini, keinginan untuk tetap *survive* dan mendapatkan rasa aman atau persoalan *security*. Dalam konteks pekerjaan, bagi pekerja kontrak maupun pekerja alih daya dalam amatan penulis, masih sebatas dua motivasi tersebut. Motivasi bekerja untuk ke tahapan dicintai dan mencintai (*love and belongings*), harga diri (*esteem/importance needs*), dan kebutuhan untuk aktualisasi (*self actualisation needs*). Bagi pekerja tetap, mereka dapat bergabung dengan serikat pekerja karena sudah pasti akan bekerja di tempat yang sama bertahun-tahun. Lewat wadah serikat pekerja tersebut mereka dapat mendapat relasi dan pertemanan juga kesempatan untuk mengaktualisasikan diri. Sebagai tenaga kerja tidak tetap, para pekerja ini kesulitan bergabung di serikat pekerja juga lebih fokus pada bagaimana mereka tetap diperpanjang kontrak di tahun-tahun selanjutnya, atau bagaimana mereka mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang lebih baik dari aspek kesejahteraan dan perlindungannya terhadap kondisi tenaga kerjanya.

Setidaknya, ada tujuh strategi yang dilakukan para pekerja TIK dengan tujuan (*goal oriented*) pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan. *Pertama*, mencoba berhemat agar penghasilan yang dimilikinya tidak habis dengan percuma. Pekerja berusaha secara ketat mengatur keuangan berdasarkan penghasilan yang diterimanya. Di sinilah pentingnya manajemen keuangan dari tiap pekerja harus benar-benar diterapkan. Jika mereka berperilaku konsumtif akan berefek negatif kepada masa depannya. Apalagi kondisi mereka sebagai pekerja kontrak dan

alih daya, yang dapat setiap saat mengalami pemutusan hubungan kerja, memerlukan banyak persiapan dan kehati-hatian dalam mengelola keuangan.

Kedua, menabung agar ada dana cadangan setiap saat dibutuhkan. Beberapa informan dapat menabung uang yang didapatnya meskipun hanya sedikit. Ada juga pekerja yang mengalokasikan sebagian penghasilannya dalam bentuk barang (emas). Tetapi juga di sisi lain ada pekerja yang sama sekali tidak dapat menabung karena uangnya sudah habis untuk dikirimkan ke orang tua untuk membiayai kehidupan kedua orang tua maupun biaya pendidikan anak.

Ketiga, mencari tempat tinggal yang dekat dengan kantor. Beberapa pekerja yang merupakan perantau memilih untuk tinggal dekat kantor dan mencari kontrakan yang murah agar mampu meminimalisir pengeluaran untuk tempat tinggal dan biaya transportasi. Walaupun mencari tempat tinggal yang dekat dengan lingkungan kantor relatif sulit. Apalagi biaya kontrakan di Jakarta termasuk tinggi. Untuk yang paling murah saja beberapa pekerja minimal harus mengeluarkan biaya kurang lebih satu juta per bulan. Oleh karenanya mereka berusaha meminimalisir biaya pengeluaran tempat tinggal agar uang yang didapat bisa dialokasikan untuk keperluan lainnya.

Keempat, tinggal bersama orang tua untuk meminimalisir pengeluaran tempat tinggal. Beberapa pekerja “terpaksa” masih tinggal dengan orang tua masing-masing. Dua orang informan yang sudah berkeluarga pun masih harus tinggal dengan orang tua. Kondisi ini dilakukan karena pekerja belum memiliki kemampuan untuk membeli atau mencicil rumah sedangkan untuk mengontrak tentu harus mengeluarkan biaya tambahan. Salah satu cara agar pengeluaran untuk tempat tinggal dapat diminimalisir, maka pekerja memilih untuk tinggal bersama orang tua.

Kelima, mencari lemburan lebih banyak agar penghasilan bertambah. Adanya kesempatan untuk lembur dan menggantikan

rekan kerja yang tidak masuk membuat hal itu dimanfaatkan oleh beberapa pekerja untuk mendapatkan uang tambahan. Dengan bertambahnya uang dari hasil lembur atau menggantikan rekannya, tentu pekerja itu dapat menyimpan kelebihan uang yang dimilikinya.

Keenam, mencari pekerjaan tambahan di luar pekerjaan. Beberapa pekerja memiliki tambahan pekerjaan di luar tempat kerja mereka saat ini. Satu orang informan berusaha bersama istrinya dengan membuka warung di rumahnya. Dengan membuka warung, maka ada tambahan penghasilan bagi keuangan rumah tangganya. Pekerja lain yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren berusaha memberikan bimbingan mengaji secara pribadi kepada orang yang membutuhkan. Dengan pekerjaan tambahan mereka berusaha mendapatkan tambahan penghasilan.

Ketujuh, berusaha hidup sehat, sehingga meminimalisir pengeluaran untuk kesehatan. Tidak semua pekerja mendapatkan jaminan kesehatan dari perusahaan. Oleh karena itu ia melakukan upaya preventif yaitu menjaga kesehatannya seoptimal mungkin. Ia berharap dengan badan yang sehat, risiko sakit akan dapat ditanggulangi sehingga tidak ada biaya tambahan apabila ia sakit.

Merujuk pada teori rasionalisasi tindakan Weber (Jones, 2009:117) mereka melakukan tujuh strategi berdasarkan pada tujuan (*goal oriented/zweckrational*) atau penggunaan rasionalitas. Ketika pekerja kontrak dan alih daya memilih bertahan sebagai pekerja dan melakukan beragam strategi agar mampu bertahan hidup, hal tersebut merupakan bagian dari tindakan yang berorientasi pada tujuan atau penggunaan rasionalitas. Tetap bertahan karena pilihan pekerjaan yang semakin terbatas merupakan pilihan yang paling rasional bagi para pekerja. Tetap bertahan walaupun tidak ada kepastian dan kesejahteraan merupakan pilihan yang paling rasional dibanding harus menganggur. Pilihan menjadi pekerja kontrak dan alih daya karena semakin sulitnya untuk memperoleh pekerjaan memang menjadi

alasan paling rasional bagi sepuluh pekerja. Dalam bahasa Weber (Kalberg, 1980: 1146), pekerja berusaha untuk menerima realitas dan melakukan hal yang paling bijak untuk menghadapi kesulitan kehidupan (*practical rationality*). Beragam tindakan yang dilakukan oleh pekerja mulai dari berhemat, menabung, penyesuaian tempat tinggal, mencari lembur, pekerjaan tambahan, dan berusaha meminimalisir sakit, semata-mata didasarkan pada upaya mereka untuk bertahan di tengah keterdesakan gaya hidup yang semakin menghimpit.

Teori yang disampaikan oleh A.L. Kalleberg pada tahun 1978 masih relevan untuk menelaah motivasi pekerja kontrak dan alih daya di bidang TIK. Ia menyatakan ada enam dimensi yang mendasari tiap individu dalam bekerja antara lain: (i) dimensi intrinsik merujuk pada apakah tugas kerja itu menarik dan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki; (ii) dimensi nyaman merujuk pada jam kerja, kemudahan perjalanan ke tempat kerja, dan situasi tempat kerja yang menyenangkan; (iii) dimensi finansial merujuk pada gaji atau upah yang diterima oleh pekerja serta keamanan pekerjaan; (iv) relasi dengan rekan kerja mencakup kemungkinan pergaulan; (v) karir yang mencakup pada promosi pekerjaan; dan (vi) kesediaan sumber yang mencakup penyediaan oleh pihak yang mempekerjakan sumber daya yang mencukupi bagi pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya secara sempurna (Abercombie, Hill, Turner: 2010: 626).

Temuan di lapangan menguatkan dimensi yang disampaikan oleh A.L. Kalleberg. Upaya pekerja untuk memperoleh kesejahteraan tidak hanya monodimensi tetapi multidimensi dengan banyaknya aspek. Bahwa bekerja tidak semata-mata berkaitan dengan pemerolehan pendapatan saja, tetapi juga rasa aman. Walaupun dari aspek dimensi finansial yang berkaitan dengan keamanan kerja, pekerja kontrak dan alih daya tidak memiliki hal itu. Status sebagai pekerja alih daya sudah pasti tidak aman karena setiap

saat bisa saja mereka diputus hubungan kerjanya. Pernyataan-pernyataan yang terungkap dari hasil wawancara menunjukkan ada ketidakpuasan dalam kepastian bekerja, harus sampai kapan mereka bekerja dengan status pekerja alih daya dan di bidang yang mereka geluti saat ini.

Penutup

Simpulan

Kondisi kesejahteraan pekerja kontrak dan alih daya di sektor TIK secara umum memang lebih baik jika dibandingkan dengan nasib pekerja kontrak dan alih daya di bidang garmen, metal, manufaktur, dan industri lainnya. Mereka relatif mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Akan tetapi, dari segi kepastian kerja apa yang dialami oleh para pekerja di sektor TIK tidak jauh berbeda dengan pekerja alih daya lainnya. Aspek jaminan kesehatan maupun ketenagakerjaan pun tidak sepenuhnya ditunaikan oleh perusahaan. Pekerja tidak mendapatkan hak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Di sisi lain, walaupun memiliki tingkat pendidikan tinggi, tidak semua pekerja memiliki pemahaman mengenai hak dasar yang harusnya mereka terima dan wajib dipenuhi perusahaan. Banyak keterbatasan yang harus diterima oleh pekerja kontrak dan alih daya di sektor TIK. Oleh karenanya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para pekerja harus menggunakan seluruh potensi yang dimilikinya. Beberapa strategi untuk memenuhi kebutuhan keseharian dilakukan mulai dari berhemat, menabung, mencari lokasi tinggal yang dekat atau tinggal dengan orang tua, mencari lemburan, mencari tambahan pekerjaan, dan berusaha hidup sehat.

Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan pemerintah terkait sistem tenaga kerja kontrak maupun alih daya yang merugikan pekerja harus ditinjau ulang. Relasi kerja antara pihak pemberi kerja dan pekerja harus setara. Praktik diskriminatif terkait dengan perpanjangan terus kontrak pekerja tanpa adanya kepastian pengangkatan sebagai

pekerja kontrak maupun alih daya harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah. Kondisi tersebut tentu merugikan pekerja. Para pekerja ini semakin jauh memperoleh haknya untuk sejahtera dan akhirnya hanya berupaya untuk bertahan hidup dari waktu ke waktu dengan beragam strateginya.

Saran

Aspek yang sangat mendasar agar pekerja kontrak dapat bertahan hidup adalah keseriusan pemerintah dalam penyiapan SDM ketenagakerjaan secara menyeluruh. Pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan bagi calon pekerja maupun pekerja, yang telah ada di dunia kerja. Pemerintah harus berkolaborasi dengan dunia pendidikan khususnya dengan perguruan tinggi maupun industri agar ketidaksesuaian kebutuhan tenaga kerja berpendidikan tinggi dan keterampilannya dapat diminimalisir. Tentu saja harapannya melalui pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi dan terkelola dengan baik diharapkan tidak ada lagi ketidaksesuaian tingkat pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja dari dunia usaha. Selain itu, pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai aturan ketenagakerjaan agar pekerja memiliki posisi tawar yang lebih baik juga tak dilanggar hak-hak normatifnya sebagai pekerja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan ke beberapa pihak yang sudah membantu proses pengerjaan tulisan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Devi Asiati, SE, M.Si. selaku Koordinator Tim DIPA Kebijakan Pasar Kerja Fleksibel yang sudah mengizinkan penggunaan

data penelitian sebagai acuan penulisan KTI ini. Terima kasih untuk Dra. Eniarti B. Djohan, MA, Dr. M. Alie Humaedi, M.Ag., M.Hum dan Rina Herawati, S.Sos., M.T. atas diskusi-diskusi dan pembelajaran yang mencerahkan dan menggugah.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Carlson D.S & Kacmar, K.M. 1994. "Learned Helplessness as a Predictor of Employee Outcomes: An Applied Model". *Human Resources Management Review* Vol.4, No. 3 Tahun 1994.
- Kalberg, Stephen. 1980. "Max Weber's Types of Rationality: Cornerstones for the Analysis of Rationalization Processes in History." *The American Journal of Sociology*, Vol. 85, No. 5 (Mar., 1980), pp. 1145-1179.
- Milawati, Resmi Setia. 2011. "Bekerja di Jam Kuburan: Studi Tentang Industri Jasa Pusat Pelayanan Berbasis Pasar Internasional di Metro Manila, Filipina." *Jurnal Analisis Sosial* Vol. 16 No. 1 September 2011. Bandung: Yayasan Akatiga.
- Nawawi. 2013. "Polemik Hubungan Kerja Outsourcing." *Jurnal Masyarakat Indonesia* Vol. 39, No. 1 Juni 2013.
- Ningrum, Vanda, dkk. 2014. "Pola Pengeluaran dan Gaya Hidup Penduduk Muda Kelas Menengah: Studi Empiris Perkotaan di Jabodetabek." *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol. 9 No 2 Tahun 2014
- Utomo, Luksanto. 2014. "Permasalahan Outsourcing dalam Sistem ketenagakerjaan Indonesia." *Jurnal Lex. Publika*. Volume 1 Nomor 1 Januari 2014.

Buku

- Abercrombie, N., Hill,& S., Turner, BS. 2010. *The Penguin Dictionary of Sociology* (Edisi Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BPS. 2014. *Statistik Perusahaan Informasi dan Telekomunikasi 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- BPS. 2015. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2015. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2015. *Pengeluaran Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Cresswell, John W. 2006. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches, Second Edition*. London: Sage Publications.
- Herawati, R., Dewayanti, R., & Sriyuliani, W. 2011. *Penelitian Praktek Kerja Outsourcing Pada Sub-Sektor Perbankan: Studi Kasus Jakarta, Surabaya, dan Medan*. Bandung: Akatiga-Opis-Fes.
- Herawati, Rina. 2010. *Kontrak dan Outsourcing Harus Makin Diwaspadai*. Bandung: Akatiga-FES.
- ILO. 2015. *Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2014 - 2015: Memperkuat Daya Saing dan Produktivitas Melalui Pekerjaan Layak*. Kantor Perburuhan Internasional – Jakarta: ILO
- Jones, PIP. 2009. *Pengantar Teori-Teori Sosial, dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme* (Terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2015. *Buku Saku Hasil Survei Indikator TIK 2015, Rumah Tangga dan Individu*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaran Pos dan Informatika Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Nurhemi, dkk. 2015. *Laporan Penelitian Kesiapan Tenaga Kerja Terampil Indonesia di Sektor Jasa dalam Menghadapi ASEAN Economy Community (AEC) 2015*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Priambada, K & Maharta A.E. 2008. *Outsourcing versus Serikat Pekerja, An Introduction to Outsourcing*. Jakarta: Alihdaya Publishing.
- Ritzer, George & Goodman, Douglas J. 2010. *Teori Sosiologi, dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Post-Modern* (Edisi Terjemahan). Bantul: Kreasi Wacana.
- Scout, James. 2002. "Rational Choice Theory". in *Understanding Contemporary Society: Theories of Present*, 126-138. Edited: Gary Browning, Abigail Halcli and Frank Webster. London: Sage Publication Ltd.
- Tjandraningsih, Indrasari & Herawati, Rina. 2009. *Menuju Upah Layak, Survei Upah Buruh Tekstil dan Garmen di Indonesia*. Bandung: Akatiga dan Friedrich Ebert Stiftung.

Internet

"Menaker Minta Pekerja TIK Dilengkapi Sertifikasi Kerja." <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/02/02/nj5fuh-menaker-minta-pekerja-tik-dilengkapi-sertifikasi-kerja>. Diakses 25 Maret 2015.

Workplacefundi. 2016. How Maslow can Transform your Outsourcing Initiative. <http://workplacefundi.com/2016/08/17/how-to-use-maslow-to-transform-your-outsourcing-initiative/>. Diakses 25 Maret 2018.

STUNTING : STUDI KONSTRUKSI SOSIAL MASYARAKAT PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERKAIT GIZI DAN POLA PENGASUHAN BALITA DI KABUPATEN JEMBER

*Stunting: Study of Social Constructions
in Rural and Urban Communities Related To Infant's Nutrition
and Nurture in Jember Municipality*

Weny Lestari, Lusi Kristiana, dan Astridya Paramita

weny716@gmail.com
Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan Badan Litbangkes Kemenkes RI
Jl. Indrapura 17 Surabaya

Naskah Diterima: 14 Juni 2017 | Naskah direvisi: 15 Maret 2018 | Naskah diterbitkan: 30 Juni 2018

Abstract: *Indonesia's rank in world was 5th on stunting case. 5 million of children under five (38.6 % from 12 milion) got stunting in Indonesia. The aims of this study were to descript the social construction of rural-urban community about the meaning of children's health and illness, and the pattern of nurturing which was related to stunting. The study used qualitative's method, datas collected with depth interview and observation partisipation. The study was conducted in rural-urban communities which had stunting cases in Jember (Kalisat and Jelbuk). The study was conducted in June to December 2013. The study showed that stunting were related to social construction. Difference social construction in rural-urban which constructed the meaning of healthy or illness and nuruturing the stunting's children was affected by maternal education, early-age marriage, after marriage's residence, responsibilities of nurturing, and valuable concept in community that causes the lack of knowledge about nutrition. The study concluded that stunting was not a single cause of heath's problems, but it related to social construction. Causes lied in the distinction of social construction, patterns of communication and interpretation between health providers and community, so there was no meeting point for the success of nutritional improvement children under five's programs.*

Keywords: *Social construction, rural-urban, nurturing, stunting*

Abstrak: Kejadian balita pendek (*stunting*) di Indonesia masih menempati urutan ke-5 di dunia. Terdapat lima Juta (38,6% dari 12 juta) Balita di Indonesia yang memiliki tinggi badan dengan kategori pendek. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konstruksi sosial masyarakat pedesaan dan perkotaan terkait pemaknaan sehat dan sakit pada balita, dan pola pengasuhan anak terkait dengan *stunting*. Metode penelitian adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan observasi partisipasi. Penelitian dilakukan di wilayah perkotaan (Kecamatan Kalisat) dan pedesaan (Kecamatan Jelbuk) dengan kasus *stunting* tertinggi di Kabupaten Jember. Waktu penelitian adalah 7 bulan (Juni-Desember 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah *stunting* terkait erat dengan konstruksi sosial masyarakat. Terdapat perbedaan konstruksi sosial yang membentuk pemahaman sehat/sakit dan pola asuh balita *stunting* di pedesaan dan perkotaan di Jember. Konstruksi sosial tersebut dipengaruhi oleh pendidikan ibu, usia perkawinan dini, tempat tinggal setelah menikah, tanggung jawab pengasuhan balita, dan prioritas ekonomi

pada masyarakat yang menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang gizi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kejadian *stunting* bukan merupakan akibat tunggal masalah kesehatan balita, namun terkait erat dengan konstruksi sosial masyarakat. Penyebabnya terletak pada perbedaan konstruksi sosial yang dibangun, pola komunikasi dan pemaknaan antara tenaga kesehatan dengan masyarakat, sehingga tidak ada titik temu untuk keberhasilan program peningkatan gizi balita.

Kata Kunci: Konstruksi sosial, perdesaan-perkotaan, pola pengasuhan, balita pendek (*stunting*)

Pendahuluan

Kejadian balita pendek (*stunting*) di Indonesia menempati urutan ke-5 dunia. Sekitar 5 juta dari 12 juta balita (38,6%) di Indonesia memiliki tinggi badan di bawah rata-rata tinggi badan balita di dunia. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 memperlihatkan bahwa status gizi balita pendek di Indonesia adalah 37,2%. Persentase tersebut relatif tidak menunjukkan perbaikan jika dibandingkan dengan data Riskesdas tahun 2010 (35,6%) dan tahun 2007 (36,8%) (Departemen Kesehatan RI, 2008) (Kementerian Kesehatan RI, 2010; Kementerian Kesehatan RI, 2013).

Terjadinya *stunting* pada balita sering kali tidak disadari, dan setelah dua tahun baru terlihat ternyata balita tersebut pendek. Masalah gizi yang kronis pada balita disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama akibat orang tua/keluarga tidak tahu atau belum sadar untuk memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi anaknya. Data Riskesdas tahun 2010 menunjukkan bahwa ada 21,5% balita usia 2-4 tahun yang mengonsumsi energi di bawah kebutuhan minimal, dan 16% yang mengonsumsi protein di bawah kebutuhan minimal (Kementerian Kesehatan RI, 2010). Bila hal ini berlangsung dalam waktu lama, maka akan mengganggu pertumbuhan berat dan tinggi badan Balita.

Pada ibu hamil juga terdapat 44,4% yang mengonsumsi energi di bawah kebutuhan minimal dan 49,5% wanita hamil yang mengonsumsi protein di bawah kebutuhan minimal yang berdampak pada terhambatnya pertumbuhan janin yang dikandungnya (Kementerian Kesehatan RI, 2010).

Berdasarkan survei Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 42% anak di Jawa

Timur bisa mengalami pendek. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur telah melakukan penelitian dengan metode *sampling* terhadap balita berusia 0-5 tahun sebanyak 24.000 balita di Jawa Timur. Hasilnya menyatakan bahwa 12% Balita berpotensi mengalami kecenderungan sangat pendek dan 30% pendek (Jawa Pos, 20 Januari 2012). Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2011, kabupaten dengan status balita gizi kurang dan status gizi buruk terbanyak berada di Kabupaten Jember, sebanyak 20.658 (13,79%) dan 4.608 (3,08%) (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2011). Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat dari Riset Kesehatan Dasar 2007 menunjukkan bahwa status gizi balita pendek dan sangat pendek di Kabupaten Jember berada di peringkat ke-5 di Jawa Timur (42,79%) (Departemen Kesehatan RI, 2008).

Program pemerintah dalam penanggulangan masalah gizi pada balita sudah cukup banyak dan terstruktur. Namun, pada kenyataannya, kasus kejadian balita *stunting* masih banyak dijumpai pada masyarakat dengan karakteristik sosial budaya ekonomi di level manapun. Bagaimana *stunting* dan masalah gizi pada balita bisa terjadi? Hal ini bisa dikaitkan dengan bagaimana masyarakat itu memberi pemaknaan tentang sehat/sakit pada balita, gizi dan pola asuh balita. Pada komunitas budaya, makna terkonstruksi secara sosial. Pengetahuan dibangun dalam komunitas dan dimaknai oleh individu sehingga membentuk pemahaman yang diyakini sebagai nilai yang ada dalam sebuah komunitas. Hal tersebut bisa terjadi beda makna antara komunitas satu dengan yang lain. Ketika balita pendek (*stunting*) oleh masyarakat dipandang bukan sebagai

masalah dalam perkembangan kesehatan balita, maka prioritas dalam pola pengasuhan bisa menjadi berbeda dalam pemenuhan kebutuhan gizi balita.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberi gambaran tentang konstruksi sosial masyarakat yang membentuk pemahaman ibu tentang (1) balita sehat/sakit, (2) status gizi balita pendek (*stunting*), dan (3) pola asuh pada balita pendek (*stunting*).

Manfaat dari tulisan ini dengan diperolehnya gambaran konstruksi sosial masyarakat terkait gizi dan pola asuh balita pendek (*stunting*), maka informasi yang disampaikan dalam tulisan ini diharapkan dapat memberi masukan dalam pelaksanaan kebijakan program kesehatan. Manfaat terutama bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam mengambil keputusan terkait perbaikan kesehatan dan peningkatan gizi balita dengan mempertimbangkan sisi budaya masyarakatnya.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan observasi partisipasi. Informan adalah ibu dari balita pendek dan bidan desa setempat. Data ditentukan berdasarkan kecukupan informasi tentang pemaknaan sehat/sakit dan pola pengasuhan pada balita. Kecukupan data adalah saat data dianggap sudah jenuh ketika terjadi keberulangan informasi yang didapat dari metode triangulasi data.

Penelitian dilakukan di 2 (dua) wilayah di Kabupaten Jember dengan kasus balita pendek

(*stunting*) paling tinggi, dan menggambarkan karakteristik masyarakat yang khas terkait perdesaan (Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk) dan perkotaan (Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat). Waktu penelitian adalah 7 (tujuh) bulan (Juni-Desember 2013).

Balita Pendek (*Stunting*)

Berdasar Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak, pengertian pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada Indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah *stunted* (pendek) dan *severely stunted* (sangat pendek) (Kementerian Kesehatan RI, 2010). Dengan kata lain, *stunting* dapat diketahui bila seorang balita sudah ditimbang berat badannya dan diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan hasilnya berada di bawah normal. Jadi secara fisik balita akan lebih pendek dibandingkan balita seumurnya.

Klasifikasi status gizi secara umum bisa dilihat pada Tabel 1. Sementara untuk perbandingan standar status gizi balita antara yang memiliki panjang badan/tinggi badan normal dengan yang pendek bisa dilihat pada Tabel 2.

Dalam Wahdah (2012) dinyatakan bahwa, "*Stunting* atau tubuh yang pendek, merupakan suatu retardasi pertumbuhan linier telah digunakan sebagai indikator secara luas untuk mengukur status gizi anak. Pendek sering dipakai sebagai terjemahan *stunting*

Tabel 1. Tabel Status Gizi

Indeks	Status Gizi	Ambang Batas *)
Berat badan menurut umur (BB/U)	Gizi Lebih	> + 2 SD
	Gizi Baik	≥ -2 SD sampai +2 SD
	Gizi Kurang	< -2 SD sampai ≥ -3 SD
	Gizi Buruk	< - 3 SD
Tinggi badan menurut umur (TB/U)	Normal	≥ 2 SD
	Pendek	< -2 SD sampai dengan ≥ -3 SD
	Sangat Pendek	< - 3 SD
Berat badan menurut tinggi badan (BB/TB)	Gemuk	> + 2 SD
	Normal	≥ -2 SD sampai + 2 SD
	Kurus	< -2 SD sampai ≥ -3 SD
	Kurus sekali	< - 3 SD

Sumber : Kementerian Kesehatan RI, 2010

Tabel 2. Perbandingan Standar Pertumbuhan Balita Normal dan Balita Pendek

Umur (Bulan)	Normal (Median)		Pendek (-3SD)	
	Panjang Badan (PB*)/Tinggi Badan (TB**) (dalam satuan centimeter)		Panjang Badan (PB)/Tinggi Badan (TB) (dalam satuan centimeter)	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
0	49,9	49,1	44,2	43,6
1	54,7	53,7	48,9	47,8
2	58,4	57,1	52,4	51,0
3	61,4	59,8	55,3	53,5
4	63,9	62,1	57,6	55,6
5	65,9	64,0	59,6	57,4
6	67,6	65,7	61,2	58,9
7	69,2	67,3	62,7	60,3
8	70,6	68,7	64,0	61,7
9	72,0	70,1	65,2	62,9
10	73,3	71,5	66,4	64,1
11	74,5	72,8	67,6	65,2
12	75,7	74,0	68,6	66,3
30	91,9	90,7	81,7	80,1
36	96,1	95,1	85,0	83,6
42	99,9	99,0	88,0	86,3
48	103,3	102,7	90,7	89,8
54	106,7	106,2	93,4	92,6
60	110,0	109,4	96,1	95,2

*PB : Pengukuran Panjang Badan dilakukan dalam posisi anak terlentang

**TB : Pengukuran Tinggi Badan dilakukan dalam posisi anak berdiri

Sumber : Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak, Kemenkes RI, 2010.

dan terdapat suatu unsur atau elemen maupun nuansa yang tidak tercakup dalam pengertian pendek. Dengan kata lain *stunting* tidak hanya sekedar pendek saja, tetapi terkandung adanya proses perubahan patologis, jadi tidak semata-mata pendek atau *shortnes* saja. *Stunting* merupakan gambaran keadaan masa lalu (kronis), karena hambatan atau gangguan pertumbuhan tinggi badan atau pertumbuhan linier memerlukan waktu lama, dalam hitungan bulan atau bahkan tahun. Jika di suatu masyarakat banyak anak dengan tinggi badan menurut umur lebih rendah dari baku rujukan, maka dapat memberikan indikasi bahwa di masyarakat yang bersangkutan terdapat masalah pembangunan secara umum seperti layanan sosial air bersih, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Perawakan pendek seringkali dikaitkan dengan hambatan pertumbuhan (*growth retardation*), bahkan digunakan sebagai petunjuk terhadap adanya gangguan kesehatan seseorang (Wahdah, 2012).

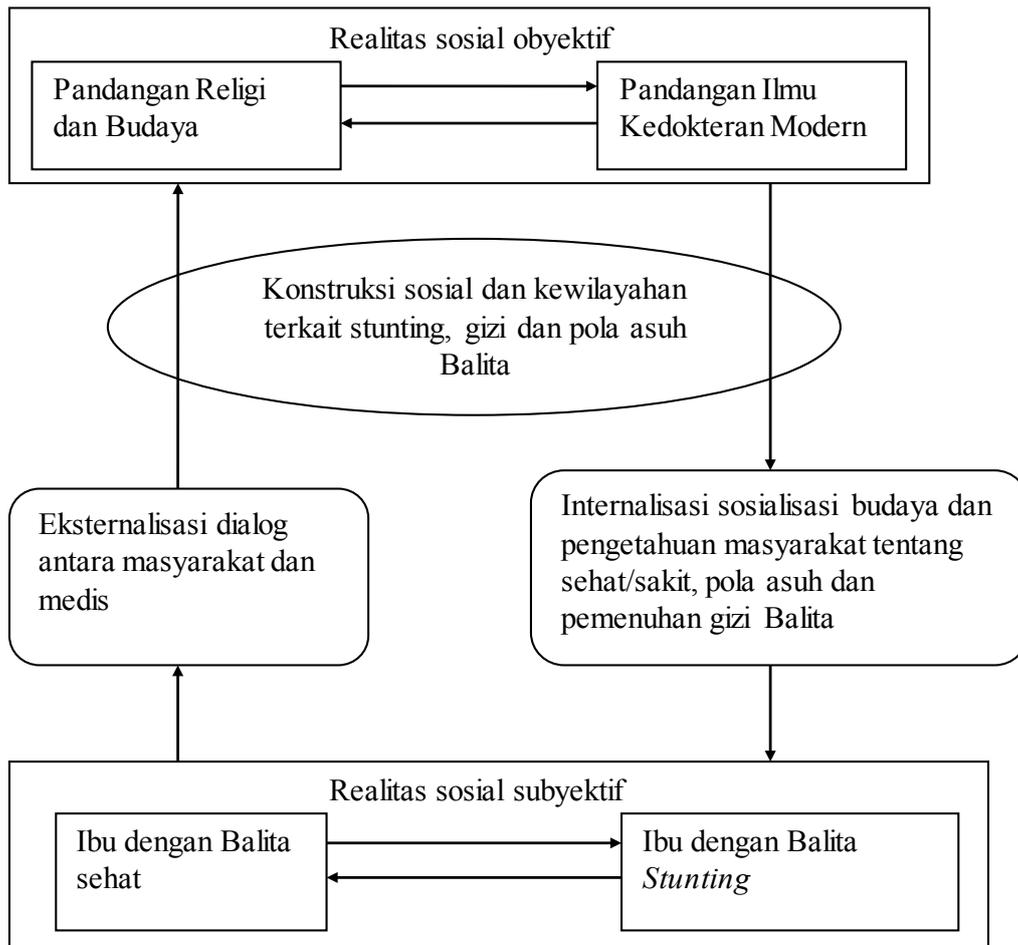
Perawakan pendek adalah apabila tinggi badan seseorang terletak di bawah persentil minus 3 SD pada grafik pertumbuhan. *Stunting* menggambarkan keadaan gizi kurang yang

sudah berjalan lama dan memerlukan waktu bagi anak-anak untuk berkembang serta pulih kembali. Anak-anak yang bertubuh pendek pada usia dini terus menunjukkan kemampuan yang lebih buruk dalam fungsi kognitif yang beragam dan prestasi sekolah yang lebih buruk dibandingkan dengan anak-anak yang bertubuh "normal" (Wahdah, 2012).

Teori Konstruksi Sosial dalam Kesehatan Masyarakat: Dasar Pemikiran, Asumsi, dan Proposisi

Gambaran kerangka konsep konstruksi sosial terkait pemaknaan balita pendek di masyarakat dapat dilihat pada Gambar 1.

Teori konstruksi sosial (*social construction*) tidak bisa terlepas dari bangunan teoritik yang telah dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Peter L. Berger merupakan sosiolog dari *New School for Social Reserach*, New York, Sementara Thomas Luckman adalah sosiolog dari *University of Frankfurt*. Teori konstruksi sosial, sejatinya dirumuskan kedua akademisi ini sebagai suatu kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan. Berger dan Luckman meyakini secara substantif bahwa



Gambar 1. Kerangka Konsep Konstruksi Sosial Balita Pendek (Stunting)

realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya, “*reality is socially constructed*” (Berger & Luckman, 1990).

Dasar dari teori konstruksi sosial adalah pemikiran Max Weber yang menjelaskan bahwa manusia bertindak atas dasar pemaknaannya pada kenyataan sosial di sekitarnya. Dari pemaknaan tersebut, manusia membangun rasionalitasnya. Ada empat jenis rasionalitas yang dikembangkan manusia, yaitu (1) rasionalitas nilai (*wert-rationalitat*), (2) rasionalitas instrumental (*zweck-rationalitat*), (3) tindakan tradisional, dan (4) tindakan afektif. Dikatakan menggunakan rasionalitas nilai, bila orang bertindak atas dasar nilai-nilai tertentu sebagai acuan dan tujuannya. Sementara itu, tindakan dengan rasionalitas instrumental apabila orang mempertimbangkan cara atau alat yang digunakan dan tujuan tindakan tersebut.

Dalam konsep ini, manusia dianggap otonom sebagai pemilik dari macam-macam tujuan yang diinginkan dan kriterianya memilih tujuan-tujuan tersebut. Demikian pula, manusia juga mampu menilai alat dan kemudian memulai proses pengumpulan informasi, mencatat kemungkinan dan hambatan, serta meramalkan konsekuensi dari tindakan itu. Akhirnya, ia memilih tujuan dan alat yang mencerminkan pertimbangan efisiensi dan efektifitasnya (Berger & Luckman, 1990). Hal itu sudah barang tentu berbeda dengan tindakan tradisional yang mengikuti pola-pola yang telah dibentuk dari masa lalu, serta tindakan afektif yang mengikuti dorongan perasaan atau emosi.

Dalam penjelasan yang demikian, seolah-olah manusia itu otonom tidak terikat oleh sistem nilai dan struktur sosial. Nilai dan struktur sosial berada di “luar” manusia dan tidak atau kurang berpengaruh dalam tindakan manusia. Dengan teori konstruksi

sosial, Peter L. Berger dan Thomas Luckman menjelaskan bagaimana proses dialektika antara manusia dan struktur sosial yang di dalamnya terdapat nilai-nilai sosial. Dalam teorinya, ada makna-makna umum yang dimiliki bersama dan diterima tetap dilihat sebagai dasar dari organisasi sosial. Makna-makna umum ini dikenal sebagai realitas objektif. Sementara itu, ada makna yang berkembang di luar makna umum merupakan hasil manusia yang muncul dari lingkungan sosial yang diciptakannya. Lingkungan ini adalah nilai-nilai dan makna-makna yang selalu berkembang, makna-makna ini berkembang dan diobjektivasi ke dalam institusi-institusi sosial dan karena itu kemudian disosialisasikan kepada anggota baru masyarakat (Craib, 1986). Proses sosialisasi inilah disebut sebagai subjektivasi, memasukan nilai ke dalam diri individu dan menjadi realitas subjektif. Namun demikian, dalam kehidupan sehari-hari manusia juga berdialog dengan sesamanya dan dikenal sebagai intersubjektif. Dengan dinamikanya, makna-makna dalam diri individu ini dapat berubah dan pada gilirannya dikembalikan ke institusi sosial dalam objektivasi. Oleh karena itu, teori ini merumuskan bahwa masyarakat adalah produk manusia, masyarakat adalah realitas objektif dan manusia adalah produk sosial. Dengan kata lain, manusia adalah produk dari masyarakat yang mereka ciptakan (Ritzer, 1988).

Pemahaman yang serupa dapat diterapkan dalam kesehatan masyarakat. Bila mencermati dalam proses kesejarahan kedokteran modern saat ini, mulanya terbentuk dari pengetahuan dan praktik-praktik penyembuhan *shaman* (perdukunan) pada masa prasejarah. Proses dialektika antara pembentukan pengetahuan (rasionalitas) dan praktik-praktik itu pada gilirannya berlanjut terus-menerus seiring dengan perkembangan pemikiran manusia sebagaimana dipaparkan oleh Aguste Comte, yaitu dari teologis, metafisik hingga ke positivistik. Kedokteran modern berkembang meninggalkan logika teologis menuju

logika positivistik dengan pembuktian ilmiah. Konstruksi tentang apa yang sehat dan bagaimana harus hidup sehat hingga bagaimana menyetatkan kembali (*healing*) dari proses sakit memperoleh pembenaran dari awalnya tindakan medis individu para penyembuh di masanya (Butt, 1998).

Gambaran Balita Pendek (*Stunting*) di Kabupaten Jember

Banyak masalah kesehatan ibu dan anak yang terkait dengan masalah budaya dan konstruksi masyarakatnya, termasuk masalah gizi buruk dan balita pendek. Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember menyatakan bahwa pada tahun 2013, data mengenai balita pendek (*stunting*) di wilayah Kabupaten Jember berdasarkan urutan 2 (dua) besar per wilayah kecamatan adalah sebagai Tabel 3.

Tabel 3. Data Balita Pendek di Kabupaten Jember per Agustus 2013

No	Kecamatan	Persentase Balita Pendek dari Balita yang diperiksa (%)
1	Kalisat	75
2	Jelbuk	68,75
3	Kaliwates	38
4	Tanggul	35
5	Sumbersari	25

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Jember, 2013

Data tersebut menunjukkan wilayah dengan persentase kejadian balita pendek (*stunting*) tertinggi yang mewakili wilayah perdesaan (Kecamatan Jelbuk) dan perkotaan (Kecamatan Kalisat).

Berdasarkan data Puskesmas Kecamatan Kalisat tahun 2013, prosentase balita pendek (*stunting*) tertinggi (75%) di Kecamatan Kalisat. Dari 20 balita yang diperiksa, ada 15 balita masuk dalam kategori pendek $\leq -3SD$ (lihat Tabel 2). Sementara itu, di wilayah Kecamatan Jelbuk, data Puskesmas Kecamatan Jelbuk mencatat ada 25 balita di Bawah Garis Merah (BGM) dan diantaranya ada 9 balita yang masuk dalam kategori sangat pendek $\leq -3SD$ (lihat Tabel 2) (Puskesmas Kecamatan Kalisat, 2013; Puskesmas Kecamatan Jelbuk, 2013).

Tabel 4. Status Kesehatan Balita Pendek dan Sangat Pendek di Desa Sucopangepok, Tahun 2013

Nama	Jenis Kelamin	Golongan	Umur (bulan)	BB (kg)	TB (cm)	BB/TB	TB/U	Keterangan	Keluhan Penyakit
Balita W	Laki-laki	Gakin*	31	8,9	82	Normal	Sangat Pendek	BGM***	Batuk, Pilek, Sesak
Balita R	Laki-laki	Non Gakin**	31	9	81	Normal	Sangat Pendek	BGM	Mencoret, Batuk, Pilek
Balita K	Laki-laki	Non Gakin	17	8	69	Normal	Pendek	KEP Ringan	Batuk, Pilek, Mencoret
Balita D	Laki-laki	Non Gakin	25	10	81	Normal	Pendek	Dropout (BB Naik)	Batuk, Pilek

Keterangan:

* Gakin: keluarga miskin

** Non Gakin: bukan keluarga miskin

*** BGM: Bawah Garis Merah

Sumber: Laporan Penimbangan Tingkat Posyandu Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Jember Per September 2013

Balita Pendek di Perdesaan (Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk)

Desa Sucopangepok terdiri dari 10 dusun, dusun yang dijadikan tempat penelitian adalah Dusun Krajan Timur dan Dusun Krajan Barat. Dusun Krajan Timur dan Krajan Barat adalah dusun yang saling berbatasan langsung. Dusun Krajan Timur adalah tempat di mana Balai Desa dan Polindes Sucopangepok berada. Di Dusun Krajan Timur tercatat ada 3 Balita yang masuk dalam kategori pendek, dengan 2 diantaranya masuk juga dalam kategori BGM. Sementara itu, di Dusun Krajan Barat berada di sebelah barat balai Desa Sucopangepok, di sana tercatat satu balita yang masuk dalam kategori pendek dan BGM.

Balita Pendek di Perkotaan (Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat)

Desa Kalisat dipilih berdasarkan data Puskesmas, merupakan desa dengan tipikal perkotaan menurut BPS dengan kasus kejadian balita pendek dan gizi kurang. Didapatkan gambaran status gizi balita seperti pada Tabel 5.

Data responden balita pendek di perdesaan maupun perkotaan didapatkan bahwa dari 7 dari 8 orang responden balita pendek memiliki berat badan lahir normal (>2.500 gram). Hanya 1 balita yang memiliki berat badan lahir di bawah standar normal seberat 2.300 Gram. Sementara itu, panjang badan lahir, 8 balita memiliki panjang badan normal >49 cm. Namun, dalam proses pertumbuhannya, 8 Balita tersebut mengalami BGM dan bertumbuh

Tabel 5. Status Kesehatan Balita Pendek dan Sangat Pendek di Desa Kalisat Tahun 2013

Nama	Jenis Kelamin	Golongan	Umur (bulan)	BB (kg)	TB (cm)	BB/TB	TB/U	Keterangan	Keluhan Penyakit
Balita Ga	Laki-laki	Non Gakin*	27	9,3	81	Normal	Pendek	BGM**	Batuk, pilek
Balita Gi	Laki-laki	Non Gakin	27	9,5	80	Normal	Pendek	BGM	Batuk, pilek
Balita R	Laki-laki	Non Gakin	35	9,6	80	Kurus	Pendek	BGM	-
Balita A	Perempuan	Non Gakin	55	10,3	85	Normal	Sangat Pendek	BGM	-

Keterangan:

* Non Gakin: bukan keluarga miskin

** BGM: Bawah Garis Merah

Sumber: PSG Puskesmas Kecamatan Kalisat Agustus 2013

Tabel 6. Konstruksi Sosial Masyarakat terkait Makna Sehat/Sakit, Pola Asuh dan Gizi Balita Pendek di Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013

	Perdesaan	Perkotaan
Pemaknaan Balita sehat/sakit	<ul style="list-style-type: none"> • Ada kepercayaan di masyarakat bahwa balita sakit sebagai hasil perbuatan orang lain (non medis), sehingga dalam perawatan medis tidak maksimal karena ibu menganggap pengobatan medis sia-sia. • Anak yang masih bisa beraktivitas dengan normal dianggap sehat meskipun pendek, kurus dan mudah terinfeksi penyakit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anak sakit itu saat tidak bisa bermain dan nafsu makan menurun. • Anak yang masih bisa beraktivitas dengan normal dianggap sehat meskipun pendek, kurus dan mudah terinfeksi penyakit.
Pengetahuan tentang Balita Pendek	<ul style="list-style-type: none"> • Anak yang pendek asal bisa beraktivitas seperti biasa dianggap sehat. Namun, pengetahuan tentang Balita kurang gizi diketahui dari tenaga kesehatan dan kejadian sering sakitnya anak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anak pendek dan kurang gizi dianggap tidak terjadi pada anaknya, tapi terjadi pada anak orang lain. Karena dianggap pola pemberian makan kepada anak masih dalam taraf cukup. • Tinggi badan anak yang kurang dianggap merupakan keturunan dari orang tua yang juga pendek. Tinggi badan pendek bukan masalah.
Pola Asuh	<ul style="list-style-type: none"> • Pengasuhan balita sepenuhnya dipegang oleh ibu dan keluarga luas dari pihak ibu. • Pengetahuan pengasuhan anak didapatkan dari keluarga. Rata-rata ibu balita berpendidikan rendah (Tidak Tamat SD/Tidak Tamat SMP), hanya sedikit yang tamat SLTA. • Usia perkawinan ibu sekitar 14-15 tahun, sehingga memiliki anak namun kurang pengetahuannya. • Pengetahuan PHBS dalam keluarga rendah • Anak perempuan lebih diinginkan karena dianggap anak perempuan bisa membantu tugas berat ibu di rumah dan di kebun, sedangkan anak laki-laki sepertinya hanya bertugas untuk main, dianggap nakal dan tidak bisa membantu. • Pengasuhan anak seadanya, tidak ada upaya untuk meningkatkan kesehatan anak, karena prioritas utama adalah peningkatan ekonomi dan barang-barang berharga sebagai kepemilikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengasuhan balita dipegang oleh ibu dan keluarga luas dari pihak bapak. Apabila sudah memasuki usia sekolah prioritas akan dimasukkan ke pesantren. • Pengetahuan pengasuhan anak didapatkan dari keluarga, tenaga kesehatan, dan media. Pendidikan ibu bervariasi ada yang S-1, tamat SLTA, dan tamat SMP. • Usia perkawinan ibu relatif lebih tinggi sekitar 17-25 tahun, dianggap cukup matang dalam mengasuh anak. • Pengetahuan PHBS dalam keluarga rendah • Anak laki-laki atau perempuan dianggap sama, namun anak laki-laki lebih diistimewakan dalam pengasuhan dan pendidikan daripada anak perempuan. • Pengasuhan anak seadanya, tidak ada upaya untuk meningkatkan kesehatan anak, karena prioritas utama adalah peningkatan ekonomi dan barang-barang berharga sebagai kepemilikan.
Gizi	<ul style="list-style-type: none"> • Ibu mengetahui dan menyadari bahwa anaknya masuk kategori gizi kurang dan sering sakit, namun tidak melakukan apa-apa • Penggunaan garam <i>krosok</i> (tidak beryodium) dalam pengolahan masakan dalam keluarga. Anggapan garam beryodium rasa kurang asin dan minimnya penjual garam beryodium. • Penggunaan makanan instan (mie instan, makanan ringan, ikan asin, makanan kaleng, sosis daging olahan) dalam pemberian makan pada balita cukup tinggi. • Ada pandangan bahwa susu formula yang harganya mahal lebih baik daripada ASI. • Program PMT dari pemerintah, tidak digunakan untuk keperluan Balita saja, namun untuk konsumsi seluruh keluarga. • Pola pemberian makan pada anak tidak teratur, hanya berdasarkan kesukaan anak saja, dan memberi uang jajan pada balita. Pemberian makan tidak sesuai usia anak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ibu mengetahui bahwa anaknya masuk kategori gizi kurang, namun menolak apabila anaknya dikatakan kurang gizi. Ibu menganggap anak balitanya sehat, karena makan anaknya dilihat cukup banyak. • Pemberian MPASI yang cukup dini (<6 bulan) sering menyebabkan bayi mengalami diare. Bayi menangis dianggap masih lapar. • Balita diberikan makanan ringan kemasan untuk menambah nafsu makannya.

Sumber: Data Penelitian, Tahun 2013

pendek dan sangat pendek. Sebanyak 6 balita diantaranya mempunyai komplikasi penyakit seperti ISPA dan diare. Sebanyak 7 balita dari 8 balita bukan berasal dari keluarga miskin, orang tua memiliki kondisi ekonomi yang cukup mampu, sehingga secara nyata akan tampak bahwa pemenuhan gizi balita yang seharusnya bisa terpenuhi dengan kondisi ekonomi keluarga yang cukup, tidaklah cukup membuktikan bahwa ekonomi yang baik turut berperan dalam pemenuhan gizi balita.

Tabel 6 menunjukkan pemetaan bagaimana konstruksi sosial masyarakat di 2 wilayah perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Jember pada tahun 2013.

Konstruksi Sosial tentang Makna Sehat/Sakit

Mengikuti cara pandang strukturalisme, kondisi sakit merupakan lawan dari sehat. Kondisi itu menggambarkan keadaan tubuh berkaitan dengan fungsinya. Kata sakit merujuk pada kondisi di mana seorang mengalami gangguan untuk melakukan fungsi sosialnya, misalnya karena badannya panas, ia tidak bisa bekerja. Sementara itu, kondisi sehat menggambarkan keadaan tubuh yang mampu menjalankan fungsi sosialnya. Kondisi sehat menggambarkan sisi positif dari keadaan tubuh (*an organic-biological characteristic*), sedangkan sakit menunjukkan sisi negatif. Kondisi yang digambarkan ini tidak saja berlangsung sesaat dan nampak, yaitu ada tidaknya kondisi sehat (*health in vacuum*), kesiapan untuk hidup sehat (*reserve of health*), dan keseimbangan (*health as an equalibrium*). Pandangan ini juga menunjukkan bahwa kondisi sehat dan sakit ini sebagai prasyarat untuk pencapaian status sosial ekonomi, atau sebagai kapasitas untuk menampilkan tugas sosial dan peran secara layak. Ringkasnya, definisi sehat dan sakit ini ditekankan pada kelangsungan fungsi individual dalam peran sosial berbeda yang dimilikinya. Fungsi sosialnya dipandang sebagai keseimbangan personal dan keberhasilan dalam memuaskan

kebutuhan diri dan orang lain serta mengurangi tekanan (Noack, 1987).

Di dalam kondisi sakit, secara teoritik, ada dua perilaku pada si sakit, yaitu perilaku sakit dan perilaku sehat. Kedua perilaku itu bergerak secara hampir bersamaan dan berurutan. Pada perilaku sakit, si sakit menanggapi gejala dan melakukan evaluasi. Individu yang sakit merasa kurang nyaman atau tanda lain karena fungsi tubuh kurang baik. Hal itu ditandai dengan perasaan atau keadaan individu yang tidak dapat mengerjakan sebagian atau keseluruhan peran normalnya, dan memberikan tuntutan tambahan tingkah laku peran individu lain di sekitarnya, sementara itu perilaku sehat terjadi tatkala si sakit mencari kesembuhan dan mengembalikan fungsi sosialnya. Kedua perilaku itu disebut oleh Suchman (1965) dalam Foster dan Anderson (Foster; Anderson, 1986), sebagai pengalaman sakit (*illness experience*). Ada dalam 5 (lima) tahap, yaitu (1) pengalaman gejala (keputusan ada yang tidak beres), (2) asumsi sakit (keputusan seseorang merasa sakit dan membutuhkan perawatan profesional), (3) kontak perawatan medis (keputusan mencari perawatan medis profesional), (4) peran ketergantungan (keputusan mengalihkan pengawasan kepada dokter dan menerima serta mengikuti pengobatan yang diterapkan), dan (5) kesembuhan atau rehabilitas (keputusan mengakhiri peranan penderita).

Hal itu berbeda dengan Andrew Twaddle (1969) sebagaimana dikutip oleh Cockerham (Cockerham, 1978) hanya membatasi pada (1) perubahan perasaan (menjadi tidak nyaman), (2) tidak mampu menampilkan peran normalnya, dan (3) gejala atau perubahan dalam bentuk biologis dari organisme yang dipandang penting karena berimplikasi pada tindakannya. Selanjutnya, Suchman (1965) lebih menggambarkan kedua perilaku (perilaku sakit dan perilaku sehat) sebagai pengalaman sakit itu dalam rangkaian Tabel 7.

Dalam pemahaman konstruksi sosial, Tabel 7 ini menggambarkan dengan baik bagaimana proses dialektik antara realitas objektif dan subjektif, antara asumsi dan pengetahuan yang

diperoleh dari dunia medik dan abstraksi atas pengalaman yang pernah dijalani seorang individu. Dalam dunia medis, asumsi dan gejala tentang sehat dan sakit telah terinci dengan detil dalam buku-buku kedokteran. Sementara itu, melalui pengalaman kesehariannya, individu mengalami proses-proses sakit yang dimulai dari ketidakberfungsian diri dalam dunia sosialnya. Pada Tabel 7, pada gilirannya orang menyadari sakit tidak ditentukan oleh buku kedokteran yang disampaikan oleh tenaga medis, tetapi kesadarannya tentang sakit yang dialaminya.

Dalam konteks pemahaman balita sakit yang dipahami oleh ibu di perdesaan Jember, memunculkan konstruksi sosial sendiri di luar konstruksi yang dibentuk oleh medis, bahwa balita sakit bisa dipahami oleh karena sebab gangguan dari luar secara supranatural, sehingga dalam proses penyembuhannya kurang melibatkan pengobatan dari medis. Sementara itu, di wilayah perkotaan Jember, balita sakit dipahami seperti dalam konteks fungsi tubuh saja, saat anak tidak beraktivitas seperti biasa, menurun nafsu makannya, rewel dan meminta digendong terus, serta tidak mau bermain sendiri.

Konteks balita sehat baik di perdesaan maupun di perkotaan juga di konstruksi terkait dengan fungsi tubuh anak, anak sehat adalah yang bisa beraktivitas normal sehari-hari, mereka bisa bermain dengan teman atau saudara mereka yang lain tanpa keluhan.

Konstruksi Sosial tentang Balita Pendek (*Stunting*)

Teori konstruksi sosial, Peter L. Berger dan Thomas Luckman menjelaskan bagaimana proses dialektika antara manusia dan struktur sosial yang di dalamnya terdapat nilai-nilai sosial. Dalam teorinya, ada makna-makna umum yang dimiliki bersama dan diterima tetap dilihat sebagai dasar dari organisasi sosial. Makna-makna umum ini dikenal sebagai realitas objektif (Peter dan Luckman, 1990). Sementara itu, ada makna yang berkembang di luar makna umum

merupakan hasil manusia yang muncul dari lingkungan sosial yang diciptakannya. Lingkungan ini adalah nilai-nilai dan makna-makna yang selalu berkembang. Makna-makna ini berkembang dan diobjektivasikan ke dalam institusi-institusi sosial dan karena itu kemudian disosialisasikan kepada anggota baru masyarakat (Craib, 1986). Proses sosialisasi inilah yang disebut sebagai subjektivasi, memasukan nilai ke dalam diri individu dan menjadi realitas subjektif. Namun demikian, dalam kehidupan sehari-hari manusia juga berdialog dengan sesamanya dan dikenal sebagai intersubjektif. Dengan dinamikanya, makna-makna dalam diri individu ini dapat berubah, dan pada gilirannya dikembalikan ke institusi sosial dalam objektivasi. Oleh karena itu, teori ini merumuskan bahwa masyarakat adalah produk manusia, masyarakat adalah realitas objektif dan manusia adalah produk sosial. Dengan kata lain, manusia adalah produk dari masyarakat yang mereka ciptakan (Ritzer, 1988).

Berdasarkan teori konstruksi sosial tersebut, maka fenomena balita pendek (*stunting*) adalah fenomena yang diproduksi oleh *provider* kesehatan atas kenyataan yang ada di masyarakat Jember khususnya di Kecamatan Kalisat dan Jelbuk, karena data balita pendek dan gizi bermasalah di dua kecamatan tersebut menempati urutan pertama dan kedua di Kabupaten Jember. *Stunting* menurut standar kesehatan pertumbuhan balita adalah balita yang memiliki tinggi badan yang tidak sesuai standar normal berdasarkan usia balita (lihat Tabel 2), dan dianggap berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun kecerdasan anak (Kemenkes, 2010). Sementara itu, balita pendek yang dipahami oleh masyarakat Jember di perdesaan dan perkotaan adalah merupakan hal yang wajar, tidak terkait dengan masalah kesehatan anak sepanjang anak masih beraktivitas/bermain dan masih memiliki nafsu makan (lihat tabel 6). Pendek dianggap sebagai faktor keturunan dari orang tua yang bertubuh pendek.

Balita pendek (*stunting*) yang terjadi di wilayah perdesaan dan perkotaan Jember terjadi setelah bayi lahir dalam masa pertumbuhannya. Sekitar 7 dari 8 bayi lahir dengan berat dan tinggi badan yang normal. Namun dalam pertumbuhannya, 8 Balita tersebut mengalami *stunting*. Balita di wilayah Sucopangepok maupun Kalisat yang masuk dalam kategori pendek (*stunting*) dan gizi kurang, pada awalnya semua lahir normal dengan berat badan lahir antara 2.500 gram sampai dengan 3.800 gram, hanya 1 yang Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yaitu 2.300 gram. Namun, dalam pertumbuhannya, para balita tersebut mengalami kekurangan gizi. Hal ini terlihat pada pencatatan status gizi yang dilakukan oleh Posyandu. Setiap bulannya, tidak ada kenaikan berat badan dan/atau tidak ada penurunan berat badan yang disertai dengan gejala terinfeksi penyakit seperti diare dan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).

Beberapa penelitian terdahulu menemukan keterkaitan antara pertumbuhan tinggi badan dan perubahan perkembangan dalam usia 3 tahun pertama. Menurut penelitian Henningham dan Mc.Gregor (2009) di Guatemala dalam Wahdah (2012) dinyatakan bahwa perubahan tinggi badan pada usia 6-24 bulan disertai dengan perubahan perkembangan. Di Jamaika, anak-anak berusia 6-24 bulan yang mengalami *stunting*, dilihat perubahan tinggi badannya dan perubahan pada kemampuan intelektualnya selama 24 bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan tinggi badan pada tahun pertama dapat meramalkan perubahan intelektual pada tahun kedua, kendati sudah dilakukan kontrol terhadap perubahan tinggi badan dalam tahun kedua. *Stunting* yang terjadi dalam usia 36 bulan pertama biasanya disertai dengan efek jangka panjang (Wahdah, 2012).

Temuan kasus *stunting* di Jember ini sejalan dengan temuan pada penelitian Mahirawati *et al*, terkait konsumsi energi dan protein pada anak usia 7-23 bulan, dinyatakan

bahwa semakin bertambah umur anak, angka rerata dan tingkat konsumsi energi dan protein semakin rendah baik di perkotaan maupun di perdesaan. Dengan tidak adanya perbedaan antara rendahnya konsumsi energi dan protein di perdesaan maupun perkotaan, maka bisa dipastikan ada konstruksi sosial di balik kejadian balita pendek (*stunting*) (Mahirawati, 2007). Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Sudiman dan Menon *et al* bahwa balita *stunting* disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi keluarga, dan balita *stunting* banyak terjadi pada keluarga dengan tingkat sosial ekonomi rendah atau miskin (Sudiman, 2008) (Menon, Ruel, Morris, 2000), maka kasus balita pendek (*stunting*) di Jember tidaklah demikian. Keluarga dengan sosial ekonomi tinggi maupun rendah, di perdesaan maupun perkotaan sama-sama ditemukan kejadian balita pendek (*stunting*).

Penurunan gizi pada balita di Jember sebagian besar terjadi setelah bayi berusia 4 sampai dengan 6 bulan, yaitu ketika bayi sudah dikenalkan pada makanan pendamping ASI. Penurunan signifikan terjadi pada berat badan bayi sehingga bayi dan balita masuk dalam BGM. Hal ini sejalan dengan yang diungkap dalam pertemuan Bappenas bahwa periode emas untuk menghindari balita pendek (*stunting*) dan gizi bermasalah adalah 1.000 hari, pada saat kehamilan ibu dan 2 tahun setelah bayi lahir (Hadiat, 2013).

Konstruksi Sosial tentang Pola Asuh dan Pemenuhan Gizi Anak

Dalam kajian antropologi, setiap masyarakat akan mengembangkan pola perawatan dan pengasuhan anak dari sejak dalam kandungan. Hal itu merupakan bagian dari tahapan manusia dan oleh budaya kemudian dikelola dalam bentuk ritus. Oleh Arnold van Gennep dalam Koentjaraningrat, ritus itu disebut dengan *rites of passage* (Koentjaraningrat, 1979). Tidak saja dalam ritus sebagai bagian dari pemahaman sakral tentang setiap perjalanan manusia, tetapi dalam praktik-praktik keseharian anak

diasuh dan dirawat oleh keluarganya. Secara sosiologis, tidak selalu sama siapa yang bertanggung jawab terhadap perawatan dan pengasuhan, seperti dalam masyarakat Jawa, keterlibatan anggota kerabat luas termasuk di dalamnya (Geertz, 1985; Butt, 1998).

Lebih dari itu, secara teoretis, kualitas perawatan kehamilan hingga pada masa sesudahnya sebenarnya dipengaruhi oleh nilai anak pada masyarakat tersebut. Artinya, semakin bermakna keberadaan anak bagi keluarga, maka semakin cermat dalam melakukan perawatan selama kehamilan hingga anak berusia di atas lima tahun. Perawatan anak pada masa usia di bawah lima tahun dikenal dalam antropologi sebagai pola pengasuhan anak. Dalam sejumlah penelitian di Indonesia, karena nilai anak yang positif, pola pengasuhan tidak saja dilakukan oleh ibu biologis, tetapi oleh kerabat luas, seperti di Jawa (Geertz, 1985), di Trunyan Bali (Danandjaja, 1980), dan di Jakarta (Habsjah, 1995). Kondisi serupa juga dilakukan di Inggris, yang berbeda dengan di Perancis dengan adanya tempat penitipan anak. Perubahan pengasuhan dengan menyerahkan pada pengasuh atau lembaga penitipan anak (*caregiver*) juga terjadi di Amerika Serikat, khususnya wilayah perkotaan (Burchinal dan Nelson, 2000), begitu pula di Nigeria (Uyanga, 1980). Perubahan pola pengasuhan ini mempengaruhi dari kualitas hidup anak, seperti perawatan dan pemberian air susu, sebagaimana pada kasus di Nigeria (Uyanga, 1980), begitu pula pada kasus keluarga miskin di Jakarta, Indonesia (Habsjah, 1995). Selain perubahan pola pengasuhan, kualitas gizi anak balita ini tidak terlepas dari sejumlah faktor sosial budaya baik dari ibu atau keluarganya, antara lain adalah pengetahuan ibu tentang perawatan anak yang kurang akibat usia menikah terlalu muda, tingkat pendidikan ibu, ras dan etnis, serta ekspektasi budaya. Sejumlah hal tersebut yang mempengaruhi pola pengasuhan dan kualitas hidup anak dapat berakibat kematian dengan didahului oleh gizi buruk (Adetunji, 1995).

Demikian halnya dalam pola pengasuhan balita di Jember, pengetahuan yang didapatkan oleh ibu dari komunitas masyarakat dalam dan struktur sosialnya membuat ibu menjadikan pengetahuan tersebut sebagai suatu realitas yang subjektif. Apa yang dilihat sehari-hari dalam kehidupan ibu sejak masa kecil hingga mempunyai anak, keluarga dan budaya masyarakat turut berperan dalam perilaku ibu dalam memberikan pola asuh kepada balitanya. Termasuk wilayah geografis yang membedakan suatu wilayah itu sebagai sebuah perdesaan atau perkotaan juga membentuk pengetahuan yang adaptif terhadap kondisi wilayah dan keterbatasan-keterbatasan yang ada atas akses dan pemenuhan akan kebutuhan.

Pengetahuan mengenai pola pengasuhan anak dipelajari oleh ibu dari kehidupannya sehari-hari dengan cara berinteraksi dengan sekitar. Masyarakat Desa Sucopangepok dan Kalisat Kabupaten Jember merupakan tipikal masyarakat *Pendalungan* yang sebagian besar menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa sehari-harinya. Namun mereka tidak mengidentifikasikan diri mereka sebagai orang Madura melainkan sebagai orang Jember, lebih spesifik lagi sebagai orang Desa Sucopangepok dan orang Desa Kalisat.

Jember sebagai tempat pertemuan dua kebudayaan yaitu budaya Jawa dan Madura, melebur menjadi satu saling memberi pengaruh, menjadi budaya *Pendalungan*. Konsep *Pendalungan* adalah merupakan konsep yang muncul karena adanya percampuran budaya antar etnis Jawa dan etnis Madura di Wilayah Jawa Timur. *Pendalungan* berasal dari kata “*dalung*” yang berarti dulang besar terbuat dari logam. Secara simbolik memiliki arti yang menggambarkan suatu wilayah yang menampung beragam kelompok etnis dengan latar belakang budaya yang berbeda, yang melahirkan percampuran (hibridisasi) budaya (Yuswadi, 2008).

Penelitian J.M. Clendon (2009) menggambarkan bagaimana proses perempuan menjadi seorang ibu dan konstruksi apa yang

dibangunnya. Dengan pendekatan sejarah sosial, ia mencermati buku *The Well Child/Tamariki Oral Health Book (the Plunket book)*¹ yang mencatat perkembangan dan pertumbuhan mulai dari sejak lahir hingga usia lima tahun. Ia mewawancarai 34 wanita dan seorang laki-laki. Dari wawancaranya, buku ini mampu mencermati pembentukan identitas diri sebagai perempuan dan ibu dari generasi ke generasi, sekaligus menginformasikan tentang pengetahuan mereka, peran sosial dalam perawatan dan pengasuhan anak dari generasi ke generasi, serta hubungan sosial antara ibu dan bidan/perawat (*nurse*). Dalam pengasuhan dan perawatan anak (*mothering*), diketahui ada empat tahapan, yaitu: (1) proses menjadi ibu (*becoming a mother*), (2) merawat dan mengasuh anak (*mothering a child*), (3) merawat dan mengasuh orang dewasa (*mothering an adult*), (4) merawat dan membimbing seorang ibu (*mothering a mother*) (Clendon, 2009).

Tingkat pendidikan ibu di Jember membawa pengaruh pada pengetahuan ibu dalam mengasuh anak. Pendidikan ibu di perdesaan lebih rendah daripada di perkotaan Jember. Di desa tingkat pendidikan yang terbanyak adalah tidak tamat SD dan SMP, sedang di perkotaan tamat SMP dan SMA. Berdasar jumlah kasus gizi buruk dan *stunting* di wilayah perkotaan Jember lebih banyak, dikarenakan jumlah penduduknya lebih padat daripada di desa. Bukan berarti tingkat pengetahuan mereka berbeda, namun secara kebetulan penelitian di Jember ini menemukan kemiripan pemahaman atas apa yang dianggap paling bernilai dalam kehidupan mereka, yaitu kepemilikan atas modal ekonomi. Hal ini berdampak pada orientasi utama dalam kehidupan mereka adalah apa yang terlihat secara fisik nyata, seperti rumah tembok berkeramik, perhiasan, mebel dan lemari pajangan, yang dianggap sebagai investasi jangka panjang dan kebanggaan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kecukupan gizi anak balitanya.

¹ Di Indonesia, dikenal dengan buku sehat yang diberikan pada ibu-ibu balita untuk penimbangan di posyandu.

Pola pengasuhan di lingkup keluarga juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang balita. Lingkup keluarga adalah keluarga luas, di mana di perdesaan Jember umumnya setelah menikah mereka tinggal di lingkungan kerabat perempuan, sedangkan di perkotaan kecenderungan keluarga setelah menikah tinggal di lingkungan kerabat laki-laki. Dengan kondisi seperti ini anak bisa diasuh oleh beberapa orang di lingkup keluarganya itu. Lingkungan tinggal yang berbeda setelah menikah antara daerah perdesaan dan perkotaan ini ternyata membawa sebab tidak langsung pada pola pengasuhan balita. Pada ibu yang tinggal di keluarga perempuan (orang tua dan saudara sendiri), pengasuhan balita bisa dilakukan bersama-sama. Ada *supporting system* bagi ibu dari keluarganya dalam pola pengasuhan balita, sedangkan di wilayah perkotaan, ibu tinggal di keluarga suami, sehingga dalam berbagai situasi pengasuhan sering kali lebih diputuskan sendiri.

Selain itu, relasi suami dan istri terlihat tidak setara di Jember. Anak hanya urusan ibu semata, sehingga pola pengasuhan tertumpu pada seorang ibu. Bagi suami, anak merupakan penghibur dan pereda lelah saat mereka pulang kerja. Selain itu, anak juga menjadi alasan untuk giat bekerja, sedangkan ibu mengurus segala kebutuhan dalam seluruh rumah tangga. Keluarga luas hanya sesekali membantu, namun kewajiban sepenuhnya atas pengasuhan anak berada di tangan ibu. Di Jember baik di perdesaan maupun perkotaan, selain berperan mengurus anak, ibu juga mengurus hewan ternak Sapi yang menjadi modal ekonomi keluarga. Ibu juga berperan dalam mengurus kebun dan/atau sawah, atau sebagai buruh penggarap kebun/sawah milik orang lain. Demikian halnya dengan ternak, ada yang punya sendiri, ada juga yang milik orang lain yang dititipkan dengan cara bagi hasil apabila peliharaan tersebut beranak.

Konstruksi sosial yang membentuk pemahaman ibu terkait pemberian ASI atau susu formula di Jember juga unik. Baik ibu

yang bisa memberikan ASI kepada anaknya maupun ibu yang memiliki ASI sedikit, sama-sama menganggap bahwa susu formula dengan harga yang mahal masih lebih baik daripada ASI. Pandangan bayi masih lapar sehingga diperlukan tambahan susu formula juga terjadi di Jember. Pembahasan dikaitkan dengan temuan R.J. Wilma Hewat (1998) yang mencermati tentang proses pemberian ASI dan permasalahannya. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan membandingkan dua kelompok ibu bermasalah dan tidak bermasalah dalam hal menyusui, ia menyimpulkan bahwa ada sejumlah faktor penyebab gangguan atau masalah dalam proses menyusui. Faktor psikologis ibu dari waktu hamil hingga melahirkan turut berpengaruh dalam hubungan emosional ketika menyusui. Faktor lain adalah berkaitan dengan pola kebutuhan asupan ASI dari bayi yang berbeda dengan segala perilaku menyusui ibu berakibat pada hubungan disharmoni antara ibu dan bayi. Selain itu, faktor ekonomi juga berpengaruh pada kemampuan menyusui ibu (Hewat, 1998).

Dari segi pengetahuan gizi balita, di perdesaan pengetahuan bahwa bayi atau balita mereka memiliki gizi bermasalah bisa diterima oleh ibu dan anggota keluarga yang lain. Namun, pengetahuan mengenai makanan sehat untuk bayinya tidak bisa masuk dalam koridor nilai yang dianggap berharga oleh mereka. Balita mereka makan apa yang mereka makan tanpa memperhitungkan asupan gizi yang masuk. Sementara itu, di wilayah perkotaan, pengetahuan bahwa bayi mereka mengalami gizi bermasalah mengalami penolakan (resistensi) akan keadaan sebenarnya balita. Balita dianggap sehat apabila makan dengan lahap, minta jajanan terus, dan beraktifitas main seperti balita yang lain. Namun, dalam penilaian bidan/Puskesmas, balita tersebut mengalami masalah gizi dengan ditandai oleh balita sering sakit dan pertumbuhan berat badan dan tinggi badan yang tidak sesuai dengan umurnya.

Selain asupan yang kurang, kejadian anak balita sering sakit juga menjadi penyebab terjadinya gangguan pertumbuhan. Sanitasi lingkungan yang buruk mempengaruhi tumbuh kembang anak melalui peningkatan kerawanan anak terhadap penyakit infeksi. Anak yang sering sakit akibat rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan kronis dan berdampak anak menjadi pendek. Temuan ini diperkuat dengan penelitian Purnamasari (2012) terhadap perawatan anak balita di daerah tempat pembuangan akhir menggunakan pendekatan teori konstruksi sosial. Pada penelitian tersebut mencari jawaban atas dua pertanyaan, yaitu makna PHBS dalam perawatan balita pada keluarga pemulung, dan bentuk perilaku perawatan kesehatan balita pada keluarga pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa makna PHBS dalam perawatan balita pada keluarga pemulung, keluarga pemulung dalam PHBS tidak terlalu mengkhawatirkan kondisi kesehatan anak balita mereka (Purnamasari, 2012).

Penutup Simpulan

Kejadian gizi buruk pada balita sebagai suatu fenomena kesehatan bukan merupakan akibat yang berdiri sendiri dan bukan hanya urusan kesehatan saja. Dengan dipaparkannya pemetaan konstruksi sosial dari suatu masyarakat perdesaan dan perkotaan terkait erat dengan fenomena kejadian balita pendek dan kurang gizi, maka masalah yang sebenarnya yang menjadi penyebab mengapa terjadi gizi buruk balita dan balita pendek diketemukan. Bukan karena minimnya anggaran, kurangnya tenaga kesehatan, dan program-program terkait, namun lebih pada berbedanya komunikasi dan pemaknaan dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan (bidan desa, tenaga Puskesmas dan dinas kesehatan), dengan yang ada di masyarakat. Konstruksi sosial yang dibangun juga

berbeda, sehingga tidak ada titik temu untuk keberhasilan program peningkatan gizi balita.

Bukan masalah perilaku positif atau negatif terhadap pengetahuan kesehatan anak, ini semua terkait dengan harga diri dan identitas kelompok masyarakat yang terus berproses, dalam hal ini masyarakat Jember, khususnya masyarakat Desa Sucopangepok dan Desa Kalisat. Apabila penyelenggara pelayanan kesehatan (bidan desa, tenaga Puskesmas dan dinas kesehatan) selalu memandang perilaku hanya dari segi “yang positif untuk kesehatan harus diteruskan dan yang negatif harus dihentikan”, tanpa memandang karakteristik dari masyarakat penganut nilai budaya tertentu berinteraksi dengan sekitarnya dan kenyataan hidup mereka sehari-hari, maka permasalahan gizi buruk, balita pendek (*stunting*) dan permasalahan kesehatan pada umumnya, tidak akan pernah bisa diselesaikan meskipun banyak program dan anggaran yang digelontorkan untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut. Masyarakat bukan hanya semata sebagai suatu gejala penyakit yang harus diobati penyebabnya lalu selesai, tetapi masyarakat adalah produk dari pengetahuan yang berproses, berinteraksi dengan sesamanya, dan bernegosiasi untuk menentukan objektivitas dalam makna-makna yang subjektif (yang berbeda-beda pemahaman dari individu-individu anggota masyarakat) sehingga memunculkan suatu kesadaran bersama.

Saran

Pemetaan konstruksi sosial masyarakat terkait fenomena balita pendek (*stunting*) telah diketahui yaitu anak pendek dianggap bukan sebagai masalah gizi balita, maka bagi pengampu kepentingan terkait program perbaikan gizi balita dan lintas sektor diharapkan program penyuluhan bisa lebih tepat guna dengan menyasar pada konsep yang dianggap berharga oleh suatu masyarakat. Apa yang dianggap berharga dalam suatu komunitas

akan menjadi sangat penting dalam pendekatan terhadap masyarakat itu untuk mengubah pengetahuan secara internal budayanya.

Yang perlu dibangun adalah membentuk konstruksi masyarakat yang berubah terkait hubungan intersubjek (antar masyarakat dan penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat) dalam membentuk pengetahuan baru seperti bahwa dengan memberikan pemahaman terkait tumbuh kembang anak berdasar pengetahuan kesehatan adalah investasi yang baik pada anak sesuai nilai yang berkembang di masyarakat, termasuk bahwa anak pendek (*stunting*) juga sebagai suatu masalah kesehatan di masa depan anak. Tenaga kesehatan juga harus membangun kedekatan dan *trust* dengan masyarakat, yang dalam hal ini sudah mulai berproses menuju kesana. Perlu pula menegosiasikan pengetahuan baru, di mana kesehatan anak merupakan konstruksi mereka dalam memandang yang dianggap bernilai dalam investasi mereka di masa mendatang. Bukan sekedar pengetahuan dari luar yang akan menyetigma komunitas mereka, bahwa pengetahuan ini sudah ada dalam struktur bangunan pengetahuan mereka sendiri. Pendekatan humanis yang mengedepankan empati kepada masyarakat itu sendiri lebih dibutuhkan untuk mengubah perilaku dan pengetahuan masyarakat akan hidup bersih dan sehat. Pengetahuan medis modern yang diakui sebagai pengetahuan lokal yang terkonstruksi dalam pengetahuan masyarakatnya sendiri, akan lebih mudah diterima daripada harus mempertentangkan pengetahuan medis modern yang dianggap positif terhadap kesehatan dengan pengetahuan lokal masyarakat yang dianggap negatif terhadap perbaikan kesehatan, gizi balita pada khususnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Seksi Informasi dan Penelitian Pengembangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan

Kabupaten Jember, Kepala Puskesmas Kecamatan Jelbuk dan Kecamatan Kalisat beserta seluruh jajarannya, Warga Masyarakat Desa Sucopangepok dan Desa Kalisat dan Tim peneliti dengan kerja kerasnya sehingga penelitian ini bisa berjalan dengan lancar. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada rekan dan kawan kami almarhum Dr. Moch. Setyo Pramono, S.Si., M.Si., atas jasa beliau penelitian ini bisa terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Butt, Leslie. 1998. *The Social and Political Life of Infants among the Baliem Valley Dani, Irian Jaya. Dissertation.* Montreal: McGill University.
- Cockerham, William C. 1978. *Medical Sociology.* Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Craib, Ian. 1986. *Teori-teori Sosial Modern. Dari Parsons sampai Habermas.* Terjemahan oleh Paul S. Baut dan T. Effendi. Jakarta: Rajawali.
- Danandjaja, James. 1980. *Kebudayaan Petani Desa Trunyan di Bali.* Jakarta: Pustaka Jaya.
- Foster, G.M., dan B.G. Anderson. 1986. *Antropologi Kesehatan.* Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Geertz, Hildred. 1985. *Keluarga Jawa.* Jakarta: Grafiti Press.
- Habsjah, Atashendartini. 1995. "Sekelumit Kehidupan Kaum Perempuan Beserta Anaknya di Beberapa RT Kumuh" Jakarta dalam T.O. Ihromi. *Kajian Wanita dalam Pembangunan.* Jakarta: YOI.
- Koentjaraningrat. 1979. *Pengantar Ilmu Antropologi.* Jakarta : Rineka Cipta.
- Noack, H. 1987. *Concepts of health and health promotion. In: Abelin, T. et al., ed. Measurement in health promotion and protection.* Copenhagen, WHO Regional Office for Europe (WHO Regional Publications, European Series, No. 22).
- Peter L. Berger & Luckman, Thomas. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan.* Jakarta: LP3S.
- Ritzer, George. 1988. *Contemporary Sociological Theory.* New York: Alfred A. Knopf.
- Uyanga, Joseph T. 1980. *A Geography of Rural Development in Nigeria.* University Press of America.
- Yuswadi H, 2008. "Budaya Pendalungan: Bentuk Multikulturalitas dan Hibridisasi Budaya Antar Etnik" dalam Ayu Sutarto dan Setya Yuwana Sudikan, ed., *Pemetaan Kebudayaan di Provinsi Jawa Timur Sebuah Upaya Pencarian Nilai-Nilai Positif* (p. 53-69), Biro Mental Spiritual Pemerintah Provinsi Jawa Timur Bekerja sama dengan Kompyawisda Jawa Timur, Jember.

Dokumen

- Kementerian Kesehatan RI. 2010. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak, Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.

Jurnal

- Adetunji, Jacob Ayo. 1995. "Infant Mortality and Mother's Education in Ondo State, Nigeria." *Social Science Medicine.* Vol. 40. No. 2.
- Burchinal, Margaret R., dan Lauren Nelson. 2000. "Family Selection and Child Care Experiences: Implications for Studies of Child Outcomes." *Early Childhood Research Quarterly,* Vol. 15, No. 3.
- Menon, Purnima; Ruel, Marie T.; Morris, Saul Sutkover. 2000. Socioeconomic "Differentials in Child Stunting Are Consistently Larger in Urban Than Rural Areas: Analysis of 10 DHS Data Sets." *Food and Nutrition Bulletin,* 21(3): 282-289.
- Sudiman, H. 2008. "Stunting atau Pendek : Awal Perubahan Patologis atau Adaptasi karena Perubahan Sosial Ekonomi yang Berkepanjangan?." *Media Litbang Kesehatan;* 18(1): 33-43.

Laporan

Departemen Kesehatan RI: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 2008. Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar 2007, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI. Jakarta.

Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur. 2011. Profil Kesehatan Propinsi Jawa Timur. Surabaya.

Kementerian Kesehatan RI: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 2010. Riset Kesehatan Dasar 2010, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 2013. Riset Kesehatan Dasar 2013, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.

Mahirawati, Vita K, et al. 2007. Konsumsi Energi Dan Protein Anak Umur 7 – 23 Bulan di Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia. Laporan Penelitian Puslitbang Gizi Dan Makanan 2007 Badan Litbang Kesehatan, Kemkes. RI. Bogor.

Puskesmas Kecamatan Jelbug. 2013. *Profil Puskesmas Kecamatan Jelbug 2013*. Jember.

Puskesmas Kecamatan Kalisat. 2013. *Profil Puskesmas Kecamatan Kalisat 2013*. Jember.

Skripsi/Thesis/Disertasi

Clendon, Jillian Margaret 2009. *Motherhood and the "Plunket Book": A Social History*. *Dissertation*. Auckland, NZ: Massey University.

Hewat, Roberta Jean Wilma.1998. "Mother-Infant Interaction During Breastfeeding. A Comparison between Problematic and Nonproblematic Breastfeeders." *Dissertation*. Edmonton, Alberta: Alberta University.

Purnamasari, Y. 2012, "Makna PHBS dalam Perawatan Balita pada Keluarga Pemulung (Studi Tentang Makna Perilaku Hidup Bersih Sehat dalam perawatan kesehatan Balita pada keluarga pemulung TPA Benowo Surabaya)," *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Wahdah, Siti. 2012. "Faktor Risiko Kejadian Stunting Pada Anak Umur 6-36 Bulan di Wilayah Pedalaman Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat." *Tesis*. Yogyakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada.

Surat Kabar

"42 Persen Anak Jatim Terancam Pendek". Jawa Pos 20 Januari 2012. Surabaya.

Lain-lain

Hadiat. 2013. "Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Peraturan Presiden RI No. 42 Tahun 2013)", Paparan Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Disampaikan Pada Talkshow Gerakan Nasional 1000 HPK Jakarta, 18-20 Oktober 2013.

PENGARUH KUALITAS LINGKUNGAN TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DI PROVINSI BANTEN

*Effect of Environmental Quality to Fulfillment of Basic Needs
in Banten Province*

Anih Sri Suryani

anih.suryani@dpr.go.id
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta

Naskah Diterima: 14 Februari 2017 | Naskah direvisi: 20 April 2018 | Naskah diterbitkan: 30 Juni 2018

Abstract: *The quality of the environment and people's basic needs are always a concern and need to be gradually improved. This study aims to measure the effect of environmental quality on the fulfillment of basic needs. Mixed methods of Quantitative (with questionnaires) and qualitative (by interview) are conducted in data collection and analysis. The results showed that all environmental quality indexes were correlated with the fulfillment of basic needs, except for the biodiversity index. The correlation test found that all environmental quality index have positive effect on the fulfillment of basic needs. It means that the increasing quality of air, water, land cover, biodiversity, public and environmental health will also increase the fulfillment of people's basic needs, and vice versa. The air quality index and land cover have the largest constants among the other indices. Thus, an increase of that value will have a greater impact on the increase in basic compliance, and vice versa.*

Keywords: *Environmental quality, environmental health, basic needs*

Abstrak: Kualitas lingkungan dan kebutuhan dasar masyarakat selama ini merupakan hal yang menjadi perhatian dan perlu terus ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh kualitas lingkungan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Metode gabungan kuantitatif (dengan penyebaran kuesioner) dan kualitatif (dengan wawancara) dilakukan dalam pengumpulan dan analisis data. Hasil penelitian di Provinsi Banten menunjukkan bahwa semua indeks kualitas lingkungan berkorelasi dengan pemenuhan kebutuhan dasar, kecuali indeks keanekaragaman hayati. Berdasarkan uji korelasi didapatkan bahwa semua indeks kualitas lingkungan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini berarti, apabila terjadi kenaikan kualitas udara, kualitas air, tutupan lahan, keanekaragaman hayati, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan maka pemenuhan kebutuhan dasar akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Indeks kualitas udara dan tutupan lahan mempunyai konstanta yang paling besar diantara indeks lainnya. Dengan demikian, kenaikan dari nilai tersebut akan berdampak lebih

besar pada kenaikan pemenuhan dasar, demikian juga sebaliknya.

Kata kunci: kualitas lingkungan, kesehatan lingkungan, kebutuhan dasar

Pendahuluan

Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Kualitas lingkungan dicirikan antara lain dari suasana yang membuat orang merasa betah atau kerasan tinggal di tempatnya sendiri. Lingkungan hidup yang baik dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang.¹

Sementara itu, berbagai keperluan hidup terpenuhi dari kebutuhan dasar atau primer, meliputi makan, minum, perumahan, sampai kebutuhan rohani atau spiritual meliputi pendidikan, rasa aman, dan sarana ibadah. Sebagaimana Pasal 28C Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Suryani, 2017).

Pembangunan di Indonesia berhasil meningkatkan pendapatan nasional, akan tetapi keadaan ini mulai menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Jika pencemaran dan kerusakan terus berlangsung, terbuka kemungkinan rusaknya lingkungan hidup. Kondisi sekarang menunjukkan telah terjadi penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan yang cukup signifikan (Palupi, 2014). Selama ini, penilaian secara kuantitatif kualitas lingkungan hidup di Indonesia dapat didasarkan pada pedoman yang ada, yaitu laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia yang

diterbitkan setiap tahun. Dalam laporan ini kualitas lingkungan hidup diindikasikan dengan tiga (3) kriteria, yaitu yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Kualitas Tutupan Hutan/Lahan (IKTL).

Berdasarkan Penghitungan IKLH Tahun 2016, Indeks kualitas lingkungan hidup nasional menunjukkan penurunan sebesar 2,50 poin dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu dari 68,23 menjadi 65,73. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan nilai IKA sebesar 5,48 dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu dari 65,86 menjadi 60,38. Disamping itu juga terjadi penurunan nilai IKU sebesar 2,23 poin dibandingkan tahun 2015, yaitu dari 83,84 menjadi 81,61. Nilai IKTL juga mengalami sedikit penurunan sebesar 0,47 poin dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu dari 58,30 menjadi 57,83. Porsi penurunan nilai IKLH dari setiap komponen adalah 66% IKA, 27% IKU dan 7% IKTL (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016).

Berdasarkan laporan IKLH Tahun 2016 tersebut, penurunan nilai IKA Nasional yang cukup signifikan ini paling besar merupakan kontribusi dari Provinsi Jawa Barat (77,95%). Provinsi lain yang berkontribusi terhadap penurunan nilai IKA adalah Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Maluku. Sementara itu, ada beberapa provinsi yang berkontribusi menahan laju penurunan IKA atau memiliki nilai IKA yang lebih baik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu secara berturut-turut dimulai yang paling besar kontribusinya adalah Kalimantan Tengah, Banten, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016).

IKLH untuk setiap provinsi yang selama ini disusun mempunyai disparitas yang cukup tinggi. Berdasarkan data IKLH tahun 2016, IKLH tertinggi dimiliki oleh Provinsi Papua Barat yakni sebesar 83,01. Sedangkan IKLH terendah adalah DKI Jakarta yakni sebesar 36,69. Lima provinsi dengan IKLH tertinggi setelah Papua Barat adalah Papua, Kalimantan

¹ "Hak atas Lingkungan yang Baik dan Sehat," http://www.academia.edu/9614003/hak_atas_lingkungan_yang_baik_dan_sehat, diakses 2 Februari 2018.

Timur, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah dan Aceh. Sedangkan provinsi dengan IKLH terendah setelah DKI Jakarta adalah DI Yogyakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan Riau (Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016).

Adanya disparitas IKLH antara provinsi yang sangat besar dengan faktor utama penyebabnya adalah perbedaan luas tutupan lahan/hutan merupakan salah satu contoh adanya bias dalam penyusunan indeks kualitas lingkungan. Di mana tutupan lahan mempunyai bobot 40%, lebih besar dari bobot pencemaran udara (30%) dan pencemaran air (30%). Berdasarkan perhitungan IKLH tahun 2016, semua provinsi di Pulau Jawa mempunyai IKLH lebih kecil dari IKLH rata-rata nasional (65,73). Penyebab utamanya adalah rendahnya indeks tutupan hutan di provinsi tersebut. Sementara itu, IKLH di Wilayah Timur seperti Papua, Papua Barat dan Maluku Utara memiliki indeks IKLH tertinggi di Indonesia, karena indeks tutupan hutannya tinggi.²

Dengan demikian, yang menjadi renungan selanjutnya adalah: apakah IKLH tersebut benar-benar menggambarkan kualitas lingkungan sesungguhnya di suatu wilayah? Jika dikatakan IKLH di Pulau Jawa rendah, namun pembangunan dari aspek lingkungan yang lain cukup baik di sini. Misalnya proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi dasar di beberapa provinsi di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di Papua (Capaian MDGS 2015, Bappenas). Demikian juga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mempunyai indeks yang tinggi di Provinsi DKI Jakarta, Bali, dan DI Yogyakarta. Sementara itu, Provinsi Papua, Aceh dan NTT mempunyai indeks PHBS terendah di Indonesia (Riskesdas 2013) Perbedaan penilaian terhadap gambaran kondisi lingkungan tersebut disinyalir terjadi karena IKLH yang selama ini disusun belum memasukkan beberapa indikator penting dalam lingkungan hidup. Indikator-indikator tersebut antara lain: keanekaragaman hayati,

kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan. Pengabaian aspek-aspek tersebut akan memberikan pemahaman yang bias terhadap kualitas lingkungan hidup yang sesungguhnya (Yuwono, 2016).

Lebih lanjut lagi, sebuah kajian mengungkapkan bahwa tidak terdapat hubungan antara IKLH dengan derajat kesejahteraan sosial (dalam kajian tersebut ditunjukkan oleh besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)). Antara keduanya tidak terdapat hubungan yang jelas (koefisien determinasinya yang sangat kecil). Beberapa provinsi dengan IKLH yang tinggi justru mempunyai PDRB yang rendah, misalnya Provinsi Gorontalo, Maluku Utara dan Maluku. Begitu juga sebaliknya, beberapa provinsi dengan PDRB tinggi mempunyai IKLH yang rendah, misalnya Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Timur (Fauzi dkk. 2013).

Kemitraan *partnership* juga pernah melakukan pengukuran terhadap keterkaitan antara investasi, lingkungan hidup, dan pembangunan sumber daya manusia melalui pengukuran *Indonesia Governance Index* (IGI) yang memfokuskan pada performa pemerintah daerah. Kemitraan menyimpulkan bahwa provinsi dengan investasi tinggi tidak selalu menganggarkan pemeliharaan lingkungan secara proporsional. Misalnya data IGI menunjukkan nilai investasi Provinsi Jawa Barat merupakan yang tertinggi dari 32 provinsi yang ada di Indonesia, dengan indeks 9,33 namun kondisi lingkungannya berada pada ranking yang rendah (Gismar dkk. 2003. dalam Qodriyatun, 2016).

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa IKLH yang ada disinyalir belum menggambarkan secara menyeluruh kondisi kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah termasuk keanekaragaman hayati, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Demikian juga IKLH belum dapat menggambarkan keterkaitannya dengan derajat kesejahteraan sosial masyarakat khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, perlu ditambahkan indikator kualitas lingkungan hidup termasuk keanekaragaman hayati,

² *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2014*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 2015.

kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Indikator tersebut diharapkan dapat menggambarkan kondisi lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pemenuhan unsur ekologis, kebutuhan dasar manusia akan kesehatan dan lingkungan yang bersih, serta membangun wilayah/tempat/bangunan yang memungkinkan warga negara dan masyarakat untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidup mereka, dan menciptakan kondisi untuk semua individu untuk mencapai potensi penuh mereka.

Berdasarkan permasalahan tersebut, yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah: bagaimana persepsi masyarakat dalam menilai pengaruh kualitas lingkungan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar? Maksud dari penelitian ini adalah untuk menelaah pengaruh IKLH dengan mempertimbangkan dan menghitung ulang IKLH dengan beberapa indikator tambahan yakni: keanekaragaman hayati, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Adapun tujuan penelitian ini selain sebagai sarana untuk mengevaluasi efektivitas program-program pengelolaan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan, juga diharapkan dapat membantu perumusan kebijakan khususnya bidang lingkungan, membantu dalam mendesain program lingkungan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan sosial, serta mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengan kondisi lingkungan. Hasil kajian diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengukur dua keberhasilan sekaligus, yakni program-program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kebijakan/program dalam pengelolaan lingkungan.

Daerah yang dipilih dalam penelitian kali ini adalah Provinsi Banten. IKLH Provinsi Banten pada tahun 2016 adalah sebesar 60,00. Angka tersebut berada pada posisi 10 terendah dalam skala nasional. Apabila dilihat dari korelasi antara IKLH tahun 2012 dengan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup per provinsi, maka Provinsi Banten berada pada kuadran III

(kapasitas rendah, kualitas lingkungan hidup juga rendah). Penelitian di Provinsi Banten dilakukan pada tanggal 2 s.d. 8 Mei 2017 yang merupakan penelitian kelompok dengan tema Telaah Terhadap Indikator Kesejahteraan Sosial dalam Bidang Lingkungan.

Penelitian ini menggabungkan dua desain (*mixed method*), yaitu eksplanasi (*explanatory research*) dan penelitian deskriptif (*descriptive research*). Objek telaahan penelitian eksplanasi adalah menguji hubungan antar-variabel yang dihipotesiskan kuantitatif dan kualitatif, sedangkan objek telaah penelitian deskriptif adalah eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti yakni kondisi lingkungan hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat dalam hal ini yang meliputi aspek pemenuhan kebutuhan dasar.

Kuantifikasi terhadap berbagai indikator lingkungan beserta parameter-parameternya dilakukan untuk menghitung indeks kualitas lingkungan versi baru. Indeks kualitas lingkungan versi baru ini dianggap lebih komprehensif dan dianggap relevan dengan derajat kesejahteraan sosial khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan kualitas lingkungan yang lebih baik.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari data-data sekunder bidang lingkungan dan kesehatan dari dokumen terkait di lokasi penelitian, wawancara dan penyebaran kuesioner. Data eksisting bidang lingkungan dan kesehatan digunakan sebagai input untuk menghitung indeks kualitas lingkungan versi baru. Pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara dengan *stakeholder* khususnya *stakeholder* di bidang lingkungan, kesehatan, dan sosial untuk menggali lebih jauh gambaran kualitas lingkungan dan derajat kesejahteraan masyarakat di lokasi penelitian. Informan pada penelitian ini antara lain: instansi terkait di lokasi penelitian (Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Sosial) serta institusi lainnya

Tabel 1. Variabel Dimensi dan Indikator Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Item Pertanyaan
<i>Variabel X</i> Indeks Kualitas Lingkungan	Kualitas Udara	SO ₂	1, 2
		NO ₂	
	Kualitas Air	TSS (<i>Total Suspended Solid</i>)	3, 4, 5, 6
		DO (<i>Dissolved Oxygen</i>)	
		COD (<i>Chemical Oxygen Demand</i>)	
	Tutupan Lahan/Hutan	luas hutan primer (LHP)	7,8
		luas hutan sekunder (LHS)	
	Keanekaragaman Hayati	Flora	9, 11
		Fauna	10, 12
	Kesehatan Masyarakat	Mortalitas	13, 14, 15, 16, 17, 18
Morbiditas			
Kesehatan Lingkungan	Akses terhadap air bersih	19	
	Rumah sehat	20	
	Sanitasi dasar	21	
Materi	Pangan	1.A	
	Sandang	1.B	
	Papan	1.C	
Fisik	Sarana prasarana kesehatan	2.A	
	Tenaga Kesehatan	2.B	
	Lingkungan yang bersih	2.C	
	Kemudahan akses terhadap air bersih	2.D	
	Ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana untuk pengelolaan sampah	2.E	
Pemenuhan kebutuhan dasar	Perasaan aman	3.A	
	Kesempatan pendidikan dasar dan menengah	3.B	
	Mental	Kesempatan pendidikan dasar dan menengah	3.C
		Perasaan bahagia	3.D
Spiritual	Kekebasan beragama	4.A	
	Kesempatan aktualisasi diri	4.B	
	Kehidupan sosial	4.C	

seperti: unsur LSM, akademisi, atau organisasi non-pemerintah lainnya yang terkait.

Teknik pengumpulan data lainnya yang dilakukan adalah penyebaran kuesioner kepada responden yang terdiri dari masyarakat di lokasi penelitian. Tujuan penyebaran kuesioner ini adalah untuk mendapat gambaran persepsi masyarakat terkait kualitas lingkungan yang ada di daerahnya yang meliputi indikator-indikator yang dikaji dalam IKLH versi baru. Selain itu kuesioner akan menggali persepsi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan dasar yang selama ini dirasakan. Aspek-aspek yang ditinjau dalam pemenuhan kebutuhan dasar baik itu secara materi (sandang, pangan, dan papan), secara fisik (kesehatan, lingkungan yang bersih, termasuk air bersih), secara mental (seperti rasa aman, indeks

kebahagiaan, dan pendidikan), dan secara spiritual (terpenuhinya kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dan hidup bersosial).

Persepsi masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup dengan indikator dan parameter yang baru dan hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar ditelaah dengan menyebarkan kuesioner kepada responden di lokasi penelitian.

Secara operasional, perlu didefinisikan variabel yang bertujuan untuk menjelaskan makna variabel penelitian. Singarimbun (1987:23) mendefinisikan operasional sebagai unsur penelitian yang memberikan petunjuk bagaimana variabel itu diukur. Variabel harus didefinisikan secara operasional, agar lebih mudah ditemukan hubungan antara satu variabel dengan lainnya dan pengukurannya.

Dalam penelitian ini, variabel bebas (variabel

X) merupakan indeks kualitas lingkungan dan variabel tidak bebas (variabel Y) adalah pemenuhan dasar yang terdiri dari beberapa dimensi dan diturunkan lagi dalam beberapa indikator (lihat Tabel 1).

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Nonprobability Sampling*, di mana tidak semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian. Adapun populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Responden diasumsikan masyarakat yang paham dan dapat menggambarkan persepsi mereka terkait kualitas lingkungan dan pemenuhan kebutuhan dasar di daerahnya. Dengan demikian, pegawai pemerintahan pada dinas di instansi terkait, LSM, akademisi, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat yang paham akan kondisi lingkungan dan kesejahteraan merupakan populasi pada penelitian ini.

Di mana sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Oleh karena itu, sampel yang akan diambil dari populasi harus betul-betul representatif (dapat mewakili). Agar hasil penelitian yang dilakukan terhadap sampel masih tetap dapat dipercaya, atau masih dapat mewakili karakteristik populasi, maka penarikan sampel harus dilakukan secara seksama.

Teknik yang digunakan dalam sampling penelitian ini adalah *incidental sample* atau *accidental sampling*, di mana pemilihan partisipan didasarkan pada ketersediaan atau kemudahan mengakses populasi partisipan (Kumar, 1999). Sampel dipilih berdasarkan karakteristik yang paling mendekati dan mudah didapat (Guilford & Fruncher, 1978). Kelemahan teknik ini adalah hasil yang diperoleh tidak dapat digeneralisir pada populasi secara keseluruhan, dan orang yang paling mudah dijangkau mungkin tidak benar-benar representatif untuk populasi (Kumar, 1999).

Jumlah partisipan penelitian yang direncanakan dalam penelitian ini adalah

minimal 30 orang. Menurut Guilford dan Frucher (1978) pengambilan jumlah sampel yang baik untuk suatu penelitian adalah setidaknya 30 orang, sehingga data dapat dianalisis secara statistik dengan menggunakan distribusi normal. Selain itu, jumlah sampel yang semakin besar dapat mengurangi varian eror dalam uji statistik, sehingga hasil yang diperoleh akan semakin akurat dibandingkan penelitian dengan jumlah sampel yang sedikit.

Sebagaimana sudah dijelaskan pada desain penelitian, teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah melalui: kuesioner, wawancara, dan studi dokumentasi (untuk menghitung IKLH versi baru). Kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan suatu rangkaian pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban yang mempunyai skala dari para responden (orang-orang yang menjawab). Adapun skala yang digunakan adalah skala likert. Tentang format skala likert tersebut, J. Supranto (1997) menjelaskan sebagai berikut:

”Untuk memungkinkan para responden menjawab dalam berbagai tingkatan bagi setiap butir kepuasan, format tipe likert bisa dipergunakan. R.A. Likert (1932) mengembangkan prosedur penskalaan di mana skala mewakili suatu kontinum bipolar. Pada ujung sebelah kiri (dengan angka rendah) menggambarkan suatu jawaban yang negatif sedangkan ujung kanan (dengan angka besar) menggambarkan yang positif.”

Dengan format skala likert tersebut akan memberikan skor secara konsisten pada setiap jawaban yang dipilih oleh setiap responden penelitian. Selanjutnya keseluruhan skor pada setiap pilihan jawaban responden akan dimasukkan ke dalam tabel distribusi jawaban responden.

Analisis data dilakukan dengan terlebih dahulu menguji validitas instrumen penelitian. Menurut Sujana (2004) validitas adalah ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang harus dinilai. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang diukur. Sehubungan dengan pengumpulan data

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner, maka kuesioner yang disusun tersebut harus dapat teruji validitasnya. Selanjutnya melakukan uji reliabilitas instrumen penelitian. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliabel.

Menurut Sugiyono (2012) butir yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa butir tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah jika $r = 0,3$.

Untuk membahas data yang diperoleh melalui proses kegiatan penelitian, penulis menggunakan metode analisis deskriptif Kuantitatif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis, dan akurat. Menurut Sugiyono (2008), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif kuantitatif menggambarkan data kuantitatif yang diperoleh menyangkut keadaan subjek atau fenomena dari sebuah populasinya. Penelitian ini juga melakukan interpretasi dan pengukuran atas data-data hasil penelitian yang berwujud angka-angka atau bilangan tertentu.

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

King (1987, dalam Potter, 2005) mengatakan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar manusia berfokus pada tiga sistem yakni, sistem personal, interpersonal, dan sistem sosial. Atau dengan kata lain, manusia berusaha menstimulasi respon dalam mencapai keseimbangan. Setiap

orang mempunyai kebutuhan dasar yang sama, walaupun masing-masing memiliki latar belakang sosial, budaya, persepsi, dan pengetahuan yang berbeda. Manusia akan memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tingkat prioritas masing-masing. Kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi adalah kebutuhan dasar dengan tingkat prioritas yang paling tinggi/utama.

Watson (dalam Kasiati dan Rosmalawati, 2016) berpendapat lain, bahwa kebutuhan dasar terdiri dari 4 hal, yakni kebutuhan biofisikal (kebutuhan makanan dan minuman, kebutuhan eliminasi, dan kebutuhan ventilasi), kebutuhan psikofisikal (kebutuhan aktivitas, istirahat dan kebutuhan seksual), kebutuhan psikososial (kebutuhan berorganisasi dan berprestasi), dan kebutuhan interpersonal dan intrapersonal (kebutuhan aktualisasi diri).

Manusia sebagai makhluk holistik merupakan makhluk yang utuh atau paduan dari unsur biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Sebagai makhluk biologis, manusia tersusun atas sistem organ tubuh yang digunakan untuk mempertahankan hidupnya, mulai dari lahir, tumbuh kembang, hingga meninggal. Sebagai makhluk psikologis, manusia mempunyai struktur kepribadian, tingkah laku sebagai manifestasi kejiwaan, dan kemampuan berpikir serta kecerdasan. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu hidup bersama orang lain, saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup, mudah dipengaruhi kebudayaan, serta dituntut untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan dan norma yang ada. Sebagai makhluk spiritual, manusia memiliki keyakinan, pandangan hidup, dan dorongan hidup yang sejalan dengan keyakinan yang dianutnya (Kasiati dan Rosmalawati, 2016).

Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan yang pada akhirnya dapat mencapai derajat kesejahteraan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hal ini berarti kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari terpenuhinya berbagai kebutuhan hidupnya, baik itu secara materi (sandang, pangan, dan papan), secara fisik (kesehatan, lingkungan yang bersih, termasuk air bersih), secara mental (seperti rasa aman dan pendidikan), serta secara spiritual (terpenuhinya kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dan hidup bersosial) (Hidayat, 2016). Pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam UU tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara.

Indikator Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup saat ini dinilai secara kuantitatif menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH ini diadopsi dari beberapa sumber diantaranya *Environmental Performance Index (EPI)* yang dikembangkan oleh sebuah pusat studi di Yale University, yaitu Yale Center for Environmental Law and Policy beserta Columbia University (Center for International Earth Science Information Network) yang berkolaborasi dengan World Economic Forum dan Joint Research Center of the European Commission. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan publikasi yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup Indonesia (Suryani, 2017). IKLH dapat digunakan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. IKLH difokuskan pada media lingkungan air, udara, dan tutupan lahan.

Kualitas udara

Kualitas udara dinyatakan dalam bentuk Indeks Pencemaran Udara (IPU). Parameter

kualitas udara yang dimasukkan dalam perhitungan hanya dua (2), yaitu SO_2 dan NO_2 , meskipun parameter kualitas udara ambien memiliki sembilan (9) parameter. Dua parameter tersebut diambil mengingat pencemaran udara di perkotaan sebagian besar disebabkan oleh sektor transportasi. Dua parameter ini juga merupakan sebagian kecil dari parameter kualitas udara ambien yang masuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Dalam PP tersebut, parameter kualitas udara meliputi SO_2 , CO, NO_2 , O_3 , Pb, debu jatuh (*dustfall*), TSP (*Total Suspended Particulate*), $PM_{2.5}$ dan PM_{10} (*Particulate Matter*), dan hidrokarbon (HC).

Kualitas air

Kualitas air dinyatakan dalam bentuk Indeks Pencemaran Air (IPA). Parameter kualitas air yang dihitung dalam IPA guna memperoleh IKLH hanya mencakup tiga (3) parameter saja, yaitu TSS (*Total Suspended Solid*), DO (*Dissolved Oxygen*), dan COD (*Chemical Oxygen Demand*). Pemilihan parameter TSS, DO, dan COD didasarkan pada ketersediaan data setiap tahunnya. Sebagai perbandingan, parameter kualitas air yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air mencakup 47 parameter yang terdiri dari tiga (3) parameter fisika, 27 parameter kimia anorganik, dua (2) parameter mikrobiologi, dua (2) parameter radioaktifitas, dan 13 parameter kimia organik.

Tutupan Hutan

Tutupan hutan dinyatakan dalam bentuk Indeks Tutupan Hutan (ITH) yang dihitung berdasarkan jumlah luas hutan primer (LHP) dan luas hutan sekunder (LHS) yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan terhadap Luas Wilayah Provinsi (LWP). LHP ditambah LHS sama dengan LTH. Hutan primer adalah hutan yang belum mendapatkan gangguan manusia atau sedikit sekali mendapat

gangguan. Hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh melalui suksesi sekunder alami pada lahan hutan yang telah mengalami gangguan berat seperti lahan bekas pertambangan, peternakan, dan pertanian menetap.

Penyempurnaan Perhitungan IKLH dan Kaitannya dengan Kesejahteraan Sosial

Penilaian atas indeks kualitas lingkungan di atas sebenarnya hanya merupakan sebagian indikator kualitas lingkungan hidup karena masih ada beberapa parameter penting dalam lingkungan hidup yang perlu dimasukkan sebagai indikator kualitas lingkungan, yaitu: keanekaragaman hayati (flora dan fauna), kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan. Ketiga parameter beserta ukuran kuantitatifnya dapat dinyatakan sebagai berikut:

- Flora dan fauna dinyatakan dengan Indeks Keanekaragaman Hayati (IKH)
- Kesehatan masyarakat dinyatakan dalam Indeks Kesehatan Masyarakat (IKM)
- Kesehatan lingkungan dinyatakan dalam Indeks Kesehatan Lingkungan (IKL).

Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman alam hayati menunjukkan berbagai variasi dalam bentuk, struktur tubuh, warna, jumlah, dan sifat lain dari makhluk hidup di suatu daerah. Sumber Daya Alam (SDA) hayati merupakan bagian dari mata rantai tatanan lingkungan hidup, yang menjadikan lingkungan ini hidup dan mampu menghidupkan manusia dari generasi ke generasi. Makin beranekaragam sumber ini, makin banyak hikmah dan pilihan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³

Istilah keanekaragaman hayati (ragam hayati, keanekaan hayati, biodiversitas, atau *biodiversity*) merupakan istilah yang digunakan untuk derajat keanekaragaman SDA hayati yang meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies, maupun gen di suatu daerah. Pengertian yang lebih

³ "Modul I Keanekaragaman Hayati," http://file.upi.edu/direktori/fpmipa/jur._pend._biologi/195305221980021-suroso_adi_yudianto/modul/modul1_keanekaragaman_hayati.pdf, diakses 2 Maret 2017.

mudah dari keanekaragaman hayati adalah kelimpahan berbagai jenis SDA hayati (tumbuhan dan hewan) yang terdapat di muka bumi.⁴

Keanekaragaman hayati adalah tergolong SDA yang dapat diperbarui, karena dapat dikembangkan, baik secara seksual (generatif), aseksual (vegetatif), maupun secara paraseksual (perkawinan sel vegetatif untuk menghasilkan sel poliploidi atau melalui upaya rekayasa genetika). Namun demikian, SDA hayati dapat saja semakin sedikit dan akhirnya menjadi punah, apabila pengelolaannya tidak memperhatikan pelestariannya sebagaimana makhluk hidup purba yang mengalami nasib kepunahan. Kekhawatiran ini semakin nyata, terbukti beberapa jenis makhluk hidup di Indonesia sudah diambang kepunahan.

Kesehatan Masyarakat

Pengertian kesehatan masyarakat menurut Winslow (dalam Notoatmodjo, 2007) bahwa kesehatan masyarakat (*Public Health*) merupakan ilmu dan seni: mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan, melalui "usaha-usaha pengorganisasian masyarakat" untuk:

1. Perbaikan sanitasi lingkungan
2. Pemberantasan penyakit-penyakit menular
3. Pendidikan untuk kebersihan perorangan
4. Pengorganisasian pelayanan-pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosis dini dan pengobatan.
5. Pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi kebutuhan hidup yang layak dalam memelihara kesehatannya.

Dari batasan tersebut tersirat bahwa kesehatan masyarakat adalah kombinasi teori (ilmu) dan praktik (seni). Dari aspek keilmuan, kesehatan masyarakat pada mulanya hanya mencakup dua disiplin keilmuan yaitu ilmu biomedis dan ilmu sosial. Akan tetapi sesuai dengan perkembangan ilmu, maka disiplin ilmu yang mendasari kesehatan masyarakat pun

⁴ "Keanekaragaman Hayati Kondisi dan Permasalahannya," http://ani_mardiastuti.staff.ipb.ac.id/files/2011/09/kehati-dan-permasalahannya.pdf, diakses 2 Maret 2017.

berkembang. Secara garis besar disiplin ilmu yang mendasari ilmu kesehatan masyarakat antara lain epidemiologi, biostatistik, kesehatan lingkungan, pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku, administrasi kesehatan masyarakat, gizi masyarakat dan kesehatan kerja (Notoatmodjo, 2007).

Menurut Achmadi (2013) kesehatan masyarakat adalah semua upaya yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan menggunakan serangkaian upaya yang sekurang-kurangnya terdiri dari unsur-unsur:

1. Berbasis masyarakat;
2. Berorientasi pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan;
3. Dilaksanakan secara lintas disiplin atau bekerja sama dengan sektor non-kesehatan;
4. Adanya keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat;
5. Terorganisir dengan baik.

Masalah kesehatan masyarakat adalah suatu masalah yang sangat kompleks yang saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar kesehatan. Hendrik L. Bloom menyatakan secara ringkas faktor yang memengaruhi kesehatan antara lain faktor keturunan (genetik), pelayanan kesehatan, perilaku kesehatan dan lingkungan (fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya). Masalah kesehatan masyarakat juga merupakan multikausal maka pemecahannya harus secara multidisiplin. Oleh karena itu, kesehatan masyarakat sebagai seni atau praktik mempunyai bentangan yang luas. Semua kegiatan baik yang langsung maupun tidak langsung untuk mencegah penyakit (preventif), meningkatkan kesehatan (promotif), terapi atau kuratif (fisik, mental dan sosial), maupun pemulihan kesehatan atau rehabilitatif (fisik, mental, dan sosial) merupakan upaya kesehatan masyarakat (Notoatmodjo, 2007).

Tujuan umum kesehatan masyarakat adalah terciptanya keadaan lingkungan yang sehat, terberantasnya penyakit menular, meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang prinsip-prinsip kesehatan perseorangan, tersedianya berbagai usaha kesehatan yang dibutuhkan masyarakat

yang terorganisir dan terlibatnya badan-badan kemasyarakatan dalam usaha kesehatan. Sedangkan tujuan akhirnya adalah terciptanya jaminan bagi tiap individu masyarakat untuk mencapai suatu derajat hidup yang cukup guna untuk mempertahankan kesehatan.⁵

Untuk dapat melihat suatu derajat atau status kesehatan masyarakat dapat digunakan indikator mortalitas (kematian), morbiditas (kesakitan) dan status gizi. Hal ini dikarenakan sensitivitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Mortalitas terdiri dari Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Morbiditas terdiri dari angka kesakitan beberapa penyakit utama.

Saat ini, mortalitas erat dikaitkan dengan perubahan iklim. Berbagai penyakit infeksi akibat perubahan iklim merupakan salah satu penyebab atau pemberi kontribusi terhadap AKI dan AKB. AKI dan AKB merupakan akibat lebih jauh dari kejadian sakit. Penyebab utama mortalitas di Indonesia masih didominasi oleh penyakit menular, berkenaan dengan determinan utama kemiskinan dan sanitasi lingkungan yang buruk. Diare dan penyakit infeksi merupakan penyebab utama kematian bayi. Semua penyebab kematian tersebut dapat dicegah dengan penyediaan air bersih, rumah sehat, dan sanitasi dasar lainnya (Achmadi, 2013).

Dalam penyempurnaan indeks kualitas lingkungan yang dimaksud disini, aspek kesehatan masyarakat menyangkut indikator seperti angka kesakitan, angka kematian, dan umur harapan hidup (UHH). Angka kesakitan (prevalensi penyakit) adalah banyaknya kasus penyakit tertentu setiap sepuluh ribu (10.000) penduduk. Angka kematian terdiri dari angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu melahirkan. Umur harapan hidup (UHH), yaitu perkiraan jumlah tahun hidup dari individu (manusia) yang berdiam di suatu wilayah, lazimnya sudah dihitung dan

⁵ "Definisi Kesehatan Masyarakat," https://www.academia.edu/8278738/Definisi_Kesehatan_Masyarakat, diakses 3 Maret 2017.

tersedia di setiap kabupaten/kota di Indonesia.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1202/Menkes/SK/VIII/ 2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat, indikator derajat kesehatan masyarakat terdiri atas indikator mortalitas, indikator morbiditas, dan indikator status gizi. Indikator-indikator tersebut merupakan acuan bagi berbagai pihak pemangku kepentingan dalam mendapatkan kesamaan tolok ukur.

Kesehatan Lingkungan

Kesehatan lingkungan merupakan ilmu kesehatan masyarakat yang menitikberatkan usaha preventif dengan usaha perbaikan semua faktor lingkungan agar manusia terhindar dari penyakit dan gangguan kesehatan. Kesehatan lingkungan adalah karakteristik dari kondisi lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan. Untuk itu kesehatan lingkungan merupakan salah satu dari enam usaha dasar kesehatan masyarakat. Menurut WHO (World Health Organization), kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia.⁶ Kesehatan lingkungan sangat erat hubungannya dengan taraf sosial ekonomi, karenanya untuk dapat mengelola kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat perlu dihayati hubungan timbal balik antara lingkungan dengan manusia (Soemirat, 2011). Kondisi lingkungan yang baik adalah yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia.

Masalah kesehatan lingkungan di negara-negara sedang berkembang adalah berkisar pada sanitasi (jamban), penyediaan air minum, perumahan, pembuangan sampah, dan pembuangan air limbah (Notoatmodjo, 2007). Di Indonesia, ruang lingkup kesehatan lingkungan

diterangkan dalam Pasal 22 ayat (3) UU No 23 Tahun 1992 terdiri dari 8 aspek, yaitu:

1. Penyehatan Air dan Udara
2. Pengamanan Limbah padat/sampah
3. Pengamanan Limbah cair
4. Pengamanan limbah gas
5. Pengamanan radiasi
6. Pengamanan kebisingan
7. Pengamanan vektor penyakit
8. Penyehatan dan pengamanan lainnya, seperti keadaan pasca bencana

Istilah kesehatan lingkungan seringkali dikaitkan dengan istilah sanitasi/sanitasi lingkungan. WHO menyebutkan pengertian sanitasi lingkungan/kesehatan lingkungan adalah suatu usaha untuk mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempunyai efek merusak perkembangan fisik, kesehatan dan daya tahan hidup manusia (Haryoto, 1986).

Dalam perhitungan IKLH baru, aspek kesehatan lingkungan mencakup komponen-komponen sebagai berikut:

- Persentase keluarga yang memiliki akses air bersih;
- Persentase rumah sehat;
- Persentase keluarga yang memiliki sarana sanitasi dasar.

Semua aspek di atas merupakan aspek penting yang bersifat mendasar dan karenanya merupakan parameter penting dalam sistem penilaian kualitas lingkungan hidup. Bila penilaian kualitas lingkungan hidup tidak melibatkan aspek-aspek tersebut maka nilai yang muncul tidak bisa menunjukkan sifat yang representatif. Pengabaian aspek-aspek tersebut juga akan memberikan pemahaman yang bias terhadap kualitas lingkungan hidup yang sesungguhnya. Pelibatan ketiga aspek ini (flora dan fauna, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan) akan membawa implikasi positif berupa perluasan kriteria penilaian kualitas lingkungan hidup dibandingkan dengan kriteria penilaian yang berlangsung selama ini.

Salah satu implikasi positif yang nyata dan bisa segera dilihat adalah adanya

⁶ World Health Organization (WHO). *Environmental Health*. Disitasi dari :<http://www.WHO.int>, diakses 1 Maret 2017.

Tabel 2. IPM Provinsi Banten Tahun 2011-2013

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	IPM / HDI			Reduksi Shortfall / Reduction Shortfall		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten / Regency						
1. Pandeglang	68,77	69,22	69,64	1,54	1,43	1,36
2. Lebak	67,98	68,43	68,82	0,95	1,41	1,25
3. Tangerang	72,05	72,36	72,82	1,02	1,10	1,66
4. Serang	69,33	69,83	70,25	2,09	1,64	1,38
Kota / Municipality						
5. Tangerang	75,44	75,72	76,05	1,12	1,13	1,34
6. Cilegon	75,60	75,89	76,31	1,23	1,21	1,75
7. Serang	71,45	72,30	73,12	2,86	2,98	2,95
8. Tangerang Selatan	76,01	76,61	77,13	2,56	2,52	2,21
Provinsi Banten	70,95	71,49	71,90	1,56	1,87	1,45

Sumber: Banten Dalam Angka 2014.

perhatian dari masyarakat dan berbagai pihak yang terlibat (*stakeholders*) bahwa berbagai aspek tersebut juga menjadi salah satu ukuran kualitas lingkungan. Bila nilai dari suatu aspek rendah maka masyarakat akan tergerak untuk berupaya memperbaikinya. Dan sebaliknya, bila nilai yang diperoleh dari aspek-aspek yang tercakup telah relatif tinggi, maka masyarakat akan berupaya untuk terus mempertahankan atau bahkan meningkatkannya.

Nilai ketiga aspek atau parameter diatas dapat diperoleh berdasarkan data yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota yang lazimnya dikemas dalam bentuk Laporan Status Lingkungan Hidup (SLH) atau *State of the Environment Report* (SoER). Ketiga indeks tersebut diharapkan dapat juga dihitung secara langsung berdasarkan data pendukung yang ada. Dengan demikian, rangkaian data tersebut harus tersedia di setiap kabupaten/kota dan provinsi.

Oleh karena itu, dengan memasukkan tiga indikator baru dalam menghitung indeks kualitas lingkungan diasumsikan indeks kualitas lingkungan tersebut akan lebih komprehensif. Namun demikian, permasalahan memasukkan atau tidak

memasukkan tiga indikator terakhir diatas tidak hanya berhenti di sini, melainkan perlu mempertimbangkan ketersediaan data dan keberlangsungan penyediaannya di seluruh Indonesia. Salah satu masalah klasik dan mendasar yang menyangkut aspek data di Indonesia adalah ketersediaannya secara terus menerus (*series data*).

Gambaran Umum Provinsi Banten Indikator Pembangunan Manusia dan Sosial Ekonomi

Provinsi Banten memiliki jumlah penduduk yang cukup signifikan, dengan jumlah kelahiran yang cukup tinggi. Sebaran penduduk yang tidak merata dengan aktivitas yang tidak terkontrol mampu menstimulasi konflik-konflik di masyarakat, baik konflik vertikal maupun Horizontal. Oleh karena itu, hal ini menjadi salah satu faktor yang harus menjadi pertimbangan utama di dalam penyusunan setiap program dengan tujuan menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten. Jumlah penduduk Provinsi Banten berdasarkan hasil rekapitulasi dari data Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten yang dilakukan oleh Biro Pemerintahan Setda

Provinsi Banten pada Semester II Tahun 2014 adalah 10.016.587 jiwa.⁷

Persebaran penduduk di Banten tidak merata, karena masih terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dengan luas wilayah kurang dari 14 persen dari seluruh luas wilayah Provinsi Banten, ketiga wilayah tersebut pada tahun 2014. Akibatnya tingkat kepadatan penduduk antar wilayah di Banten menjadi sangat tidak merata. Tercatat, Kota Tangerang merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi, mencapai 12.147 jiwa per km², sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Lebak yaitu dengan tingkat kepadatan penduduk hanya 359 jiwa per km². Berarti, Kota Tangerang hampir 34 kali lebih padat bila dibandingkan dengan Kabupaten Lebak.

Pembangunan manusia merupakan sebuah proses perubahan kualitas manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Kemajuan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan kemajuan pada tiga dimensi pokok pembangunan manusia yaitu bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi. Capaian pembangunan manusia di Provinsi Banten selama Periode 2011 – 2013 secara keseluruhan mengalami peningkatan, walaupun lambat. Hal ini terlihat bukan hanya dari angka IPM yang meningkat tidak terlalu tinggi jika di bandingkan dengan IPM pada tahun 2011 ke tahun 2012. Begitu juga dapat dilihat dari penurunan reduksi *shortfall* dari 1,87 pada tahun 2012 menjadi 1,45 pada tahun 2013. Implikasi dari membesar atau menurunnya reduksi *shortfall* ini adalah salah satu indikator menuju IPM ideal (IPM = 100). IPM Provinsi Banten pada tahun 2013 sendiri baru mencapai 71,90 atau jarak dari IPM ideal masih kurang 28,10 persen.⁸

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada triwulan III 2016 tumbuh sebesar 5,35 persen, lebih tinggi dari nasional sebesar 5,02 persen. Pertumbuhan ekonomi Banten yang

melebihi angka nasional tersebut antara lain ditunjang oleh perkembangan investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang cukup tinggi. Secara peringkat investasi Provinsi Banten berada di urutan ke-4 secara nasional untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan urutan ke-3 untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Membaiknya kinerja ekspor juga mendorong tumbuhnya industri pengolahan komitmen pemerintah dalam mendorong Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) pada proyek-proyek infrastruktur juga telah berdampak pada kinerja industri pengolahan di Provinsi Banten.⁹

Dari sisi perkembangan harga, inflasi di Provinsi Banten terjaga di level yang rendah dan stabil. Inflasi sampai dengan November tercatat di level 3,33 persen, lebih rendah dari posisi yang sama tahun 2015 yang mencapai 5,86 persen, sedangkan untuk pertumbuhan perekonomian Provinsi Banten untuk 2017 sebesar 5,2 - 5,5 persen dan untuk tingkat inflasi Banten pada tahun 2017 diperkirakan dalam kisaran 4,5 - 4,8 persen. Reformasi struktural yang berjalan dengan baik akan meningkatkan produktivitas dan mendorong perekonomian tumbuh lebih tinggi. Kinerja perekonomian yang tumbuh tinggi dan disertai struktur yang lebih baik pada gilirannya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menghindarkan perekonomian dari jebakan kelas menengah (*middle income trap*).¹⁰

Derajat Kesehatan Masyarakat

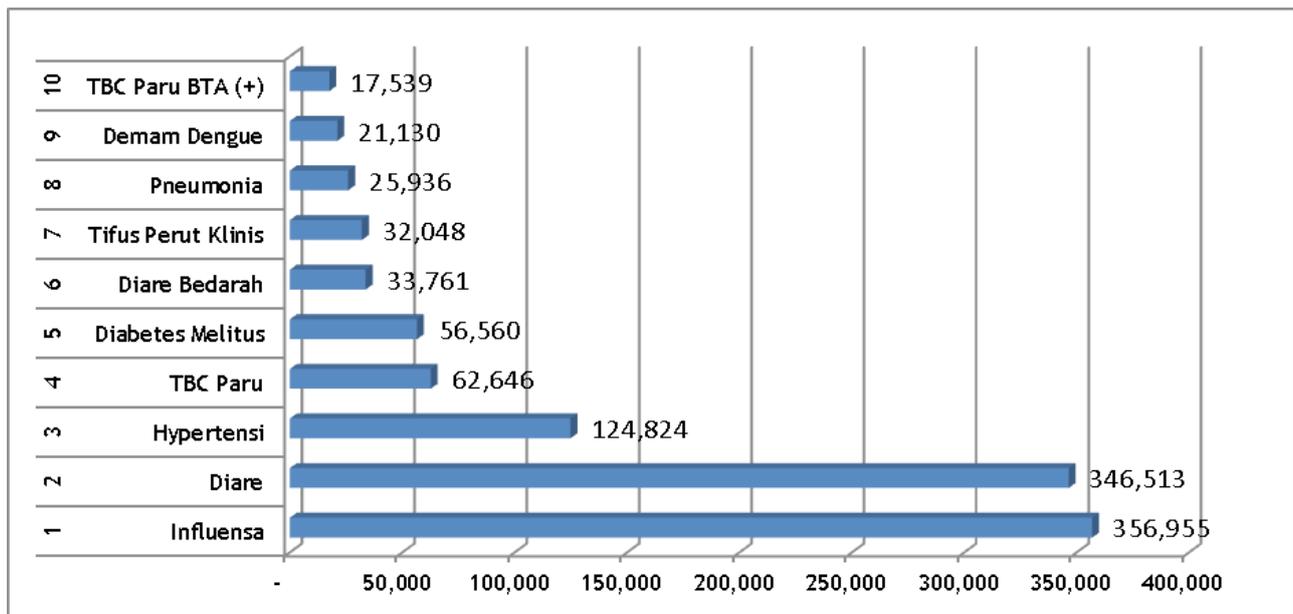
Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana tertera dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karenanya menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak asasi manusia tersebut sebagaimana tertera

⁷ <https://bantenprov.go.id/upload/lpdp/Materi%20ILPPD%202014.pdf> diakses 15 September 2017.

⁸ *Ibid.*

⁹ <https://banten.antaranews.com/berita/25590/pertumbuhan-ekonomi-banten-lebih-tinggi-dari-nasional>, diakses 15 September 2017.

¹⁰ *Ibid.*



Grafik 1. Gambaran Penyakit di Provinsi Banten
Sumber data : Profil Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2014.

dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Aspek kesehatan mempunyai pengaruh penting pada pembangunan nasional suatu bangsa.

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Sasaran pembangunan kesehatan pada tahun 2025 adalah meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) serta menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. AKB dan AKI merupakan ukuran mortalitas atau tingkat kematian yang sering digunakan untuk mengevaluasi upaya pembangunan kesehatan yang telah dilakukan pemerintah. Derajat kesehatan masyarakat digambarkan melalui angka kematian (mortalitas), angka kesakitan (morbiditas) dan status gizi balita.

AKB merupakan jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun

yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Tahun 2013 AKB Provinsi Banten adalah 5,8 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini meningkat dari tahun 2011 di mana AKB mencapai 5,2 per 1.000 kelahiran hidup. Penurunan AKB ini banyak dipengaruhi kegiatan pelatihan manajemen supervisor pada kasus asfiksia (kekurangan oksigen) dan kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR); kemitraan bidan dengan dukun; persalinan oleh tenaga kesehatan; Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Kehamilan (P4K); dan asuhan kebidanan dari masa maternal hingga perinatal.

Selain AKB, indikator mortalitas yang digunakan di Provinsi Banten juga berupa AKI. AKI merupakan indikator penting dalam menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator

ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitivitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan.

AKI di Provinsi Banten pada tahun 2013 sebesar 359,1 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan AKI di tahun 2011 yang mencapai 79,5 per 100.000 kelahiran hidup. Penurunan AKI ini dipengaruhi oleh program *antenatal care* terpadu, pemantapan kelas ibu hamil, pembinaan kemitraan bidan dengan dukun, persalinan oleh tenaga kesehatan, dan pelayanan kesehatan ibu lainnya.

Morbiditas juga berperan dalam penilaian terhadap derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Morbiditas menggambarkan kejadian penyakit yang terjadi di masyarakat baik yang dilaporkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan melalui surveilans rutin maupun dari adanya laporan KLB atau wabah. Morbiditas penyakit menular yang banyak menginfeksi masyarakat di Provinsi Banten dinyatakan dalam angka insiden maupun angka prevalens.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa penyakit yang paling banyak terjadi pada masyarakat Banten adalah influenza, diare, dan hipertensi. Influenza menduduki peringkat pertama penyakit terbanyak di masyarakat pada tahun 2013 yaitu sebanyak 356.955 kasus, selanjutnya diikuti oleh penyakit diare sebanyak 346.513 kasus, hipertensi sebanyak 124.824 kasus, TB paru sebanyak 62.646 kasus, diabetes melitus sebanyak 56.560 kasus, diare berdarah sebanyak 33.761 kasus, tifus klinis sebanyak 32.048 kasus, pneumonia sebanyak 25.936 kasus, demam berdarah dengue sebanyak 21.130 kasus dan TB paru BTA (+) 17.539 kasus.

Derajat Kesehatan Lingkungan

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat adalah kualitas

lingkungan. Hal ini sesuai dengan teori Blum yang menyatakan bahwa derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh determinan yang saling berkaitan satu sama lain yaitu determinan lingkungan, perilaku kesehatan, genetik dan akses fasilitas pelayanan kesehatan. Namun kualitas lingkungan hidup semakin lama semakin menurun sebagai dampak dari adanya pembangunan dan perkembangan era globalisasi. Dampak tersebut sebagai ancaman tradisional yang sejak dahulu erat berhubungan dengan faktor kemiskinan dan keterbelakangan pembangunan yang meliputi keterbatasan persediaan air minum yang aman, keterbatasan persediaan fasilitas sanitasi dasar di rumah dan lingkungan masyarakat, adanya polusi udara yang berasal dari dalam rumah dan kurangnya fasilitas pembuangan sampah. Di samping itu, juga adanya ancaman modern yang mencakup polusi air dari industri dan pertanian intensif, polusi udara perkotaan dari kendaraan bermotor, tenaga batu bara dan industri, perubahan cuaca, penipisan lapisan ozon stratosfir dan polusi lintas batas (Supraptini dan Tin Afifah. 2006). Untuk menggambarkan keadaan lingkungan di Provinsi Banten, digunakan indikator seperti akses terhadap air bersih dan air minum berkualitas dan akses terhadap sanitasi layak.

Tahun 2011 kepala keluarga yang mempunyai air bersih sebanyak 1.039.796. Jumlah tersebut naik pada tahun 2013 yaitu mencapai 1.243.157 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, kepala keluarga yang menggunakan ledeng sebanyak 203.358 (16.4%), sumur pompa tangan sebanyak 123.494 (9.9%), sumur gali sebanyak 314.802 (25.3%), penampungan air hujan sebanyak 5.832 (0.5 %), penggunaan air kemasan 9.678 (0.8%) dan lainnya sebanyak 533.316 (42.9%). Sedangkan pada tahun 2011, kepala keluarga yang menggunakan ledeng sebanyak 236.426 (22,7%), sumur pompa tangan sebanyak 192.605 (18,5%),

sumur gali sebanyak 312.734 (30,1%), penampungan air hujan sebanyak 9.583 (0,9%), air kemasan sebanyak 11.353 (1,1%) dan lainnya sebanyak 412.406 (39,7%). Dengan pemakaian sumber air bersih yang sesuai dengan syarat kesehatan diharapkan penularan penyakit dapat diminimalisir bila masyarakat melaksanakan PHBS.

Untuk mencegah atau mengurangi kontaminasi tinja terhadap lingkungan maka pembuangan tinja harus dikelola dengan baik seperti pembuangan tinja harus di suatu tempat tertentu atau jamban sehat. Pembuangan tinja layak adalah dengan menggunakan jamban sendiri atau bersama serta menggunakan jamban leher angsa. Sementara tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septi atau saluran pembuangan air limbah.

Pada tahun 2013, jumlah kepala keluarga yang diperiksa kepemilikan jambannya mencapai 1.003.364. Dari jumlah tersebut yang menggunakan jamban sehat sebanyak 568.452 (70,5%). Proporsi kepala keluarga yang memiliki jamban pada tahun 2013 tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2011. Pada tahun 2011, jumlah kepala keluarga yang diperiksa kepemilikan jambannya mencapai 941.196. Dari jumlah tersebut, ada sebanyak 508.849 (45,6%) yang menggunakan jamban sehat.

Tahun 2013, rumah di Provinsi Banten ada sebanyak 2.371.217. Dari jumlah tersebut, rumah yang diperiksa sebanyak 866.555 rumah (36,5%). Terdapat sebanyak 510.678 rumah sehat (56,0%). Jumlah tersebut meningkat jika dibanding tahun 2011. Pada tahun 2011, terdapat 2.253.718 rumah di Provinsi Banten. Dari jumlah tersebut, rumah yang diperiksa apakah memenuhi persyaratan sehat atau tidak ada sebanyak 1.048.120 rumah (46,5%). Dari hasil pemeriksaan tersebut, diketahui rumah sehat di Provinsi Banten pada tahun 2011 sebanyak 587.316 rumah (56,0%).

Program terpadu untuk mengetahui perilaku masyarakat tentang kesehatan adalah program PHBS. Pada tahun 2013

jumlah keseluruhan di 8 Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan pembinaan ber-PHBS adalah sebanyak 1.131.243 rumah tangga. Dari jumlah tersebut yang berhasil menerapkan PHBS sebanyak 501.218. Pada tahun 2011, pemantauan rumah tangga PHBS mencapai 973.191 rumah tangga. Secara umum keadaan pada tahun 2013 menurun bila dibandingkan dengan tahun 2011. Di mana pada tahun 2011 jumlah rumah tangga Ber-PHBS mencapai 51% sedangkan tahun 2013 mencapai 44,3%.

Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati di Indonesia terkonsentrasi di hutan alam, baik yang berada di pegunungan, rawa, dataran rendah, maupun di kawasan pantai. Provinsi Banten adalah salah satu provinsi di Pulau Jawa yang mempunyai potensi hutan alam yang luas dan kaya akan keanekaragaman hayati. Berdasarkan SK Menhut No. 419/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Jawa Barat serta SK Penunjukkan Parsial. Luas kawasan hutan dan perairan yang dimiliki Provinsi Banten mencapai ± 253.218,27 ha, dan luas daratan kawasan hutannya mencapai 208.161,27 ha. Kawasan hutan tersebut meliputi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

Berdasarkan fungsinya, luas kawasan hutan (daratan) di Provinsi Banten terdiri dari: hutan konservasi (127.892,30 ha), hutan lindung (9.471,39 ha) dan hutan produksi (70.797,58 ha). Sedangkan kawasan konservasi di Provinsi Banten terdiri dari: Cagar Alam Gunung Tukung Gede, Cagar Alam Pulau Dua, Cagar Alam Rawa Danau, Taman Wisata Alam Pulau Sangiang, dan Taman Nasional Ujung Kulon.

Eksistensi keanekaragaman hayati di Provinsi Banten tidak hanya terancam oleh adanya kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan sektor jasa dan industri, tetapi juga oleh adanya kegiatan eksploitasi sumber daya hutan yang ada. Kegiatan eksploitasi SDA tidak hanya mengancam

keanekaragaman hayati, tetapi juga telah merusak fungsi hutan dalam menjaga tata air, sehingga ketika musim hujan tiba kawasan-kawasan permukiman, persawahan, dan tata guna lahan lainnya di hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) tergenang air. Sementara ketika musim kemarau, terjadi kelangkaan air di kawasan yang sangat luas, yang tidak saja menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih, tetapi juga berdampak pada sektor pertanian karena debit air saluran irigasi sangat rendah atau kering (Wawancara dengan Staf BKSDA Jawa Barat Kantor Wilayah Banten).

Demikian juga pengembangan industri di wilayah utara Provinsi Banten, pengelolaan yang tidak dilakukan dengan baik telah mengganggu dan merusak ekosistem laut. Kondisi ini mengakibatkan ikan sulit dicari sehingga tangkapan ikan para nelayan juga cenderung menurun. Skala dan intensitas kegiatan di wilayah pesisir dan laut Teluk Banten meningkat dengan cepat seiring dengan perkembangan kependudukan dan perekonomian. Proses-proses ini berpotensi menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem teluk dan berdampak besar bagi masyarakat terutama yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya pesisir dan laut.¹¹

Rusaknya lingkungan dan terjadinya kepunahan keanekaragaman hayati di Provinsi Banten tidak hanya karena perkembangan kependudukan dan perekonomian. Tetapi juga karena peran masyarakat (Wawancara dengan Staf BKSDA Jawa Barat Kantor Wilayah Banten), seperti:

- a. perambahan di kawasan Cagar Alam Rawa Danau sehingga mengancam eksistensi Rawa Danau sebagai kawasan rawa pegunungan satu-satunya di Pulau Jawa dan ekosistem rawa yang ada di dalamnya;
- b. perambahan di Taman Nasional Ujung Kulon dan pembantaian badak untuk diambil culanya;
- c. penjarahan burung di Cagar Alam Pulau

- Dua;
- d. Penebangan hutan di kawasan-kawasan lindung dan cagar alam;
- e. Penebangan bakau untuk dijadikan kawasan tambak di hampir sepanjang pantai utara, mulai dari Teluk Naga Tangerang sampai dengan Sawah Luhur, Serang;
- f. Pengambilan terumbu karang;
- g. pengambilan ikan dengan menggunakan bom dan sianida, yang mengancam dan membunuh terumbu karang;
- h. penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti dengan menggunakan pukot harimau, arad, gardan, dan lain sebagainya.

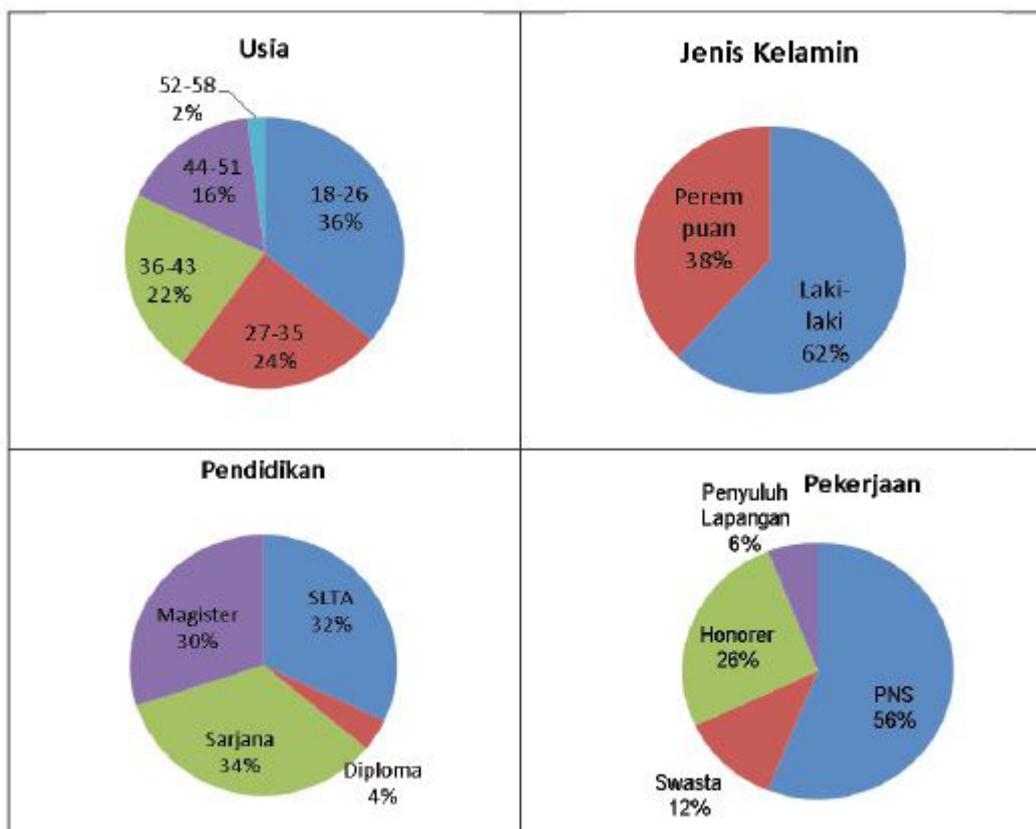
Seksi Konservasi Wilayah I (Wilayah Serang) Balai Besar KSDA Jawa Barat mencatat ada beberapa hewan dan tumbuhan yang terancam punah di Provinsi Banten, yaitu: Badak Bercula Satu (*Rhinoceros sondaicus*), Surili (*Presbytis comata*), Macan tutul (*Panthera pardus melas*), Burung pantai Bintayung (*Fregata andrewsi*), dan Kokoleceran (*Vatica bantamensis*).

Menghadapi kondisi tersebut, beberapa upaya telah dilakukan oleh Seksi Konservasi Wilayah I Banten BBKSDA Jawa Barat dalam upaya mempertahankan keanekaragaman hayati, yaitu dengan melakukan:

- a. pembinaan habitat di Pulau Sangiang;
- b. pengamanan dan penjagaan kawasan konservasi, seperti melalui kegiatan patroli, operasi pengamanan;
- c. penyuluhan konservasi ke tokoh masyarakat, masyarakat dan ke sekolah;
- d. pembinaan kader konservasi, kelompok pecinta alam (Wawancara dengan Staf BKSDA Jawa Barat Kantor Wilayah Banten).

Tantangan yang dihadapi oleh Seksi Konservasi Wilayah I Banten BBKSDA Jawa Barat dalam melaksanakan berbagai upaya tersebut antara lain: perambahan yang dilakukan oleh masyarakat, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki kurang. Di Seksi Konservasi Wilayah I Banten BBKSDA Jawa Barat hanya ada 16 PNS Polhut, TPHL, PEH,

¹¹ "Pendahuluan," http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/40870/2/BAB%20I_2007sja-2.pdf, diakses 2 Februari 2018.



Grafik 2. Gambaran Responden

dan PPNS dengan luas kawasan konservasi mencapai 6.343.20 ha dan keterbatasan anggaran.

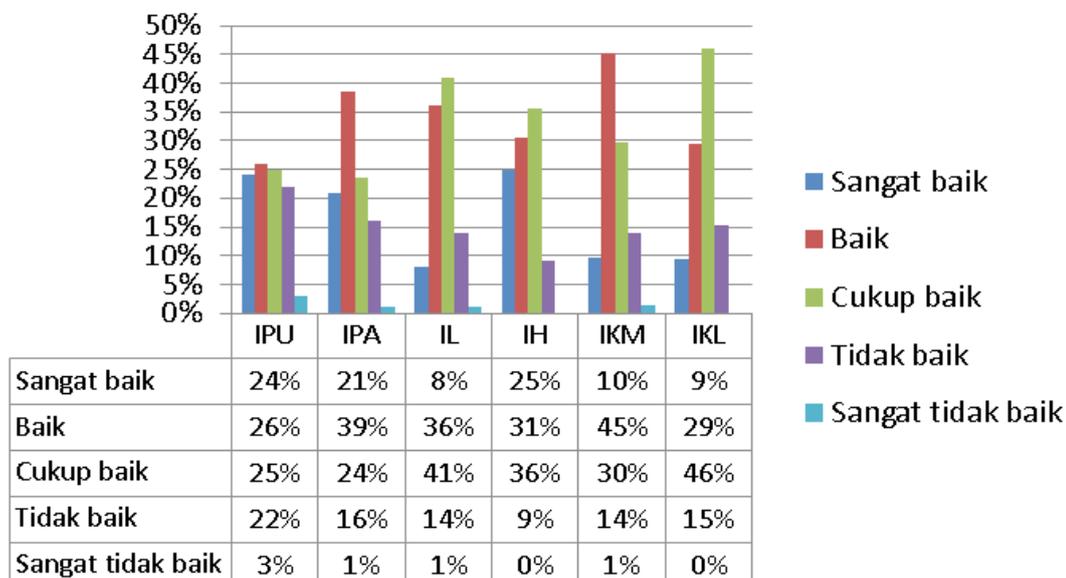
Hubungan antara IKLH dengan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Gambaran Responden

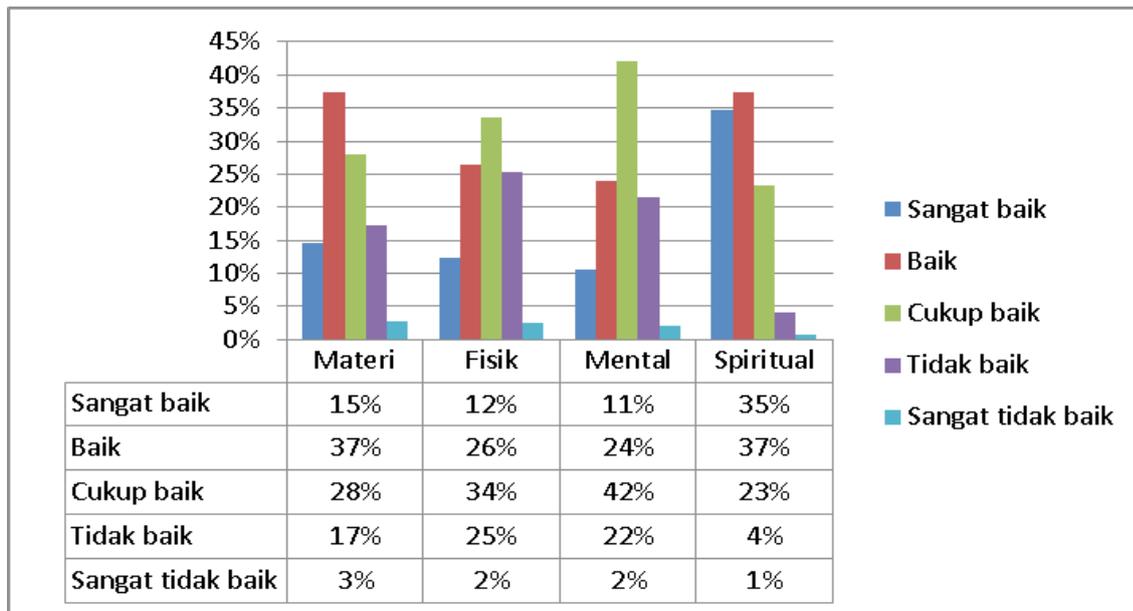
Jumlah responden sebanyak 50 orang, dengan

gambaran responden sebagaimana Grafik 2.

Jumlah responden adalah 50 orang, sebagian besar berada pada usia 18-26 tahun. Terdiri dari 62% laki-laki dan 38% perempuan. Adapun pendidikan responden sebagian besar sarjana, disusul kemudian SLTA dan kemudian magister dalam jumlah yang tidak jauh berbeda. Jenis pekerjaan responden sebagian besar PNS (50%).



Grafik 3. Persepsi Responden terkait IKLH



Grafik 4. Persepsi Responden terkait IKLH

Persepsi Responden

Persepsi responden terkait kondisi lingkungan di Provinsi Banten rata-rata baik dan cukup baik. Mayoritas responden berpendapat baik untuk indeks kualitas udara, kualitas air dan kesehatan masyarakat. Sedangkan indeks tutupan lahan, keanekaragaman hayati dan kesehatan lingkungan dipersepsikan cukup baik oleh responden.

Walaupun mayoritas responden menjawab seperti di atas, namun yang patut dicermati dari grafik tersebut adalah masih adanya responden yang berpendapat bahwa indeks lingkungan tidak baik, kisarannya sekitar 9% s.d. 22%. Hal ini patut menjadi perhatian karena dapat diasumsikan kondisi kualitas lingkungan belum merata dirasakan oleh masyarakat Banten. Hal ini diindikasikan oleh disparitas jawaban responden mulai dari sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik, bahkan sangat tidak baik untuk beberapa indikator.

Adapun persepsi responden terkait pemenuhan kebutuhan dasar dapat dilihat pada Grafik berikut. Sebagian besar responden berpendapat bahwa pemenuhan kebutuhan dasar di Provinsi Banten adalah baik dan cukup baik. Mayoritas responden berpendapat baik untuk pemenuhan materi dan spiritual,

dan cukup baik pada fisik dan mental. Hal ini dapat diasumsikan bahwa mayoritas responden

Tabel 3. Hasil Uji Korelasi Antara Variabel X dengan Variabel Y

Correlations			
		IKLH	KebDasar
IKLH	Pearson	1	.610**
	Correlation Sig. (2-tailed)		.000
	N	50	50
KebDasar	Pearson	.610**	1
	Correlation Sig. (2-tailed)	.000	
	N	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

sudah terpenuhi kebutuhan material dan spiritual, Keseimbangan antara material dan spiritual diharapkan menjadi modal dasar dalam pembangunan manusia.

Hasil Uji Korelasi

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai signifikansinya < 0.05 , yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara gabungan masing-masing dimensi pada variabel kualitas lingkungan dengan variabel pemenuhan kebutuhan dasar. Nilai pearson correlation yang dihubungkan antar masing-masing variabel adalah sebesar 0.610^{**} dan mempunyai tanda bintang. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat

Tabel 4. Korelasi antara Beberapa Dimensi pada Kualitas Lingkungan dengan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

No	Dimensi Var. X	Var. Y	Signifikansi	Pearson Correlation	Keterangan
1	Pencemaran udara	Total seluruh	0.00	0.566**	Berkorelasi kuat
2	Kualitas air	dimensi pada	0.001	0.469*	Berkorelasi
3	Tutupan lahan	variabel	0.001	0.456*	Berkorelasi
4	Keanekaragaman hayati	pemenuhan kebutuhan dasar	0.141	0.211	Tidak berkorelasi
5	Kesehatan masyarakat		0.005	0.395*	Berkorelasi
6	Kesehatan lingkungan		0.00	0.487*	Berkorelasi

dan signifikan antar berbagai dimensi pada variabel X dengan variabel Y.

Selanjutnya dilakukan pula uji korelasi antara masing-masing dimensi pada Variabel X dengan variabel Y, maka didapatkan hasil sebagai berikut: (output hasil pengolahan data SPSS secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran C):

Berdasarkan hasil perhitungan statistik tersebut terlihat bahwa semua indeks kualitas lingkungan berkorelasi dengan pemenuhan kebutuhan dasar, kecuali indeks keanekaragaman hayati. Hal ini dapat dimungkinkan karena kurang tersosialisasikannya keanekaragaman hayati pada masyarakat, sehingga responden tidak memandang bahwa keanekaragaman hayati tersebut berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Provinsi Banten mempunyai cagar alam yang cukup luas di beberapa tempat, namun nampaknya belum dianggap suatu hal yang mendesak untuk diperhatikan oleh responden.

Hasil Uji Regresi

Hasil uji regresi terhadap kuesioner di Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Tabel 5, nilai R yang merupakan nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0.666. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel penelitian ada di kategori cukup kuat. Nilai Koefisien Determinasi (KD) adalah sebesar 0,444 yang menunjuk bahwa variabel bebas X memiliki pengaruh kontribusi sebesar 44,4% terhadap variabel Y. Sisanya, sebesar 55,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar dimensi-dimensi

pada variabel X.

Selanjutnya adalah menentukan taraf signifikansi atau linieritas dari regresi. Kriterianya dapat ditentukan berdasarkan uji F atau uji nilai Signifikansi (Sig). Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikansi penelitian ini adalah sebesar 0.002. Apabila $Sig < 0.05$ maka model regresi adalah linier. Dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan dan memenuhi kriteria linieritas. Dengan nilai F sebesar 5,715 dan H_0 ditolak, maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara dimensi-dimensi pada kualitas lingkungan dengan pemenuhan dasar. Adapun model persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = 13,286 + 1,703X_1 + 0,323X_2 + 1,083X_3 + 0,111X_4 + 0,204X_5 + 0,828 X_6$$

Di mana:

X_1 = Kualitas udara X_4 = Keanekaragaman hayati
 X_2 = Kualitas air X_5 = Kesehatan masyarakat
 X_3 = Tutupan lahan X_6 = Kesehatan lingkungan

Berdasarkan persamaan di atas, semua dimensi pada variabel X bernilai positif. Hal ini berarti, apabila terjadi kenaikan kualitas udara, kualitas air, tutupan lahan, keanekaragaman hayati, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan maka pemenuhan kebutuhan dasar akan meningkat, begitu juga sebaliknya.

Kualitas udara dan tutupan lahan mempunyai konstanta yang paling besar diantara indeks lainnya. Dengan demikian, kenaikan dari nilai tersebut akan berdampak lebih besar pada kenaikan pemenuhan dasar, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, udara yang bersih dan tutupan

Tabel 5. Hasil Uji Regresi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.666 ^a	.444	.366	7.06520

a. Predictors: (Constant), IKL, IH, IPU, IKM, IPA, IL

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1711.570	6	285.262	5.715	.000 ^b
	Residual	2146.430	43	49.917		
	Total	3858.000	49			

a. Dependent Variable: KebDasar

b. Predictors: (Constant), IKL, IH, IPU, IKM, IPA, IL

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	13.286	8.172		1.626	.111
	IPU	1.703	.779	.326	2.185	.034
	IPA	.323	.486	.098	.665	.510
	IL	1.083	1.036	.167	1.045	.302
	IH	.111	.484	.033	.230	.819
	IKM	.204	.330	.089	.618	.540
	IKL	.828	.638	.194	1.297	.201

a. Dependent Variable: KebDasar

lahan yang luas dianggap responden paling berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Selanjutnya dilakukan uji regresi antara IKLH dengan pemenuhan kebutuhan dasar di Provinsi Banten dengan hasil sebagaimana Tabel 6. Nilai R adalah sebesar 0.0 yang berarti masih ada hubungan yang cukup kuat antara dua variabel ini. Berdasarkan koefisien

determinasi, hanya sebesar 37% variabel kualitas lingkungan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Sisanya sebesar 63% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel kualitas lingkungan.

Signifikansi dari hubungan antara variabel X dan Y adalah sebesar 0.00 dengan nilai F sebesar 28,393, hal ini menunjukkan bahwa model regresi ini signifikan dan terdapat

Tabel 6. Hasil Uji Regresi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.610 ^a	.372	.359	7.10647

a. Predictors: (Constant), IKLH

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1433.910	1	1433.910	28.393	.000 ^b
	Residual	2424.090	48	50.502		
	Total	3858.000	49			

a. Dependent Variable: KebDasar

b. Predictors: (Constant), IKLH

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	10.299	7.741		1.330	.190
	IKLH	.554	.104	.610	5.329	.000

a. Dependent Variable: KebDasar

hubungan antara kualitas lingkungan dengan kebutuhan dasar dengan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,554, X + 10,229$$

Hal ini berarti setiap kenaikan sekitar setengah kali kualitas lingkungan akan menaikkan satu kali pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan demikian apabila kebutuhan dasar masyarakat ingin dipenuhi sebesar satu tingkat, maka kualitas lingkungan perlu untuk ditingkatkan sebanyak setengah tingkat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdiri dari kebutuhan materi, fisik, mental dan spiritual, maka pemerintah perlu meningkatkan kualitas lingkungan yang terdiri dari kualitas udara, kualitas udara, tutupan lahan, keanekaragaman hayati, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan dengan skala dua kali lipat. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Banten dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakatnya sekaligus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan secara merata bagi seluruh masyarakat Banten.

Penutup

Simpulan

Provinsi Banten memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, demikian juga nilai investasinya. Namun beberapa permasalahan lingkungan kerap terjadi seperti pencemaran udara karena padatnya transportasi maupun pencemaran air yang dikarenakan limbah domestik dan industri baik yang berasal dari Provinsi Banten sendiri maupun dari provinsi sekitar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi responden terkait kondisi lingkungan di Provinsi Banten rata-rata baik dan cukup baik. Mayoritas responden berpendapat bahwa kualitas udara, kualitas air dan kesehatan masyarakat adalah baik, sedangkan tutupan lahan, keanekaragaman hayati, dan kesehatan lingkungan dipersepsikan cukup baik oleh responden.

Selanjutnya pemenuhan kebutuhan dasar di Provinsi Banten juga dianggap mayoritas responden baik dan cukup baik. Mayoritas responden berpendapat baik untuk pemenuhan materi dan spiritual, dan cukup baik pada fisik dan mental. Berdasarkan hasil perhitungan statistik, dapat disimpulkan bahwa semua indeks kualitas lingkungan berkorelasi dengan pemenuhan kebutuhan dasar, kecuali indeks keanekaragaman hayati. Hal ini dapat dimungkinkan karena kurang tersosialisasikannya keanekaragaman hayati pada masyarakat, sehingga responden tidak memandang bahwa keanekaragaman hayati tersebut berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Provinsi Banten mempunyai cagar alam yang cukup luas di beberapa tempat, namun nampaknya belum dianggap suatu hal yang mendesak untuk diperhatikan oleh responden.

Berdasarkan uji korelasi juga didapatkan bahwa semua indeks kualitas lingkungan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini berarti, apabila terjadi kenaikan kualitas udara, kualitas air, tutupan lahan, keanekaragaman hayati, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan maka pemenuhan kebutuhan dasar akan meningkat, begitu juga sebaliknya.

Indeks kualitas udara dan tutupan lahan mempunyai konstanta yang paling besar di antara indeks lainnya. Dengan demikian, kenaikan dari nilai tersebut akan berdampak lebih besar pada kenaikan pemenuhan dasar. Demikian juga sebaliknya, apabila indeks kualitas udara dan tutupan lahan mengalami penurunan, maka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat juga akan menurun.

Saran

Hasil telaah hubungan antara kualitas lingkungan dan pemenuhan kebutuhan dasar dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan para pemegang keputusan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas lingkungannya.

Kualitas udara dan tutupan lahan dianggap

responden paling berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, program-program untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga tutupan lahan menjadi prioritas yang perlu dilakukan di khususnya di kawasan perkotaan di samping tentunya terus berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas perairan, kesehatan masyarakat, dan keanekaragaman hayati.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan ke beberapa pihak yang sudah turut berkontribusi dalam penelitian ini. Khususnya para peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI yang telah bekerja sama melakukan penelitian kelompok tentang “Telaah Terhadap Indikator Kesejahteraan Sosial dalam Bidang Lingkungan” yakni: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., MSi., Dr. Rohani Budi Prihatin, M.Si., Teddy Prasetiawan, ST., MT., dan Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M. Serta seluruh instansi terkait di Provinsi Banten, dan masyarakat Provinsi Banten yang menjadi responden penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Qodriyatun, Sri Nurhayati. 2016. “Terbaikannya Lingkungan Hidup dalam Pembangunan,” *Info Singkat*. Vol. VIII, No. 24/II/P3DI/ Desember/2016.
- Supraptini & Afifah, Tin. 2006. “Kondisi Kesehatan Lingkungan di Indonesia dan Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Anak Balita serta Angka Kematian Balita menurut Data Susenas 1998. 2001 dan 2003” *Jurnal Ekologi Kesehatan*, Vol. 5 No. 3. Jakarta: Departemen Kesehatan. Hlm.453.

Buku

- Achmadi, Umar Fahmi. 2013. *Kesehatan Masyarakat: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fauzi, Ahmad dan Octavianus, Alex. 2013. *Background Study RPJMN 2015 - 2019 Indeks Pembangunan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Bappenas.
- Guilford, J. P. & Fruchter, Benjamin. 1978. *Fundamental Statistic in Psycology and Education (6th. ed)*. New York: McGraw-Hill.
- Hidayat, Rahmat (ed). 2016. *Pembangunan Wilayah Pesisir Konsep dan Implementasinya dalam Berbagai Sektor*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Dian Pustaka.
- Kasiati, NS, Ni Wayan Dwi Rosmalawati. 2016. *Kebutuhan Dasar Manusia I*. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Kumar, R. 1999. *Research Methodology: A Step by Step Guide for Beginners*. London: Sage Publication.
- Kusnoputranto, Haryoto. 1986. *Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Depdikbud dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
- Mulyana, Deddy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Palupi, Lutfi Kristiana. 2014. “Persepsi Masyarakat terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta.” *Skripsi*. Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

- Prasurya, Rizky Adi. 2016. "Analisis Pengaruh PDRB Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup di Pulau Sumatera Tahun 2010-2014." *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung.
- Soemirat, Juli. 2011. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sudjana, Nana. 2004. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung :Sinar Baru Algensido Offset.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supranto, J. 1997. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suryani, Anih Sri. 2017. *Pengaruh Kualitas Lingkungan terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar Studi Persepsi Masyarakat di Provinsi Gorontalo*. Bagian dari Buku "Indikator Kesejahteraan, Indikator Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Implementasinya di Indonesia Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Inteligencia Intrans Publishing.
- Syahrin, Alvi. tt. *Pembangunan Berkelanjutan (Perkembangannya, Prinsip-Prinsip dan Status Hukumnya)*. Medan: Fakultas Hukum USU.
- Zaman, Badrus dan Syafrudin. 2012. *Buku Ajar Pengelolaan Kualitas Lingkungan*. Semarang: Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro.
- Yuwono, Arief Sabdo. 2016. "Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Kaitannya dengan Indikator Kesejahteraan Sosial," Disampaikan dalam Diskusi tentang "Indikator Kesejahteraan Sosial Bidang Lingkungan," Bidang Kesejahteraan Sosial Pusat Penelitian BKD tanggal 7 Desember 2016.
- Yuwono, Arief Sabdo. 2017. Disampaikan pada *Focus Group Discussion* Proposal Penelitian Kelompok Tentang "Telaah terhadap Indikator Kesejahteraan Sosial Bidang Lingkungan," Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 20 Maret 2017.

Intenet

- "Bantaeng Menjadi Uji Coba Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia," <http://rakyatsulsel.com/107900.html>, diakses 3 Maret 2017.
- "Definisi Kesehatan Masyarakat," https://www.academia.edu/8278738/Definisi_Kesehatan_Masyarakat, diakses 3 Maret 2017.
- "Hak atas Lingkungan yang Baik dan Sehat," http://www.academia.edu/9614003/hak_atas_lingkungan_yang_baik_dan_sehat, diakses 2 Februari 2018.
- "Indeks Kebahagiaan Indonesia 2014 Sebesar 68,28 pada Skala 0-100," <https://www.bps.go.id/brs/view/id/1117>, diakses 20 Maret 2017.
- "Keanekaragaman Hayati Kondisi dan Permasalahannya," http://ani_mardiastuti.staff.ipb.ac.id/files/2011/09/kehatidan-permasalahannya.pdf, diakses 2 Maret 2017.
- "Modul I Keanekaragaman Hayati," http://file.upi.edu/direktori/FPMIPA/jur._pend._biologi/195305221980021-suroso_adi_yudianto/modul/modul1_keanekaragaman_hayaTI.pdf, diakses 2 Maret 2017.
- "PDRB Penduduk Bantaeng Naik 8,15 Persen," <https://bantaengkab.go.id/pdrb-penduduk-bantaeng-naik-815-persen/>, diakses 3 maret 2017.

Dokumen

- Bappenas 2015. *Capaian MDGS 2015*.
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2014*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 2015.
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2014*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 2016.
- Kementerian Kesehatan 2013. *Riset Kesehatan Dasar 2013*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 2015. *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2014*.
- Perpustakaan Bappenas. 2009. *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*.

- “Pendahuluan,” http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/40870/2/BAB%20I_2007sja-2.pdf, diakses 2 Februari 2018.
- “Pengertian Kesehatan Masyarakat,” <http://www.indonesian-publichealth.com/pengertian-kesehatan-masyarakat-2/>, diakses 2 Maret 2017.
- “Pengertian Kesehatan Mental,” <http://www.alodokter.com/kesehatan-mental>, diakses 29 Maret 2017. “Definisi Kesehatan Masyarakat,” https://www.academia.edu/8278738/Definisi_Kesehatan_Masyarakat, diakses 3 Maret 2017.
- “Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota 2010,” <https://bpspenajampaserutara.wordpress.com/category/pendapatan-regional/>, diakses 3 Maret 2017.
- “Sekelumit tentang Social Progress Index,” https://www.academia.edu/10443993/Sekelumit_tentang_Social_Progress_Index, diakses 1 maret 2017.
- “Studi Dokumentasi,” <http://www.apb-group.com/studi-dokumentasi/>, diakses 21 Maret 2017.
- Fauzik (2007) dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/55003/3/Chapter%20II.pdf>, diakses 1 maret 2017.
- Fauzik. 2007. “Chapter II”. dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/55003/3/Chapter%20II.pdf>, diakses 1 maret 2017.
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30654/4/Chapter%20II.pdf>, diakses 28 Februari 2017.
- Rusman R. Manik, tt, “Pembangunan Sosial di Indonesia: Sebuah Kajian terhadap UU 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Teoritis Pembangunan Sosial,” https://www.academia.edu/10501825/Pembangunan_Sosial_dan_Kesejahteraan_Sosial_di_Indonesia, diakses 28 Februari 2017.
- Slamet Suprayogi, dkk. tt. “Relevansi Spacial Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan Pengetahuan Siswa akan Kesiapsiagaan Perubahan Lingkungan dan Iklim,” <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4236/46.pdf?sequence=1>, diakses 1 Maret 2016.
- World Health Organization (WHO). Environmental Health. Disitasi dari: <http://www.WHO.int>, diakses 1 maret 2017.

Lampiran A.

Hasil Pengolahan Data Persepsi Responden (Variabel X) Provinsi Banten

I. INDIKATOR PENCEMARAN UDARA

1. Saya dapat menghirup udara yang bersih dan segar setiap saat

A	B	C	D	E
Selalu	Sering	Kadang-kadang	Pernah	Tidak pernah
42%	30%	24%	4%	0%

2. Polusi udara baik itu baik itu yang bersumber dari pembakaran sampah, kendaraan bermotor maupun industri kerap mengganggu.

A	B	C	D	E
Tidak pernah	Pernah	Kadang-kadang	Sering	Selalu
6%	22%	26%	40%	6%

II. INDIKATOR KUALITAS AIR

3. Jumlah air bersih yang selama ini digunakan untuk keperluan sehari-hari.

A	B	C	D	E
Sangat memadai	memadai	Cukup memadai	Tidak memadai	Sangat tidak memadai
20%	52%	22%	6%	0%

4. Kualitas air bersih yang selama ini digunakan untuk keperluan sehari-hari.

A	B	C	D	E
Sangat memadai	memadai	Cukup memadai	Tidak memadai	Sangat tidak memadai
22%	42%	30%	6%	0%

5. Saya menjumpai air sungai dalam kondisi kotor dan tercemar.

A	B	C	D	E
Tidak pernah	Pernah	Kadang-kadang	Sering	Selalu
8%	26%	20%	44%	2%

6. Saya mengalami sakit (seperti diare, gatal-gatal, dll) setelah menggunakan air sumur/sungai.

A	B	C	D	E
Tidak pernah	Pernah	Kadang-kadang	Sering	Selalu
34%	34%	22%	8%	2%

III. INDIKATOR TUTUPAN LAHAN

7. Menurut saya, kondisi hutan yang ada di provinsi ini adalah:

A	B	C	D	E
Sangat baik	Baik	Cukup baik	Tidak baik	Sangat tidak baik
4%	28%	48%	20%	0%

8. Kejadian kerusakan hutan seperti penebangan liar, kebakaran, di provinsi ini:

A	B	C	D	E
Tidak pernah	Pernah	Kadang-kadang	Sering	Selalu
12%	44%	34%	8%	2%

IV. INDIKATOR KEANEKARAGAMAN HAYATI

9. Kondisi keberagaman tumbuhan-tumbuhan yang ada di provinsi ini:

A	B	C	D	E
Sangat beragam	Beragam	Cukup beragam	Tidak beragam	Sangat tidak beragam
22%	32%	36%	10%	0%

10. Kondisi keberagaman hewan yang ada di provinsi ini:

A	B	C	D	E
Sangat beragam	Beragam	Cukup beragam	Tidak beragam	Sangat tidak baik
20%	36%	32%	10%	0%

11. Kejadian kepunahan beberapa jenis tumbuhan di provinsi ini akhir-akhir ini:

A	B	C	D	E
Tidak pernah	Pernah	Kadang-kadang	Sering	Selalu
30%	30%	34%	6%	0%

12. Kejadian kepunahan beberapa jenis hewan di provinsi ini akhir-akhir ini:

A	B	C	D	E
Tidak pernah	Pernah	Kadang-kadang	Sering	Selalu
28%	24%	36%	10%	0%

V. INDIKATOR KESEHATAN MASYRAKAT

13. Secara rata-rata, jumlah penduduk di provinsi ini yang akan tetap sehat dan bugar sampai usia 70 tahun diperkirakan:

A	B	C	D	E
Sangat banyak	Banyak	Cukup banyak	Tidak banyak	Tidak ada
2%	20%	42%	34%	0%

14. Jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia balita akhir-akhir ini:

A	B	C	D	E
Tidak ada	Tidak banyak	Cukup banyak	Banyak	Sangat banyak
14%	50%	26%	8%	2%

15. Kejadian penyakit atau wabah penyakit yang melanda penduduk di provinsi ini akhir-akhir ini:

A	B	C	D	E
Tidak ada	Tidak banyak	Cukup banyak	Banyak	Sangat banyak
20%	42%	26%	12%	0%

16. Jumlah anak-anak yang meninggal sebelum mencapai usia remaja akhir-akhir ini:

A	B	C	D	E
Tidak ada	Tidak banyak	Cukup banyak	Banyak	Sangat banyak
6%	60%	26%	8%	0%

17. Kasus balita yang kekurangan gizi di provinsi ini akhir-akhir ini:

A	B	C	D	E
Tidak ada	Tidak banyak	Cukup banyak	Banyak	Sangat banyak
10%	40%	32%	14%	4%

18. Kasus kasus Ibu yang meninggal saat melahirkan di provinsi ini akhir-akhir ini:

A	B	C	D	E
Tidak ada	Tidak banyak	Cukup banyak	Banyak	Sangat banyak
6%	58%	26%	8%	2%

VI. INDIKATOR KESEHATAN LINGKUNGAN

19. Kemudahan akses terhadap air bersih dari masing-masing rumah tangga selama ini:

A	B	C	D	E
Sangat mudah	Mudah	Cukup mudah	Tidak mudah	Sangat tidak mudah
12%	28%	42%	18%	0%

20. Jumlah rumah dengan kondisi sehat dan bersih di provinsi ini:

A	B	C	D	E
Sangat banyak	Banyak	Cukup banyak	Tidak banyak	Tidak ada
4%	30%	50%	16%	0%

21. Jumlah rumah yang memiliki sarana MCK bersih di provinsi ini:

A	B	C	D	E
Sangat banyak	Banyak	Cukup banyak	Tidak banyak	Tidak ada
12%	30%	46%	12%	0%

E. Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Variabel Y) Banten

Keterangan *)

ST: Sangat terpenuhi T: Terpenuhi CT: Cukup terpenuhi

KT: Kurang terpenuhi TT: Tidak terpenuhi

No	Indikator *)	ST	T	CT	KT	TT
1.	Materi					
A	Penyediaan makanan bergizi yang dibutuhkan masyarakat untuk keberlangsungan pola hidup sehat	18%	40%	24%	16%	2%
B	Penyediaan busana/pakaian yang layak dan terjangkau dibutuhkan masyarakat	18%	40%	28%	12%	2%
C	Ketersediaan perumahan sebagai tempat tinggal yang layak	8%	32%	32%	24%	4%
2.	Fisik					
A	Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit dan Puskesmas	16%	40%	30%	14%	0%
B	Ketersediaan tenaga kesehatan seperti dokter, bidan dan perawat	14%	38%	32%	16%	0%
C	Ketersediaan lingkungan yang bersih, termasuk udara bersih, sungai, danau yang tidak tercemar	8%	16%	40%	32%	4%
D	Kemudahan akses terhadap sumber air bersih	18%	26%	32%	22%	2%
E	Ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana untuk pengelolaan sampah yang baik	6%	12%	34%	42%	6%
3.	Mental					
A	Perasaan aman dari berbagai jenis kejahatan, gangguan, kriminalisasi, dsb.	6%	16%	36%	38%	4%
B	Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas mulai pada tingkat dasar dan menengah (SD, SMP, SLTA)	6%	32%	50%	10%	2%
C	Pendidikan yang berkualitas mulai pada tingkat lanjut (misal perguruan tinggi)	10%	20%	38%	30%	2%
D	Perasaan bahagia dan bergembira dalam menjalani kehidupan	20%	28%	44%	8%	0%
4.	Spiritual					
A	Kebebasan untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya	58%	24%	16%	2%	0%
B	Kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dan berkembang sesuai dengan potensinya	24%	40%	30%	4%	2%
C	Kesempatan untuk dapat melakukan kehidupan sosial dalam pergaulan masyarakat secara rukun, sejajar dan saling menghargai.	22%	48%	24%	6%	0%

DINAMIKA HUBUNGAN ANTARUMAT BERAGAMA POLA HUBUNGAN MUSLIM DAN HINDU DI BALI

*Dynamics of Inter-Religious Relations
The Pattern of Relations Between Muslims and Hindus In Bali*

A. Muchaddam Fahham

*achmad.fahham@dpr.go.id
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270*

Naskah diterima: 27 Februari 2017 | Naskah direvisi: 17 Mei 2018 | Naskah diterbitkan: 30 Juni 2018

Abstract: *In 2015, in terms of religious harmony in Indonesia, Bali Province was ranked second. The province of Bali received a score of 81.6 percent and was under the province of NTT which obtained a value of 83.3 percent. The acquisition of the harmony index shows that generally the relationship between religious believers in Bali is harmonious. Nevertheless, this does not mean that Bali is protected from the problems of relations between religious believers. This study aims to explain the pattern of relations between Islamic and Hindu communities in Bali. This study uses a qualitative approach, the data is collected through literature studies and interviews with several informants who are selected purposively. The findings obtained show that the pattern of relations between Muslim and Hindu followers is not single, but diverse. There are associative patterns and there are also patterns of disassociative relationships. Associative relationships are divided into three, namely cooperation, accommodating, and tolerance, while disassociative relationships are divided into two, namely competitive and conflict. Factors that encourage the birth of associative relationships are historical factors, economic interests, and integration factors. On the other side, the determinants of the birth of a disassociative relationship are factors of economic jealousy, lack of understanding of the teachings of Islam, communication and the strong customs implemented in Bali*
Keywords: *cooperation, accommodation, competition, conflict, associative, and disassociative.*

Abstrak: Di tahun 2015, dalam hal kerukunan umat beragama di Indonesia, Provinsi Bali menempati peringkat kedua. Provinsi Bali memperoleh nilai 81,6 persen dan berada di bawah Provinsi NTT yang memperoleh nilai 83,3 persen. Perolehan indeks kerukunan tersebut menunjukkan secara umum hubungan antarumat beragama di Bali adalah harmonis. Meskipun demikian, ini bukan berarti Bali terhindar dari problema hubungan antarumat beragama. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan pola hubungan antarumat Islam dan Hindu di Bali. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, data-datanya dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dengan beberapa informan yang dipilih secara *purposive*. Temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa pola hubungan antarumat Islam dan Hindu tidak tunggal, tetapi beragam. Ada pola hubungan yang asosiatif dan ada pula pola hubungan yang disasosiatif. Hubungan yang asosiatif dipilah menjadi tiga yakni kerja sama, akomodatif, dan toleransi, sementara hubungan yang diasosiatif dibagi menjadi dua, yakni kompetitif dan konflik. Faktor yang mendorong lahirnya hubungan yang asosiatif adalah faktor historis, kepentingan ekonomi, dan faktor integrasi. Sementara faktor penentu lahirnya hubungan yang disasosiatif adalah faktor kecemburuan ekonomi, ketidakmengertian terhadap ajaran agama Islam, komunikasi dan kuatnya adat yang berlaku di Bali.

Kata Kunci: kerja sama, akomodatif, kompetitif, konflik, assosiatif dan diasassosiatif

Pendahuluan

Dari sisi agama, Pulau Bali tidak saja dihuni oleh masyarakat yang memeluk agama Hindu, tetapi tetapi juga oleh masyarakat yang memeluk agama non-Hindu. Hasil sensus BPS 2010 menjelaskan penduduk Bali yang beragama non-Hindu adalah Islam (520.244), Katholik (64.454), Kristen (31.397), Hindu (3.247.283), Budha (21.156), dan Konghuchu (427), lainnya (282). (BPS Provinsi Bali, 2010)¹. Masyarakat Bali yang multiagama itu, dipandang sebagai masyarakat yang rukun (Ismail, 2010), (Wildaniyati, 2018), toleran, saling menghargai, bekerja sama, dan tolong menolong (Suwindia, 2012). Pandangan itu ditegaskan dalam hasil survei Kementerian Agama RI 2015 tentang indeks kerukunan antarumat beragama di Indonesia yang menempatkan Provinsi Bali pada peringkat kedua dalam perolehan indeks kerukunan setelah provinsi NTT. Provinsi NTT memperoleh nilai 83.3 dan Provinsi Bali memperoleh nilai 81.6 (Kemenag RI, 2015). Meskipun memiliki indeks kerukunan tertinggi kedua setelah Provinsi NTT, tidak berarti bahwa hubungan sosial antarumat beragama dalam masyarakat Bali sama sekali tidak ada masalah. Interaksi sosial antarumat beragama yang rukun di Bali ada kalanya diwarnai oleh berbagai masalah yang melahirkan ketegangan interaksi sosial antarumat beragama, ketegangan interaksi antarumat tersebut terjadi pada interaksi antara umat Hindu dan Muslim. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa interaksi sosial antarumat Hindu dan Muslim di Bali tidak selalu rukun tetapi juga mengalami ketegangan-ketegangan. Dengan kata lain, interaksi sosial antarumat Hindu dan Muslim di Bali bersifat dinamis. Ada kalanya interaksi sosial kedua umat tersebut rukun, kerja sama, dan saling menghormati, tapi ada kalanya interaksi sosial antarumat beragama tersebut mengalami ketegangan-ketegangan yang dipicu antara lain oleh pembangunan tempat ibadah,

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, "Penduduk Provinsi Bali Menurut Agama yang Dianut Hasil Sensus Penduduk 2010," <http://bali.bps.go.id/2018>, diakses 24 Mei 2018.

pembangunan sarana pendidikan keagamaan, penggunaan jilbab di sekolah, penolakan atas pengembangan wisata syariah dan penolakan atas pendirian bank syariah di beberapa tempat di Bali. Interaksi sosial antarumat Hindu dan Muslim di Bali seperti disebutkan di atas menarik untuk dikaji. Ada dua pertanyaan yang diajukan pertama, bagaimana pola hubungan Muslim dan Hindu di Bali? Apa saja faktor yang mendorong lahirnya pola hunungan tersebut?

Studi ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan tersebut. Data-datanya dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan berbagai hasil studi tentang interaksi antarumat beragama di Bali yang telah ditulis oleh para peneliti yang tersebar di berbagai karya tulis baik dalam bentuk buku maupun jurnal. Sementara itu, studi lapangan dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan informasi dari informan terpilih yang dipandang mengetahui dan memahami interaksi antarumat beragama yang terjadi dalam masyarakat Hindu dan Muslim di Bali. Hasil studi pustaka dan studi lapangan tersebut kemudian dikategorisasi dan diklasifikasi sesuai dengan tujuan studi ini, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang menggambarkan pola interaksi dan faktor yang mendorong interaksi pola interaksi antarumat Hindu dan Muslim di Bali.

Pola Hubungan Muslim dan Hindu di Bali

Mayoritas masyarakat Bali merupakan pemeluk agama Hindu, tetapi Islam bukan merupakan agama yang asing bagi mereka. Islam merupakan agama yang telah lama hidup dan berkembang di tengah-tengah mereka. Secara historis, perjumpaan antara Islam dan Hindu di Bali telah berlangsung sejak lama. Beberapa studi yang telah dilakukan misalnya oleh Kartini (2011), Masyad (2014), dan Diana (2016) menyebutkan bahwa Islam masuk ke Bali sejak zaman kerajaan Majapahit saat kerajaan tersebut diperintah oleh Raja Hayam Wuruk (1350-1389 M) dan terus berkembang sampai sekarang. Hubungan Muslim dan Hindu di Bali, dengan demikian bukan hal baru, hubungan kedua umat tersebut telah terjalin lama dan melahirkan pola hubungan yang dinamis.

Dalam studi sosiologi (Soekanto, 2012:264) hubungan sosial dimaknai sebagai hubungan yang terjadi antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dan kelompok lainnya, atau antara kelompok dengan individu. Hubungan sosial juga dipandang sebagai hubungan sosial yang dinamis dan dibagi menjadi dua bentuk, yakni hubungan sosial yang asosiatif dan diasosiatif. Pola hubungan asosiatif merupakan pola hubungan yang positif, bersifat mempersatukan dan menghasilkan keteraturan. Pola hubungan yang asosiatif merupakan proses sosial yang harmonis. Pola hubungan sosial yang asosiatif dibagi tiga, yakni kerja sama, akomodasi, dan asimilasi. Kerja sama akan terjadi jika orang menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang sama memiliki cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri mereka. Faktor pendorong lahirnya kerja sama adalah kepentingan bersama. Akomodasi merupakan suatu proses adaptasi atau penyesuaian diri. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menafikan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Asimilasi merupakan proses sosial untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada pada orang perorang atau kelompok-kelompok, selain itu asimilasi juga ditujukan untuk meningkatkan kesatuan tidak dan sikap agar tujuan bersama dapat dicapai. Asimilasi dapat berupa asimilasi kultural dan asimilasi struktural. Asimilasi kultural merupakan proses adaptasi nilai, kepercayaan, dogma ideologi, bahasa, dan sistem simbol dari suatu kelompok, sehingga terbentuk budaya atau kultur baru. Sementara asimilasi struktural merupakan proses penetrasi budaya dari suatu kelompok ke dalam kelompok lain melalui kelompok primer, seperti keluarga, teman dekat, dan klik (kelompok kecil) dalam kelompok (Tobroni, 2012:66-67).

Pola hubungan diasosiatif disebut juga dengan *opositional procesess*, yakni hubungan sosial yang bersifat pertentangan dengan orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan. Pola hubungan diasosiatif dibagi tiga, yakni persaingan (*competition*), kontroversi

(*contravention*), dan pertentangan atau pertikaian (*conflict*). Persaingan merupakan proses sosial di mana individu atau kelompok manusia bersaing, mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu waktu tertentu menjadi perhatian umum dengan cara menari perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Ada beragam bentuk persaingan, di antaranya adalah persaingan ekonomi, budaya, status sosial, dan etnik atau ras. Dua pola hubungan tersebut digunakan untuk memotret dinamika pola hubungan Muslim dan Hindu di Bali.

Kerja Sama

Kerja sama antara Muslim dan Hindu di Bali telah terbangun sejak era kerajaan Bali. Kerja sama tersebut terjadi seiring dengan migrasi orang-orang Islam ke Bali (Atmadja, 2010:426). Di era kerajaan Bali, salah satu kerja sama yang dikembangkan oleh umat Hindu dan Muslim adalah kerja sama di bidang militer. Kerja sama tersebut dapat ditelusuri di era kerajaan Buleleng, Badung, dan Jembrana. Di tahun 1587 Raja Buleleng, Panji Sakti membawa laskar Muslim asal Bugis-Mandar dari Blambangan ke Buleleng. Laskar muslim tersebut pada mulanya bermarkas di Prampang-Blambangan kemudian dibawa oleh Panji Sakti guna membatunya dalam pertempuran memperebutkan Blambangan dari kekuasaan kerajaan Mataram (Kartini, 2011:128).

Menurut Mashad (2014:190), ketika kerajaan Bali terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil, banyak raja dari kerajaan kecil tersebut yang menjalin kerja sama dengan orang-orang Muslim Bugis dan Jawa-Madura untuk mempertahankan kerajaan mereka dari serangan kerajaan kecil lainnya. Dalam catatan Kartini (2011:128), tahun 1770 Raja Badung Cokorde Pemecutan berusaha menyerang kerajaan Jembrana dari arah selatan Desa Perancak, namun serangan itu berhasil dipatahkan oleh pasukan kerajaan Jembrana yang didukung oleh orang-orang Muslim Bugis-Makassar. Pada tahun 1828 terjadi peperangan kedua kalinya antara kerajaan Jembrana dan kerajaan Buleleng. Peperangan ini dimenangkan

oleh kerajaan Jembrana. Pasukan Jembrana yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Gde diperkuat oleh pasukan Muslim dan berhasil mengalahkan pasukan Buleleng dan menewaskan Raja Anak Agung Gde. Saat kerajaan Badung berperang melawan kerajaan Mengwi tahun 1891, Raja Badung juga menggunakan prajurit-prajurit muslim asal Serangan dan Kepaon guna membatunya dalam memenangkan peperangan melawan Mengwi. Ketika Anak Agung Putu Handul menjadi Raja Jembrana III, Raja Jembrana ini juga menggunakan orang-orang Bugis-Makassar Muslim untuk membantu pasukan Jembrana memukul mundur pasukan Raja Tabanan yang mencoba menyerang Jembrana.

Kerjasama penguasa kerajaan dengan laskar-laskar Muslim terus terjalin tidak hanya pada saat kerajaan Bali terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil tetapi juga pada saat masuknya kolonial Belanda ke Bali. I Gusti Ketut Jelantik misalnya, adalah patih kerajaan Buleleng yang populer di era perang Buleleng melawan kolonial Belanda. Pada 1846 I Gusti Ketut Jelantik berhasil memukul mundur Belanda dari Buleleng. Keberhasilan tersebut berkat bantuan laskar Bugis-Muslim dari Jembrana dan Buleleng yang membendung jalur masuk pasukan Belanda ke Buleleng. (Kartini, 2011:128). Meskipun akhirnya pada April 1849 Hindia-Belanda berhasil mengalahkan Pasukan Buleleng-Jembrana (Bali), namun secara historis partisipasi pasukan Muslim dalam mempertahankan Bali dari penjajah tak bisa dipungkiri (Mashad, 2014:238).

Kerjasama Muslim dan Hindu di Bali pada era kerajaan juga tampak pada permukiman. Sebagian besar permukiman Muslim saat itu merupakan pemberian Raja atas jasa besar warga Muslim yang telah membantu kerajaan dalam berbagai peperangan. Saat ini, permukiman Muslim tersebut masih dapat ditemukan di berbagai wilayah di Bali. Hingga saat ini berbagai permukiman itu masih dapat dijumpai di Klungkung, Badung, Denpasar, Buleleng, Jembrana, Tabanan, Karangasem, Gianyar, dan Bangli (Mashad, 2014:131-180). Perkampungan Muslim di Pegayaman, Buleleng misalnya, merupakan tempat yang diberikan

oleh Raja Panji Sakti bagi laskar Muslim yang telah membantu kerajaan Buleleng dalam peperangan memperebutkan Blambangan. Termasuk para punggawa yang dikirim dari Jawa untuk menggembala gajah pemberian Raja Mataram yang juga diberikan tempat bermukim di Pegayaman dan Tegallingah. Demikian pula di kerajaan Badung, Raja Pamecutan III menghadihkan tempat pemukiman di Kepaon bagi Raden Sastraningrat dan pengikutnya dari Jawa-Madura yang telah berjasa membantu kerajaan Badung mengalahkan Kerajaan Mengwi (Kartini, 2011: 129).

Selain militer dan permukiman, kerjasama Muslim dan Hindu juga terjadi di bidang pertanian, terutama pada lembaga subak. Subak adalah sistem irigasi di Bali yang telah ada sejak lama dan diwariskan secara turun temurun. Subak juga merupakan sistem irigasi tradisional yang bercorak sosio religius yang didasarkan atas filosofi Tri Hita Karana, yang bermakna untuk menjaga keselarasan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya serta manusia dengan alam sekitarnya. Oleh karena itu, subak disebut bercorak sosio-religius (Atmadja, 2010:308). Selain itu, dalam implementasinya, sistem subak dilandasi oleh jiwa dan semangat gotong royong yang tinggi dari pengelola dan para anggotanya (Suputra, 2008). Anggota lembaga subak pada umumnya tidak saja berasal dari pemeluk Hindu, tetapi juga berasal dari pemeluk Islam. Kerjasama pengelolaan subak masih terjadi hingga sekarang seperti yang dipraktikkan para pengelola Subak Pancoran di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng (Arta, 2010:CIV). Komunitas Muslim Bali yang bergerak di bidang pertanian lazim bergabung dalam lembaga subak. Dalam lembaga subak ada kesepakatan-kesepakatan yang unik dan berubah sesuai konteks zamannya. Anggota subak dari kalangan Muslim di Desa Banyubiru misalnya, pada awalnya mereka memiliki dua kewajiban, yakni membayar iuran pembagian air dan iuran untuk ritual yang dilakukan pemeluk Hindu di pura. Namun, dalam perkembangannya kewajiban itu diubah, kelompok Muslim bergabung dalam lembaga subak hanya dibebani

kewajiban membayar iuran pembagian air dan tidak lagi membayar iuran untuk kepentingan ritual pura. Meskipun demikian, kelompok Muslim tetap terlibat dalam kerja-kerja di luar ritual pura, misalnya kerja sama untuk membangun bendungan dan pemeliharaan fisik subak.

Pemeliharaan fisik subak meliputi pemeliharaan *bale subak* (bangunan milik organisasi subak digunakan sebagai tempat rapat subak), *pura bedugul* (tempat pemujaan yang berkaitan dengan wilayah subak dan pelaksanaan pertanian), *empelan* (bendungan air), *aungan* (terowongan air), dan *telabah* (saluran air). Pemeliharaan bangunan fisik tersebut melibatkan semua komponen anggota yang berbeda agama, baik masyarakat beragama Hindu, Islam, Kristen, maupun Budha. Kerja sama pemeliharaan fisik subak tampak pada kegiatan *matelik* (perbaikan saluran air) maupun pemeliharaan *empelan* (bendungan air). Masing-masing anggota subak mendapat tugas-tugas memelihara kondisi fisik subak secara adil dan merata tanpa memandang agama yang dianut, ada kelompok yang bertugas mengatur air, memelihara saluran air, maupun memelihara bendungan. Masing-masing kelompok bertanggung jawab atas keadaan bendungan, kelancaran pasokan air, maupun pengaturan pembagian air. Sementara itu, pemeliharaan fisik yang agak berat dan membutuhkan tenaga besar, pembagian kelompok tugas tidak berlaku. Seluruh anggota bekerja sama mengatasi pekerjaan tersebut, misalnya perbaikan bendungan jebol atau pun memperbaiki *bale* subak. Khusus untuk perbaikan *pura* subak, masyarakat muslim tidak ikut terlibat, perbaikan hanya dilaksanakan oleh pihak anggota yang beragama Hindu. Biaya perbaikan ditanggung bersama, baik masyarakat Hindu maupun masyarakat non-Hindu (Armini, 2013:39-53). Hal lain yang menarik dalam lembaga subak adalah *nandu*, yakni sistem bagi hasil antara kelompok Muslim sebagai penggarap sawah dengan pemeluk Hindu sebagai pemilik sawah. Sistem ini telah berlaku sejak lama di tengah-tengah masyarakat Hindu di Bali, sebab ketika komunitas Muslim pertama kali datang ke Bali mereka bukan pemilik tanah (Kartini 2011: 129).

Secara historis kerja sama orang-orang Islam dan Hindu di Bali dalam bidang perdagangan juga telah terjalin sejak masa kerajaan. Gejala ini menurut Atmadja (2010:316) tampak pada pelabuhan Kota Banding atau Tebading di pantai Desa Pakraman Kubutambahan (Kawista), Buleleng. Menurut Kartini (2011:116) orang-orang Bugis-Islam yang berprofesi sebagai pedagang menyalurkan hasil bumi seperti beras dan kelapa, ke luar Bali dan membawa kain, alat rumah tangga, alat-alat pertanian dan sebagainya ke Bali. Orang-orang Bugis-Islam ini mampu melakukan hal tersebut karena memiliki perahu dagang. Besarnya peran orang-orang Bugis-Islam bagi kemajuan ekonomi Bali saat itu mendorong beberapa kerajaan kecil di Bali untuk memberi mereka hak untuk bermukim di Bali. Ketika orang-orang Muslim ini bermukim di Bali hubungan masyarakat Muslim dengan Hindu menjadi sangat intens. Dampaknya kemudian adalah lahirnya konversi agama dan sistem kekerabatan melalui lembaga perkawinan. Di Buleleng misalnya, salah seorang keluarga raja pada era kerajaan ada yang beralih agama, dari Hindu ke agama Islam. Hal demikian bisa dilihat pada salah seorang keluarga Raja Buleleng, I Gusti Ketut Tubun atau Imam Wasir Ketut Tubun memeluk agama Islam, kemudian diangkat menjadi punggawa yang mengepalai desa-desa Islam di pantai utara Buleleng pada awal abad ke-19.

Akomodatif

Muslim Bali memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan budaya Bali yang mengitarinya. Kemampuan adaptasi itu melahirkan budaya Muslim Bali yang unik. Di antara budaya tersebut adalah *ngejot* dan *megibung*. *Ngejot* merupakan kebiasaan Muslim Bali mengantarkan makanan kepada tetangganya yang Muslim maupun yang Hindu. (Nuryahman, 2015:327-334). Tradisi tersebut pada mulanya merupakan tradisi umat Hindu Bali saat perayaan Galungan, Nyepi, dan Kuningan. Tradisi ini kemudian adaptasi umat Islam Bali, mereka melakukan *ngejot* saat menjelang perayaan Idul Fitri, Maulid Nabi saw, dan Idul Adha. Kata *ngejot* dalam bahasa Bali berarti “memberi.”

Dalam *ngejot*, umat Islam maupun umat Hindu memberikan makanan, jajanan, atau buah-buahan. Tradisi *ngejot* dipandang sebagai penanda kerukunan antarumat Muslim dan Hindu di Bali. Sampai saat ini tradisi *ngejot* masih dipraktikkan baik oleh masyarakat Muslim maupun masyarakat Hindu Bali. Di Desa Pegayaman misalnya, masyarakat Islam melakukan *ngejot* saat perayaan idul fitri, maulid Nabi, dan idul adha. Sementara masyarakat Hindu Bali juga melakukan *ngejot* ketika memperingati hari raya galungan. Pada hari raya tersebut, masyarakat Hindu Bali membagikan buah-buahan kepada masyarakat Islam (Soviawan, 2013:9).

Tradisi lain yang unik adalah *megibung* yakni tradisi makan bersama-sama dalam satu dan waktu tertentu, biasanya dilakukan setiap tanggal 10 Ramadan. Menu utama dalam makan bersama tersebut adalah nasi tumpeng dengan lauk daging sapi dan ayam cincang yang diberi bumbu kedoteng, yakni racikan dari rempah-rempah lengkap sebagai penyedap utama sajian khas pada Hari Raya Galungan dan Kuningan. *Megibung* berasal dari kata *gibung* yang mendapat awalan *me* sehingga menjadi *me-gibung* berarti kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang yang saling berbagi antara orang yang satu dengan lainnya. Tradisi *megibung* pada mulanya merupakan tradisi umat Hindu kemudian diadaptasi oleh umat Islam Bali. Tradisi *megibung* yang dilakukan umat Islam Bali dapat ditemukan di Kampung Islam Kepaon, umat Islam di kampung tersebut melaksanakan *megibung* sebanyak tiga kali, yakni setiap hari ke-10, ke-20, dan ke-30 bulan Ramadan. Sementara tradisi *megibung* yang dilakukan oleh umat Hindu dapat ditemukan di Karangasem terutama saat dilakukannya upacara-upacara adat seperti upacara odol, ngaben, metatah dan Pawiwahan (Wulandari, 2017:29-40).

Adaptasi masyarakat Islam Bali terhadap kultur umat Hindu juga tampak pada arsitektur bangunan rumah yang dikembangkan oleh masyarakat di Pegayaman Buleleng. Arsitektur rumah masyarakat Islam di desa tersebut mengadaptasi arsitektur bangunan milik masyarakat Hindu di Bali (Prasetya, 2012:57).

Beberapa arsitektur bangunan masjid di Bali juga menyerap arsitektur bangunan khas Bali. Masjid Jami Singaraja misalnya ditemukan pola ornamen Bali dan simbol swastika pada pintu masjid. Mihrab masjid tersebut polanya mirip pelinggih Bathara. Pola *meru* juga dapat dilihat pada Masjid Keramat di Kajan (Buleleng). Di kampung Gelgel, bentuk masjid tidak berbentuk kubah yang menjadi ciri asli seni arsitektur Islam, melainkan berbentuk tumpang yang biasanya terdapat pada bangunan suci umat Hindu (Kartini, 2011:133).

Adaptasi masyarakat Muslim Bali juga tampak pada penggunaan nama untuk anak-anak mereka. Nama-nama masyarakat Bali seperti Putu, Made, Kadek, dan Ketut juga dipakai masyarakat Islam Kepaon sebagai julukan untuk anak-anak mereka. Bedanya, nama-nama khas Bali yang menunjukkan urutan kelahiran dalam keluarga itu tidak diformalkan secara administratif, melainkan hanya sebuah panggilan sehari-hari. (Nuryahman, 2015: 332).

Masyarakat Muslim Bali juga berupaya menyesuaikan bahasa yang digunakannya dengan bahasa Bali. Upaya demikian dapat ditemukan pada masyarakat Islam Pegayaman. Masyarakat Muslim di Pegayaman secara historis berasal dari Jawa dan Bugis, tetapi bahasa ibu yang mereka gunakan adalah bahasa Bali. Tak heran jika mereka fasih berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Bali. Bahasa Bali yang berkembang dalam komunitas Islam Pegayaman juga hampir sama dengan Bahasa Bali yang berkembang pada masyarakat Bali umumnya. Mereka mengenal *angghah-ungguh* Basa Bali yakni Basa Bali *alus*, *madya* dan *kesamen*. Masyarakat Islam Pegayaman tidak mengenal pelapisan masyarakat berdasarkan keturunan (*received status*) seperti yang terjadi pada masyarakat Bali. Penggunaan *angghah-ungguh* Basa Bali hanya sebatas pada lawan bicara. Basa Bali *alus* digunakan saat berkomunikasi dengan orang yang dihormati seperti *penglingsir*, tokoh adat, dan agama, atasan, pejabat desa, dan sebagainya. Basa Bali *madya* digunakan dalam kehidupan keseharian kepada orang yang dituakan seperti orang tua, paman, orang baru

dikenal dan sebagainya. Sementara itu, Basa Bali *kesamen* digunakan dalam interaksi sosial sehari-hari dengan teman sebaya (Budarsa, tt:5).

Upaya masyarakat Muslim Bali untuk menyesuaikan diri dengan kultur masyarakat Hindu Bali juga tampak pada perayaan hari besar keagamaan. Masyarakat Muslim di Pegayaman (Buleleng) misalnya saat melakukan perayaan Maulud Nabi utamanya hari pertama tanggal 12 Rabiul Awal membuat *sokok base* rangkaian daun sirih, kembang, dan buah-buahan. *Sokok base* ini mirip dengan *pajegan* yang dibuat masyarakat Hindu Bali saat upacara hari-hari tertentu. Puluhan *sokok base* dibawa ke masjid dan dideretkan di tengah-tengah lingkaran orang yang membacakan barzanji (karya sastra Arab klasik yang berisi riwayat dan puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW). Kemudian pada hari kedua tanggal 13 Rabiul Awal warga membuat *sokok taluh* untuk merayakan *muludan taluh* (muludan telur) dengan membuat *grodok maulud* berisikan rangkaian serupa *sokok base* namun dilengkapi dengan telur dan buah-buahan yang disusun pada batang pisang. Sebelum dibawa ke masjid, *sokok* ini diarak keliling desa disertai dengan iringan musik rebana dan atraksi pencak silat. Sesampainya di masjid, dilakukan doa dan zikir bersama yang dilanjutkan dengan ceramah agama oleh imam masjid. Di akhir prosesi, *sokok base* dan *sokok taluh* dibongkar dan isinya dibawa pulang warga untuk mendapatkan berkah doa sekaligus penolak bala (Kartini, 2011:133).

Tradisi lainnya di Pegayaman tampak dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pada kedua hari raya itu masyarakat Muslim Pegayaman melaksanakan salat id sama seperti Muslim lainnya. Namun, yang menarik adalah mereka menambahkan rangkaian hari-hari menjelang hari raya Idulfitri, yakni *penapean*, (hari membuat tape pada hari ke-3 menjelang Idul Fitri), *penyajaan* (hari membuat jajan uli pada hari ke-2 menjelang Idul Fitri), dan *penampahan* (hari memotong hewan dan mengolah daging sapi sehari menjelang Idulfitri), dan *manis lebaran* (sehari setelah hari H). Rangkaian tradisi ini sama seperti yang dilakukan umat Hindu menjelang hari Galungan, namun bagi Muslim

bukan merupakan bentuk ibadah (Kartini, 2011:133). Pelaksanaan salat Idulfitri di Desa Pegayaman dibagi dua waktu, *pertama*, untuk kalangan perempuan dilaksanakan pada pukul 07.00 wita di musala masing-masing. *Kedua*, untuk kalangan laki-laki dilaksanakan pada pukul 09.00 wita di Masjid Safinatussalam. Menurut Wayan Muhajir, pemisahan demikian dilakukan semua warga muslim yang melaksanakan salat Idulfitri dapat melaksanakannya dengan tenang dan hikmat. Karena saat ibu-ibu dan remaja Muslimah melaksanakan salat, bapak-bapak bertugas menjaga anak-anak yang masih kecil di rumah masing-masing begitu juga sebaliknya (Tirthayasa, 2015:1).

Mengapa komunitas Islam mampu beradaptasi dengan tradisi lokal di Bali? *Pertama*, komunitas Islam yang masuk ke Bali merupakan komunitas Islam yang sebelumnya telah terbiasa beradaptasi secara sukarela dengan tradisi Hindu-Buddha yang ada di Jawa. Ketika masuk ke Bali mereka dapat menyesuaikan diri tanpa banyak kendala. Meskipun melakukan adaptasi budaya, komunitas Islam Bali tetap mampu memegang prinsip-prinsip ajaran agamanya. Apalagi tradisi lokal yang mereka temui di Bali hampir sama dengan tradisi lokal yang ada di Jawa. *Kedua*, adaptasi komunitas Islam dengan tradisi lokal Bali itu juga merupakan upaya mereka untuk mengenalkan Islam kepada masyarakat Hindu Bali secara damai dan menghindari konflik antarbudaya. Ketika komunitas Islam hadir di Bali, mereka merupakan komunitas asing bagi masyarakat Hindu Bali. Komunitas Islam yang asing itu, perlu menunjukkan keberislaman dengan wajah lokal. Apa yang dilakukan oleh komunitas Islam di Bali itu dapat dipandang sebagai strategi penyebaran Islam yang telah lazim terjadi di Jawa, yakni melakukan adaptasi dan seleksi dalam menghadapi budaya dan tradisi yang berkembang di Nusantrara (Qomar, 2015: 318).

Toleransi

Secara historis hubungan antara umat Islam dan Hindu di Bali adalah harmonis. Kedua komunitas agama tersebut saling menghormati, bahkan seperti telah disinggung di atas, kedua

komunitas saling bekerja sama, dan komunitas Islam berusaha untuk beradaptasi dengan kultur masyarakat Hindu Bali sehingga tercipta kultur Muslim Bali yang unik. Pertanyaannya adalah mengapa di era lama hubungan komunitas Islam dan Hindu Bali tersebut harmonis? Menurut Mashad (2014:190-204) hubungan harmonis dua komunitas berbeda itu ditentukan setidaknya oleh dua faktor, *pertama*, faktor keterkaitan sosio-historis komunitas Muslim dan Puri. *Kedua*, faktor hubungan kekerabatan Muslim dan Hindu Bali.

Faktor *pertama*, hampir semua komunitas Islam di kampung-kampung Islam era lama di Bali memiliki keterkaitan sosio-historis dengan puri. Puri dikenal sebagai tempat tinggal bangsawan Bali, terutama mereka yang merupakan keluarga dekat raja-raja Bali. Menurut pembagian triwangsa atau kasta, puri ditempati oleh bangsawan berkasta kesatria. Kedekatan sosio-historis komunitas Islam dan puri berawal di Kerajaan Gelgel, ketika Prabu Hayam Wuruk (1350-1389) memberi hadiah empat puluh orang pengiring beragama Islam kepada Dalem Ketut Ngelesir (1380-1460). Pemberian hadiah itu terjadi saat Raja Gelgel itu pulang ke Bali setelah melakukan kunjungan ke Majapahit. Empat puluh Muslim tersebut menetap di Bali dan menjadi abdi dalem yang setia kepada kerajaan Gelgel (Mashad, 2014:192). Empat puluh Muslim itulah yang kemudian menjadi cikal bakal Kampung Islam di Gelgel dan Klungkung (Atmadja, 2010:283). Kedekatan sosio-historis komunitas Islam dan puri tidak hanya terjadi di Gelgel dan Klungkung tetapi juga terjadi di hampir semua puri di Bali, seperti Tabanan, Buleleng, Denpasar-Badung, Jembrana, dan Karangasem (Mashad, 2014:193-202). Masing-masing puri memiliki kisah kedekatan sosio-historis yang unik, Kedekatan sosio-historis puri Tabanan dengan komunitas Muslim misalnya berawal dari jalinan perkawinan keluarga puri dengan tokoh Islam. Adalah Aryo Nur Alam pemuda Islam asal Blambangan datang ke Bali tahun 1808 di usia 15 tahun dan diangkat sebagai juru bahasa keraton karena kemampuannya menerjemahkan surat-surat berbahasa Jawa yang diterima oleh raja Tabanan, Batara Ngeluhur. Nur Alam

dikenal berperangai baik dan berloyalitas tinggi. Raja Tabanan pun terkesan kemudian mengawinkannya dengan salah seorang putrinya. Raja Tabanan juga memberinya tanah pelungguhan. Tanah pelungguhan tersebut hingga saat ini dikenal sebagai Kampung Jawa atau Banjar Tunggul Sari dan merupakan Kampung Islam di Tabanan. Di Buleleng ada kampung Islam Pagayaman. Keberadaan kampung tersebut merupakan penanda adanya kedekatan sosio-historis komunitas Islam dengan puri. Ada tiga kisah yang menjelaskan awal mula terbentuknya Kampung Islam Pagayaman. Kisah pertama menjelaskan bahwa Kampung Pagayaman terbentuk setelah pasukan Mataram menaklukkan Jawa Timur (Giri Kedaton) tahun 1635. Kemenangan ini mendorong Raja Buleleng mengundang sebagian pasukan Mataram untuk menjadi pasukan bayaran untuk menjaga atau menghadapi ancaman keamanan dari kerajaan lain di Bali. Kisah kedua menjelaskan bahwa Kampung Islam Pagayaman terbentuk dari pemberian tanah sebagai tempat tinggal pawang gajah dari Mataram. Raja Mataram memberi raja Buleleng seekor gajah berikut tiga orang pawang. Dua orang diberi tempat tinggal di Banjar Jawa sementara satu lagi tinggal di Pantai Lingga (Atmadja, 2010: 285).

Relasi sosio-historis komunitas Islam dan Hindu di Denpasar-Badung, terjadi karena kepentingan politik, pertahanan dan perkawinan. Komunitas Islam di Denpasar-Badung dapat ditemukan di desa Kepoan. Cikal bakal komunitas Islam di Kepoan berasal dari Madura. Raden Suryadiningrat seorang pangeran dari kerajaan Bangkalan yang terdampar di Sanur kemudian membantu Raja Pemecutan dalam mempertahankan kerajaannya yang saat itu sedang berperang melawan kerajaan Mengwi. Raja Pemecutan menang dalam peperangan melawan Raja Mengwi atas bantuan Pangeran Raden Suryadiningrat (Suwindia, 2012:53-76). Setelah kemenangan itu, Pangeran Suryadiningrat kemudian mempersunting Ni Ayu Rai, Putri Raja Pemecutan, setelah pernikahan pangeran Suryadiningrat membawa sang putri ke Madura dan memeluk Islam serta berganti nama menjadi

Dewi Katijah (Atmadja, 2010:294). Setelah pengetahuan agamanya matang, Suryadiningrat membawa sang putri kembali ke Bali. Kedatangan Suryadiningrat dan sang putri disambut dengan baik oleh Raja Pemecutan, namun ketika sang raja mengetahui bahwa putrinya telah memeluk Islam, sang raja kemudian mengasingkannya di Kebon yang saat ini dikenal sebutan desa Kepoan (Nuryahman, 2015:327-334). Hubungan Puri Pemecutan dan Kampung Islam Kepoan hingga saat ini masih terjaga dengan baik, hingga saat ini komunitas Islam Kepoan masih menganggap dirinya sebagai anak buah Puri Pemecutan (Atmadja, 2010:293).

Kedekatan sosiohistoris juga ditemukan di Puri Karangasem. Menurut Agung dalam Atmadja (2018:293) sebagai pusat pemerintahan, puri Karangasem dikelilingi perlampungan Islam yang ditata penempatannya guna mewujudkan kerukunan antarumat beragama. Kampung Islam digunakan sebagai benteng pertahanan. Mereka disusun dalam dua lapisan permukiman yang mengelilingi puri. Studi Mashad (2014:194) menjelaskan penempatan perkampungan komunitas Islam sebagai benteng pertahanan memang masuk akal, karena komunitas Islam yang datang dari kerajaan Selaparang (Lombok) adalah orang-orang memiliki keberanian dan kekuatan. Uniknyanya komunitas Islam yang didatangkan adalah mereka yang sudah berkeluarga atau suami-istri dan ditempatkan di sekeliling puri Kangingan sebagai tempat raja. Hampir semua kampung Islam di Karangasem pada awalnya berfungsi sebagai benteng keamanan puri.

Berbeda dengan yang terjadi di Denpasar-Badung, faktor sosiohistoris yang mendekatkan hubungan Muslim dan Hindu Bali di Jembrana adalah faktor ekonomi. Komunitas Islam yang datang ke Jembrana adalah komunitas Islam asal Kesultanan Goa yang datang ke Jembrana setelah kesultanan Goa ditaklukkan Belanda. Mereka datang ke Jembrana dengan perahu-perahu dagang dan membawa berkah ekonomis bagi Jembrana. Daerah itu kemudian menjadi ramai dikunjungi oleh para pedagang dan tidak lagi terisolir dari dunia luar (Mashad, 2014:195). Selain komunitas Islam Bugis, Jembrana juga

didatangi oleh komunitas Islam dari Melayu Pontianak. Salah satu pimpinan komunitas Islam Melayu Pontianak itu adalah Syarif Abdullah bin Yahya Al-Qadri. Komunitas ini menetap di Loloan atau disebut juga dengan Bandar Pancoran. Komunitas Islam Bugis dan Melayu Pontianak ini kemudian melakukan hubungan perkawinan. Perkembangan komunitas Islam yang cukup pesat di Loloan itu mendorong Raja Jembrana untuk memberikan izin kepada komunitas Islam untuk mendirikan masjid pada tahun 1848. Hingga sekarang Loloan masih menjadi komunitas Islam yang cukup terkenal di Kabupaten Jembrana (Atmadja, 2010:322).

Faktor *kedua*, hubungan harmonis komunitas Islam dan Hindu di Bali disokong oleh hubungan kekerabatan Muslim-Hindu Bali. Hubungan kekerabatan tersebut diikat oleh tali perkawinan antar Muslim dan Hindu Bali. Salah satu penanda yang paling sering disebut adalah kasus perkawinan Pangeran Sosroningrat adalah seorang muslim asal Madura (Mataram) dengan putri Raja Badung. Seperti sudah disebut sebelumnya, perkawinan tersebut mendekatkan hubungan komunitas Islam Kepoan dengan puri Pemecutan serta masyarakat Hindu Bali pada umumnya. Hubungan kekerabatan melalui perkawinan tidak saja terjadi di Kepoan, tetapi juga terjadi di desa-desa lain seperti Pengastulan, Banyu Poh, Tegallinggah, Buleleng, dan Julah. Hubungan kekerabatan melalui perkawinan seperti itu menurut Atmadja (2010:211) merupakan modal sosial dalam toleransi. Praktik perkawinan yang terjadi adalah perkawinan silang antara umat Islam dan Hindu. Sebagian wanita Muslimah di Kampung Kepoan yang kawin dengan lelaki Bali beralih memeluk Hindu, sebaliknya sebagian wanita Bali yang kawin dengan lelaki Muslim beralih memeluk agama Islam. Praktik demikian melahirkan praktik interaksi sosial yang harmonis. Ikatan keluarga berdasar perkawinan itu juga melahirkan rasa saling memiliki, aksi saling mengunjungi dan tolong menolong dalam berbagai masalah yang mereka hadapi. Ikatan kekerabatan antarumat Islam dan Hindu Bali ini juga melahirkan kesadaran tentang makanan yang boleh dimakan oleh keluarga

mereka yang Muslim. Karena itu ketika keluarga Hindu mengundang mereka dalam acara-acara ritual daur hidup, keluarga Hindu menyiapkan makanan yang tidak mengandung babi yang disebut *lawar selam*. Di beberapa desa yang dwi agama seperti Banyu Poh dan Baturiti selalu menyediakan lawar selam, bahan bakudan pengerjaannya diserahkan kepada tetangga atau kerabatn mereka yang Muslim agar makanan yang mereka sediakan terjamin kehalalannya.

Kedekatan relasi komunitas Islam dan Hindu Bali melalui ikatan perkawinan, relasi sosial antartetangga yang berbeda agama melahirkan pandangan *nyama selam* di kalangan umat Hindu Bali. Dengan kata lain, bagi orang Hindu Bali, orang Islam adalah *nyama* (kerabat) mereka. Sebaliknya orang Islam menyebut orang Bali sebagai *nyama* Bali. Pandangan terhadap orang lain sebagai kerabat merupakan salah satu asas interaksi sosial masyarakat Hindu Bali. Asas ini dikenal dengan istilah *menyama braya* (Suda, tt:2). Secara bahasa *nyama* berarti saudara yang memiliki hubungan darah atau hubungan kekerabatan, sementara itu, *braya* berarti masyarakat atau komunitas, tempat di mana orang Bali hidup bermasyarakat dengan tingkat terkecil disebut banjar. Dalam pandangan tradisional orang Bali, orang lain, meskipun tidak memiliki hubungan persaudaraan sedarah merupakan bagian dari keluarga atau komunitas (Fajriyah, tt:5). Dalam *menyama* pluralitas agama dipahami sebagai suatu kesejajaran, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, orang lain yang berbeda agama, suku, dan ras adalah kerabat. Di masa lalu berdasarkan *menyama* umat Islam dan Hindu Bali hidup rukun tanpa konflik (Tantra, 2015:134).

Seiring dengan berjalannya waktu, *menyama braya* yang menjadi dasar hubungan relasi sosial bagi masyarakat Bali mengalami pergeseran, bagi masyarakat Bali *nyama selam* dan *nyama Jawa* yang dulu berarti saudara Islam atau saudara Jawa kini berubah menjadi *jelama Jawa* yang berarti orang luar berasal dari Jawa bukan orang Bali (Damayana, 2011:91).

Pergeseran makna itu menggerus aspek

sosio-historis hubungan harmonis umat Islam dan Hindu yang telah berjalan ratusan tahun. Kerukunan hidup antara umat Islam dan Hindu Bali menjadi spekulatif yang abstrak, yang tidak terjadi secara empirik (Mashad, 2015:278). Pergeseran makna *menyama braya* yang berakibat pudarnya hubungan harmonis antarumat Islam dan Hindu di Bali menjadikan kerukunan menjadi mitos, sebuah diskursus sosial yang diyakini benar-benar terjadi. Sebagai mitos, kerukunan muncul secara tidak riil dan mengandung makna keperluan sesaat (Tantra, 2015:171).

Pertanyaannya kemudian adalah apa yang menjadi faktor yang mendorong lahirnya pergeseran sikap masyarakat Hindu Bali terhadap *nyama Islam* atau *nyama Jawa* dan melahirkan sikap-sikap dan perilaku yang tidak lagi berpegang teguh pada *menyama braya*? Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pergeseran sikap dan perilaku orang Bal. Atmadja (2010:2) menyebut pembangunan dan globalisasi sebagai penyebab persegeran itu. Damayana (2011:138) melihat kehadiran pendatang, ketertinggalan ekonomi, pengembangan pariwisata, semangat etnisitas dan budaya Bali sebagai penyebab pergeseran sikap, pandangan dan perilaku masyarakat Hindu Bali terhadap *menyama braya*.

Pembangunan tampaknya merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat manapun, termasuk Bali. Pembangunan dinilai sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan maju. Tolok ukur masyarakat yang adil, makmur dan maju adalah masyarakat Barat, yang dipandang mengalami capaian budaya maju terlebih dahulu. Karena itu, budaya ini menjadi acuan pembangunan yang akan mengantarkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, maju dan modern. Jika ingin mencapai budaya itu, masyarakat meski melakukan transformasi menyeluruh dari masyarakat yang tradisional ke masyarakat modern. Masyarakat Bali menurut Atmadja (2010:9) pertama kali mengenal dan mengagumi budaya modern di era penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Akibatnya, kiblat budaya Bali bukan lagi ke budaya Jawa-Majapahit, tetapi ke budaya Belanda yang dipandang orang

Bali sebagai modern, maju, rasional, dan baik dan berlawanan dengan budaya Bali saat itu yang tradisional, terbelakang, irrasional, dan buruk.

Keinginan masyarakat Bali untuk mengadopsi budaya tersebut menguat karena *pertama*, secara historis orang Bali pernah melihat budaya tersebut saat diperkenalkan oleh Belanda abad ke-19, dalam bentuk ilmu dan teknologi yang secara faktual lebih maju dibanding dengan yang dimiliki oleh orang Bali. Di tahun 1920, perkumpulan Surya Kanta di Kota Singaraja menganjurkan orang Bali untuk berkiabat ke Barat untuk mewujudkan kemajuan. *Kedua*, modernisasi dan globalisasi membuat orang-orang Bali mengakses ilmu dan teknologi Barat. *ketiga*, pola pikir Barat yang oposisional dan dikotomis (oposisi biner) diadopsi oleh orang Bali sehingga memandang budayanya sebagai budaya yang tradisional, terbelakang, irrasional, dan buruk. Budaya tersebut berbeda dengan budaya Barat yang modern, maju, rasional, dan baik.

Pembangunan dan modernisasi yang terjadi di Bali membuat budaya Bali yang banyak memuat nilai-nilai adiluhung banyak mengalami pergeseran dan perubahan, termasuk makna *menyama braya* yang memandang orang lain sebagai saudara dekat, seperti terwujud dalam istilah *nyama selam* dan *nyama Jawa*. Orang lain yang dipandang sebagai nyama, kini berubah menjadi jelata (orang lain, berbeda, pendatang). Dalam konteks subak dulu dikenal istilah *sakehe manyi*, bekerja atas dasar rasa persaudaraan (*menyama braya*) dan kebersamaan yang ditujukan untuk menambah persediaan pangan keluarga, kini telah berubah dan diganti dengan sistem *majeg* (kontrak), tradisi *sekehe numbeg* (perkumpulan membajak sawah) yang didasarkan asas gotong royong dan tolong menolong, kini telah bergeser menjadi sistem upah. Pergeseran itu tak terhindarkan karena pola pikir masyarakat telah bergeser dari pola pikir gotong royong ke pola pikir ekonomis dan pragmatis. Karena itu nilai-nilai tradisional masyarakat Bali, seperti *sekehe manyi*, *sekehe numbeg* dan *sekehe-sekehe* lainnya telah kehilangan makna esensialnya dan diganti dengan sistem buruh panen, buruh bajak, dan buruh-buruh lainnya

yang menuntut adanya upah. Pada konteks kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai solidaritas sosial yang ada dalam masyarakat tradisional pun mulai berubah dan digantikan dengan nilai-nilai modern yang bersifat individualis-materialis (Suda, tt:6).

Kehadiran pendatang ke Bali sejatinya bukan fenomena baru bagi masyarakat Hindu Bali. Sejak era lama Bali selalu menarik untuk dikunjungi. Sejarah mencatat kehadiran pendatang di era lama memang dibutuhkan diperlukan terutama untuk menjaga Bali dari pelbagai gangguan keamanan dari luar. Di samping itu, kehadiran pendatang juga diperlukan untuk pengembangan ekonomi Bali. Kehadiran pendatang baru menjadi problem ketika Bali memasuki era pariwisata. Sebagai salah satu destinasi wisata yang populer, Bali memang menjadi tempat populer yang banyak dikunjungi wisatawan, baik asing maupun domestik. Di samping wisatawan, Bali juga didatangi oleh banyak pendatang yang ingin mengadu nasib di Bali. Para pendatang ini melihat Bali sebagai tempat mencari peruntungan ekonomis karena sedang berkembang pesat sebagai destinasi wisata. Tetapi, kehadiran pendatang yang menetap dan hidup di Bali melahirkan problem kultural bagi umat Hindu. Pendatang tentu saja bukan sekadar datang untuk berdagang dan bekerja, pendatang juga membawa beragam identitas yang melekat pada dirinya. Pendatang yang Muslim membawa serta identitas agama dan budayanya, begitu juga dengan pendatang yang nasrani, Buddha, dan agama lainnya. Para pendatang ini tentu saja perlu bertahan hidup, beragam pekerjaan mereka lakukan dengan tekun, sehingga dapat mengubah status sosial dan ekonomi mereka. Seorang pengusaha hotel di Bali berkisah bagaimana ia pertama kali datang ke Bali, ia bekerja sebagai penjaja souvenir di Kuta dan di Pasar Sukawati, kemudian mendapat kepercayaan dari seorang wisatawan asing untuk menyediakan meubel ukir khas Bali untuk diekspor. Dari kegiatan ekspor itulah ia kemudian berubah, bisa membeli rumah, tanah, usaha mebel hingga hotel. Tentu banyak lagi kisah sukses para perantau dari luar Bali yang seperti itu. Kemajuan ekonomi

para pendatang memunculkan kecemburuan di kalangan masyarakat Hindu Bali. Pariwisata seharusnya dapat menyejahterahkan mereka, tetapi yang sejahtera justru orang luar Bali. Ditambah lagi, kemajuan pariwisata Bali ternyata tidak saja bertolak dari eksotika budaya Bali yang bernafaskan tradisi Hindu, tetapi berkembang menjadi industri pariwisata yang eksploitatif. Salah satu contoh yang mencolok adalah penimbunan laut menuju Pulau Serangan, di Pulau itu terdapat Pura Sakenan (Denpasar) warisan Danghyang Nirartha, penimbunan itu membuat orang Bali tidak bisa lagi berkunjung dan menjalani ritual ke pura Sakenan (Mashad, 2014:264).

Pembangunan, modernisasi, kehadiran pendatang dengan beragam identitas agama dan budayanya, kemajuan ekonomi mereka, pengembangan pariwisata yang mengabaikan ajaran agama Hindu dan nilai-nilai adat mendorong lahirnya semangat identitas dan agama umat Hindu Bali. Semangat identitas etnik dan agama ini mengkristal dalam gerakan ajeg Bali. Gerakan ini ingin menegakkan ajaran-ajaran Hindu dan nilai-nilai adat Bali yang selama ini terabaikan dalam proses pembanguan dan pengembangan pariwisata di Bali. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Hindu Bali, gerakan ajeg Bali mendirikan Koperasi Krama Bali (KKB) yang ditujukan menyediakan dana bantuan bagi warga Hindu Bali yang hendak berwirausaha. Selain itu koperasi ini juga merancang berbagai kegiatan pelatihan keterampilan untuk mendukung upaya pemberdayaan ekonomi krama Bali. Salah satu pelatihan yang digulirkan adalah membuat bakso pakraman, bakso pakraman berbeda dengan bakso pada umumnya yang telah dikenal oleh masyarakat Bali, bakso pakraman terbuat dari daging babi. Untuk menyukkseskan bakso pakraman itu, ada desa pakraman yang melarang warganya untuk membeli bakso lainnya, bahkan akan didenda jika warga tersebut tetap melakukannya. Gerakan ajeg Bali dalam bidang ekonomi dimaksudkan untuk menandingi kemajuan ekonomi para pendatang di sektor informal.

Akhirnya menurut Damayana (2011:148)

pergeseran konsep *menyama braya* pada masyarakat Hindu Bali saat ini merupakan resistensi budaya atas hegemoni dan dominasi kaum pendatang terhadap penduduk asli. Di masa lalu *menyama braya* merupakan ajaran para leluhur/tetua Bali yang harus dipelihara dan dipraktikkan untuk menciptakan harmoni di tengah-tengah masyarakat tanpa harus membedakan agama, suku, dan budaya. Sekarang *menyama braya* hanya dimaknai sebagai toleransi atau kebersamaan masyarakat yang multi etnis dan multi agama. Pergeseran makna *nyama* menjadi *jelama* terlihat sangat kentara pada terjadinya Bom Bali I di Legian dan Bom Bali II di Jembrana. Bom Bali I dan II melahirkan semangat anti pendatang dan mencurigai umat Islam sebagai pelaku teror. Kecurigaan itu kemudian melahirkan sikap diskriminasi etnis dan agama kepada para pendatang dari Jawa dan Muslim yang melahirkan ketegangan identitas. Terjadi perubahan karakter orang Bali yang penuh perasaan curiga dan kemudian melakukan pemilihan antara penduduk asli (pribumi) dan dengan pendatang. Perubahan karakter itu menguatkan semangat pergulatan dan penguatan identitas dan wacana *Ajeg Bali*.

Kompetisi

Selain kerja sama, akomodasi, toleransi yang sifatnya asosiatif, relasi antar umat Islam dan Hindu Bali juga bersifat diasosiatif. Salah satu bentuk dari pola relasi yang diasosiatif adalah kompetisi, atau persaingan. Hal itu terlihat dengan sangat jelas di bidang ekonomi. Persaingan di bidang ini, juga memiliki dampak pada interaksi umat Hindu Bali terhadap Muslim dan atau pendatang. Bali yang berkembang menjadi destinasi pariwisata dunia, menarik banyak pendatang untuk mengunjunginya. Ada yang datang sebagai wisatawan, ada juga yang datang untuk melihat peluang ekonomi kemudian menetap di Bali. Pendatang sebagai wisatawan barangkali menguntungkan masyarakat Bali. Sebaliknya pendatang yang kemudian menetap di Bali untuk mengadu nasib dan mencari rizki menjadi masalah bagi masyarakat Bali, sebab hampir semua sektor ekonomi terutama

sektor informal dikuasai oleh pendatang mulai dari penjual nasi keliling, pengelola warung nasi, penjual gorengan, penjual bakso keliling, pengelola pasar senggol, semuanya adalah pendatang. Tidak salah jika ada yang mengatakan bahwa perkembangan pariwisata Bali yang pesat tidak banyak memberikan kontribusi ekonomi kepada masyarakat Hindu Bali. Karena sektor-sektor ekonomi lebih banyak dikuasai oleh pendatang. Tetapi, penguasaan sektor informal oleh pendatang itu memiliki alasan, karena menurut Dyana (Damayana, 2010:139) *pertama*, masyarakat Hindu Bali terlalu sibuk meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya manusianya, tanpa diiringi dengan kemampuan, keahlian dan kepercayaan diri untuk menciptakan lapangan kerja sendiri, *kedua*, masyarakat Hindu Bali kurang memiliki kemampuan untuk berkompetisi karena mereka memiliki kekayaan materi berupa tanah warisan, sehingga minat untuk bekerja pada sektor formal sangat minim. *Ketiga*, masyarakat Hindu Bali sendiri kurang memiliki minat untuk membeli produk usaha informal yang dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat Hindu Bali. Krama Bali cenderung membeli produk informal yang dibangun dan dikembangkan pendatang. Sebaliknya pendatang sangat jarang mau membeli produk usaha informal yang dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat Hindu Bali. Pendatang yang Muslim, karena taat kepada doktrin agamanya, takut membeli makanan yang dijual oleh Krama Bali, ketakutan itu, terkait dengan status hukum makanan yang dijual orang Bali. Terutama produk makanan yang berjenis daging, apakah itu daging ayam, kambing, dan sapi. Status makanan yang halal dan yang haram sangat melekat dalam kesadaran pendatang Muslim.

Selain itu, ada juga faktor lain yang menjadi sebab mengapa Krama Bali kalah bersaing di sektor ekonomi informal, yakni kecenderungan Krama Bali untuk memilih-milih pekerjaan. Tidak semua pekerjaan sektor informal mau dikerjakan oleh Krama Bali. Terutama sektor pekerjaan informal yang tergolong kasar atau kotor dalam pandangan Krama Bali. Karena Krama Bali enggan pada pekerjaan sektor informal tersebut,

para pendatanglah yang kemudian mengisinya. Berbagai pekerjaan sektor informal yang ditolak Krama Bali adalah tukang batu, tukang gali jalan, tukang got, tukang panen padi, penjual sayur, pedagang kaki lima, tukang cukur, pemulung serta sektor lainnya. pekerjaan sektor informal tersebut diisi oleh para pendatang, mereka tekun, ulet dan kreatif dalam menjalankan pekerjaan di sektor informal tersebut. Ada ungkapan yang sering dikutip terkait dengan gengsi Krama Bali. Ketika ditanya kenapa tidak berjualan bakso? Pada umumnya jawaban mereka adalah: “Jualan bakso, lebih baik nganggur, masih bisa minta nasi ke tetangga (Damayana, 2011:140). Keengganan Krama Bali untuk bergelut pada sektor ekonomi informal memberi peluang bagi pendatang Jawa-Muslim untuk mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh Krama Bali. Hampir semua sektor informal dan pekerjaan kasar dikuasai oleh para pendatang, yang mayoritas Jawa-Muslim. Untuk mendorong minat masyarakat Hindu Bali terhadap sektor informal di Bali, pemerintah daerah Bali berupaya memfasilitasi masyarakat Hindu Bali untuk berjualan bakso, namun tetap saja Krama Bali tidak tertarik terhadap peluang yang diberikan pemerintah tersebut.

Konflik

Meskipun hubungan umat Islam dan Hindu di Bali terlihat rukun dan harmonis, hubungan kedua komunitas agama tersebut, sejatinya diselimuti sejumlah ketegangan hingga konflik. Hubungan tersebut tidak sampai melahirkan amuk massa atau kekerasan berbasis agama. Pertanyaannya kemudian apa saja hubungan dari kedua komunitas tersebut yang diselimuti konflik? *Pertama*, adalah soal rumah ibadah. Menurut beberapa informan, bagi Muslim di Bali, mendirikan rumah ibadah baik dalam bentuk masjid maupun musala bukan hal yang mudah untuk dilakukan (Wawancara, AR, 2011). Kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah di Bali juga dijelaskan oleh AY salah seorang warga Muslim urban asal Palembang. Menurutnya, saat ini jumlah umat Islam di Bali cukup banyak, banyak kendala yang mereka hadapi ketika mereka hendak mendirikan rumah ibadah. Izinnya rumit, persetujuan dari lingkungan sekitar atau desa adat

juga tidak mudah. Karena kendala-kendala itu, mereka kemudian membeli bangunan seperti ruko dan difungsikan sebagai tempat salat. Pengalihan fungsi ruko menjadi tempat ibadah itu kemudian dipersoalkan oleh masyarakat sekitar (Wawancara, 2016).

Secara historis, kondisi Bali saat ini memang tengah berubah, apalagi sejak Bali menjadi destinasi wisata, Bali menjadi pulau yang penuh hikuk pikuk pariwisata, wisatawan pun tak henti-hentinya datang ke Bali. Di tengah perubahan itu, warga Hindu Bali mulai menyadari bahwa identitas budayanya dan kondisi alamnya saat ini tidak seperti dulu. Sebagai pulau yang dihuni oleh mayoritas Hindu, Bali dulu sunyi dan sesekali terdengar alunan bacaan Trisanti yang syahdu. Kini Bali tidak seperti itu lagi, aktivitas pariwisata yang hingar bingar dan jumlah urban yang terus meningkat membuat Bali berubah. Suara azan yang bergema melalui pengeras suara sahut menyahut di kala waktu salat tiba, dentang lonceng gereja di hari Minggu juga terdengar kencang. Bali berubah menjadi pulau yang dihuni oleh warga yang multi agama. Menyadari keadaan yang tengah berubah itu, warga Bali yang mayoritas Hindu itu tergugah untuk melakukan pembatasan-pembatasan agar identitas kultur dan agamanya tetap hidup. Agama Islam dan agama-agama yang terus berkembang di Bali mau tidak mau menuntut tersedianya rumah ibadah untuk pelaksanaan ajaran-ajaran agama mereka dan mendesak warga Hindu Bali untuk berbagi tanah demi berdirinya rumah ibadah. Kondisi ini menjadi persoalan tersendiri bagi warga Hindu Bali saat ini. Kondisi tersebut berbeda dengan Bali di era kerajaan dulu. Saat itu hubungan warga Hindu Bali dengan Islam adalah hubungan yang mutualsimbiosis, saling menguntungkan. Umat Islam yang datang ke Bali saat itu difungsikan sebagai mitra kerajaan untuk keamanan kerajaan dan puri. Karena itu, menurut Kartini (2011), pada era kerajaan Bali, umat Islam tidak memiliki kendala dalam pembangunan rumah ibadah. Bahkan raja tidak segan memberi tanah untuk pembangunan masjid. Hal itu terjadi karena kontribusi masyarakat Islam bagi kerajaan saat itu cukup signifikan.

Sebenarnya kesulitan yang dihadapi umat Islam bukan hanya soal bagaimana mendirikan rumah ibadah, tetapi mereka juga kesulitan memperoleh tanah untuk pemakaman. Kartini (2011) menerangkan kesulitan memperoleh tanah untuk pemakaman jenazah dialami oleh warga Muslim di Denpasar, Badung, Jembrana, Buleleng, dan Gianyar. Di Buleleng misalnya, pemerintah daerah bahkan pernah mengubah fungsi tanah untuk pemakaman menjadi tempat pariwisata, padahal tanah tersebut merupakan tanah wakaf. Masih di Buleleng, pernah ada seorang wanita Muslimah yang menguburkan jenazah suaminya di pekarangan depan rumahnya atas wasiat sang suami. Tindakan ini menuai protes warga Hindu, karena tanah tempat tinggal warga muslimah tersebut masuk dalam wilayah desa pakraman. Tokoh agama Islam dan Hindu kemudian bertemu untuk mencari solusi atas masalah yang timbul di tengah-tengah mereka, hasil pertemuan itu adalah memindahkan jenazah yang telah dimakamkan di pekarangan rumah itu ke tempat pemakaman yang lebih layak. Warga Muslimah itu pun setuju untuk memindahkan makam suaminya (Kartini, 2011:115-145).

Studi Bashori A. Hakim (2011:83-) di Kota Denpasar menjelaskan ada dua musala yang sulit didirikan oleh umat Islam di Kota Denpasar. Kedua musala itu adalah al-Syafi'iyah dan al-Qari, musala al-Syafi'iyah di Denpasar Utara. Pada awalnya keberadaan musala ini tidak dipersoalkan oleh masyarakat sekitar, meskipun dipergunakan untuk aktivitas keagamaan dan peribadatan oleh jemaah musala. Namun, tahun 2006, musala yang telah dirintis pendiriannya sejak tahun 1988 ini mulai dipersoalkan oleh warga Hindu sekitar musala. Mereka keberatan dan merasa terganggu oleh adanya sejumlah sepeda motor milik jemaah musala yang melaksanakan salat jumat. Ketika musala itu hendak digeser ke tanah yang telah dibeli oleh jemaah musala, warga Hindu sekitar musala juga menyatakan keberatannya dengan alasan pergeseran atau pemindahan musala tidak melalui musyawarah warga dan meminta rencana tersebut dihentikan. Atas permintaan warga Hindu sekitar musala, panitia menghentikan kegiatan pemindahan

atau penggeseran musala, namun ketika jemaah musala hendak melaksanakan salat Jumat pada 23 Mei 2008 tiba-tiba jemaah musala digiring oleh warga Hindu sekitar musala agar keluar musala, dan sekelompok warga Hindu tersebut menyegel musala dengan alasan musala tersebut tidak ada izin warga sekitar. Menurut Hakim, hingga saat studi itu dilakukan, musala tersebut belum bisa lagi digunakan untuk sarana kegiatan keagamaan dan ibadah, berbagai upaya warga Muslim jemaah musala untuk menggunakan kembali musala tersebut tidak membuahkan hasil. Salah satu syarat yang tak bisa diperoleh oleh pengurus musala adalah izin atau persetujuan pembangunan rumah ibadah dari pendamping dan kelian adat. Meskipun FKUB telah berupaya melakukan mediasi atas persoalan rumah ibadah tersebut, namun mediasi tersebut tidak membuahkan hasil. Penolakan pendirian tempat ibadah juga terjadi di Denpasar Utara, pendirian musala al-Qari ditolak warga Hindu. Musala yang pendiriannya dirintis sejak tahun 1999 sempat disegel oleh warga Hindu sekitar musala, tetapi warga Muslim tetap menggunakannya sebagai tempat salat, melihat hal tersebut warga Hindu menyegel dan menggembok musala dan mendatangi setiap rumah warga muslim agar tidak salat di musala al-Qari, yayasan al-Qari mewakili warga Muslim pada 2 Agustus 2003 melaporkan hal tersebut ke Kapolda Bali. FKUB Desa Ubung dan FKUB Kota Denpasar kemudian memprakarsai pertemuan warga untuk mendialogkan masalah tersebut. Hasil pertemuan itu disepakati untuk mencabut laporan intimidasi ke Polda, penggantian dan pembentukan pengurus Warga Muslim Dusun Tegal Kori. Hingga 19 Oktober 2003, persoalan yang melilit musala al-Qari belum kelar dan musala belum bisa digunakan sebagai tempat ibadah (Hakim, 2011: 93).

Penolakan atas pendirian rumah ibadah juga terjadi di Perumahan Bumi Permai Desa Dalung Permai Kuta Utara, Kabupaten Badung (Alifiati, 2014: 169-184). Warga Hindu menolak memberi izin pendirian tempat ibadah bagi warga Muslim, selain menolak pendirian musala di perumahan itu, warga Hindu juga menolak penyelenggaraan

proses pembelajaran keagamaan nonformal di perumahan tersebut. Penolakan terakhir ini disesalkan oleh kalangan Muslim. Bagi mereka proses pembelajaran keagamaan adalah kebutuhan mendesak bagi mereka terutama untuk membekali anak-anak mereka pengetahuan agama, terutama pengetahuan membaca Alquran dan pengetahuan ibadah-ibadah ritual bagi anak-anak mereka. Meskipun kecewa dengan penghentian proses pembelajaran keagamaan nonformal bagi anak-anak mereka di kompleks perumahan itu, kalangan Muslim tetap melakukan interaksi sosial dengan masyarakat Hindu di perumahan tersebut. Sementara itu, larangan untuk mendirikan tempat ibadah dapat mereka maklumi karena mereka masih dapat menunaikan ibadah di tempat lainnya yang berada di luar kompleks perumahan Bumi Permai.

Menurut Pamungkas (2014: 286-316) ada beberapa konflik yang kerap kali muncul dalam konteks relasi Muslim dan Hindu di Bali. Konflik-konflik itu, antara lain dipicu oleh *pertama*, penggunaan pengeras suara oleh komunitas Muslim saat mengumandangkan azan sebagai panggilan salat lima waktu. Suara azan yang keluar dari pengeras suara itu, kerap kali dipandang mengganggu warga Hindu sekitar masjid atau musala. Sebaliknya komunitas Muslim yang tinggal di sekitar pura juga merasa terganggu ketika warga Hindu melakukan pembacaan Trisandhi. Menurut AR, pembacaan Trisandi menggunakan pengeras suara sebenarnya merupakan tradisi baru bagi warga Hindu, sebab sebelumnya pembacaan Trisandi dilakukan tanpa pengeras suara (Wawancara, 2013). Pemuka-pemuka agama Hindu merasa, bahwa Bali yang mayoritas memeluk Hindu justru jarang terdengar pembacaan Trisandi, yang terdengar malah azan sebagai panggilan salat yang keluar dari masjid atau musala. Berangkat dari kesadaran seperti Trisandi kemudian mulai dibaca dengan menggunakan pengeras suara.

Kedua, konflik juga kerap dipicu oleh pemanfaatan tempat-tempat ibadah oleh warga Muslim. Sebuah masjid atau musala yang telah berdiri pada awalnya tidak menjadi masalah bagi warga Hindu, tetapi ketika masjid atau musala di

satu tempat digunakan oleh warga Muslim untuk kegiatan pengajian dan kegiatan lain yang sejenis dan melibatkan warga Muslim lainnya yang datang dari luar desa atau kecamatan, kerap kali dipandang mengganggu ketenangan hidup warga Hindu di sekitar masjid atau musala tersebut. Apalagi jika kegiatan yang dilakukan oleh warga Muslim itu bertepatan dengan peringatan hari-hari keagamaan warga Hindu Bali. Hari Raya Nyepi bagi warga Hindu bertepatan dengan hari Jumat. Bagi warga Hindu semua masyarakat yang ada Bali tidak boleh menyalakan lampu selama satu hari penuh, sementara bagi warga Muslim. Salat Jumat adalah kewajiban yang tak boleh ditinggalkan, kewajiban itu harus ditunaikan. Menghadapi situasi seperti itu, kedua tokoh agama, FKUB dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota pada umumnya melakukan kompromi-kompromi, tetapi hasil kompromi itu tidak sepenuhnya dapat diterima oleh umat di akar rumput. Pada kasus seperti itulah biasa konflik tak bisa dihindarkan (Pamungkas, 2014: 286-316). *Ketiga*, adalah izin pendirian rumah ibadah. Warga Muslim di Bali tidak mudah untuk mendirikan masjid atau musala. Komunitas Muslim yang hendak mendirikan masjid atau musallah harus berjumlah 40 (empat puluh) kepala keluarga (KK). Sebagai warga minoritas tentu saja tidak mudah bagi Muslim Bali untuk memenuhi syarat tersebut. Karena itu, syarat 40 KK tersebut seringkali diabaikan oleh warga Muslim di Bali. Dengan kata, seringkali warga Muslim, karena membutuhkan rumah ibadah mengabaikan SK Gubernur. Selain syarat 40 KK, izin mendirikan rumah ibadah bagi warga non-Hindu harus memperoleh persetujuan dari lingkungan. Kata lingkungan yang dimaksud dalam perda pendirian rumah ibadah tidak jelas batasannya, "Lingkungan yang dimaksud dalam Perda itu apakah mencakup banjar, desa atau RT," Karena dalam praktiknya yang memiliki peran dalam persetujuan itu adalah desa adat atau desa pakraman.

Karena kesulitan yang dialaminya, seringkali komunitas Muslim dalam satu desa tertentu mengabaikan SK Gubernur Bali No. 583/1991 tentang pendirian tempat ibadah itu. Ada banyak

kasus yang dapat disebut sebagai contoh: Masjid Nurul Iman Khomairon, pada mulanya didirikan tanpa didahului dengan mengurus izin, yang dilakukan terlebih dahulu adalah membangun fisik masjid, setelah pembangunan fisik selesai, warga Muslim kemudian mengurus perizinannya. Bahkan karena sulitnya memperoleh izin pendirian rumah ibadah, tak jarang warga Muslim mengajukan izin tapi tidak ditujukan untuk membangun rumah ibadah, tetapi ditujukan untuk pembangunan gedung. Setelah itu, perlahan tapi pasti, gedung tersebut diubah fungsinya menjadi masjid. Hal seperti itu terpaksa dilakukan karena warga Muslim yang tinggal di daerah itu tak memenuhi syarat pendirian rumah ibadah. sebagai minoritas jumlah mereka tentu tak mencapai 40 KK. Pendirian masjid atau musala di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Singaraja, menurut Pamungkas (2014: 286) adalah contoh lain sarana ibadah yang sudah dibangun namun tidak memiliki izin. Pihak MIN Singaraja, berupaya memenuhi berbagai syarat yang telah ditentukan, namun izin tak kunjung diberikan, pembangunan kemudian dilakukan tanpa mengantongi izin pendirian rumah ibadah, dan hingga sekarang belum pernah ditegur.

Menurut Kartini (2011: 135-140), kendala komunitas Muslim untuk mendirikan rumah ibadah terjadi di berbagai daerah di Bali, bukan saja di Denpasar dan Badung, tetapi juga di Buleleng misalnya warga Muslim kesulitan membangun masjid Jabal Nur, mereka juga mendapat tentangan dari warga Hindu ketika mendirikan majelis taklim dan taman pendidikan Alquran (TPA). Masjid Jabal Nur awalnya diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan warga Muslim tetapi dihentikan pembangunannya karena tidak punya izin. Izin pendirian tidak diperoleh karena tanah masjid tersebut masuk dalam kawasan desa adat (desa pakraman). Kasus masjid Jabal Nur ini menarik, di satu sisi letak masjid masuk dalam wilayah desa dinas, karena itu desa dinas memberi izin kepada warga Muslim untuk membangun masjid, tetapi di sisi lain, letak masjid juga masuk wilayah hukum desa pakraman dan merasa tidak mengeluarkan izin untuk pembangunan masjid tersebut, sehingga berhak untuk membongkar

masjid tersebut. Setelah pihak pengelola masjid melakukan pendekatan kepada desa pakraman, masjid tersebut akhirnya tidak jadi dibongkar. Warga Muslim Buleleng menurut Kartini juga tengah berjuang untuk memperoleh izin pembangunan musala di rumah sakit umum. Meskipun sudah mengajukan persetujuan bupati dan lembaga legislatif daerah, namun hingga saat ini izin pembangunan musala itu belum diperoleh.

Kendala-kendala yang dialami warga Muslim dalam pendirian rumah ibadah di Bali menurut Pamungkas (2014:287-316) disebabkan antara lain oleh: syarat jumlah kepala keluarga (KK) yang tinggal di satu lingkungan yang sama tidak mencapai 40 KK. Jumlah ini memang berat, karena jumlah warga Muslim yang tinggal di satu lingkungan di Bali pada umumnya jumlahnya kecil. Selain itu, ada juga kendala lain seperti adanya SK Gubernur No. 583/1991 tentang Prosedur Pendirian Tempat Ibadah.

Konflik atau perselisihan antarwarga Muslim dan Hindu di Bali kerap kali terjadi di di desa pakraman. Perselisihan itu disebabkan oleh pandangan warga Hindu terhadap warga Muslim, di desa pakraman, warga Muslim merupakan warga tamu (krama tamu), sementara warga Hindu merupakan warga utama. Sebagai warga tamu, mereka diperlakukan secara berbeda oleh desa pakraman (Pamungkas, 2014 287-316). Perselisihan warga Muslim dan Hindu juga kerap terjadi karena ketidaktahuan warga Hindu terhadap ajaran Islam tentang ibadah. Bagi warga Muslim, salat bisa dilakukan di mana saja, tidak harus di tempat di mana warga Muslim bertempat tinggal. Ketika waktu salat tiba, warga Muslim tentu akan mencari tempat ibadah yang ada di sekitar mereka. Warga yang tinggal di Denpasar misalnya, bisa jadi menunaikan salat di masjid atau musala yang ada Badung, bahkan di mallyang ada tempat salatnya. Hal seperti itu bagi warga Hindu adalah aneh karena di tempat tinggal warga Muslim telah ada tempat salat, seharusnya mereka salat di sana, sebab warga Hindu akan selalu melaksanakan ibadah di tempat di mana mereka tinggal. Akibat ketidaktahuan itu, sebagian warga Hindu protes, mengapa musala atau masjid kerap kali didatangi pendaang dari

luar, dan meminta agar orang Muslim dari luar Bali tidak salat di masjid atau musala di Bali. Bagi warga Hindu, tempat ibadah merupakan tempat yang sakral. Karena itu, jika ada tempat kerja atau tempat perbelanjaan yang digunakan sebagai tempat salat, maka akan banyak tempat yang sakral. Sementara bagi Muslim tempat ibadah tidak harus di tempat sakral, di mana pun Muslim dapat melaksanakan salat, (Pamungkas, 2014:207-316; Wawanca, MUI Provinsi Bali, 2017).

Faktor Penentu Pola Hubungan

Seperti telah dijelaskan di atas, hubungan warga Muslim dan Hindu di Bali terbagi menjadi dua pola utama, yakni pola asosiatif dan diasosiatif. Jika selama ini hubungan antarumat Islam dan Hindu di Bali selalu digambarkan sebagai hubungan yang harmonis: kerja sama, akomodatif, dan toleransi, senyatanya tidak selalu demikian, sebab hubungan dua komunitas tersebut juga memiliki pola yang kompetitif dan konflik. Pertanyaannya kemudian adalah apa faktor penentu dari masing-masing pola hubungan itu? Pola hubungan kerja sama di berbagai bidang antara warga Muslim dan Hindu di Bali ditentukan oleh faktor sejarah, seperti diketahui secara historis hubungan Muslim dan Hindu di Bali sudah terjalin lama, sejak era Dalam Waturenggong, ketika kerajaan Bali yang berpusat di Gelgel masih menjadi bagian dari kerajaan Majapahit. Bahkan, kerja sama antara warga Muslim dan Hindu Bali terus berlanjut hingga kerajaan Bali pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Kebutuhan keamanan dan ekonomi membuat kerajaan-kerajaan kecil di Bali meminta bantuan prajurit-prajurit Muslim asal Bugis-Makassar. Selain itu, kebutuhan ekonomi membuat hubungan kerja sama perdagangan antara Muslim dan Hindu di Bali menjadi tek terhindarkan. Pola hubungan kerja sama itu bahkan berlanjut hingga sekarang terutama kerja sama di bidang perdagangan. Pariwisata Bali tentu saja membutuhkan arus barang keluar dan masuk Bali, dan tidak mungkin hal tersebut dikerjakan oleh orang Bali sendiri, tentu harus melibatkan banyak pihak, termasuk warga Muslim yang ada

di Bali.

Pola hubungan akomodatif yang dilakukan oleh warga Muslim Bali dimaksudkan agar kehadiran mereka di Bali dapat diterima oleh warga Hindu. Hubungan yang akomodatif tersebut terbukti dapat diterima oleh warga Bali dan melahirkan hubungan kekerabatan antara kedua komunitas melalui hubungan perkawinan dan melahirkan pandangan yang positif terhadap warga muslim yang oleh warga Hindu Bali disebut sebagai *nyama selam*. Sementara pola hubungan yang toleran ditentukan oleh faktor keinginan warga Muslim dan Hindu untuk berintegrasi. Keduanya menafikan identitas masing-masing untuk saling menghormati, tolong menolong, dan membiarkan warga Muslim dengan identitas keagamaannya, begitu sebaliknya warga Muslim membiarkan warga Hindu dengan identitas keagamaannya. Upaya membangun pola hubungan toleran ini sebenarnya juga tidak bisa dilepaskan dari upaya tokoh agama dan pemerintah dalam memupuk rasa kebangsaan, persudaraan di antara mereka. selain itu, pola hubungan yang toleran itu, juga dibangun dari ajaran agama masing-masing.

Pola hubungan kompetitif antara warga Muslim dan warga Hindu Bali dipicu oleh hadinya pendatang Muslim ke Bali. Warga Muslim yang datang ke Bali tidak semua bekerja di sektor formal, seperti guru, polisi, tentara, dosen, wartawan, dan pegawai negeri. Mayoritas warga Muslim dan menetap di Bali bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, pekerja bangunan, buru tani, padagang bakso, penjual nasi pemulung, dan pekerja kasar lainnya. Sebagai perantau, warga Muslim tersebut berupaya hidup hemat hingga akhirnya mereka dapat membeli properti mulai dari tanah, rumah, dan kendaraan bermotor. Status ekonomi warga Muslim perantau itu melahirkan kecemburuan di kalangan warga Hindu Bali. Dan memuncak dengan lahirnya Bom Bali I dan Bom Bali II. Stigma warga Muslim pun muncul, jelaham Jawa, pendatang adalah masalah, razia KTP dan lahirnya gerakan Ajeg Bali. Kemajuan ekonomi pendatang telah melahirkan gerakan bakso pakraman meskipun tidak bertahan lama

karena tidak laku. Kedudukan warga Muslim di desa pakraman pun tidak sama dengan warga Hindu Bali. Warga Muslim di desa pakraman pada umumnya diposisikan sebagai warga tamu, bukan sebagai warga utama sebagaimana warga Hindu Bali.

Pola hubungan warga Muslim dan warga Hindu Bali yang tidak harmonis alias konflik seperti tergambar pada pendirian rumah ibadah, perayaan hari raya keagamaan selain ditentukan oleh faktor komunikasi masing-masing warga, juga ditentukan oleh faktor adat yang dipegang kuat oleh warga Hindu Bali di desa pakraman. Kemudian ada juga faktor ketidakmengertian masing-masing warga atas ajaran masing-masing agama. Warga Muslim tidak sedikit yang tidak mengerti adat dan ajaran agama Hindu tentang rumah ibadah dan tanah, begitu juga warga Hindu tidak semua tahu tentang ajaran ibadah yang ada dalam ajaran Islam.

Pola hubungan yang toleran tampaknya perlu ditumbuhkan di tengah-tengah warga Muslim dan warga Hindu Bali. Perbedaan identitas agama, harus didialogkan di antara kedua komunitas jika hubungan harmonis dan saling hormat menghormati merupakan cita-cita yang hendak diwujudkan. Nilai-nilai lokal dan nilai-nilai agama yang menekankan moralitas dan menjunjung tinggi kemanusiaan perlu perkenalkan dan ditumbuhkembangkan oleh para tokoh agama di kedua komunitas Muslim maupun Hindu Bali.

Penutup

Hubungan antara warga Muslim dan Hindu di Bali tidaklah tunggal, namun beragam. Pola hubungan kedua komunitas itu, tidak saja kerja sama, akomodatif, dan toleransi, tetapi juga kompetitif dan konflik. Hubungan kedua warga yang berbeda agama tersebut sangat dinamis. Ada kalanya harmonis dan ada kalanya dililit oleh kendala-kendala yang melahirkan konflik. Tetapi, secara umum pola hubungan keduanya adalah harmonis. Realitas demikian perlu dipahami agar kedua komunitas agama tersebut agar keduanya tidak merasa bahwa hubungan mereka selama ini tidak ada masalah. Kedua warga tersebut harus

menyadari bahwa hubungan yang harmonis sebagai hubungan yang perlu dijaga dan dilestarikan sementara hubungan yang tidak harmonis perlu didialogkan dan dikomunikasikan. Peran tokoh agama, tokoh adat, forum kerukunan umat beragama dan pemerintah sangat strategis dalam membangun hubungan yang harmonis itu dan sangat strategis untuk memediasi segala bentuk hubungan yang dililit oleh masalah. Tetapi, karena peran strategis itu, para tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah sering alpa akan dinamika hubungan kedua warga tersebut pada tataran akar rumput. Akibatnya, tak jarang apa yang dikatakan oleh elit agama, adat, dan pemerintah berbeda dengan apa yang mewujud pada tataran masyarakat.

Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hubungan yang harmonis di tengah-tengah warga Muslim dan Hindu Bali merupakan tugas bersama semua pihak, baik tokoh agama, tokoh adat, pemerintah dan masyarakat. Sikap-sikap yang pejoratif terhadap warga Muslim pendatang pasca Bom Bali I dan II perlu dikikis habis, warga Muslim pendatang pun perlu memperbaiki citra mereka. Meskipun hukum adat yang berlaku di desa pakraman tidak bisa diubah karena begitulah adanya, maka hal-hal yang terkait dengan pembangunan rumah ibadah dan pemakaman warga Muslim perlu disosialisasikan di kalangan warga Muslim bahwa kondisi Bali berbeda dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, karena itu hal-hal terkait ajaran agama Islam yang memang sulit dilaksanakan karena berbenturan dengan adat atau hari raya keagamaan warga Hindu perlu didialogkan bersama warga Hindu Bali, agar warga Hindu Bali memahami posisi warga Muslim terkait dengan pelaksanaan ajaran agamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliffiati. 2014. "Interaksi Sosial Antarumat Beragama di Perumahan Bumi Dalung Permai Desa Dalung, Kuta Utara, Badung" dalam *JURNAL KAJIAN BALI*, Volume 04, Nomor 01, April.
- Armini, I Gusti Ayu. 2013, "Toleransi Masyarakat Multi Etnis dan Multi Agama dalam Organisasi Subak di Bali," dalam *Jurnal Patanjala* Vol 6 No. 1.
- Atmadja, Nengah Bawa, 2010. *Genealogi keruntuhan Majapahit Islamisasi, Toleransi dan Pemertahanan Agama Hindu di Bali*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- . 2010. *Ajeg Bali Gerakan, Identitas Kultural dan Globalisasi*. Yogyakarta: LkiS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2018. "Penduduk Provinsi Bali Menurut Agama yang Dianut Hasil Sensus Penduduk 2010," <http://bali.bps.go.id/2018>, diakses 24 Mei.
- Bales, Robert F. 1954. *Social Interaction*, California: The Rand Corporation.
- Basyir, Kunawi. 2016. "Membangun Kerukunan antarumat Beragama Berbasis Budaya Lokal Menyama Braya di Denpasar Bali," dalam *Religio Jurnal Studi Agama-agama* Vol. 6 No. 2.
- Boer, Niels-Ingvar, Peter J. An Baalen, Kuldeep Kumar, 2004. "The Implications of Different Models of Social Relations for Understanding Knowledge Sharing," dalam *Organizations as Knowledge Systems*. London: Palgrave Macmillan.
- Budarsa, Gede, "Karakteristik Budaya Komunitas Islam Pegayaman Buleleng Bali," Bali, Program Studi Antropologi Sastra dan Budaya Universitas Udayana, tt.
- Damayana, I Wayan. 2011. "Menyama Braya: Studi Perubahan Masyarakat Bali," Salatiga: Disertasi Universitas Kristen Satya Wacana,
- Diana, Nina. 2016. "Islam Masuk ke Bali dan Dampaknya terhadap Perkembangan Islam di Bali," dalam *Jurnal Tamaddun* Vol 4 Edisi 2 Juli-Desember
- Fiske, Alan Page, 1992. "The Four Elementary Forms of Sociality: Framework for a Unified Theory of Social Relations," *Psychological Review*, Vol 99 No. 4.
- Freese, Lee and Peter J. Burke, Persons, Identities, and Social Interaction, in B. Markovsky, et al. (eds.) *Advances in Group Processes*, Vol. 11. Greenwich, Conn.: JAI Press.
- Ismail, Arifuddin. 2010. "Refleksi Pola Kerukunan Umat Beragama: Fenomena Keagamaan di Jawa Tengah, Bali, dan Kalimantan Barat," *Jurnal Analisa*, Volume XVII, No. 02, Juli - Desember.
- Jannah, Siti Raudhatul. 2012. "Kegalauan Identitas: Dilema Hubungan Muslimin dan Hindu di Bali," dalam *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 16 No. 2 Desember.

- Karim, M. Abdul. 2016. "Toleransi Umat Beragama di Desa Loloan, Jembrana, Bali Ditinjau dari Perspektif Sejarah," dalam *Jurnal Analisis* Volume XVI, Nomor 1, Juni.
- Kartini, "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali, dalam *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Edisi XXXVII No. 2 Tahun 2011, hlm. 116.
- Khalikin,, Ahsanul dan Fathuri (Ed.) 2006. *Toleransi Beragama di Daerah Rawan Konflik*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Kymlicka, Will. 1992. "Two Models of Pluralism and Tolerance," *Analyse und Kritik · January*. DOI: 10.1515/auk-1992-0103.
- Pageh, I Made, Wayan Sugiarta, dan Ketut Sedana Artha, 2013. "Faktor Integratif Nyma Bali-Nyama Selam: Model Kerukunan Masyarakat pada Era Otonomi Daerah di Bali," dalam *Jurnal Kajian Bali* Volume 03 Nomor 01, April.
- Pamungkas, Cahyo. 2014. "Toleransi Beragama dalam Praktik Sosial: Studi Kasus Hubungan Mayoritas dan Minoritas," dalam *Episteme* Vol. 9, No. 2, Desember.
- Parmiti, Ni Nyoman. 1998. "Masyarakat Islam di Badung 1891-1990. Denpasar: Skripsi S1 Fakultas Sastra Universitas Udayana Denpasar.
- Yuliani, Ni Putu. 1993. "Kerukunan antarumat Beragama di Jembrana dan Buleleng 1856-1990: Suatu Tinjauan Sejarah." Denpasar: Skripsi S1 Fakultas Sastra Universitas Udayana Denpasar.
- Sarlan. 2009. *Islam di Bali: Sejarah Masuknya Agama Islam ke Bali*. Denpasar: Bidang Bimas Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bali.
- Saidi, Saleh dan Yahya Anshori (eds). 2002. *Sejarah Keberadaan Umat Islam di Bali*, Denpasar: MUI.
- Scheinkman, Jase A. "Social Interaction," Princeton University and NBER.
- Soviawan, I Putu, I Wayan Landrawan, dan Ratna Artha Windari. 2013. "Menyama Braya dalam Kehidupan Masyarakat Islam dan Hindu di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Tahun 2013," Bali, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Sujarwanto, I. 2012. "Interaksi Sosial Antar Umat Beragama: Studi Kasus Pada Masyarakat Karangmalang Kedungbanteng Kabupaten Tegal," *Journal of Educational Social Studies*, Vol. 1 No. 2.
- Sumbulah, Umi dan Nurjannah. 2013. *Pluralisme Agama Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Suputra, I Ketut. 2008. "Efektivitas Pengelolaan Sumber Air Untuk Kebutuhan Air Irigasi Subak di Kota Denpasar." (Tesis), Program Pascasarjana Universitas Udayana.Denpasar.
- Suwindia, I Gede. 2012. "Relasi Islam dan Hindu Perspektif Masyarakat Bali," *Jurnal Al-Ulum*, Volume. 12, Nomor 1, Juni.
- Suwindia, I Gede, Machasin, dan I Gede Parimartha, 2012. "Relasi Islam dan Hindu: Perspektif Masyarakat Bali," dalam *Jurnal al-Ulum* Volume 12 Nomor 1, Juni.
- Sztompka, Piotr, 2008. "The Focus on Eeryday Life a New Tyrn in Sociology, *European Reiew*, Vol 16 No. 1.
- Tunner, H. Jonathan. 1988. *A Theory of Social Interaction*, California: Stanford Uniersity Press.
- Tirthayasa, Made. 2017. "Tradisi Umat Islam Islam Desa Pegayaman," dalam <https://www.dewatanews.com/2015/07/tradisi-unik-umat-islam-desa-pegayaman.html>. diakses 2 April.
- Ulum, Raudatul dan Budiyo (Eds.). 2016. *Survey Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Tahun 2015*, Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- United Nation. 1997. *Defining Tolerance*, United Nation.
- Wildaniyati, 2018. "Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama Eksistensi Masyarakat Islam di Bali Pasca Bom Bali Tahun 2002-2012," *Jurnal Humanis*, Fakultas Ilmu Budaya Unud, Vol. 22 No. 1, Februari. DOI: 10.24843/JH.2018.v22.i01.p19.
- Wulandari, Riza. 2017. "Tradisi Mengibung: Studi Kasus Singkretisme Agama di Kampung Islam Kepaon Bali," dalam *Gulawentah Jurnal Studi Sosial* Volume 2 Nomor 1 Juli.

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA NGLANGGERAN, KABUPATEN GUNUNG KIDUL

*Community Empowerment Strategy in Development Of Nglanggeran Tourism Village,
Gunung Kidul Regency*

Dinar Wahyuni

dinar.wahyuni@dpr.go.id
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta

Naskah Diterima: 28 Februari 2017 | Naskah direvisi: 2 Mei 2018 | Naskah diterbitkan: 30 Juni 2018

Abstract: *Currently, tourism is growing rapidly. The problem is the progress of a tourist area has not guaranteed an increase in the welfare of the local community due to the low community participation in tourism management. The writing which is the result of research would like to study community empowerment strategy in development of Nglanggeran Tourism Village, Gunung Kidul Regency. Through qualitative descriptive approach, it can be seen that community empowerment in Nglanggeran Tourism Village is done through three strategies, awareness, capacity building, and powering. Awareness is done through socialization and innovation by the youth organization until finally Nglanggeran is defined as a tourist village. Community capacity building is done through training and mentoring around tourism village management. Society then put together in the organization, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran. The Articles of Association and Bylaws are based on deliberation as a form of value system capitation. The powering stage is given to people who have the capacity for independence. Nglanggeran village get a lot of support for the development of tourism support facilities and tourism business development from various parties. Community empowerment strategy succeeded in improving the local community's economy. In addition, the increasing number of tourists each year has increased PAD Gunung Kidul through ticket charges.*

Keywords: *empowerment strategy, tourism village, Nglanggeran*

Abstrak: Saat ini pariwisata berkembang pesat. Permasalahannya, kemajuan sebuah daerah wisata belum menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata. Tulisan ini merupakan hasil penelitian, ingin mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif terlihat bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Nglanggeran dilakukan melalui tiga strategi, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Penyadaran dilakukan melalui sosialisasi dan inovasi oleh Karang Taruna desa sampai akhirnya Nglanggeran disepakati sebagai desa wisata. Pengkapasitasan masyarakat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan seputar manajemen desa wisata. Masyarakat kemudian disatukan dalam wadah organisasi, yakni Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran. Pokdarwis menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berdasarkan musyawarah sebagai bentuk pengkapasitasan sistem nilai. Tahap pendayaan diberikan kepada masyarakat yang telah mempunyai kapasitas

sehingga tercapai kemandirian. Desa Nglanggeran banyak mendapat bantuan untuk pembangunan sarana pendukung wisata maupun pengembangan usaha wisata dari berbagai pihak. Strategi pemberdayaan masyarakat berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, peningkatan jumlah wisatawan setiap tahunnya telah meningkatkan PAD Gunung Kidul melalui retribusi tiket.

Kata kunci: strategi pemberdayaan, desa wisata, Nglanggeran

Pendahuluan

Dewasa ini, pariwisata mengalami perkembangan pesat. Tahun 2015, pariwisata di Indonesia tumbuh di atas pertumbuhan pariwisata dunia yang hanya 4,4% dan pertumbuhan pariwisata kawasan ASEAN sebesar 6%.¹ Bahkan sektor ini menjadi salah satu sektor unggulan penghasil devisa dan penyerap tenaga kerja. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata dinyatakan bahwa tahun 2015 sektor pariwisata menciptakan devisa sebesar US\$ 11,9 miliar US\$ atau setara Rp163 triliun (meningkat 113% dibandingkan tahun 2014 yang mencapai angka devisa sebesar US\$ 11,17 miliar) dan menyerap tenaga kerja sebesar 12,16 juta orang. Selain itu, Badan Pusat Statistik merilis angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Agustus 2016 mencapai 7,03 juta orang. Jumlah ini turun 530.000 orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, berkurangnya angka pengangguran karena perkembangan di sektor pariwisata. Perkembangan beberapa destinasi wisata menyerap banyak tenaga kerja.²

Mengingat pentingnya peran pariwisata dalam pembangunan masyarakat, maka Pemerintah menggalakkan pariwisata di berbagai daerah sekaligus menempatkannya sebagai pendekatan pembangunan alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang

Pasal 3 Undang-Undang tersebut menyebutkan

¹ Tantangan Pengembangan Pariwisata, <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/02/03/01yju1-tantangan-pengembangan-pariwisata>, diakses 7 Maret 2017.

² Pengangguran Turun 530.000, Menaker: Pariwisata Serap Tenaga Kerja, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3340085/pengangguran-turun-530000-orang-menaker-pariwisata-serap-tenaga-kerja>, diakses 20 Februari 2017.

bahwa tujuan penyelenggaraan wisata adalah memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata; memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa; memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja; meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; serta mendorong pendayagunaan produksi nasional.

Namun demikian, selama ini kemajuan sebuah daerah wisata belum menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Salah satu penyebabnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata masih rendah baik karena kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam manajemen pengembangan pariwisata maupun peran *stakeholder* lain yang mendominasi sehingga meminggirkan peran masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan konsep pembangunan pariwisata yang pada gilirannya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat lokal.

Community based tourism (CBT) muncul sebagai sebuah alternatif dari pengembangan pariwisata. Nicole Hausler (2005) mendefinisikan CBT sebagai bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pengembangan pariwisata. Fokus utama CBT menurut Pookaiyudom (1999 dalam Pookaiyudom, 2013: 2) adalah masyarakat lokal, bagaimana mendorong keterlibatan, partisipasi, dan manfaat bagi masyarakat dari kegiatan pariwisata, serta mendorong masyarakat menuju pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Pantin dan Francis (2005: 2) berpendapat bahwa CBT sebagai integrasi dan kolaborasi antara pendekatan dan alat untuk

pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui *assessment*, pengembangan, dan pemasaran sumber daya alam dan budaya masyarakat. Pengembangan CBT adalah pengembangan pariwisata yang mensyaratkan adanya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi komunitas dalam aspek ekonomi, social, budaya, politik dan lingkungan (Nurhidayati dan Fandeli: 2012: 3).

Karakteristik CBT adalah proses yang dihasilkan dari keterlibatan masyarakat untuk mengembangkan produk dan jasa pariwisata atau membuat dan menerapkan strategi pariwisata (Hall, 2000; Murphy, 1985 dalam Peter A. Johnson, 2010: 2). Penerapan konsep CBT pada pengembangan pariwisata akan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata. Ide kegiatan muncul dari masyarakat berdasarkan kearifan lokal yang ada. Demikian juga pengelolaan dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif, dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, dalam CBT terkandung konsep pemberdayaan masyarakat.

Desa wisata sebagai bentuk penerapan CBT menjadi pilihan wisata di Indonesia. Kearifan lokal dan tradisi budaya masyarakat menjadi penggerak utama kegiatan desa wisata. Selain itu, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling terkait. Karena itu, keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal (Wearing, 2002).

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi yang mengembangkan desa wisata untuk menarik wisatawan. Pada awal tahun 2016, jumlah desa wisata terdaftar di lima kabupaten/kota berjumlah 122 desa, dengan sebaran 38 desa wisata di Sleman, 14 desa wisata di Gunung Kidul, 27 desa wisata di Kota Yogyakarta, 33 desa wisata di Bantul, dan 10 desa wisata

ada di Kulon Progo.³ Tema desa-desa wisata tersebut beragam seperti desa wisata alam, kerajinan maupun budaya.

Salah satu desa wisata yang populer di Kabupaten Gunung Kidul adalah Nglanggeran. Keistimewaan Nglanggeran mengantarkan desa ini ke berbagai ajang penghargaan pariwisata. Tahun 2017, Desa Nglanggeran memperoleh penghargaan sebagai Desa Wisata Terbaik I Indonesia dan menerima penghargaan ASEAN *Community Based Tourism Award* 2017. Capaian yang diperoleh Desa Nglanggeran antara lain: mampu memberikan kontribusi kesejahteraan sosial, melibatkan kepengurusan dari masyarakat, menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan, mendorong terjadinya partisipasi interaktif antara masyarakat lokal dengan wisatawan, menyediakan jasa perjalanan wisata dan pramuwisata yang berkualitas. Selain itu, kualitas makanan, minuman, akomodasi dan kinerja *friendly tour operator* (FTO) ikut menunjang perolehan penghargaan tersebut.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul? Tulisan yang merupakan hasil penelitian tahun 2017 ini ingin mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian bersifat deskriptif dan dilakukan dengan pendekatan desain kualitatif. Sesuai pendekatan yang digunakan, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Observasi dilakukan selama proses pengumpulan data, sedangkan wawancara di Desa Wisata Nglanggeran mengambil informan

³ Lebih baik Pertumbuhan Desa Wisata Daripada Mal, <http://www.pikiran-rakyat.com/wisata/2016/01/04/355728/lebih-baik-pertumbuhan-desa-wisata-daripada-mal>, diakses 27 Februari 2017.

⁴ Desa Wisata Nglanggeran Terbaik ASEAN 2017, <https://m.tempo.co/read/news/2017/01/21/242838401/desa-wisata-nglanggeran-terbaik-asean-2017>, diakses 27 Februari 2017.

dari Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Kidul, Kelompok Sadar Wisata Desa Nglanggeran, BUMDes Nglanggeran, Kepala Desa Nglanggeran, dan masyarakat Desa Nglanggeran. Dari data yang terkumpul dilakukan analisis deskriptif sehingga didapatkan gambaran strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul.

Beberapa studi terkait pemberdayaan masyarakat desa wisata telah dilakukan, diantaranya penelitian Made Heny Urmila Dewi, Chafid Fandeli, dan M. Baiquni (2013: 129-139) yang mengkaji keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, Tabanan, Bali. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata di Jatiluwih belum melibatkan masyarakat lokal. Peranan pemerintah terlihat dominan padahal dalam acuan pendekatan tata kelola pemerintah yang bersih dan berkelanjutan, pemerintah hanya sebagai fasilitator dengan memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat lokal. Diperlukan kemauan politik pemerintah untuk mengurangi perannya dalam pengembangan desa wisata dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Kemudian penelitian yang dilakukan Hastuti, Suhadi Purwantara, dan Nurul Khotimah tentang model pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal sebagai strategi pengentasan kemiskinan di Lereng Merapi Kabupaten Sleman menemukan bahwa tiga wilayah lereng Merapi Kabupaten Sleman yang meliputi Desa Wisata Pentingsari, Srowolan, dan Brayut mempunyai model pengembangan desa wisata yang berbeda. Hal ini sesuai dengan kondisi dan potensi desa masing-masing. Desa Wisata Pentingsari dijadikan alternatif model pengembangan desa wisata alam karena kondisi alam yang diapit oleh Kali Pawon dan Kali Kuning

sangat cocok untuk pendakian dengan jalur menyusuri sungai, melewati hamparan sawah, naik turun tebing, dan melewati rindangnya berbagai jenis tanaman hutan, sedangkan Desa Wisata Srowolan dijadikan alternatif model pengembangan desa wisata budaya. Keberadaan Pasar Perjuangan Srowolan dan Sanggar Budaya Sayuti Melik sebagai objek wisata sejarah menjadikan peluang pengembangan desa wisata budaya. Terakhir adalah Desa Wisata Brayut yang dijadikan alternatif model pengembangan desa wisata alam dan budaya. Di desa wisata ini, wisatawan dapat belajar tentang bagaimana bertani, belajar memelihara ikan, memasak makanan tradisional, memainkan gamelan atau berlatih menari 8 dengan tarian tradisional, serta membuat kerajinan.⁵

Penelitian ini akan melengkapi penelitian-penelitian terdahulu dengan menitikberatkan pada strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul.

Pemberdayaan sebagai Pendekatan

Secara umum, pemberdayaan mengandung arti proses menuju berdaya. Pengertian “proses” menunjukkan pada serangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menjadi berdaya. Senada dengan pengertian ini, Prijono dan Pranarka (1996: 77) menyatakan bahwa: pemberdayaan mengandung dua arti, yakni: *to give power or authority* dan *to give ability to or enable*. Pengertian pertama mengandung arti memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau

⁵ Hastuti, Suhadi Purwantara, dan Nurul Khotimah. “Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Lereng Merapi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Laporan Penelitian*, <http://lppm.uny.ac.id/sites/lppm.uny.ac.id/files/abstrak%20lepas%20desa%20wisata.pdf>, diakses 27 Februari 2017.

keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Ife memperkuat pengertian kedua dengan mendefinisikan pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam dan memengaruhi kehidupan dari masyarakatnya (Ife, 1995: 182).

Sependapat dengan Ife, Winarni (1998: 75-76) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu: pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya, dan terciptanya kemandirian. Berdasarkan pendapat tersebut, maka pemberdayaan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat yang tidak memiliki daya, tetapi dapat diberikan juga kepada masyarakat yang memiliki daya, namun masih terbatas untuk mencapai kemandirian. Karena itu, daya dan potensi masyarakat harus digali dan dikembangkan. Pemberdayaan dilakukan dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki kemudian berupaya untuk mengembangkannya. Namun, pemberdayaan hendaknya tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat, sebaliknya pemberdayaan harus mengantarkan pada proses kemandirian.

Pemberdayaan memberikan tekanan pada pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Dengan demikian, pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai objek melainkan juga sebagai subjek.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 2) membagi tiga tahapan pemberdayaan, yaitu: penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Pada tahap penyadaran, masyarakat yang menjadi subjek pemberdayaan diberi penyadaran bahwa setiap manusia mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Dalam

penelitian ini, subjek pemberdayaan adalah masyarakat desa wisata. Masyarakat tersebut diberi pemahaman dan motivasi bahwa mereka harus berdaya dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dirinya sendiri. Dalam hal ini, orang lain hanya berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat mencapai kemandirian. Dengan demikian dalam masyarakat akan tercipta iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi yang dimiliki masyarakat.

Tahap kedua adalah pengkapasitasan. Proses ini dapat dicapai apabila masyarakat sudah mempunyai kemampuan untuk menerima daya. Tahap ini sering juga disebut dengan *capacity building* yang meliputi manusia, organisasi, dan sistem nilai. Pengkapasitasan manusia berarti memampukan masyarakat desa wisata baik secara individu maupun kelompok melalui pemberian ketrampilan dan pengetahuan seputar manajemen desa wisata. Pengkapasitasan organisasi dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya. Sebelum diberikan peluang usaha, masyarakat dibuatkan wadah organisasi lokal. Organisasi bersifat otonom dan berpola *structure follow functions*. Sementara pengkapasitasan sistem nilai dilakukan dengan membantu masyarakat menyusun aturan main. Misalnya, peraturan usaha bersama, sistem dan prosedur usaha, dan sebagainya. Sistem nilai ini harus dipatuhi semua pihak terkait.

Tahap ketiga adalah pemberian daya. Pada tahap ini masyarakat diberikan daya, otoritas, atau peluang untuk berkembang mencapai kemandirian. Pemberian daya disesuaikan dengan kualitas kecakapan masing-masing orang. Misalnya, pemberian kredit modal usaha kepada masyarakat di desa wisata sesuai dengan kemampuannya dalam mengelola usaha.

Dengan demikian, pemberdayaan merupakan suatu proses dan tujuan. Proses berarti serangkaian tahapan untuk mendayakan kelompok masyarakat yang

tidak berdaya maupun masyarakat yang memiliki daya, namun masih terbatas untuk mencapai kemandirian. Berbeda dengan tujuan yang menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya melalui potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat.

Konsep Desa Wisata

Desa wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Pariwisata Inti Rakyat (PIR) dalam Hadiwijoyo (2012: 68) mendefinisikan desa wisata sebagai suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman dan kebutuhan wisata lainnya. Sementara itu, Nuryanti (Wiendu, 1993 dalam Chusmeru dan Agoeng Noegroho, 2010: 17) mendefinisikan desa wisata sebagai suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Ada dua komponen utama dalam desa wisata, yaitu: *pertama*, akomodasi, yakni sebagian dari tempat tinggal penduduk setempat dan atau/unit-unit yang berkembang sesuai dengan tempat tinggal penduduk, dan *kedua*, atraksi, yakni seluruh kehidupan sehari-hari penduduk setempat beserta latar fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipan aktif.

Suatu desa dapat dikembangkan sebagai desa wisata apabila memiliki kriteria dan faktor-faktor pendukung sebagai berikut: *pertama*, memiliki potensi produk atau daya tarik unik dan khas yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Potensi-potensi tersebut dapat berupa lingkungan alam maupun kehidupan sosial budaya masyarakat. *Kedua*, memiliki dukungan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) lokal yang cukup dan memadai untuk mendukung pengelolaan desa wisata. *Ketiga*, faktor peluang akses terhadap akses pasar. Faktor ini memegang peran kunci, karena suatu desa yang telah memiliki kesiapan untuk dikembangkan sebagai desa wisata tidak ada artinya apabila tidak memiliki akses untuk berinteraksi dengan pasar atau wisatawan. *Keempat*, potensi SDM lokal yang mendukung peluang akses terhadap pasar wisatawan. *Kelima*, memiliki area untuk pengembangan fasilitas pendukung desa wisata, seperti: *homestay*, area pelayanan umum, area kesenian dan sebagainya (Dinas Pariwisata DIY, 2014: 26-29).

Berdasarkan tingkat perkembangannya, desa wisata dibagi menjadi tiga kategori sebagai berikut (Victoria br. Simanungkalit dkk, 2017: 20-21):

1. Desa wisata embrio adalah desa yang mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata dan sudah mulai ada gerakan masyarakat untuk mengelolanya menjadi desa wisata.
2. Desa wisata berkembang, yakni desa wisata embrio yang sudah dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa secara swadaya, sudah mulai melaksanakan promosi dan sudah ada wisatawan yang mulai tertarik untuk berkunjung.
3. Desa wisata maju merupakan desa wisata yang sudah berkembang dengan adanya kunjungan wisatawan secara kontinu dan dikelola secara profesional dengan terbentuknya forum pengelola, seperti koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Desa wisata kategori ini telah mampu melakukan promosi dan pemasaran dengan baik.

Sementara itu, berdasarkan karakteristik sumber daya dan keunikan yang dimilikinya, desa wisata dikelompokkan dalam empat kategori sebagai berikut (Dinas Pariwisata Provinsi DIY, 2014: 30):

1. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal sebagai daya tarik wisata utama.
2. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya alam sebagai daya tarik utama seperti pegunungan, perkebunan dan pertanian, pesisir.
3. Desa wisata berbasis perpaduan keunikan sumber daya budaya dan alam sebagai daya tarik utama.
4. Desa wisata berbasis keunikan aktifitas ekonomi kreatif seperti industri kerajinan sebagai daya tarik wisata utama.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Penyadaran Masyarakat Akan Potensi Desa

Nglanggeran merupakan desa yang secara administratif terletak di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Nglanggeran memiliki luas 762.0990 ha dengan tata guna lahan sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, ladang dan pekarangan. Di Desa Nglanggeran terdapat gunung yang saat ini berkembang menjadi salah satu tujuan wisata. Menurut salah satu pengurus Pokdarwis, Bapak Sugeng Handoko, Gunung Nglanggeran terletak di Zona Pegunungan Selatan Jawa Tengah-Jawa Timur atau tepatnya di Subzona Pegunungan Baturagung dengan ketinggian 700 meter dari permukaan laut dan kemiringan lerengnya curam-terjal (>45%). Bentang alamnya memiliki keindahan dan secara geologi sangat unik dan bernilai ilmiah tinggi. Berdasarkan sejarah geologinya, Gunung Nglanggeran merupakan gunung api purba yang berumur tersier atau 0,6-70 juta tahun yang lalu. Material batuan penyusun Gunung Nglanggeran merupakan endapan vulkanik tua berjenis andesit (*old andesite formation*). Singkapan batuan vulkanik klastik yang

ditemukan di Gunung Nglanggeran kenampakannya sangat ideal. Oleh karena itu, satuan batuan yang ditemukan di gunung tersebut menjadi lokasi tipe dan diberi nama Formasi Geologi Nglanggeran (wawancara tgl 30 Agustus 2017).

Sebelum menjadi ekowisata, kawasan Gunung Api Purba seluas luas 48 ha dan ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut termasuk kawasan yang gersang. Masyarakat sering mengambil batu dan menebang pohon dari area tersebut untuk dijual. Aktivitas tersebut berpotensi merusak lingkungan. Karang Taruna Desa Nglanggeran (Karang Taruna Bukit Putra Mandiri) menyadari bahwa apabila kondisi tersebut terus berlanjut, akan terjadi kerusakan lingkungan yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut, Karang Taruna ingin mengubah kondisi kawasan Gunung Api Purba menjadi kawasan yang lebih menarik dan memberi keuntungan bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan. Kemudian dilakukan penelitian oleh peneliti dari UPN Yogyakarta dan Dinas Pariwisata Gunung Kidul tentang potensi Gunung Api Purba. Hasilnya Gunung Api Purba merupakan gunung api yang pernah aktif jutaan tahun lalu, namun sekarang gunung tersebut dinyatakan sudah tidak aktif lagi. Gunung Api Purba berbentuk bongkahan batu andesit raksasa membentang sekitar 800 meter dan setinggi 300 meter ini ternyata menyimpan keindahan yang dapat dikembangkan.

Bersama sejumlah pemuda di tiga dusun di Nglanggeran, yakni Nglanggeran Kulon, Nglanggeran Wetan, dan Gunung Butak, Bapak Sugeng Handoko (saat ini pengurus Pokdarwis) merintis kegiatan ekowisata berbasis masyarakat. Dengan menerapkan konsep tersebut, tidak diharapkan adanya investasi dari pihak luar, sehingga keberlanjutan konservasi alam dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat dapat dipertahankan. Menurut Bapak Sugeng, pengembangan konsep tersebut

mebutuhkan komitmen dari semua pihak desa dan waktu yang tidak sebentar. SDM yang berkompeten juga diperlukan agar mampu memanfaatkan potensi desa bagi kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan. Selain itu, faktor yang juga penting dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat adalah swadaya baik berupa tenaga maupun material dari semua pihak. Kebetulan, saat itu Bapak Sugeng menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Bukit Putra Mandiri di Desa Nglanggeran sehingga lebih mudah dalam mengorganisasi pemuda (wawancara tanggal 30 Agustus 2017).

Berbagai kegiatan pelestarian lingkungan terus dilakukan oleh karang taruna. Atas dasar itulah, Pemerintah Desa Nglanggeran memercayakan pengelolaan lahan seluas 48 ha untuk dikelola Karang Taruna Bukit Putra Mandiri yang kemudian dituangkan dalam dalam SK Kepala Desa Nglanggeran No.05/KPTS/1999 tertanggal 12 Mei 1999. Selain itu, sosialisasi terus dilakukan sebagai upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang potensi wisata kawasan tersebut.

Memberi kesadaran masyarakat memang bukan hal yang mudah. Sebagaimana dinyatakan Bapak Sugeng Handoko (wawancara tanggal 30 Agustus 2017) bahwa bagi masyarakat yang tinggal turun temurun di Nglanggeran, kondisi alam Nglanggeran dianggap tidak menarik. Hal ini menyebabkan tingkat urbanisasi di Desa Nglanggeran sangat tinggi. Karena peluang kerja sedikit, pemuda desa itu memilih ke luar daerah bahkan ke luar negeri untuk mendapat penghasilan memadai. Persepsi itulah yang coba diubah oleh Karang Taruna Bukit Putra Mandiri. Dalam setiap pertemuan desa, perwakilan karang taruna selalu mensosialisasikan ide pengembangan desa wisata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertahankan budaya lokal dan menjaga kelestarian lingkungan alam.

Seiring berjalannya waktu, mulai tumbuh kesadaran untuk mengembangkan desanya. Setelah diperoleh kesepakatan

dari masyarakat, langkah selanjutnya adalah memilih potensi desa yang akan dikembangkan, meliputi: penggalan ide dan gagasan di kelompok-kelompok masyarakat, memusyawarahkan ke forum lebih tinggi, memilih kegiatan yang paling mendekati kondisi *existing* (SDM, potensi, isu yang berkembang), menentukan skala prioritas, menjadikan kesepakatan bersama, membuat perencanaan dan membagi peran dalam proses pengembangannya.

Berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat, potensi alam desa yang dikembangkan meliputi Gunung Api Purba, Embung Nglanggeran, dan Air Terjun Musiman. Panorama wisata yang ditawarkan Gunung Api Purba berupa *sunrise*, *sunset*, bulan dan bintang pada malam hari, panjat tebing yang menantang, dan keindahan alam berupa deretan pegunungan dan perkampungan penduduk yang menarik. Selain itu, di kawasan ini dijumpai fauna dan flora langka seperti tanaman tremas (tanaman obat yang hanya hidup di kawasan ekowisata Gunung Api Purba) dan kera ekor panjang.

Gunung Api Purba juga mempunyai beberapa kawasan yang bernilai sejarah seperti Gunung Kelir dengan bentuk kelir, diyakini sebagai tempat tinggal dari Ongko Wijoyo dan Punakawan, Tlogo Wungu dipercaya sebagai tempat pemandian bidadari, Sumber Air Comberan digunakan sebagai tempat pemujaan dan pertapaan orang zaman dahulu, Gunung Gedhe, Gunung Bongos, Gunung Blencong, Gunung Buchu, Tlogo Mardhido, Talang Kencono, dan Pamean Gadhung. Masing-masing kawasan tersebut menyimpan cerita sejarah yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata.

Satu lagi legenda unik dari Gunung Api Purba sebagai daya tarik wisata, yaitu Kampung Pitu. Menurut legenda yang dipercaya masyarakat, keluarga yang tinggal di puncak gunung itu harus berjumlah 7 kepala keluarga saja. Jika kepala keluarga yang tinggal di dusun ini kurang atau lebih maka akan terjadi hal-hal buruk yang tidak

diinginkan. Oleh karena itu, jika anak-anak mereka sudah berkeluarga maka keluarga baru tersebut harus meninggalkan Dusun Tlogo Mardhido.

Potensi alam kedua adalah embung. Embung atau telaga buatan dibangun di atas sultan *ground*. Embung diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X tanggal 19 Februari 2013. Embung berjarak sekitar 1,5 km arah tenggara dari Pendopo Kalisong dan pintu gerbang masuk Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba Nglanggeran. Fungsi utama embung adalah mengairi Kebun Buah Nglanggeran dengan memanfaatkan sumber air hujan sekaligus suplai dari sumber mata air yang ada di kawasan Nglanggeran, yakni Sumber Air Tujuh. Embung Nglanggeran menawarkan wisata yang unik karena tidak berada pada daerah lembah seperti umumnya telaga lain. Embung dibangun di atas bukit berketinggian sekitar 500 mdpl, sehingga seolah kita menikmati suasana di atas awan.

Selain gunung dan embung, potensi wisata alam lain di Nglanggeran adalah Air Terjun Musiman (Talang Purba dan Air Terjun Kedung Kandang). Keunikan air terjun ini adalah berada di tengah terasiring sawah dan berbentuk tangga batuan vulkanik. Sedangkan di Air Terjun Kedung Kandang terdapat tiga kedung dan enam tingkatan air terjun. Kedung kandang adalah kedung paling bawah dan paling besar, di atasnya terdapat Kedung Temanten dan Kedung Keris.

Nglanggeran juga menyimpan potensi wisata budaya yang dapat dikembangkan seperti wiwitan, kenduri, tayuban, atraksi kesenian jathilan, membatik topeng, karawitan, dan rasulan. Rasulan atau bersih desa merupakan syukuran atas berhasilnya panen. Acara ini biasanya dilaksanakan di bulan jawa, ruwah. Selain itu, tradisi masyarakat seperti bertani, membajak sawah, menangkap ikan di sungai, dan memasak kuliner khas masyarakat lokal juga dapat dijadikan daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Nglanggeran.

Tahun 2009, Nglanggeran resmi menjadi

desa wisata. Dengan visi menjadikan Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba Nglanggeran menjadi kawasan wisata unggulan berwawasan lingkungan berbasis masyarakat, pengelola desa wisata terus berupaya mengajak masyarakat berperan aktif dalam kegiatan pariwisata. Sedangkan misi dari pengelolaan desa wisata Nglanggeran meliputi: a) meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan pengelolaan Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba; b) membangun dan meningkatkan kesadaran peduli lingkungan; c) menggalang kemitraan dengan berbagai pihak yang berkompeten dalam masalah kepariwisataan dan aktivis peduli lingkungan; d) melindungi lingkungan di Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba, baik kebudayaan, flora, fauna dan juga keunikan batumannya; e) melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba; f) melakukan promosi secara efektif dan intensif; dan g) meningkatkan lama tinggal wisatawan di Kabupaten Gunungkidul dan Provinsi DIY.

Pengkapasitasan Masyarakat

Setelah masyarakat menyadari potensi desanya, maka strategi pemberdayaan selanjutnya adalah pengkapasitasan masyarakat. Pengkapasitasan meliputi peningkatan kapasitas manusia, organisasi, dan sistem nilai. Pengkapasitasan manusia dilakukan melalui pemberian ketrampilan dan pengetahuan seputar manajemen desa wisata. Dalam hal ini, peran serta pemerintah sangat dibutuhkan. Pemerintah harus mengajak, memotivasi, dan mendorong masyarakat agar mampu mengembangkan desanya sehingga kesejahteraan masyarakatnya meningkat tanpa merusak kelestarian lingkungan dan adat budaya setempat.

Pengkapasitasan manusia dimulai dari menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaku wisata. Para pelaku desa wisata banyak mengikuti pelatihan seputar pengelolaan desa wisata yang

diselenggarakan berbagai pihak. Misalnya, pada bulan Juli tahun 2009, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (sekarang Dinas Pariwisata) Gunung Kidul bekerja sama dengan Karang Taruna Bukit Putra Mandiri menyelenggarakan pelatihan panjat tebing bertempat di Pendopo Joglo Kalisong dengan mengundang Federasi Panjat Tebing Indonesia (FTPI) cabang Gunungkidul sebagai instruktur. Kegiatan pelatihan bertujuan membekali peserta tentang teknik panjat tebing serta pengenalan alat dan cara penggunaannya sesuai standar keamanan pemanjatan. Tidak hanya Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pariwisata juga memfasilitasi sertifikasi pemandu. Tahun 2016, sebanyak 52 orang pemandu mengikuti sertifikasi pemandu ekowisata yang merupakan program dari Kementerian Pariwisata berlokasi di Goa Jomblang.

Selain memfasilitasi sertifikasi pemandu, Kementerian Pariwisata memberikan bantuan PNPM Pariwisata kepada Desa Wisata Nglanggeran melalui Pokdarwis. Menurut Bapak Mursidi, Desa Nglanggeran mendapatkan program PNPM Pariwisata dua tahap, yaitu tahun 2011 dan tahun 2012. Adapun program yang dilaksanakan di tahun pertama (2011) antara lain: pelatihan pengelolaan *home stay*, pelatihan penataan pedagang, pembuatan warung relokasi pedagang, dan pembuatan arena *flying fox*. Selanjutnya tahap kedua (2012) digunakan untuk pelatihan pemandu *outbond*, pelatihan kuliner, pelatihan manajemen objek daya tarik wisata, pelatihan kesenian tradisional dan pengadaan seragam kesenian, serta pembuatan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) berstandar wisatawan mancanegara (wawancara tanggal 31 Agustus 2018). Program-program tersebut merupakan hasil dari rebug warga sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang dimiliki. Diharapkan dengan adanya program ini akan memperkuat

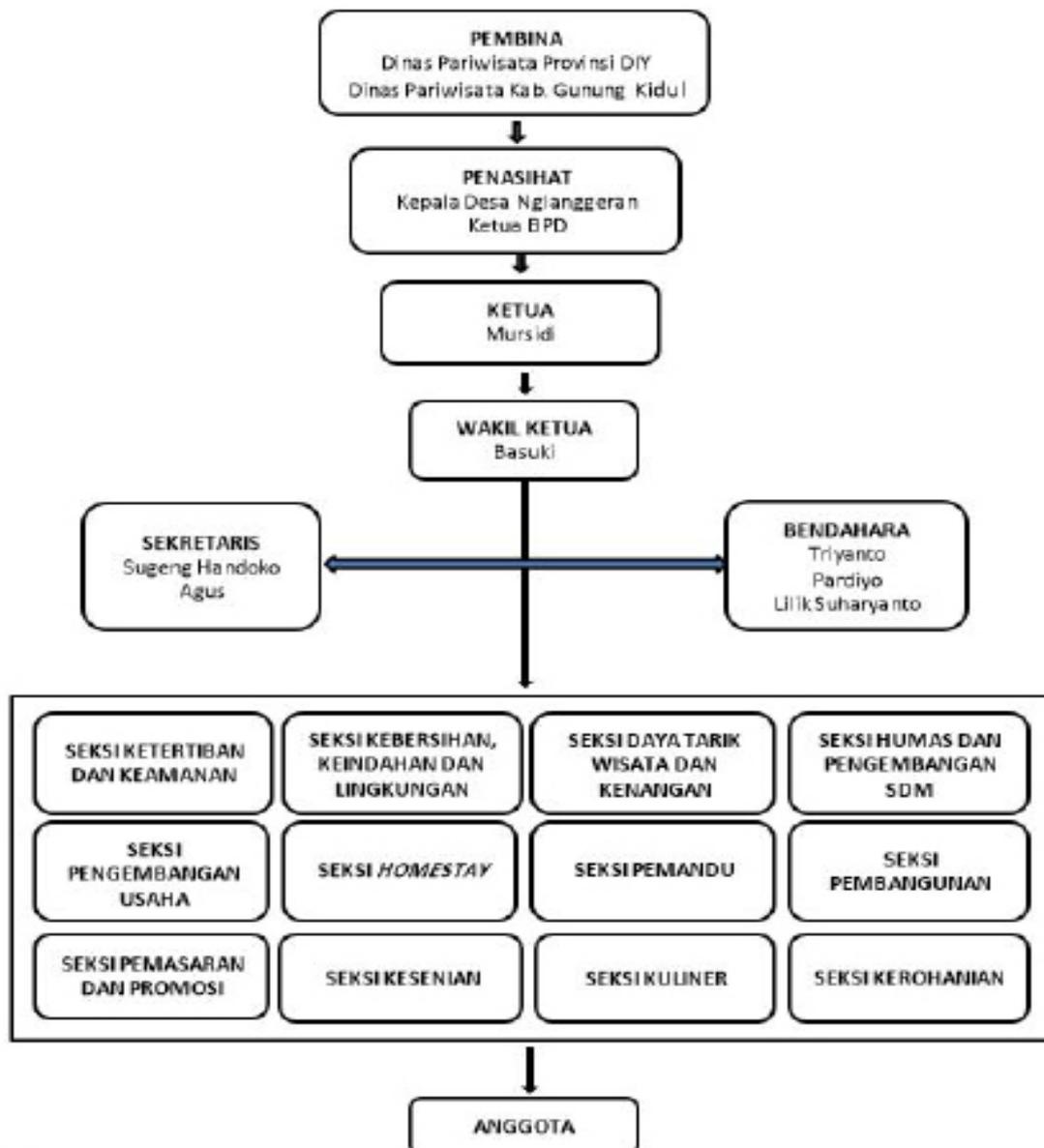
daya tarik wisata yang sudah terbentuk sebelumnya.

Dalam perkembangannya, Dinas Pariwisata Gunung Kidul terus melakukan pendampingan bagi pengelola Desa Wisata Nglanggeran. Promosi *family tour* terus digalakkan. Akses untuk dikenal secara global semakin terbuka lebar. Hasilnya Nglanggeran menjadi destinasi wisata baik domestik maupun mancanegara. Semakin dikenalnya Nglanggeran sampai ke mancanegara, mendorong pengelola desa wisata untuk lebih meningkatkan kemampuan bahasa asing. Beberapa mahasiswa dari Manajemen Kajian Pariwisata UGM rutin datang ke Nglanggeran untuk melatih bahasa Inggris para pengelola desa wisata (wawancara dengan pengurus Pokdarwis, Triyanto tanggal 31 Agustus 2017).

Seiring dengan semakin tingginya jumlah wisatawan yang datang ke Nglanggeran, maka Karang Taruna dan Pemerintah Desa berinisiatif untuk membentuk kelompok pengelola wisata. Kelompok tersebut diberi nama Badan Pengelola Desa Wisata (BPDW) Nglanggeran. BPDW melibatkan seluruh komponen masyarakat seperti PKK, kelompok tani, Pemerintah Desa dan Karang Taruna. BPDW Nglanggeran terus membenahi dan menata lokasi wisata dengan membangun jalur pendakian, fasilitas MCK, dan gubuk-gubuk peristirahatan pendakian. Selain penataan fisik, juga diperlukan pengembangan konsep gerakan sadar wisata untuk mendukung terciptanya iklim kondusif di desa wisata. Gerakan sadar wisata merupakan konsep yang mengembangkan partisipasi dan dukungan para pemangku kepentingan dalam mendorong iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya wisata di suatu wilayah.⁶

Tahun 2013, BPDW ditunjuk sebagai organisasi yang secara resmi berhak mengelola 48 hektar kawasan konservasi Gunung Api Purba sekaligus menggunakannya sebagai

⁶ Apa itu Pokdarwis? <https://travel.kompas.com/read/2017/10/17/153900727/apa-itu-pokdarwis->, diakses 16 Maret 2018.



Bagan 1. Susunan Pengurus Kelompok Sadar Wisata Desa Nglanggeran Tahun 2016-2021
 Sumber: hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Sadar Wisata, Bapak Mursidi tanggal 30 Agustus 2017

kawasan wisata dengan nama organisasi baru, yaitu Pokdarwis Desa Wisata Nglanggeran. Keberadaan Pokdarwis merupakan cermin pengkapasitasan organisasi dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengkapasitasan organisasi dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya. Dalam hal ini, Pokdarwis berperan sebagai wadah organisasi lokal. Pokdarwis harus mampu meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata sekaligus meningkatkan nilai manfaat wisata bagi kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, jumlah pengurus inti dan anggota Pokdarwis tercatat sebanyak 154 orang. Dalam 1 minggu, satu orang akan bekerja piket menjadi pemandu wisata, petugas parkir atau menjaga kebersihan lingkungan kawasan selama 4 hari. Adapun susunan kepengurusan Pokdarwis akan ditunjukkan dalam Bagan 1.

Struktur organisasi, tata kerja, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan program kerja Pokdarwis ditetapkan melalui musyawarah anggota. Selain itu, Pokdarwis menyusun peraturan usaha bersama sesuai kesepakatan masyarakat pelaku wisata yang harus dipatuhi oleh

semua pihak. Penyusunan AD/ART dan peraturan usaha bersama mencerminkan pengkapasitasan sistem nilai dalam konsep pemberdayaan.

Seiring perkembangan Desa Wisata Nglanggeran, dukungan dari pemerintah daerah semakin meningkat. Pendampingan terus dilakukan baik pendampingan terhadap pokdarwis maupun kelompok-kelompok masyarakat berkegiatan ekonomi produktif yang mendukung desa wisata. Setiap kelompok mendapatkan pendampingan dari pihak terkait. Kelompok *pertama* adalah penyedia kuliner. Penyedia kuliner di Desa Wisata Nglanggeran dikelola oleh PKK yang tergabung dalam kelompok Purba Rasa. Adapun ketua kelompok penyedia kuliner adalah Ibu Surini dengan anggota berjumlah 55 orang. Banyak kegiatan pelatihan dan pendampingan untuk peningkatan kapasitas SDM kelompok kuliner ini. Standar pelayanan pun disepakati masing-masing kelompok sehingga sistem kontrol dilakukan oleh anggota sendiri dan juga dari Pokdarwis Nglanggeran.

Kedua adalah kelompok *homestay* Purba Wisma yang menjadi tempat menginap bagi wisatawan di Desa Wisata Nglanggeran. Saat ini terdapat 80 *homestay* dengan berbagai kondisi yang menjadi keunikan dan keberagaman masyarakat. Penyesuaian pemilik *homestay* dan tamu yang akan menginap merupakan tugas dari Pokdarwis untuk mengaturnya. Interaksi antara wisatawan dengan pemilik *homestay* adalah syarat wajib setelah kebersihan rumah dan MCK yang dimiliki.

Ketiga adalah Kelompok Tani Kumpul Makaryo yang diketuai oleh Bapak Hadi Purnomo. Kelompok tani tersebar di lima dusun di Desa Nglanggeran. Saat ini sebanyak 100 anggota aktif melakukan kegiatan pertanian yang mendukung desa wisata. *Keempat*, kelompok pengrajin yang terdiri dari tiga kelompok pengrajin. Adapun kelompok ini ada di Dusun Nglanggeran Kulon, Nglanggeran Wetan, dan Gunungbatak.

Kelima, kelompok pedagang yang memiliki anggota 21 orang. Kelompok ini ada di sekitar kawasan ekowisata Gunung Api Purba. *Keenam*, Kelompok Ternak Purbaya dengan ketua kelompok Bapak Pardiya. Lokasi ternaknya ada di Nglanggeran Kulon, Nglanggeran Wetan, dan Gunung Butak. *Ketujuh* adalah kelompok pengelola kakao yang diketuai Bapak Hadi Purwanto. Jumlah anggota 15 orang.

Kedelapan, kelompok TKI Purna dengan Bapak Triyana sebagai ketua. Kelompok ini beranggotakan 50 orang. Pada tahun 2014 Desa Nglanggeran resmi menjadi Sentra Usaha TKI Purna karena menurut kajian dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia melalui Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Yogyakarta, para TKI Purna di desa ini sangat potensial dan kreatif dalam berwirausaha dengan mendayagunakan potensi daerahnya. Bentuk konkrit pemberdayaan dilakukan melalui program edukasi keuangan dan edukasi kewirausahaan bagi para TKI Purna dan keluarganya. Dengan kegiatan itu diharapkan semakin banyak daerah lain yang terinspirasi dan termotivasi untuk mengembangkan ekonomi produktif sebagai sumber penghasilan berkelanjutan di daerah asal.

Tahun 2017, Pokdarwis bekerja sama dengan Tim Putri Kedaton pimpinan Lastiyani Warih Wulandari menyelenggarakan pelatihan terapis spa professional untuk mendukung kegiatan spa di Desa Wisata Nglanggeran. Sebanyak 20 perempuan dari kelompok Purba Ayu Spa dilatih oleh Tim Putri Kedaton. Para perempuan yang akan menjadi terapis ini dibekali metode pijat yang benar mulai dari *foot massage*, *hand massage*, hingga *back massage*. Tidak hanya itu, kelompok ini juga mendapat materi pembuatan produk lulur dan masker spa serta mempelajari penyiapan makanan dan minuman spa.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

juga ikut terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran. Bentuk pendampingan masyarakat meliputi pendampingan pembuatan rencana pengembangan desa wisata oleh *Indonesia Ecotourism Network* (Indecon), pelatihan bahasa asing bagi pelaku wisata khususnya pemandu wisata oleh Komunitas STORM, dan pelatihan pelatihan kapasitas pasca gempa oleh *International Organization for Migration* (IOM). Pada prinsipnya, semua kegiatan peningkatan kapasitas diselenggarakan dengan mengacu pada “sapta pesona” (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan).

Pemberian Daya

Pada tahap ini, masyarakat diberikan daya, otoritas, atau peluang untuk berkembang mencapai kemandirian. Tahun 2012, Pertamina memberikan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) senilai Rp765.084.500 kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kumpul Makaryo untuk mengembangkan agrowisata di Nglanggeran dengan konsep Sentra Pemberdayaan Tani (SPT).

SPT Nglanggeran merupakan konsep pertama SPT melalui pembuatan kebun buah durian dan kelengkeng dengan jumlah tanaman 3.100 pohon yang terdiri atas 2.800 pohon durian monthong dan chanee, dan 300 pohon kelengkeng. Kebun buah berdiri di atas tanah seluas 20 ha. 11,5 ha merupakan tanah Sultan dan 8,5 ha merupakan tanah warga. Kebun buah ini dikelola oleh Kelompok Tani Kencono Mukti yang terdiri dari 80 orang petani dari Desa Nglanggeran.

Program pengembangan agrowisata diawali dengan pembangunan waduk kecil yang biasa disebut embung di atas bukit Nglanggeran. Embung digunakan sebagai tempat penampungan air hujan untuk mengairi kebun buah di sekitarnya pada musim kemarau. Embung dapat menampung air hingga mencapai 12.000 meter kubik. Di sekitar lokasi embung ditanami bibit durian dan kelengkeng.

Dalam perkembangannya, Pertamina bekerja sama dengan Yayasan Obor Tani terus melakukan pendampingan kepada petani dalam pengembangan agrowisata. Dampaknya, Agrowisata Patra Nglanggeran berhasil menarik perhatian wisatawan yang datang ke Desa Wisata Nglanggeran. Tidak hanya menikmati keindahan alam, wisatawan juga dapat menikmati buah kelengkeng dan durian di atas bukit.

Dinas Pariwisata Provinsi DIY juga mendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Nglanggeran melalui pemberian bantuan hibah berupa 79 unit kloset duduk, lantai keramik, tempat penampungan air, dan pipa penyambungan air yang diserahkan kepada 79 pemilik *homestay* pada akhir tahun 2014 (wawancara dengan Mursidi tanggal 31 Agustus 2018). Saat ini, rata-rata di setiap *homestay* terdapat dua MCK, yakni model jongkok dan model duduk untuk kebutuhan wisatawan mancanegara. Diharapkan dari bantuan ini dapat memenuhi kebutuhan wisatawan terutama wisatawan mancanegara yang akan menginap di *homestay* tersebut.

Tahun 2015, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dan Universitas Gadjah Mada mendirikan Taman Teknologi Pertanian (TTP) di atas lahan seluas 4.600 meter persegi. Lokasi TTP berada di kawasan Agrowisata Patra. Tujuan didirikannya TTP sebagai pusat diseminasi, pusat pengolahan kakao dan susu kambing etawa (pabrik mini), inovasi hidroponik sayuran, *screen field* bunga krisan, dan inovasi teknologi lain khususnya pembibitan sayuran dan buah-buahan.

Perlu diketahui bahwa di Nglanggeran terdapat dua tempat pengolahan coklat. Selain TTP, ada juga Griya Cokelat. Griya Cokelat merupakan *home industry* dengan alat sederhana untuk memproduksi coklat, sedangkan TTP merupakan industri dengan skala besar. Kedua usaha ini berjalan sinergi

seperti diungkapkan Sekretaris Pokdarwis, Bapak Sugeng Handoko (wawancara 31 Agustus 2017).

Griya Cokelat Nglanggeran merupakan salah satu inovasi yang digerakkan oleh masyarakat lokal dalam rangka mengembangkan potensi kakao di Nglanggeran. Desa Nglanggeran merupakan salah satu desa penghasil kakao terbesar di Gunung Kidul dengan luas lahan 101 ha. Hal ini menarik perhatian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam (BPTBA), Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY, dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gunungkidul untuk bekerja sama mengembangkan dan membantu budidaya kakao hingga pengolahan pasca panen.

Sinergi beberapa *stakeholders* tersebut kemudian memberikan bantuan sarana dan prasarana berupa peralatan dan pembangunan rumah produksi atau *showroom* Griya Cokelat Nglanggeran. Kegiatan yang ada di Griya Cokelat Nglanggeran meliputi pengolahan buah kakao menjadi bubuk coklat hingga produk yang siap dimakan dan pelatihan pembuatan dodol coklat dan pembuatan keripik pisang salut coklat yang terintegrasi dalam paket wisata Gunung Api Purba. Produksi kakao kering 120 kg bisa menghasilkan 40 kg bubuk coklat. Sementara produk yang dihasilkan berupa 15 kg lemak coklat, 4.000 kemasan *chocomix*, 400 *pack* pisang coklat, dan 300 *pack* dodol coklat dengan berbagai varian.⁷

Kepala BPTBA LIPI, Hardi Julendra menyatakan bahwa Nglanggeran merupakan desa percontohan untuk mengelola ekonomi lokal dalam bentuk usaha berbasis komunitas. Oleh karena itu, strategi pengembangan produksi kakao di Nglanggeran merupakan perpaduan antara potensi sektor agro dengan berbagai komoditas yang ada, terutama Gunung

Api Purba yang sangat potensial sebagai komoditas pariwisata yang dikemas dalam pola agrowisata.⁸

Pada awalnya, TTP direncanakan menjadi pusat pengembangan hilirisasi teknologi yang dijalankan oleh lima kelompok, yaitu pengembangan berbasis padi dan sapi di Padukuhan Nglanggeran Wetan (kelompok Mugodadi) dan Padukuhan Doga (kelompok Margodadi), pengembangan berbasis kambing dan kakao di Padukuhan Gunung Butak (Ngudi Makmur) dan Padukuhan Karangari, sedangkan untuk pengolahan dan pemasaran hasil di Padukuhan Nglanggeran Kulon. Namun dalam prakteknya, masing-masing padukuhan juga mengembangkan inovasi teknologi integrasi kambing dan kakao.

Luasan tanaman kakao masyarakat setiap bulannya mencapai 3-5 ton di mana 30 persen dari produksi kakao diolah di TTP Nglanggeran. Masih minimnya produksi selain karena mesin yang terbatas, juga pemilihan biji kakao kualitas A yang akan digunakan untuk memproduksi berbagai olahan coklat. Adapun produk-produk yang dihasilkan TTP diantaranya, coklat instan, susu kambing etawa, susu kambing coklat, dan beberapa jenis permen coklat lainnya. Belum lama ini merk produk coklat diberi nama baru yakni SINcho (*Science Innovation Network chocolate*). Setelah berjalan kurang lebih tiga tahun, TTP diserahkan kembali ke Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.

Menurut penulis, TTP lebih pada program pemerintah di desa wisata yang sedang berkembang. Tujuan awalnya untuk memberdayakan masyarakat. Namun dalam praktiknya, skala usaha TTP besar dan masyarakat dijadikan karyawan di posisi tertentu. Akibatnya, TTP tidak bisa menampung masyarakat dalam jumlah besar dan inovasi yang dikembangkan juga tidak didasarkan pada potensi dan kebutuhan

⁷ Inilah Produk Griya Cokelat Nglanggeran, <http://gunungapipurba.com/posts/detail/inilah-produk-griya-cokelat-nglanggeran>, diakses 16 Maret 2018.

⁸ “Diresmikan, Griya Cokelat Hasil Kerjasama LIPI dengan BI dan Kabupaten Gunung Kidul,” <http://lipi.go.id/siaranpress/diresmikan-griya-cokelat-hasil-kerjasama-lipi-dengan-bi-dan-kabupaten-gunungkidul/17088>, diakses 16 Februari 2018.

masyarakat lokal. TTP tidak bersifat memberdayakan masyarakat. Berbeda dengan Griya Coklat. Griya Coklat dikelola langsung masyarakat sehingga keuntungan yang diperoleh kembali ke masyarakat.

Pokdarwis Nglanggeran terus berinovasi untuk mengembangkan desanya. Tahun 2016 dibangun Nglanggeran *Mart*, yaitu toko produk lokal masyarakat Desa Nglanggeran. Nglanggeran *Mart* menjual souvenir dan produk olahan ibu-ibu PKK Desa Nglanggeran seperti keripik singkong, brownies singkong, dan dodol kakao. Pokdarwis juga memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat dengan bunga 1,5% yang diangsur selama 35 hari. Besarnya bunga merupakan hasil kesepakatan bersama masyarakat dan digunakan untuk penambahan pemupukan modal. Pada awalnya, besarnya pinjaman antara Rp300-500rb. Dengan berjalannya kegiatan ini dinilai efektif membantu masyarakat dalam peningkatan usaha wisata seperti memperbaiki *homestay* atau membuat MCK. Karena itu, besarnya waktu pinjaman meningkat menjadi Rp2,5-3juta. Hal ini juga dipengaruhi perputaran uang yang ada di Pokdarwis. Kegiatan simpan pinjam ini dilakukan bersamaan dengan pertemuan warga setiap malam Selasa Kliwon. Selain sebagai wadah kegiatan simpan pinjam, pertemuan malam Selasa Kliwon sebenarnya merupakan wadah untuk melakukan monitoring dan evaluasi Desa Wisata Nglanggeran.

Seiring berjalannya waktu, konsep desa wisata yang tetap mempertahankan masyarakat. Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran ternyata membawa berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat setempat. Masyarakat Nglanggeran yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani tidak perlu berganti profesi karena pertanian juga diintegrasikan sebagai salah satu bagian dari wisata. Para pengelola desa wisata berusaha menampilkan budaya lokal yang dikemas dalam sebuah paket wisata seperti *homestay*, *outbond*, makrab, *camping*, Puncak Kampung Pitu, *sunset* dan *sunrise*, dan *live in*.

Paket *live in* paling banyak diminati wisatawan karena wisatawan bisa berinteraksi langsung dengan penduduk dan belajar budaya masyarakat Desa Nglanggeran seperti menanam padi dan membajak sawah, membuat kreasi kerajinan dari janur, belajar tari tradisional (Jathilan dan Reog), membuat topeng, ikut kenduri, menangkap dan melepas ikan di sungai, belajar memasak makanan khas Desa Nglanggeran, dan budidaya kakao. Pilihan wisata yang ditawarkan ternyata Pokdarwis

Tabel 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2012-2017

Tahun	Kunjungan Wisatawan		Total
	Domestik	Mancanegara	
2012	27675	200	27875
2013	85424	234	85658
2014	324827	476	325303
2015	255388	529	255917
2016	171306	1557	172863
2017	149241	1794	151035

Sumber: hasil wawancara dengan Pengurus Pokdarwis, Sugeng Handoko tanggal 1 September 2017.

berhasil menarik perhatian wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Nglanggeran seperti ditunjukkan Tabel 2 berikut.

Selama kurun waktu 6 tahun, terus terjadi kenaikan jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke Desa Wisata Nglanggeran. Bahkan pada tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan mencapai 325.303 orang. Angka ini meningkat pesat dibandingkan tahun sebelumnya 2013 yang hanya 85.658 orang. Fenomena ini menunjukkan bahwa wisata minat khusus semakin diminati wisatawan. Namun demikian, perkembangan Desa Wisata Nglanggeran yang sangat pesat menyisakan dampak buruk bagi lingkungan. Kondisi alam di sekitar objek wisata Nglanggeran rusak. Karena itu Pokdarwis berupaya memperbaiki kondisi Nglanggeran dengan menekan jumlah wisatawan yang berkunjung demi

keberlangsungan Desa Wisata Nglanggeran. Salah satunya dengan menaikkan harga tiket masuk dari Rp7.000 menjadi Rp15.000. Hasilnya tahun 2017 jumlah wisatawan mengalami penurunan menjadi 151.035 orang dari 172.863 orang di tahun 2016. Penurunan jumlah wisawatan tidak menurunkan omzet

Tabel 3. Omzet Desa Wisata Nglanggeran Tahun 2012-2017

Tahun	Omzet (rupiah)	Kas Desa dan BUMDes (rupiah)	Retribusi Pemkab Gunung Kidul (rupiah)
2012	81.225.000	2.400.000	-
2013	424.690.000	3.600.00	-
2014	1.422.915.000	7.200.000	196.400.000
2015	1.541.990.000	8.400.000	369.200.000
2016	1.081.710.500	12.000.000	345.726.000
2017	1.963.455.000	71.030.500	304.068.000

Sumber: hasil wawancara dengan Pengurus Pokdarwis, Sugeng Handoko tanggal 1 September 2017

Desa Wisata Nglanggeran. Tahun 2018, omzet Desa Nglanggeran tetap naik sebesar Rp1.963.455.000 dari Rp1.081.710.500 pada tahun 2017. Uraian lebih rinci akan dijelaskan dalam Tabel 3 berikut.

Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga, pendapatan Desa Wisata Nglanggeran berupa tiket masuk wisatawan terdistribusi ke beberapa tempat. Tiket seharga Rp7.000 per lembar didistribusikan ke Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sebesar Rp2.000, Jasa Raharja Rp500, Pemerintah Desa Rp2.000, sedangkan sisanya sebesar Rp2.500 masuk ke kas Pokdarwis untuk kegiatan operasional dan pengembangan Desa Wisata Nglanggeran.

Dampak lain dari pengembangan desa wisata adalah penurunan tingkat migrasi karena kegiatan pariwisata mendorong munculnya berbagai lapangan kerja bagi masyarakat setempat seperti pemandu

wisata, usaha *homestay*, warung makan, toko oleh-oleh, dan petugas parkir. Demikian juga terjadi transformasi kultural mata pencaharian masyarakat dari pertanian ke pariwisata akibat berkembangnya desa wisata. Namun demikian, transformasi mata pencaharian tersebut tidak terjadi pada seluruh warga Nglanggeran. Kepala Desa Nglanggeran, Bapak Senen mengatakan bahwa warga yang mengelola *homestay* dan jasa pariwisata lebih banyak berasal dari tiga dusun yang berdekatan dengan objek wisata, yakni Dusun Nglanggeran Kulon, Nglanggeran Wetan, dan Gunung Butak. Sedangkan di dua dusun lain, yakni Dusun Karangsari dan Dusun Doga, kondisi tersebut tidak ditemukan (wawancara tanggal 2 September 2017).

Transformasi mata pencaharian masyarakat yang tidak merata menimbulkan kesenjangan ekonomi di Desa Nglanggeran. Masyarakat di sekitar objek wisata mempunyai akses yang lebih besar dalam usaha wisata dibandingkan dengan masyarakat yang relatif jauh dari objek wisata. Akibatnya, pendapatan yang diperoleh juga berbeda. Dengan demikian, semakin tinggi keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata, maka peluang masyarakat untuk mengambil manfaat ekonomi dari hasil kegiatan desa wisata cenderung semakin tinggi.

Penutup Simpulan

Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Nglanggeran dilakukan melalui tiga strategi, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Penyadaran dilakukan melalui sosialisasi dan inovasi oleh Karang Taruna Putra Bukit Mandiri untuk menyadarkan masyarakat akan potensi desa Desa Nglanggeran. Akhirnya masyarakat sepakat menjadikan Nglanggeran sebagai desa wisata. Masyarakat kemudian menentukan potensi Desa Nglanggeran yang akan dikembangkan sebagai daya tarik wisata meliputi wisata

alam, wisata budaya, wisata sejarah, dan wisata edukasi.

Setelah tumbuh kesadaran masyarakat akan potensi desa, kemudian dilakukan pengkapasitasan. Pengkapasitasan pengelola desa wisata dilakukan melalui pelatihan seputar pengelolaan desa wisata. Sebagai bentuk dukungan bagi pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Dinas Pariwisata dan Kementerian Pariwisata aktif memberikan pelatihan dan pendampingan. Begitu juga dengan BUMN, pihak swasta maupun LSM. Mereka sangat mengapresiasi ide pengembangan desa wisata. Untuk memudahkan koordinasi dan pengelolaan, para pengelola desa wisata disatukan dalam wadah organisasi lokal yang disebut Pokdarwis Nglanggeran. Pokdarwis merupakan wujud dari pengkapasitasan organisasi. Pokdarwis kemudian menyusun peraturan usaha bersama (AD dan ART) untuk mengatur sistem kerja organisasi dan sistem administrasi berdasarkan musyawarah anggota.

Masyarakat yang telah mempunyai kapasitas kemudian diberi daya untuk mencapai kemandirian. Dari segi fisik, Desa Nglanggeran banyak mendapat bantuan dana pembangunan sarana pendukung wisata dari berbagai pihak. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menganggarkan dana pembangunan sarana pendukung wisata dari APBD. Dinas Pariwisata Provinsi DIY memberikan hibah untuk pengembangan *homestay*. Kemudian untuk pengembangan obyek wisata, Pertamina memberikan dana CSR kepada kelompok tani untuk mengembangkan wisata agro. Lembaga penelitian, pihak perbankan, perguruan tinggi dan dinas terkait juga bersinergi untuk pengembangan budidaya kakao mengingat Desa Nglanggeran merupakan salah satu desa penghasil kakao terbesar di Gunung Kidul.

Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran membawa berbagai dampak. Tingkat migrasi menurun karena kegiatan pariwisata mendorong munculnya berbagai

lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Bahkan terjadi transformasi kultural mata pencaharian masyarakat dari pertanian ke pariwisata. Namun demikian, transformasi mata pencaharian tersebut tidak terjadi pada seluruh warga Nglanggeran. Akibatnya muncul kesenjangan ekonomi masyarakat di Desa Nglanggeran. Selain itu, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Nglanggeran setiap tahunnya akan meningkatkan PAD Gunung Kidul melalui retribusi tiket masuk wisatawan.

Saran

Selama ini ada sebagian masyarakat di desa wisata yang hanya menjadi *multiplier efect* dari adanya kegiatan wisata. Karena itu, pengelola desa wisata diharapkan mampu merangkul semua elemen masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat dalam kegiatan desa wisata dapat merata. Selain itu, perlu dilakukan regenerasi pengelola desa wisata agar seluruh masyarakat kompeten dalam berorganisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dinas Pariwisata DIY. 2014. Kajian Pengembangan Desa Wisata di DIY. *Laporan Akhir*. DIY: Dinas Pariwisata DIY.
- Hadiwijoyo. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ife, Jim. 1995. *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice*. Melbourne: Addison Wesley Longman.
- O.S. Prijono, O.S. & A.M.W. Pranarka. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Pantin, D. and Francis, J. 2005. *Community Based Sustainable Tourism*. UK: UWI-SEDU.
- Tri Winarni. 1998. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta: Adita Media.

Victoriabr.Simanungkalit,dkk.2017.*Buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau*. Jakarta: Asisten Deputi Urusan Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Jurnal

Chusmeru dan Agoeng Noegroho. 2010. "Potensi Ketengger Sebagai Desa Wisata di Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas". *Analisis Pariwisata* Vol. 10, No. 1, 2010: 16-23.

Johnson, Peter A. 2010. "Realizing Rural Community Based Tourism Development: Prospects for Social-Economy Enterprises." *Journal of Rural and Community Development* 5, 1/2 (2010): 150-162.

Made Heny Urmila Dewi, Chafid Fandeli, dan M. Baiquni. 2013. "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali". *Kawistara*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2013: 129-139.

Nurhidayati, Sri Endah dan Chafid Fandeli. 2012. "Penerapan Prinsip Community Based Tourism (CBT) Dalam Pengembangan Agrowisata Di Kota Batu, Jawa Timur." *Jejaring Administrasi Publik*. Th IV. Nomor 1, Januari-Juni 2012: 36-46.

Pookaiyudom, Gulapish. 2013. "The Integrated Learning of Community-Based in Thailand." *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 106 (2013): 2890-2898.

Wearing, S.L. and Mc Donald. 2002. "The Development of Community Based Tourism: Re-Thinking The Relationship Between Tour Operators and Development Agents As Intermediaries in Rural and Isolated Area Communities." *Journal of Sustainable Tourism*, Vol. 10, No. 3, 2002.

Artikel

Hausler, N. 2005. *Definition of Community Based Tourism*. Tourism Forum International at the Reisepavillon. Hanover 6 Pebruari 2005.

Laporan Penelitian

Hastuti, Suhadi Purwantara, dan Nurul Khotimah. "Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Lereng Merapi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta". Laporan Penelitian. <http://lppm.uny.ac.id/sites/lppm.uny.ac.id/files/abstrak%20lepas%20desa%20wisata.pdf>, diakses 27 April 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.

Internet

Apa itu Pokdarwis? <https://travel.kompas.com/read/2017/10/17/153900727/apa-itu-pokdarwis->, diakses 16 Maret 2018.

Desa Wisata Nglanggeran Terbaik ASEAN 2017, <https://m.tempo.co/read/news/2017/01/21/242838401/desa-wisata-nglanggeran-terbaik-asean-2017>, diakses 27 Februari 2017.

Diresmikan, Griya Cokelat Hasil Kerjasama LIPI dengan BI dan Kabupaten Gunung Kidul, <http://lipi.go.id/siaranpress/diresmikan-griya-cokelat-hasil-kerjasama-lipi-dengan-bi-dan-kabupaten-gunungkidul/17088>, diakses 16 Maret 2018.

Inilah Produk Griya Cokelat Nglanggeran, <http://gunungapipurba.com/posts/detail/inilah-produk-griya-cokelat-nglanggeran>, diakses 16 Maret 2018.

Lebih baik Pertumbuhan Desa Wisata Daripada Mal, <http://www.pikiran-rakyat.com/wisata/2016/01/04/355728/lebih-baik-pertumbuhan-desa-wisata-daripada-mal>, diakses 27 Februari 2017.

Pengangguran Turun 530.000, Menaker: Pariwisata Serap Tenaga Kerja, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3340085/pengangguran-turun-530000-orang-menaker-pariwisata-serap-tenaga-kerja>, diakses 20 Februari 2017.

Tantangan Pengembangan Pariwisata, <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/02/03/01yjcui1-tantangan-pengembangan-pariwisata>, diakses 7 Februari 2017.

SWAFOTO: SEBUAH PENDEKATAN TEORI MANAJEMEN PRIVASI KOMUNIKASI

*Selfie: a Communication Management
Privacy Theory Approach*

Handrini Ardiyanti

*handrini@gmail.com
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto Senayan Jakarta*

Dimas Tri Hadyanto, Dewi Krislamawaty, dan Irwansyah

*Departemen Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
Kota Depok Jawa Barat*

Naskah diterima: 21 Desember 2017 | Naskah direvisi: 20 Mei 2018 | Naskah diterbitkan: 30 Juni 2018

Abstract: *Selfie has evolved into a global phenomenon. The popularity of selfie has brought some great concerns about identity, privacy, security and control. The habit that accompanies when uploading selfies is to give too much information. This study explores privacy in selfies culture with communication privacy management (CPM) theory. This research uses qualitative research method of phenomenology. The experience that became phenomenon in this research is about swafoto. Phenomenological research is done by collecting data from people who have experienced the phenomenon, and developed a description of the essence of experience for all individuals. This description consists of “what” they experience and “how” they experience it. The results of the analysis show that there is a consideration of privacy by respondents in uploading selfie. Respondents who have received the condition of private informacy turbulence try to consider the situation by the needs of them selves and the opinions around them. Based on the results of the study can be known early adolescent age group 12 s.d. 17 years old actually has a higher level of privacy when doing swafoto and upload it in social media when compared with other age groups. Need further research on selfie among others research that ask about their motivation who likes to do selfie, research related to public perception related to selfie by public official.*

Keyword: *Selfie, privacy, communication privacy management theory*

Abstrak: *Selfie atau swafoto telah berkembang menjadi fenomena global. Kepopuleran swafoto ikut membawa sejumlah kekhawatiran besar tentang identitas, privasi, keamanan, dan pengawasan. Kebiasaan yang menyertai saat mengunggah swafoto adalah memberikan informasi yang terlalu banyak. Artikel ini berusaha mengkaji budaya swafoto terkait dengan privasi menggunakan teori manajemen privasi komunikasi atau *communication privacy management* (CPM). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi. Pengalaman yang menjadi fenomena dalam penelitian ini adalah swafoto. Penelitian fenomenologi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari orang-orang yang telah mengalami fenomena tersebut, dan mengembangkan deskripsi dari esensi pengalaman untuk semua individu. Deskripsi ini terdiri dari “apa” yang mereka alami dan “bagaimana” mereka mengalaminya. Hasil analisis menunjukkan sudah adanya pertimbangan privasi oleh*

responden dalam mengunggah swafoto. Responden yang pernah mendapatkan kondisi *private informacy turbulence* berusaha untuk menimbang tuntutan-tuntutan situasi dengan kebutuhan dirinya dan pendapat orang lain yang ada disekitarnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kelompok usia remaja awal 12 s.d. 17 tahun justru memiliki tingkat privasi yang lebih tinggi saat melakukan swafoto dan mengunggahnya di media sosial bila dibanding dengan kelompok usia lainnya. Perlu penelitian lanjutan tentang swafoto antara lain penelitian yang bertanya tentang motivasi mereka yang gemar melakukan swafoto, penelitian terkait dengan persepsi publik berkaitan dengan selfie oleh pejabat publik

Kata Kunci: *Selfie*, swafoto, privasi, teori manajemen privasi

Pendahuluan

Seiring dengan pesatnya perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), *selfie* atau swafoto berkembang menjadi fenomena global. Di kalangan artis, swafoto seolah menjadi perekat mereka dengan fans mereka. Artis seperti Justin Bieber secara rutin memposting swafoto lewat Twitter, atau Rihanna yang memuaskan keinginan pengemarnya dengan memposting swafoto yang seksi di sebuah klub, atau Kim Kardashian yang memposting swafoto dengan *caption*: “*vampire facial*” atau wajah vampir, yang memperlihatkan wajahnya penuh dengan darah. Artis Kelly Brook bahkan hanya mampu menahan dirinya untuk tidak memposting swafoto dalam jangka waktu dua jam saja. Tidak hanya selebriti, politisi pun ikut memposting swafoto mereka. Di Amerika misalnya, Hillary Clinton diajak putrinya Chelsea untuk melakukan swafoto dan mempostingnya di Twitter. Di Indonesia, Presiden Joko Widodo, Puan Maharani dan Megawati mengajak Raja Arab Saudi Salman Abdulaziz bin Al Saud untuk melakukan swafoto bersama ketika Raja Arab tersebut melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia (Kompas, 02/03/2017). Wabah swafoto bahkan telah sampai di luar angkasa, astronot Jepang Aki Hoshide pernah melakukan swafoto saat berada di stasiun luar angkasa (Day, 2013).

Fenomena swafoto yang merebak belakangan tersebut mengundang minat untuk menelitinya. Karena itu studi tentang swafoto telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah tentang “Studi Kualitatif Motif dan Kepuasan Penggunaan Foto

Swafoto Dalam Akun Instagram”. Studi dilakukan dengan melakukan analisis teks guna mendapatkan kategorisasi terhadap swafoto yang muncul pada bulan April-Mei 2014 di akun Instagram. Kategorisasi yang ditentukan berdasarkan analisis teks di Instagram meliputi wajah, tubuh, pakaian atau dandanan, karakter, peran, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman dan hubungan dengan pacar. Kemudian dianalisa tentang tingkat kepuasan sebelum, saat dan sesudah penggunaan foto swafoto berdasarkan teori Sven Windl (Tanasa, 2017).

Studi lain tentang swafoto adalah studi yang dilakukan oleh Tysna. Studi yang merupakan tugas akhir ini berusaha mengungkap kecemasan sosial dan perilaku agresif pelaku swafoto bila ditinjau dari teori interaksi simbolik. Teori Interaksi Simbolik ini berfokus pada pentingnya konsep diri (*self-concept*), atau seperangkat persepsi yang relatif stabil yang dipercaya oleh orang terhadap dirinya sendiri. Interaksi simbolik memiliki ciri pada stimulus-respons namun lebih fokus pada pemahaman makna dari pihak lain melalui penggunaan simbol, interpretasi hingga upaya menyepakati untuk mencapai kesepakatan bersama (Tysna, 2015).

Studi menarik lainnya tentang swafoto adalah studi yang dilakukan oleh Paul Frosh. Penelitian yang dilakukan Paul Frosh dengan menggunakan teori fotografi tradisional melakukan kajian terhadap swafoto yang pada akhir kesimpulannya dipandang sebagai sesuatu yang memiliki citra kinetis. Menurut Frosh, citra kinetis yang dimiliki swafoto merupakan suatu

konduktor unggul bagi energi sosial, karena swafoto sulit diabaikan untuk tidak diberikan respons. Telaah swafoto dari sisi ranah kinestis sebenarnya lebih luas dari sekedar budaya digital, namun sayangnya relatif sering diabaikan sebagai obyek analisis. Pada kesimpulan studinya, Frost menyatakan bahwa swafoto dengan demikian merupakan agen fatik (*phatic*) baru dalam arus energi antara gerakan tubuh, interaksi yang ramah, dan teknologi media yang menjadi hal mendasar bagi aktivitas rutin sehari-hari kita dalam melakukan aktivitas digital (Frost, 2015: 1607-1628).

Lebih lanjut, Iqani berpendapat meskipun swafoto mungkin tampak sebagai mode terbaru, popularitas swafoto memiliki pengaruh transformasional terhadap budaya kontemporer. Selain itu swafoto menjadi isu penting dalam komunikasi, fotografi, psikologi, ekspresi diri, dan studi media digital - saat swafoto membawa sejumlah kekhawatiran besar tentang identitas, privasi, keamanan, dan pengawasan (Iqani, 2016:405-415).

Swafoto menjadi salah satu isu penting dalam komunikasi juga terungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh Cristina Miguel. Studi yang dilakukan adalah menganalisa bagaimana pengguna mempertimbangkan pengungkapan intim melalui swafoto di dua media sosial yang berbeda yaitu *Badoo* dan *Facebook* di dua kota Eropa yang berbeda yaitu di Barcelona (Spanyol) dan Leeds (Inggris) yang berada dalam kelompok usia 25-49 tahun. *Badoo* adalah platform media sosial yang mana pengguna mencari interaksi dengan orang asing untuk berkenan. Studi ini mengeksplorasi bagaimana swafoto digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi secara intim oleh pengguna media sosial tersebut. Hal yang menarik dari hasil studi ini, terungkap sebagian besar peserta mengaku tidak memposting swafoto mereka yang bersifat intim di Facebook,

karena mereka ingin melindungi privasi mereka dan mereka menganggap bahwa perasaan intim akan kehilangan rasanya ketika itu diungkapkan (Miguel, 2016: 1-10).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa salah satu permasalahan yang krusial dalam budaya mengunggah swafoto di media sosial berkaitan dengan privasi. Salah satu artis yang menerapkan kebijakan menolak melakukan swafoto dengan alasan menjaga privasi adalah Emma Watson, pemeran Hermione Granger di seri 'Harry Potter'. "Buatku, ada perbedaan antara harus memiliki privasi dan tidak. Jika seseorang memfotoku dan mengunggahnya, dalam dua detik mereka meninggalkan jejakku di radius 10 meter. Mereka bisa melihat penampilanku dan siapa yang sedang bersamaku. Aku tidak bisa memberikan data tersebut," demikian alasan Emma (Ngantung, 2017). Mengutip Rappler.com, Beritagar menuliskan artikel tentang budaya swafoto dengan privasi. Hal-hal yang patut dipertimbangkan terkait dengan privasi dalam mengunggah swafoto di media sosial meliputi: lokasi, rencana, keberadaan para pengintip serta kebiasaan yang menyertai saat mengunggah swafoto yaitu: "*too much information*" atau memberikan informasi yang terlalu banyak (Fikrie, 2014).

Oleh karena itu, artikel ini bermaksud menelaah swafoto dengan menggunakan perspektif studi media digital; yaitu dengan menggunakan pemahaman tentang konsep swafoto dan teori manajemen privasi saat berkomunikasi atau *Communication Privacy Management* (CPM).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi. Penelitian kualitatif fenomenologi mengidentifikasi suatu fenomena (suatu "objek" dari pengalaman manusia (Van Manen, 1990:163). Pengalaman yang menjadi fenomena dalam penelitian ini adalah tentang swafoto. Penelitian fenomenologi dilakukan dengan cara mengumpulkan data

dari orang yang telah mengalami fenomena tersebut, dan mengembangkan deskripsi gabungan dari esensi pengalaman untuk semua individu. Deskripsi ini terdiri dari “apa” yang mereka alami dan “bagaimana” mereka mengalaminya (Moustakas, 1994). Dengan demikian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman, yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji (Creswell, 1998:54). Data dikumpulkan dari individu yang telah mengalami fenomena tersebut. Seringkali pengumpulan data dalam studi fenomenologi terdiri dari wawancara mendalam dan beberapa wawancara dengan peserta. Pada penelitian fenomenologi, narasumber akan ditanya tentang dua pertanyaan umum yang luas (Moustakas, 1994), yaitu: Apa yang telah dialami dalam hal fenomena tersebut? Konteks atau situasi apa yang biasanya memengaruhi atau mempengaruhi pengalaman Anda tentang fenomena tersebut? (Moustakas, 1994; Polkinghorne, 1989). Berdasarkan data dari pertanyaan penelitian pertama dan kedua, analisis data menelusuri data (misalnya: transkripsi wawancara) dan menyoroti “pernyataan penting,” kalimat, atau kutipan yang memberikan pemahaman tentang bagaimana para peserta mengalami fenomena tersebut. (Marshall & Rossman, 2006 dalam Creswell 2006: 61-62).

Penelitian ini didahului dengan menyebarkan kuesioner melalui *Facebook* peneliti pada tanggal 17 s.d. 18 Desember 2018 dengan pengaturan terbuka untuk umum. Dengan setingan terbuka untuk umum, pengguna *Facebook* sekalipun tidak berada dalam daftar pertemanan peneliti tetap dapat mengisi survei tersebut, sehingga setiap anggota populasi memperoleh probabilitas yang sama untuk menjadi sampel. Pertanyaan yang diajukan dalam survei tersebut diperuntukkan bagi mereka yang

memiliki pengalaman melakukan swafoto dan mengunggahnya di media sosial. Dari kuesioner yang disebar terdapat 66 responden yang mengisi. Dari ke-66 responden yang mengisi kemudian diklasifikasikan berdasarkan tiga kategori usia berdasarkan kategori usia dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu: kategori remaja awal (usia 12-16 tahun); masa remaja akhir (usia 17-25 tahun); masa dewasa awal (usia 26-35 tahun); dan masa dewasa akhir (usia 36 tahun ke atas). Dikarenakan ini merupakan penelitian kualitatif fenomenologi, maka tahap penelitian utamanya dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi terhadap 66 responden yang menyatakan memiliki pengalaman melakukan swafoto dan mengunggahnya ke media sosial mereka. Teknik ini dipilih dengan tujuan agar data yang didapat dari subjek lebih mendalam. Metode wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab terhadap informan untuk menggali informasi yang diperlukan untuk penelitian (Aunu, 2013:76). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data-data pendukung yang diperoleh dari telaah literatur guna membahas tentang swafoto. Studi literatur dilakukan pada buku-buku, jurnal, dan penelitian tentang swafoto. Data yang didapat dari studi literatur ini akan digunakan sebagai acuan dan pembahasan dalam penelitian ini.

Swafoto: Perubahan Budaya Digital

Swafoto, atau lebih dikenal dengan istilah *selfie*, biasanya berupa foto: gambar bergambar (*pictorial image*) yang diproduksi oleh kamera. Pengertian sederhana ini menginformasikan pemahaman swafoto yang meluas sebagai kategori budaya: “Sebuah foto yang telah diambil seseorang” (*Oxford Dictionaries Word of the Year*, 2013: 1). *Selfie* atau swafoto telah menjadi satu budaya di era digital. Meski demikian, swafoto telah lama dilakukan orang. Orang pertama yang melakukan swafoto adalah Robert

Cornelius di Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1839. Pada waktu itu Cornelius berpose di depan kamera yang sudah dia atur untuk dapat memotret secara otomatis. Untuk melakukan swafoto tersebut, Cornelius membuat pengendali jarak jauh, yang dapat membuat kamera merekam gambar selama 15 menit setelah tombol pengendali ditekan. Cornelius kemudian menuliskan kalimat, "The first light picture ever taken: 1839" (News, 2016).

Pengajar sekaligus pakar jejaring media sosial Universitas Durham, Marian Hardey mengatakan, swafoto merupakan sebuah revolusi tentang bagaimana kita membentuk informasi autobiografi tentang diri kita dan teman-teman kita. Swafoto adalah tentang perpanjangan konstruksi diri kita dan bagaimana kita menghadirkan diri kita dengan cara yang terbaik. Sama halnya seperti ketika wanita memakai *make-up* agar terlihat lebih cantik atau pria binaraga dengan cara tertentu menampilkan dirinya. Jadi, swafoto adalah tentang bagaimana kita mengetahui diri kita sendiri dan melihat sisi-sisi mana yang lemah yang ada di diri kita. Dengan kata lain, swafoto adalah bentuk dari refleksi diri (Day, 2013). Menurut Ana Peraica, swafoto bukan tentang pencitraan diri. Hal ini karena orang yang gemar melakukan swafoto pada dasarnya merupakan *narcissus* dan *narcissus* tidak membutuhkan orang lain, menganggap mereka tidak ada, dan menarik diri ke dalam bayangannya sendiri, strategi *dematerialisasi*, menarik diri ke citra seseorang akan menjadi fokus utama (Peraica, 2017:52).

Menurut Laura Busetta, swafoto adalah contoh penting bagaimana interaksi antara jejaring sosial dan bentuk representasi visual terkini, membentuk kembali gagasan tradisional seperti subjektivitas, privasi, dan selebriti. Sebagai bagian dari difusi kontemporer budaya visual amatir melalui perangkat pribadi (kamera yang terintegrasi di HP), swafoto berkontribusi pada peredaran gambar pribadi secara global. Popularitas

mereka dapat dikaitkan dengan tren lain yang berasal dari dekade terakhir abad ke-20, seperti munculnya seniman dan fotografer khusus potret diri. Sejauh menyangkut produksi amatir, gambar pribadi beredar di antara komunitas dan teman digital yang relatif homogen di situs jejaring sosial, namun karena swafoto telah berubah menjadi objek konsumsi publik global, mekanisme ideologis budaya selebriti menjadi aktif. Dengan demikian, swafoto juga menjadi alat dalam aktivitas *self-branding* yang dilakukan oleh tokoh masyarakat: ini adalah bagian strategi media oleh pemimpin politik dan selebriti (*entertainment personalities*) yang terintegrasi dengan baik (Busetta, 2015:1-3).

Tulisan ini bermaksud menguraikan, hal sebagai berikut: 1) bagaimana responden dalam penelitian ini melakukan manajemen privasi saat berkomunikasi tentang kegiatan swafoto dan mengunggahnya di media sosial mereka? dan 2) apakah latar belakang dari manajemen privasi komunikasi yang mereka lakukan tersebut terkait dengan kegiatan mereka melakukan swafoto dan mengunggahnya di media sosial?

Teori Manajemen Privasi Komunikasi

Teori CPM dikembangkan pertama kali oleh Sandra Petronio (2002). Salah satu penelitian yang dilakukan berdasar teori CPM, dengan fokus pada manajemen individu dalam mengolah privasi, berjudul: "Perbedaan *Communication Privacy Management* di Media Sosial Twitter pada Remaja dengan Tipe Kepribadian *Extravert* dan *Introvert*". Penelitian tersebut dilakukan berdasarkan teori CPM generasi pertama; yang melihat CPM dari 3 aspek, yaitu: *boundary permeability*, *boundary ownership*, dan *boundary linkages*. Dari penelitian tersebut ditemui perbedaan CPM antara tipe kepribadian *extravert* dan *introvert*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe *extravert* lebih mengungkapkan privasinya pada media sosial dibanding dengan tipe *introvert*. Namun, berdasarkan jenis kelamin

dan kelompok usia pada remaja, diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan CPM antar jenis kelamin dan antar kelompok usia pada masa remaja (Tiyarestu, 2015).

Penelitian lain yang menggunakan teori CPM adalah penelitian yang dilakukan Kartika Putri dan kawan-kawan terhadap pengguna *Facebook* korban *cyberstalking*. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan, pada umumnya pelaku *cyberstalking* melakukan tindakan *stalking* dengan cara berkomentar pada foto, status atau apapun yang diunggah korbannya dalam akun *Facebook* mereka, bahkan mungkin pelaku *cyberstalking* mengirim pesan bertubi-tubi kepada korbannya. Biasanya pelaku *cyberstalking* memperhatikan orang-orang terdekat korban dalam akun mereka. Pelaku bisa menemukannya lewat foto-foto, video dan komentar-komentar dalam akun korbannya. Pelaku juga berusaha mencari informasi tentang korbannya melalui teman-teman sekitar korban dalam *Facebook*, misalnya dengan mengirim pesan kepada teman-teman terdekat korban dan mendesak meminta informasi tentang korban (Putri, 2012:4).

Gagasan utama teori komunikasi ini adalah memandu bagaimana seseorang memutuskan apa yang akan diungkapkan dan apa yang harus dirahasiakan (Sandra Petronio, 2013). Teori CPM mempertanyakan makna aturan privasi dan darimana mereka berasal (Petronio, 2004: 203).

Inti dasar dari CPM adalah membahas tentang proses negosiasi yang ada dalam diri seseorang terkait dengan membuka informasi privat. Proses yang terjadi adalah proses mengkomunikasikan informasi privat, saat melakukan hubungan dengan orang lain dan menjadi pembukaan diri atau *private disclosure*. Ada tiga *axioma* dalam teori CPM, yaitu: 1) konseptualisasi kepemilikan informasi pribadi; 2) konseptualisasi kontrol atas informasi pribadi; dan 3) konseptualisasi *private information turbulence* atau turbulensi batasan informasi pribadi.

Turbulensi batasan informasi pribadi terjadi ketika kita mengundang orang untuk masuk dalam informasi pribadi kita, dan efek yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan (Sandra Petronio, 2013: 338). Penelitian ini mendalami swafoto berdasarkan tiga *axioma* dalam teori CPM generasi kedua, yaitu: mempertanyakan konsepsi kepemilikan informasi pribadi, konseptualisasi kontrol atas informasi pribadi dan turbulensi batasan.

Tabel 1. Usia Responden

No	Usia Responden	Periode Masa	Jumlah	%
1.	12 – 16 tahun	masa remaja awal	10	15,2%
2.	16 tahun ke atas – 25 tahun	masa remaja akhir	24	36,4%
3.	25 tahun ke atas – 35 tahun	masa dewasa awal	16	24,2%
4.	35 tahun ke atas	masa dewasa akhir	16	24,2%
Total			66	100%

Sumber: Hasil Survei tentang Swafoto dan Kebijakan Privasi Komunikasi

Gambaran Responden

Dari survei yang telah disebar secara random, dihasilkan gambaran responden penelitian sebagaimana Tabel 1.

Dari Tabel 1, dapat kita ketahui bahwa untuk kategori remaja awal di usia 12-16 tahun sejumlah 10 orang atau 15,2%. Jumlah responden dengan masa remaja akhir 17-25 tahun berjumlah 24 orang atau berjumlah 36,4%. Jumlah responden yang berada pada masa dewasa awal 26-35 tahun adalah 16 orang atau 24,2%. Sementara jumlah

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan Responden	Jumlah	Persentase
1.	S2 dan S2 ke atas	15	22,7%
2.	S1	35	53%
3.	Diploma	2	3%
4.	SMA	11	24,2%
5.	SMP	2	3%
6.	SD	1	1,5%
Total		66	100%

Sumber: Hasil Survei tentang Swafoto dan Kebijakan Privasi Komunikasi

responden yang berada pada masa dewasa akhir 36 tahun ke atas adalah 16 orang atau 24,2%. Jumlah pengisi kuesioner total adalah 66 orang.

Berdasarkan hasil survei yang telah disebar secara acak melalui Facebook pada 17 Desember 2017 s.d. 18 Desember 2017, maka diperoleh gambaran pendidikan responden penelitian sebagaimana Tabel 2. Dari Tabel 2 dapat kita ketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah berpendidikan S1 yaitu berjumlah 35 orang atau 53%. Kemudian pendidikan responden penelitian tertinggi kedua adalah S2 dengan presentase 22,7% atau berjumlah 15 orang. Selanjutnya pendidikan responden penelitian tertinggi kedua adalah SMA dengan presentase 24,2% atau 11 orang. Pendidikan responden penelitian berikutnya adalah Diploma dengan presentase 3% atau 2 orang, dan terakhir subjek penelitian berpendidikan SD dengan presentase 1,5% atau 1 orang.

Swafoto dan Manajemen Privasi

Dari hasil wawancara diketahui ada tidaknya pertimbangan privasi dalam mengunggah swafoto. Untuk kelompok umur 26-35 tahun diketahui memiliki manajemen privasi komunikasi yang baik saat mengunggah swafoto. Adapun kelompok yang memiliki manajemen privasi komunikasi paling minim privasi adalah kelompok umur 12-16 tahun dan kelompok umur 36-45 tahun.

Sementara terhadap pertanyaan yang mempertanyakan bagaimana manajemen individu dalam mengolah privasi yang dimilikinya dalam berkomunikasi dengan orang lain, dapat disimpulkan bahwa, dari jawaban responden kita dapat mengetahui bahwa memutuskan apa yang akan diungkapkan dan apa yang harus dirahasiakan bukanlah sebuah keputusan yang dapat langsung diambil, melainkan merupakan tindakan menimbangkan segala sesuatu dan bila perlu melakukan perubahan keputusan yang telah diambil dari dalam hati. Berikut

presentase atas sejumlah pertanyaan yang dijawab responden, yang telah dikumpulkan berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan.

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa dari keseluruhan responden, terdapat 19,7% responden yang menyertakan keterangan lokasi seperti rumah, sekolah, tempat lain saat mengunggah swafoto, sedang yang tidak menyertakan keterangan lokasi rumah, sekolah dan tempat lainnya saat melakukan swafoto sebesar 80,3%. Dari keseluruhan responden terdapat 81,8% responden yang menyertakan keterangan kegiatan saat melakukan swafoto sedang yang tidak menyertakan keterangan tentang kegiatan hanya berjumlah 18,2%. Terhadap pertanyaan tentang mengizinkan orang lain untuk unggah ulang swafoto yang diunggah 27,3% responden menyatakan mengizinkan orang lain untuk mengunggah ulang swafoto yang diunggahnya dan 72,7% responden menyatakan tidak mengizinkan. Perihal pengaturan privasi dengan pertimbangan tertentu, sebanyak 72,7% responden menyatakan mengatur *privacy setting* dengan pertimbangan tertentu dan 27,3% lainnya menyatakan tidak mengatur, yang berarti keseluruhan swafoto yang diunggah dapat dilihat oleh publik tanpa harus masuk ke dalam daftar pertemanan ataupun mengikuti akun media sosialnya.

Terkait pertanyaan pengaturan privasi swafoto untuk dapat di *share* dengan pertimbangan tertentu terdapat 73,7% responden yang menyatakan telah mengatur *privacy setting*, sehingga swafoto yang diunggahnya tidak dapat dibagikan dengan bebas dan hanya 27,3% responden menyatakan tidak mengatur *privacy setting* untuk membagi swafoto yang diunggahnya dan berarti semua orang dapat membagi atau mengunggah ulang swafoto yang diunggahnya.

Terhadap pertanyaan ada atau tidaknya pengaruh dari pasangan, guru, orang tua tentang batasan privasi saat mengunggah

swafoto terdapat 34,8% responden menyatakan terdapat pengaruh pasangan, orang tua, guru atau ustaz saat menentukan batasan privasi, sementara sebanyak 65,2% responden menyatakan tidak ada pengaruh dari orang lain saat menentukan batasan privasi saat mengunggah swafoto mereka di media sosial. Terkait pertanyaan ada tidaknya pengetahuan batasan privasi dari orang lain tentang batasan privasi saat mengunggah swafoto; sebanyak 43,9% menjawab ada pengetahuan yang diberikan oleh orang lain yang meliputi guru, orang tua dan ustaz; sementara 51,3% responden menyatakan tidak mendapat penjelasan tentang batasan privasi mengunggah swafoto dari orang lain.

Tentang pertanyaan apakah responden pernah mengalami permasalahan akibat kebijakan privasi yang tidak tepat saat mengunggah swafoto terdapat 18,2% responden yang menyatakan pernah mengalami permasalahan dan sebanyak 81,2% responden menyatakan tidak pernah mengalami permasalahan terkait dengan batasan privasi saat mengunggah swafoto. Ketika mendapat permasalahan maka terdapat 34,8% responden yang mengaku memutuskan mengganti kebijakan privasi akibat mengalami permasalahan privasi dalam mengunggah swafoto, sedang 65,2% lainnya menyatakan tidak pernah mengganti kebijakan privasi saat melakukan swafoto. Menjawab pertanyaan pernah tidaknya mendapat kritikan atas swafoto yang diunggah terdapat 22,7% responden menyatakan pernah mendapat kritikan karena swafoto yang diunggahnya dan 77,3% responden menyatakan tidak pernah mendapatkan kritikan atas swafoto yang diunggahnya.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui, konsepsi kepemilikan atas informasi pribadi terdapat perbedaan antara informasi yang berhubungan dengan lokasi dengan informasi yang berkaitan dengan kegiatan. Mayoritas responden (80,3%) beranggapan bahwa informasi

terkait lokasi, misalnya: lokasi rumah saat mengunggah swafoto merupakan informasi yang bersifat pribadi. Sedang 19,7 % beranggapan informasi tentang lokasi bukan merupakan informasi yang bersifat pribadi karena di era digital tentang lokasi dengan mudah dapat diketahui sepanjang kita aktif menggunakan *smartphone*. Yang menarik dari responden yang berpendapat bahwa informasi mengenai lokasi rumah, sekolah dan lokasi lainnya dimana mereka berada bukan merupakan informasi yang bersifat pribadi terdiri dari berbagai kategori usia yang berbeda. Namun, ketika dilihat berdasarkan persentase kategori usia dewasa jauh memiliki batasan privasi yang lebih longgar yaitu mencapai angka 57,14% bila dibandingkan dengan jumlah persentase kategori remaja yaitu sebesar 42,86%.

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa beberapa responden mendapat kritik yang terkait dengan pandangan agama atas foto hasil swafoto yang mereka unggah di media sosial, misalnya: foto dianggap memberikan kesan tidak baik karena melakukan swafoto dengan jenis kelamin berbeda yang sudah memiliki pasangan; atau hasil swafoto yang dibagikan dalam media sosial yang dianggap membanggakan dan menyombongkan diri; atau swafoto yang memperlihatkan bagian tubuh dan dipandang tidak sopan, sehingga menyampaikan kritik pada responden.

Responden yang mendapat kritik yang terkait dengan norma atau pandangan agama, menyatakan bahwa mereka memperhatikan kritik yang diterima dan menghindari, agar tidak mendapat komentar yang serupa dari orang-orang yang melihat hasil swafoto mereka di media sosial. Walaupun kebanyakan dari responden tidak menerima kritik atas hasil swafoto yang mereka bagikan di media sosial.

Dari informasi responden mengenai kritik atas swafoto mereka, ada responden yang mendapat kritik dengan alasan dirasa

terlalu mengumbar informasi. Selain itu, ada yang mendapat kritik karena dianggap menyampaikan *hate speech* melalui hasil swafotonya. Temuan yang menarik, ada responden menerima kritik atau komentar dari orang lain yang ikut melakukan swafoto dan kemudian foto tersebut dimuat dalam media sosial, dengan alasan tidak suka foto yang ada dirinya dimasukkan dalam media sosial. Ternyata *sharing* swafoto di media sosial juga perlu memperhatikan privasi orang lain yang ada dalam suatu foto tersebut karena tidak semua orang menyukai ‘tampil’ di media sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa responden yang pernah mendapatkan kondisi *private information turbulence* berusaha untuk menimbang tuntutan situasi dengan kebutuhan dirinya dan pendapat orang lain yang ada disekitarnya. Namun, yang tak kalah menariknya, diketahui batasan agama merupakan batasan yang ditetapkan oleh responden terkait privasi. Privasi merupakan hal yang penting bagi responden karena hal ini memungkinkan responden untuk merasa “terpisah” dari orang lain. Privasi menurut responden dapat memberikan perasaan bahwa mereka adalah pemilik sah dari informasi yang mereka miliki. Dari wawancara dengan salah seorang responden (LL) diketahui ada risiko yang dapat muncul dari ketika mengunggah swafoto dengan pengaturan privasi yang salah misalnya ketika foto yang diunggah di instagram diunggah sementara keterangan foto mengkritik guru dan dibaca oleh guru yang bersangkutan. Salah satu strategi yang dilakukan untuk responden dari kelompok umur remaja awal adalah dengan membuat dua akun media sosial yang menerapkan pengaturan privasi yang berbeda. Satu akun media sosial memiliki privasi yang lebih longgar dan satu akun media sosial lainnya memiliki privasi yang jauh lebih ketat dan biasanya hanya menerima pertemanan dengan mereka yang benar-benar menjadi teman mereka. Dari penuturan responden LL dapat disimpulkan bahwa kelompok usia remaja

awal lebih memahami dan mempraktekan manajemen privasi, Sesuai dengan aksioma ketiga dari teori CPM pengaturan manajemen privasi yang tidak tepat dapat menyebabkan terjadinya turbulensi batasan informasi pribadi yang dapat terjadi ketika kita mengundang orang untuk masuk dalam informasi pribadi kita dan efek yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, responden LL berusaha menghindari terjadinya turbulensi tersebut dengan menerapkan strategi akun ganda.

Terkait alasan memberikan batasan yang lebih longgar di kalangan kelompok umur remaja awal karena adanya keuntungan dengan melakukan privasi yang lebih longgar; yaitu: merupakan eksistensi diri yang lebih tinggi dan menguatkan perspektif atau cara pandang yang mereka miliki ke teman-teman yang mereka miliki serta menjadi akrab dengan teman mereka, misalnya: ketika mengunggah swafoto saat menonton konser BTS atau Bangtan Boys, boyband asal Korea dan diatur privasi untuk umum maka akan menambah permintaan *follower* dan makin akrab dengan teman mereka yang juga merupakan penggemar BTS.

Memposting swafoto sejatinya adalah salah satu bentuk komunikasi di era media digital. Dengan mengunggah swafoto dengan mengatur metoda *private disclosure* merupakan cara mengelola hubungan-hubungan yang ada di media sosial. Swafoto sebagai salah satu perilaku komunikasi yang makin berkembang di era media digital memerlukan cara pandang baru. Tidak hanya terbatas pada pemahaman bahwa semakin dekat hubungan seseorang, maka akan semakin membuka informasi pada orang tersebut. Di era media digital ternyata ada pertimbangan lainnya, misalnya: menggunakan pengaturan privasi berdasarkan kategori usia dan karakteristik individu yang menjadi teman mereka di media sosial.

Hasil wawancara dengan responden juga mengemukakan aksioma bahwa anggapan semakin terbuka informasi yang diberikan, maka akan semakin kuat hubungan dengan orang lain. Berdasarkan wawancara dari responden yang menetapkan batasan privasi lebih ketat, yaitu: responden pada kelompok umur di atas dewasa akhir (kelompok umur diatas 45 tahun) mereka menyatakan sengaja untuk memberlakukan batasan privasi yang lebih ketat, karena mereka tidak ingin orang salah menilai diri mereka. Hal tersebut diungkapkan salah seorang responden berinisial A yang menyatakan bahwa swafoto yang sama dapat dipersepsikan berbeda-beda oleh orang yang memiliki kerangka berpikir yang berbeda. Pendapat senada juga dikhawatirkan responden lainnya, bahwa jika mengunggah swafoto tertentu justru dampak memberikan dampak negatif terhadap citra dirinya di tempat dia bekerja.

“Bisa jadi kita memposting swafoto kita saat bertugas dengan maksud bukti pertanggungjawaban bahwa kita melaksanakan amanah kita. Tapi bisa jadi dipersepsikan orang lain bahwa kita ingin pamer. Selain itu taruhlah kita memposting foto kita dengan maksud menerangkan pekerjaan yang sudah kita lakukan tapi justru dikomentari ‘horang kaya jalan-jalan terus’, Kan jadi ga enak banget rasanya.” (Responden D).

Penjelasan responden A dan D tersebut sesuai dengan kerangka berpikir teori manajemen privasi komunikasi, yang berakar pada asumsi mengenai bagaimana seorang individu berpikir dan berkomunikasi, sekaligus asumsi mengenai sifat dasar manusia yang mempertimbangkan banyak aspek termasuk pandangan orang lain terhadap perilaku komunikasi yang kita sampaikan. Asumsi-asumsi dari responden ini secara keseluruhan mewakili sebuah persepsi aktif mengenai manusia dan merupakan sebuah penggambaran akan manusia yang terlibat di

dalam hidup berhubungan sampai pada batas di mana diri dan orang lain saling terkait. Persepsi yang saling berkaitan ini merupakan ide yang sangat penting bagi teori CPM, bahwa diri kita dengan orang lain tidak hanya terlibat di dalam hubungan, tetapi juga selalu melibatkan proses pembukaan juga terkait dengan konsep privasi yang terus berproses. Dalam proses tersebut terlibat dan dipengaruhi berbagai faktor termasuk perubahan jaman. Hal tersebut merupakan salah satu temuan dalam penelitian ini dalam kelompok umur remaja awal.

“Siapa bilang itu (lokasi rumah, sekolah) adalah informasi yang pribadi. Jaman now mah tinggal klik juga sudah bisa dilacak kita anak mana. Kalaupun kita tidak unggah keterangan lokasi, temen kita yang posting. Kan sama saja. Lagian soal keamanan, itu bukan soal orang tahu dimana rumah kita atau sekolah kita tapi bagaimana kita bisa berhati-hati. Tempat jalan mana saja yang biasa kita kunjungi memang jadi bisa diketahui, tapi itu *sans* (;santai) saja. Malah jadi ketahuan kita basis mana dan itu lebih memudahkan kita menambah teman yang satu basis. Misalnya sama-sama basis fans Korea, atau anak gaming.” (responden LL).

Telaah teori Manajemen Privasi Komunikasi atau CPM yang berupaya menjelaskan proses-proses negosiasi orang seputar pembukaan informasi privat adalah salah satu temuan menarik lainnya. Teori CPM mempelajari bagaimana orang melakukan pembukaan melalui sistem yang didasarkan pada aturan, termasuk di dalamnya aturan batasan informasi yang berlaku secara kolektif, misalnya: di kelompok di mana orang tersebut berkelompok atau berada.

Jadi, penentuan batas informasi privat tidak hanya ditentukan oleh diri responden melainkan batasan kolektif (*collective boundary*). Hal ini terjadi pada responden RN yang akhirnya memilih mengubah pengaturan privasinya saat mengunggah

swafotonya, karena teman-teman di akun *Facebook*-nya memiliki batasan yang jauh lebih ketat terkait dengan privasi. Ketika RN mengunggah swafoto bersama keluarganya, teman-teman RN berpandangan bahwa swafoto keluarga yang usai *snorkeling* tersebut tak layak untuk ditampilkan, karena pakaian berenang yang dikenakan meski tertutup oleh handuk. Munculnya batasan kolektif dari responden RN ini menurut pendapat peneliti berdasarkan wawancara mendalam disebabkan karena kelompok pertemanan RN adalah kelompok Islam Salafi. Menurut responden kelompok Islam Salafi sangat ketat dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad, sehingga batasan menampakkan aurat wanita jauh lebih ketat bila dibanding dengan kelompok lainnya.

Hal lain yang menarik dalam penelitian ini menemukan temuan yang berbeda dari hasil temuan penelitian Petronio. Jika penelitian Petronio dan Kovach (1997) menghasilkan temuan bahwa anak-anak memiliki batasan yang relatif kecil. Batasan ini, lanjut Petronio dan Kovach, terus meningkat seiring dengan pertumbuhan anak menjadi remaja dan dewasa, menumbuhkan rasa privasi yang lebih besar. Namun, ketika orang memasuki usia tua, batasan-batasan mereka mulai mengerut. isu-isu perawatan bagi orang lanjut usia seperti kebutuhan untuk dimandikan oleh orang lain, atau mengatur keuangan mereka menyebabkan batasan bagi orang lanjut usia menjadi kabur (Petronio, 2004). Berbeda dengan temuan pada penelitian Petronio dan Kovach, dalam penelitian ini justru menemukan sebaliknya. Anak-anak memilih tidak mencantumkan lokasi mereka melakukan swafoto mereka atau memilih tidak mencantumkan kegiatan mereka. Alasannya hanya sederhana saja karena mereka tidak mau melakukannya. Seperti pengakuan responden ARP (12 tahun):

“*Ga* mau saja cantumin kita lagi *ngapain* dan dimana. Malas saja orang

lain jadi tahu kita *ngapain* saja seharian kalau libur. Yang penting posting foto saja buat seru-seruan dan dapat *like* banyak,” (Responden ARP, 12 tahun).

Meski responden tidak memahami tentang kontrol atas kepemilikan informasi pribadi, namun sesungguhnya responden dalam kategori usia remaja awal telah menerapkan asumsi ketiga dalam teori CPM yang berkaitan dengan kontrol dan kepemilikan. Asumsi ini bergantung pada ide bahwa orang merasa mereka memiliki informasi privat mengenai diri mereka sendiri. Sebagai pemilik informasi ini, mereka percaya bahwa mereka harus ada dalam posisi untuk mengontrol siapa saja yang boleh mengakses informasi ini. Hal ini dapat diketahui dari jawaban responden ketika ditanya lebih jauh alasan mengapa mereka tidak mau orang lain mengetahui kegiatan atau lokasi rumah mereka.

“Sama saja seperti *password*, tidak semua orang tahu *password* HP atau akun *Facebook*-ku. *Ga* seru kalau semua orang lain tahu, Kalau teman-teman kan pasti tahu di mana dan lagi *ngapain* begitu lihat foto-fotoku,” (Responden ARP, 12 tahun)

Dari hasil wawancara dengan responden dapat disimpulkan bahwa remaja awal dalam kurun usia 12 s.d. 16 tahun justru memiliki manajemen privasi komunikasi yang lebih tinggi, bila dibandingkan dengan usia dewasa akhir, yaitu: usia 35 tahun ke atas, maupun bila dibandingkan dengan kelompok usia dewasa awal, yaitu: mereka yang berada di kurun usia 16 tahun ke atas hingga 35 tahun. Hal ini menjadi menarik untuk ditelisik lebih jauh apa penyebab dari fenomena tersebut. Menurut pandangan peneliti, hal ini disebabkan karena generasi dewasa akhir justru mengalami *digital divide* atau kesenjangan pengetahuan digital bila dibanding dengan generasi remaja awal yang lebih akrab dengan teknologi digital. Sebab lainnya

adalah karena faktor psikologis. Kelompok usia dewasa akhir merasa sudah mampu untuk menjaga diri mereka sehingga faktor mempertimbangkan privasi dan keamanan menjadi lebih longgar bila dibandingkan dengan kelompok remaja awal.

Konseptualisasi kepemilikan informasi pribadi dan konseptualisasi kontrol atas informasi pribadi kelompok usia 12 s.d. 16 tahun juga lebih tinggi bila dibanding dengan kelompok lainnya. Dengan menyatakan “malas orang lain menjadi tahu” menunjukkan bahwa kelompok usia 12 s.d. 16 tahun merasa orang-orang yang bukan menjadi bagian dari kelompoknya tidak berhak mengetahui informasi tersebut. Dengan demikian kelompok usia 12 s.d. 16 tahun memiliki konseptualisasi kontrol atas informasi lebih tinggi bila dibanding dengan kelompok usia remaja akhir, kelompok usia dewasa awal maupun kelompok usia dewasa akhir.

Meskipun demikian, ternyata dari sisi gaya saat melakukan swafoto pun merupakan satu permasalahan tersendiri dari sisi privasi dan keamanan. Gaya *peace* dengan membentuk huruf “V” dianggap dapat mempermudah para perentas. Karena dengan gaya tersebut sidik jari dapat diketahui (Intisarionline, 2017). Hal ini tentunya memerlukan literasi media digital tak hanya menyangkut masalah etika melainkan juga berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan privasi dan keamanan termasuk didalamnya tentang hal-hal teknis seperti itu

Mengunggah swafoto sejatinya adalah salah satu bentuk komunikasi di era media digital. Dengan mengunggah swafoto dengan mengatur metode *private disclosure* merupakan cara mengelola hubungan-hubungan yang ada di media sosial. Berdasarkan hasil survei ketahu, kelompok umur 26-35 tahun yang paling mempertimbangkan privasi saat mengunggah swafoto. Adapun kelompok yang paling minim dalam mempertimbangkan privasi adalah

kelompok umur 36-45 tahun. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kelompok kategori remaja awal yaitu kelompok usia 12-16 tahun yang selama ini kita anggap rentan justru memiliki perspektif media digital yang lebih besar daripada kelompok usia dewasa akhir yaitu pada kategori umur 36-45 tahun. Analogi privasi yang disejajarkan dengan keamanan yaitu dipahami sama halnya seperti *password* untuk akun media sosial menunjukkan bahwa tingkat literasi media digital di kelompok umur remaja awal lebih tinggi daripada kelompok umur dewasa akhir meskipun alasan dari kelompok dewasa akhir secara umum, beranggapan tidak mempermasalahkan privasi karena gambar swafoto yang mereka bagikan adalah aktivitas keseharian mereka.

Melalui swafoto, orang senang membagikan aktivitas yang dilakukan dalam media sosial. Memang orang tidak secara langsung memberi informasi mengenai data pribadi seperti lokasi sekolah, rumah, dan keberadaan mereka saat itu, walaupun melalui gambar swafoto dapat menginformasikan hal tersebut. Orang merasa sudah membatasi ruang lingkup penerima informasi, karena sudah melakukan pengaturan privasi saat membagikan foto, walaupun sebagian orang tidak melakukan pengaturan unggahan foto. Kebanyakan orang tidak pernah mengalami masalah karena membagikan gambar swafoto tanpa melakukan *privacy setting*, sehingga tidak mempertimbangkan untuk memperhatikan atau mengubah privasi dari swafoto yang dibagikan dalam media sosial.

Hampir sebagian orang menerima pendapat untuk memperhatikan privasi dalam membagikan gambar swafoto. Beberapa orang mendapat kritik untuk unggahan swafoto yang dilakukan, hal tersebut menunjukkan bahwa komunitas atau lingkungan sekitar selalu berusaha mengingatkan untuk menjaga privasi,

sehingga orang tetap memperhatikan privasi. Hal ini dikarenakan media sosial bagaimanapun adalah ruang bebas yang tidak terbatas. Dengan demikian, terdapat relasi antara batasan privasi individu dengan batasan privasi yang berlaku di komunitas individu tersebut berada. Batasan privasi komunitas berpengaruh terhadap batasan privasi individu.

Berbagi gambar swafoto melalui media sosial sudah jamak dilakukan dan menjadi hal rutin, bahkan bisa jadi autobiografi. Namun, paling tidak, setiap orang perlu memahami batasan privasi mereka masing-masing mengenai sejauh mana akan informasi atau gambar swafoto yang bisa dibagikan. Selebihnya, tentu saja memperhatikan norma dan etika umum yang ada di masyarakat, agar tidak memicu komentar dan risiko negatif dalam menggunakan media sosial.

Studi tentang swafoto dari perspektif CPM ini masih jauh dari komprehensif mengingat terbatasnya waktu. Akan tetapi studi lanjutan tentang swafoto dapat dilakukan dengan menggunakan perspektif psikologi, misalnya berlatar belakang pada kasus yang ditemui pada Kelly Brook yang hanya mampu menahan dirinya untuk tidak mengunggah foto swafotonya dalam jangka waktu dua jam saja.

Salah satu penelitian terkait dengan swafoto dari perspektif psikologi adalah penelitian dengan menggunakan metode survei *web* ini diberikan kepada 3.763 pengguna media sosial Norwegia, mulai dari 13 hingga 50 tahun, dengan jumlah wanita yang lebih banyak ($n = 2.509$, 66.7%). Penelitian ini meneliti dampak dari masalah privasi pada perilaku *selfie* lintas gender dan kelompok usia (remaja, dewasa remaja, dewasa) dengan menggunakan pendekatan pemodelan persamaan struktural. Hasilnya menunjukkan bahwa orang dewasa muda memiliki masalah privasi yang lebih besar daripada remaja dan orang dewasa. Perempuan memiliki masalah privasi yang lebih besar daripada laki-laki (Dhir, 2017).

Penelitian tentang swafoto lain yang dapat dilakukan adalah dari sisi etika politik dengan latar belakang kasus salah satunya fenomena yang terjadi pada saat kunjungan Raja Salman dari Saudi Arabia ke Indonesia. Beredarnya swafoto di jagat maya sempat mengundang kritikan keras yang dimuat di halaman depan salah satu media cetak ternama di Saudi Arabia. Selain itu, swafoto juga dapat dikaji dari perspektif syariah Islam. Pembahasan swafoto dari sisi syariah dapat mengupas mengapa dianggap sebagai tindakan yang dapat berujung pada *takkabur*, *ujub* dan *riya*, atau pamer (Siauw, 2015) dengan menggunakan berbagai dalil dalam Al Quran dan Hadits serta fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Penelitian lain yang menarik untuk dilanjutkan adalah penelitian swafoto bila dilihat dari studi psikologi sosial. Andrew L. Mendelson dan Zizi Papacharissi melakukan penelitian yang menarik tentang swafoto yang dikaitkan dengan jaringan yang berpusat pada diri yaitu yang mengulas soal identitas, komunitas, dan budaya di jaringan sosial dimana individu tersebut berada (Mendelson & Papacharissi, 2011). Menurut Mandelson dan Papacharissi, foto-foto di *Facebook* dimana memperlihatkan bagaimana kehidupan mereka saat mereka bermain diluar bersama lainnya memperlihatkan identitas mereka sebagai murid sekolah. Secara otomatis hal tersebut menyajikan performa dari pengkajian tentang identitas dan kepemilikan, deklarasi. Selain itu, deklarasi tentang bagaimana melaksanakan lagi kolaborasi ulang dapat dilakukan dengan membagi pengalaman mereka.

Penelitian swafoto yang terkait dengan identitas dan swafoto lainnya adalah penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang melibatkan mahasiswa yang diskors dalam sosialitas, yang terus terikat dengan ikatan teman seiya sekata, teman yang terbaik sepanjang waktu.

Ketika ada acara maka itu adalah peluang untuk terhubung dengan teman, dan hal tersebut diwakili momen-momen dalam foto *Facebook* yang diposting untuk memperkuat ikatan hubungan. Bagi seorang wanita yang melakukan swafoto, lanjut Nayak dan Kehily. Setelah diposting, foto-foto ini menciptakan “hari tua yang baik” secara instan, karena dapat mendapatkan teman untuk bernostalgia dan merasa ikut bernostalgia. Hal tersebut seperti budaya kamar merapikan kamar anak perempuan dalam rangka membangun identitas dan roman (Nayak & Kehily, 2008).

Di era media digital seperti saat ini, swafoto kebanyakan diambil oleh nonprofesional, meskipun fotografer remaja Reuters Molhem Barakat, yang tewas dalam pekerjaan di Suriah, juga menggunakan swafoto saat melapor di zona perang (Al-Ali, 2013). Karena itu tampaknya ada pergeseran makna swafoto yang semula dipahami sebagai suatu bentuk bukti bagi para profesional yang menunjukkan bahwa mereka telah berada di tempat pada waktu tertentu, dengan melakukan swafoto maka terdapat kredibilitas, karena dapat menyaksikan kejadian secara langsung. Dalam arti kata yang lebih ekstrem mereka swafoto juga dapat digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan pribadi untuk mengumpulkan bukti. Sebagai contoh, penduduk Philadelphia menggunakan narsis untuk melacak kebiasaan belanja dengan menggunakan *Internal Revenue Service* atau IRS (Stampler, 2014). Agen penagihan pajak negara dan mengelola *internal revenue service* atau kode pendapatan internal yang disahkan oleh Kongres. Terkadang swafoto bisa tanpa sadar menjadi saksi atau menjadi bukti. Geodata dapat diperoleh dari swafoto yang diambil dan kemudian dibagikan melalui instagram oleh tentara Rusia pada musim panas 2014 menyarankan bahwa tentara Rusia sedang menembaki oposisi Ukraina pada waktu itu, sementara para pejabat menyangkal adanya serangan tersebut (Lokot, 2014; Seddon, 2014).

Dari sisi jurnalistik, swafoto dapat berfungsi sebagai elemen pelaporan atau kesaksian. Selain itu, swafoto juga dapat sebenarnya dapat membantu untuk meningkatkan rasa untuk melaporkan kebenaran yang semakin terpecah dan semakin terfokus pada seberapa banyak akun yang menyatakan bahwa itu adalah kebenaran. Bahkan, muncul nilai-nilai dalam jurnalisme profesional seperti komunitas dan transparansi (McBride & Rosenstiel, 2014). McBride & Rosenstiel, (2014) menunjukkan kebutuhan untuk mengakui pergeseran klaim kebenaran jurnalistik ini. Swafoto sebagai bentuk kesaksian dan jurnalisme dengan sudut pandang – setidaknya secara konseptual — mewakili pergeseran ini sebagai transparan dan berbasis komunitas (disengaja atau tidak disengaja) berusaha untuk menggambarkan kebenaran.

Hal menarik lainnya yang dapat kita kaji bersama adalah motivasi orang melakukan swafoto dan mengunggahnya di media sosial. Kita kerap mendengar adagium “*No Picture, Hoax*”. Hal itulah yang disebut Barthes bahwa foto merupakan “*social presence*” bukti kehadiran sosial (Barthes, 1981). Mereka yang kerap melakukan swafoto dan mengunggahnya di media sosial menganggap bahwa swafoto merupakan sarana mnemonik untuk mengarsipkan peristiwa penting. Selain itu, mereka juga mementingkan menunjukkan identitas, khususnya dalam bentuk foto (Barthes, 1981; Sontag, 2005). Hal ini juga sejalan dengan temuan Van Dijck yang berpendapat bahwa fungsi foto sebagai alat untuk merawat memori menjadi tenggelam ketika munculnya perangkat digital dan mengiring pada kemunculan media sosial. Fungsi foto termasuk swafoto pun bergerak, menggeser fungsi foto dari mengingat menjadi “komunikasi dan pembentukan identitas” (Van Dijck, 2008: 58), memungkinkan untuk mereka lakukan melalui konektivitas dengan mereka yang

berada dalam jaringannya (Cruz & Meyer, 2012). Karena penggunaan kamera digital dan munculnya berbagai aplikasi tambahan dalam media sosial yang mudah dan dapat produksi gambar digital secara yang sederhana telah membuat mereka terlalu berlimpah dalam memproduksi swafoto maupun dalam bentuk lainnya seperti melakukan siaran langsung aktivitas pribadi berikut dengan memvideokan diri mereka dan menayangkannya secara langsung. Hal tersebut mengubah nilai gambar dari “kenang-kenangan” yang tak ternilai menjadi “momen” berharga. Hal itulah yang disebut Van Dijck sebagai “foto yang berubah menjadi bahasa lisan dan foto berubah menjadi mata uang baru untuk interaksi sosial” (van Dijck, 2008: 62). Hal ini sejalan dengan ide-ide Bank (1995), yang menunjukkan bahwa “foto-foto memberikan dasar untuk pekerjaan narasi; ada cerita tentang foto, dan ada cerita yang ada di belakang mereka dan di antara mereka” (Bank, 1995:89).

Merujuk penelitian Katie Davis yang berupaya menyelidiki efek gabungan hubungan interpersonal dan penggunaan media digital pada identitas remaja. Kuesioner diberikan kepada sampel dari 2.079 siswa (57% perempuan) antara usia 11 dan 19 tahun (M = 15,4 tahun) menghadiri salah satu dari tujuh sekolah menengah di Bermuda. Berdasarkan studi yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa berkomunikasi melalui media digital dengan teman-teman, memiliki peran yang lebih positif dalam pembentukan identitas remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi teman sebaya secara *online* mempengaruhi kejelasan konsep diri secara tidak langsung melalui dampak positifnya pada kualitas pertemanan (Davis, 2013: 2281–2293). Dalam penelitian ini, diketahui terdapat responden yang melakukan perubahan kebijakan privasinya setelah mendapatkan

kritikan dari teman yang ada di daftar pertemanan pada akun media sosialnya. Oleh karena itu, dapat dilakukan pula penelitian lanjutan guna mengetahui faktor yang paling mempengaruhi kebijakan individu dalam melakukan manajemen privasi komunikasinya saat melakukan swafoto dan mengunggahnya di media sosial.

Lantas bagaimanakah sebaiknya pengaturan tentang kebijakan yang mampu melindungi *privacy* masyarakat di era *global village* atau masyarakat global seperti saat ini? Mengutip pendapat Greenberg, maka dapat dinyatakan bahwa pesatnya perkembangan internet telah menuntut adanya revisi terhadap undang-undang yang mengatur tentang hak atas pribadi. Keberadaan media sosial di satu sisi telah mengubah pola interaksi interpersonal yang mampu menjangkau lebih jauh untuk membangun koneksi, namun di sisi lain swafoto yang sifatnya pribadi cenderung lebih mudah untuk dibagi ke publik. Oleh karena itu, meski kehadiran media sosial telah menjadi perpanjangan dari fisik kita, namun harus diatur oleh prinsip privasi yang sama dengan keberadaan *offline* (Greenbreg, 2015: 740).

Namun pada akhirnya, peneliti menyimpulkan, sepakat dengan pendapat Buchi bahwa ketrampilan berinternet merupakan titik awal yang penting terkait dengan perlindungan privasi. Jadi, kesadaran akan arti penting privasi tidak selalu menghasilkan perlindungan diri yang lebih baik, bila dibandingkan dengan mereka yang memiliki ketrampilan internet lebih baik. Kemampuan internet lebih baik akan mengurangi risiko terlanggarnya privasi (Buchi, 2016: 1261-1278). Hal ini juga dialami peneliti sendiri yang kerap mendapat pertanyaan dari responden yang berasal dari kelompok dewasa akhir tentang bagaimana cara merubah privasi untuk ijin memberikan komentar atau menandai

swafoto yang mereka unggah di akun media sosial mereka.

Penutup

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kelompok usia remaja awal 12 s.d. 17 tahun, justru memiliki tingkat privasi yang lebih tinggi saat melakukan swafoto dan mengunggahnya di media sosial; apabila dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Berdasarkan studi literatur dapat diketahui ada berbagai motivasi yang memungkinkan menjadi penyebab longgarnya tingkat pengaturan privasi saat melakukan swafoto dan mengunggahnya di media sosial. Salah satunya adalah karena swafoto merupakan *social presence* atau bukti kehadiran sosial dan sebagai sarana pembentukan identitas. Diperlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan swafoto yang meliputi alasan secara personal penyebab longgarnya tingkat pengaturan privasi di kalangan usia dewasa akhir.

Saran

Dengan diketahuinya penyebab longgarnya tingkat pengaturan privasi di kalangan usia dewasa akhir maka, kita dapat merekomendasikan sejumlah saran yang tepat guna mencegah terjadinya tindak pidana siber atau *cybercrime* maupun dampak negatif lainnya akibat longgarnya manajemen privasi yang ditetapkan saat melakukan swafoto dan mengunggahnya ke media sosial yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aunu, R. D. 2013. "Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif." *Quantum Sinergis Media*, Vol : XX, No : 1, 76.
- Busetta, Laura, V. C. 2015. "Be Your Selfie: Identity, Aesthetics and Power in Digital Self-Representation". *Networking Knowledge*, 8(6), 1-3.
- Davis, Katie. 2013. "Young people's digital lives: The impact of interpersonal relationships and digital media use on adolescents' sense of identity". *Computers in Human Behavior*, 29(6), 2281-2293.
- Dhir, A., Torsheim, T., Pallesen, S., & Andreassen, C. S. 2017. "Do Online Privacy Concerns Predict Selfie Behavior among Adolescents, Young Adults and Adults?." *Frontiers in Psychology*, 8, 815. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5440591/> diakses 11 Mei 2018.
- Frost, P. 2015. Frosh, P. 2015. "The Gestural Image: The Selfie, Photography Theory, and Kinesthetic Sociability. International" *Journal of Communication*, 9, 1607-1628.
- Iqani, Mehita; Schroeder, Jonathan E. 2016. "Selfie: Digital Self-portraits as Commodity form and Consumption Practise." *Consumption Market & Culture*, 405-415.
- Miguel, C. 2016. "Visual Intimacy on Social Media: from Selfies to The Co-Construction of Intimacies through Shared Pictures". *Social Media+ Society*, 2(2), 2056305116641705. <http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2056305116641705> diakses 11 Mei 2018.
- Petronio, S. 2004. "Road to Developing Communication Privacy Management Theory: Narrative in Progress, Please Stand By." *Journal of Family Communication*, 4(3&4), 193-207.
- Putri, Dian Kartika; Nirwana, Maya Diah dan Sobari, Wawan. 2012. "Analisis Manajemen Privasi Komunikasi Korban Cyberstalking dalam Facebook." *Jurnal Interaktif* Vol 3, No.2 Tahun 2010 <http://interaktif.ub.ac.id/index.php/interaktif/article/download/120/118> diakses 17 Desember 2018.
- Tiyarestu, Anya Cahyaning & Cahyono, Rudi.

2015. "Perbedaan Communication Privacy Management di Media Sosial Twitter pada Remaja dengan Tipe Kepribadian Extravert dan Introvert." *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Vol. 04 No. 1, 65. Diakses dari <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jppp1ab5761c17full.pdf> diakses 28 Desember 2017.

Van Dijck, J. 2013. "You have one identity": Performing the self on Facebook and LinkedIn." *Media, Culture and Society*, 35(2), 199–215.

Buku

Barthes, R. 1981. *Camera Lucida: Reflections on Photography*. New York, NY: Hill and Wang.

McBride, K., & Rosenstiel, T. 2014. *The New Ethics of Journalism: Principles for the 21st Century*. Thousand Oaks, CA: CQ Press.

Mendelson, A., & Papacharissi, Z. 2011. *Look at us: Collective Narcissism in College Student Facebook Galleries*. In Z. Papacharissi (Ed.), *A Networked Self: Identity, Community and Culture on Social Network Sites* hlm. 251–273). New York, NY: Routledge.

PROBLEMATIKA TATA KELOLA GURU DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN

*Teachers' Governance Problematics
in Implementation The Law of Teachers and Dosen*

Faridah Alawiyah

faridahalawiyah@gmail.com
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta

Naskah Diterima: 3 Maret 2017 | Naskah direvisi: 3 Mei 2018 | Naskah diterbitkan: 30 Juni 2018

Abstract: *Teachers and Lecturers Act of 2005 (Ind. UUGD) is a constitutional accomplishment to appreciate the profession of teachers and lecturers in Indonesia. Unfortunately, it's the implementation, particularly teachers' governance often runs into quite complex problems. The question in this study is why teachers' governance is quite complicated? Qualitative approach is employed to explore the dynamics of the implementation problems. Numerous competent people were interviewed deeply and purposively, series of FGD's were held and finally the study finds that implementation problems relate with: the problems of teacher quantity, the distribution and mutation as well as the problems of teacher quality in and on-service trainings / workshops, law protection, rewards, and at last, professional association of teachers.*

Keywords: *education, teachers, governance, regulation and implementation*

Abstrak: Lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi terhadap profesi guru dan dosen. Dalam implementasi UUGD, tata kelola guru seringkali berjalan sangat kompleks dan dihadapkan pada berbagai masalah. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah mengapa tata kelola guru belum baik? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dipilih karena sifatnya yang terbuka dan fleksibel. Melalui wawancara terbuka (individual dan kelompok) serta beberapa FGD ditemukan bahwa problematika tata kelola guru dalam implementasi UUGD berkaitan dengan banyak sekali persoalan, misalnya: kurang jelasnya definisi guru beserta implikasinya pada tugas tambahan (struktural) dan fungsional pengawas, perubahan kurikulum, kuantitas-distribusi-mutasi guru, kualitas-spesialisasi-workshop guru PNS dan non-PNS, perlindungan guru, penghargaan guru, dan organisasi profesi guru.

Kata Kunci: Pendidikan, guru, undang-undang, tata kelola, implemmentasi

Pendahuluan

Pengakuan terhadap profesi guru dan dosen yang sebelumnya kurang dihargai dibuktikan dengan lahirnya Undang Undang Guru dan Dosen (UUGD). Guru dan dosen merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan dalam mengisi pembangunan

nasional di bidang pendidikan. Pendidikan diselenggarakan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia berkarakter, kompeten dan mampu mengisi masa depan berbangsa dan bernegara.

UUGD disahkan pada tahun 2005 dengan tujuan untuk memperbaiki pendidikan nasional, baik secara kualitas maupun

kuantitas, agar sumber daya manusia Indonesia bisa lebih beriman, kreatif, inovatif, produktif, serta berilmu pengetahuan luas demi meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa. Hal ini sesuai amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Perbaikan mutu pendidikan nasional yang dimaksud dalam UUGD meliputi, sistem pendidikan nasional, kualifikasi serta kompetensi guru dan dosen, standar kurikulum yang digunakan, serta hal lainnya.

UUGD diharapkan menjadi terobosan dalam rangka menciptakan tenaga pendidik yang berkualitas, namun ternyata ada beberapa hal yang tidak terlepas dari kekurangan dan kiranya perlu segera dibenahi (baik dari segi konsep maupun pelaksanaan). Faktanya, dari sekitar 3,9 juta guru di bawah pengelolaan Kemendikbud dan Kemenag, masih terdapat sebanyak satu juta guru yang belum memenuhi syarat minimal kualifikasi akademik S-1/D-4. Dari sejumlah guru tersebut, baru sekitar 1,9 juta guru yang telah tersertifikasi. Dalam rangka memenuhi UUGD, Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan proses sertifikasi bagi guru-guru secara bertahap, melakukan langkah perbaikan dalam pengelolaan dan peningkatan profesionalisme guru, menugaskan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk melaksanakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk melahirkan guru-guru berkualitas, menyaratkan pengangkatan guru baru hanya bagi lulusan PPG, memperkuat kebijakan rekrutmen dan distribusi guru yang berkualitas, mengirim sarjana lulusan LPTK untuk mendidik di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) di seluruh Indonesia.

Dalam implementasi UUGD, tata kelola guru kerap menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Khusus untuk guru, permasalahan tersebut antara lain

masih timpangnya ketersediaan guru antar lembaga pendidikan dan antarwilayah; program sertifikasi guru yang masih syarat dengan masalah (pelaksanaan program, pembiayaan); belum signifikannya dampak berbagai program peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa; belum memadainya kapasitas LPTK, terutama LPTK swasta dalam menciptakan guru berkualitas; pengembangan serta jenjang karir guru yang masih belum jelas; upaya perlindungan terhadap guru masih rendah; kurangnya perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan guru; adanya diskriminasi terhadap guru swasta dengan guru negeri, guru honorer dan guru PNS, serta UUGD yang sudah tidak relevan lagi dengan dinamika nasional. Menyadari kompleksnya permasalahan tata kelola guru, maka rumusan pertanyaan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah mengapa tata kelola guru belum baik?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran yang utuh tentang mengapa tata kelola guru belum baik. Penelitian dilakukan pada dua daerah yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan diperoleh substansi dan paradigma baru mengenai tata kelola guru untuk memberikan sumbangsih hasil pemikiran kepada Komisi X DPR RI, terutama dalam upaya perbaikan dalam tata kelola guru di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena sifat pendekatan kualitatif yang terbuka dan fleksibel. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh masukan yang sebanyak-banyaknya dari para narasumber dan informan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Teknik ini memiliki bentuk dan kegunaan yang beragam, tetapi dalam penelitian

ini akan digunakan tipe paling umum, yaitu: wawancara langsung tatap muka (*face to face*), baik dengan individu maupun dengan kelompok (*focus group interview*). Wawancara dilakukan dengan tidak terstruktur (*unstructured interview*) yang memberikan ruang lebih luas bagi informan dan pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka (*open-ended*), sehingga dapat memperkaya perolehan data. Untuk memperoleh data primer, wawancara dilakukan terhadap berbagai informan, yaitu narasumber yang berprofesi sebagai guru dan akademisi, yang terkait dengan permasalahan tata kelola profesinya, pejabat kementerian terkait dengan urusan pengelolaan profesi guru, serta perwakilan organisasi guru dan dosen. Wawancara direkam dan dilengkapi dengan catatan lapangan (*field-note*) oleh peneliti.

Daerah penelitian adalah Yogyakarta dan Sulawesi Selatan. Untuk Yogyakarta, turun lapangan selain dilakukan di Kota Yogyakarta juga dilakukan di Kabupaten Gunung Kidul. Berdasarkan data Neraca Pendidikan Nasional, Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang memiliki jumlah guru terbesar untuk wilayah Indonesia bagian tengah (111.812 guru). LPTK di Sulawesi Selatan juga menjadi LPTK yang lulusannya adalah para guru yang ditempatkan di Indonesia bagian timur. Berbagai kasus kurangnya perlindungan terhadap guru terjadi di Makassar, misalnya kasus guru dipukuli orang tua siswa yang terjadi di akhir Agustus 2016 lalu.¹ Sementara Yogyakarta sebagai salah satu kota pendidikan merupakan wilayah dengan kompleksitas persoalan pendidikan yang begitu beragam. Kedua lokasi penelitian juga mendukung penelitian yang dilakukan, karena LPTK yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan sertifikasi guru ada di Yogyakarta dan Makassar,

yaitu di Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Negeri Makassar. Selain kedua LPTK tersebut, berdasarkan data Kemenristekdikti, khususnya Dirjen Belmawa, masih ada beberapa Universitas/LPTK negeri dan swasta yang ditugaskan Pemerintah untuk mencetak calon guru untuk ditugaskan di dalam negeri, maupun di luar negeri.

Tata Kelola

Kunci keberhasilan kebijakan pendidikan adalah efisiensi proses pelayanan, mutu, dan kepastian pelaksanaan kebijakan. Dalam upaya menghadapi tantangan tersebut, salah satu prasyarat yang perlu dikembangkan adalah komitmen yang tinggi untuk menerapkan nilai luhur dan prinsip tata kelola (*good governance*) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara, yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. *United Nations Development Program* (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “*Governance for Sustainable Human Development*” (1997), mendefinisikan *governance* sebagai pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan dan kohesitas sosial di masyarakat.²

Menurut Sutojo dan Aldridge (2005: 1), kata *governance* diambil dari kata latin, yaitu *gubernance* yang artinya mengarahkan dan mengendalikan. Sementara itu, menurut Azhar Kasim yang dikutip oleh Tunggal dan Tunggal (2002: 5), *governance* adalah proses pengelolaan berbagai bidang kehidupan (sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya) dalam suatu negara serta penggunaan sumber daya (alam, keuangan, manusia) dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan

¹ Guru dipukul orang tua siswa, murid datang ke kantor polisi, diakses di <https://regional.kompas.com/read/2016/08/11/11304741/guru.dipukul.orangtua.siswa.murid-muridnya.datangi.kantor.polisi.pada.15.Maret.2017>.

² UNDP, “*Governance for Sustainable Human Development*,” Policy Paper, 1997. Diakses di <http://magnet.undp.org/policy/chapter1.htm#b>, pada 15 Maret 2017.

akuntabilitas. Pemerintah atau *government* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc.* Ditinjau dari sisi semantik, kebahasaan *governance* berarti tata kelola pemerintahan dan *good governance* bermakna tata kelola pemerintahan yang baik. Istilah *good governance* dimaknai sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan, perusahaan atau organisasi kemasyarakatan. Apabila istilah ini dirujuk pada asli kata dalam bahasa Inggris "*governing*", maka artinya adalah mengarahkan atau mengendalikan. Karena itu *good governance* dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi masalah publik.

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan yang baik adalah baik dalam proses maupun hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, serta terbebas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses dan laju pembangunan. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika produktif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat, baik dalam aspek produktivitas maupun dalam daya belinya; kesejahteraan spiritualnya meningkat dengan indikator rasa aman, bahagia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi.

Pendidikan dalam Mencapai Pembangunan Nasional

Negara yang sedang berkembang, di mana terdapat "*labour surplus economy*", modal pembangunan tidak dapat digantungkan hanya pada tersedianya atau kemungkinan tersedianya dana investasi. Pembangunan yang demikian itu di samping akan terlalu mahal juga akan mengalami hambatan-hambatan apabila pada suatu waktu sumber investasi menjadi terbatas, baik yang

berasal dari pemerintah maupun masyarakat (Samtono, 2011: 121). Sementara itu, jumlah penduduk yang besar sebagai sumber daya manusia hendaklah dijadikan sebagai suatu keunggulan, bukan sebaliknya. Dalam GBHN Tahun 1988 dinyatakan: "jumlah penduduk yang sangat besar, apabila dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan merupakan modal pembangunan yang besar yang sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan di segala bidang". Masalah ini tidak saja karena keterbatasan dana investasi, tetapi juga sebagai landasan yang kuat bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk menjamin kelangsungan dan berhasilnya pembangunan nasional.

Kondisi Indonesia yang baik secara geografis dan politis, serta posisi geostrategik menjadi modal besar dalam upaya pembangunan nasional. Modal besar tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien terutama jika dikelola secara bijak dan ditunjang oleh kemampuan yang tinggi dari para pengelola dan rakyatnya. Kenyataan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas sumber daya manusia memegang peranan yang penting dalam menyejahterakan suatu bangsa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia agar menjadi negara yang makmur dapat dimulai dari membangun sumber daya manusia melalui pendidikan atau memegang prinsip *education first, prosperity follows*.

Partisipasi masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan sangat penting. Pembangunan tidak akan mencapai hasil yang optimal dan keberhasilan yang dicapai tidak dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat secara merata tanpa partisipasi aktif mereka. Meskipun demikian, dalam batasan-batasan tertentu melibatkan partisipasi aktif setiap lapisan dan anggota masyarakat terkadang menemui berbagai kendala dan permasalahan, di antaranya adalah kendala kemampuan dan kompetensi. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana secara terus-menerus dilakukan upaya agar kendala kemampuan yang dimiliki oleh

semua lapisan dan anggota masyarakat dapat teratasi sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dan dapat pula menikmati hasil pembangunan yang dicapai. Upaya yang paling efektif untuk mengatasi kendala tersebut adalah melalui pendidikan.

Peran dan Fungsi Guru dalam Pendidikan Nasional

Guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 509) berarti orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar. Pengertian ini memberi kesan bahwa guru adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mengajar. Istilah guru sinonim dengan kata pengajar dan sering dibedakan dengan istilah pendidik. Perbedaan ini dalam pandangan Muh. Said dalam Rusn (2009: 62-63) dipengaruhi oleh kebiasaan berpikir orang Barat, khususnya orang Belanda yang membedakan kata *onderwijs* (pengajaran) dengan kata *opveeding* (pendidikan). Pandangan ini diikuti oleh tokoh-tokoh pendidikan di dunia Timur, termasuk tokoh-tokoh pendidikan di kalangan muslim.

Nata (1997: 61) mengemukakan istilah-istilah yang berkaitan dengan penamaan atas aktivitas mendidik dan mengajar. Ia lalu menyimpulkan bahwa keseluruhan istilah-istilah tersebut terhimpun dalam kata pendidik. Hal ini disebabkan karena keseluruhan istilah itu mengacu kepada seseorang yang memberikan pengetahuan, keterampilan atau pengalaman kepada orang lain.

Selanjutnya, guru menurut Zahara Idris (2008: 49) dan Lisma Jamal dalam Idris adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam hal perkembangan jasmani dan ruhani untuk mencapai tingkat kedewasaan, memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu yang mandiri, dan makhluk sosial. Al-Gazali tidak membedakan kata pengajaran dan pendidikan, sehingga guru

dan pendidik juga tidak dibedakan (Rusn, 2009: 63). Di dalam UUGD sendiri guru adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpolo, formal, dan sistematis. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru yang profesional akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian, baik dalam materi maupun metode. Di samping keahliannya, sosok guru profesional ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdianannya. Guru profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Sebagai pengajar atau pendidik, guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan setiap upaya pendidikan. Itulah sebabnya setiap adanya inovasi pendidikan, khususnya dalam kurikulum dan peningkatan sumber daya manusia yang dihasilkan dari upaya pendidikan, selalu bermuara pada faktor guru (Shabir, 2015: 222). Hal ini menunjukkan bahwa betapa eksisnya peran guru dalam dunia pendidikan. Guru menjadi faktor yang menentukan mutu pendidikan karena guru berhadapan langsung dengan para peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Di tangan guru, mutu dan kepribadian peserta didik dibentuk. Karena itu, perlu sosok guru kompeten, bertanggung jawab, terampil, dan berdedikasi tinggi. Guru adalah kurikulum berjalan. Sebaik apa kurikulum dan sistem pendidikan yang ada tanpa didukung oleh kemampuan guru, semuanya akan sia-sia. Guru berkompoten

dan bertanggung jawab, utamanya dalam mengawal perkembangan peserta didik sampai ke suatu titik maksimal. Tujuan akhir seluruh proses pendampingan guru adalah tumbuhnya pribadi dewasa yang utuh.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat, guru tidak lagi sekadar bertindak sebagai penyaji informasi. Guru juga harus mampu bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari dan mengolah sendiri informasi (Uno, 2009: 16-17). Dengan demikian, guru juga harus senantiasa meningkatkan keahliannya dan senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia mampu menghadapi berbagai tantangan.

Perkembangan dunia pendidikan yang sejalan dengan kemajuan teknologi dan globalisasi yang begitu cepat perlu diimbangi oleh kemampuan pelaku utama pendidikan, dalam hal ini guru. Bagi sebagian guru, menghadapi perubahan yang cepat dalam pendidikan dapat membawa dampak kecemasan dan ketakutan. Perubahan dan pembaruan pada umumnya membawa banyak kecemasan dan ketidaknyamanan. Implikasi perubahan dalam dunia pendidikan, bukan perkara mudah, karena mengandung konsekuensi teknis dan praksis, serta psikologis bagi guru. Misalnya, perubahan kurikulum atau perubahan kebijakan pendidikan. Perubahan itu tidak sekadar perubahan struktur dan isi kurikulum atau sekadar perubahan isi pembelajaran, tetapi perubahan yang menuntut perubahan sikap dan perilaku dari para guru. Misalnya, perubahan karakter, mental, metode, dan strategi dalam pembelajaran. Guru dalam menjalankan tugas profesionalnya mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Untuk itu, guru harus memiliki dan menguasai kompetensinya dan sekaligus mengetahui hak dan kewajibannya sehingga ia menjadi sosok guru yang betul-betul profesional.

Guru sebagai Pekerjaan Profesional

Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Sanusi dalam Syaefudin (2009: 6) mengatakan bahwa profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*expertise*) dari para anggotanya. Artinya ia tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak dilatih atau disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Webstar dalam Kusnandar (2009: 45) juga mengatakan bahwa profesi juga diartikan sebagai jabatan atau pekerjaan tertentu yang menyaratkan pengetahuan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Sementara profesional menunjukkan pada penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Nurdin, 2005: 13). Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi di sini meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun akademis. Bila dianalisis kembali, guru dalam konteks profesional dari pengertian dan ciri profesional tersebut di atas dapat diartikan sebagai profesi seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya bukan hanya mengajar dan memberikan informasi berupa materi pelajaran saja, akan tetapi memiliki tujuan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya diperlukan kemampuan khusus yang didasarkan konsep pengetahuan yang spesifik. Berdasarkan UUGD, pada Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik (kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik), kompetensi kepribadian (kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik), kompetensi sosial (kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar), dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam) yang dinilai dari portofolionya.

Komitmen Legislatif dan Eksekutif tentang Guru

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan, DPR telah membuat Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai pendidik di negara ini, hadirnya UUGD mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Penelitian ini bukan lagi merupakan penelitian baru di bidangnya, jika yang dilihat adalah guru sebagai profesi. Berbagai penelitian tentang profesionalisme guru banyak ditemui di LPTK dan universitas di dalam negeri terutama sejak UUGD disahkan lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Secara khusus, lembaga internasional seperti World Bank bahkan mempunyai gugus tugas tersendiri terkait dengan guru, melalui proyek Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru World Bank). Lembaga Penelitian SMERU dengan dukungan PBB juga telah beberapa kali melakukan kajian

terhadap guru sebagai profesi ujung tombak pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Tim Kesejahteraan Sosial ini akan lebih fokus pada implementasi UUGD yang seharusnya menjadi standar bagi pengembangan profesi guru. Dari kajian langsung di dua provinsi yang diharapkan dapat mewakili kondisi nyata di lapangan, diharapkan dapat ditemui kejelasan, apakah UUGD ini sebenarnya telah ideal dalam menjawab tuntutan profesi guru atau justru terlalu mengkotak-kotakkan profesi yang sangat mulia dari seorang pendidik. Dari hasil kajian di lapangan tersebut akan terlihat perlu tidaknya UUGD direvisi atau dirombak total untuk menjawab tuntutan pembangunan di masa yang akan datang.

Tata kelola Guru dalam Implementasi UUGD di Tingkat Daerah

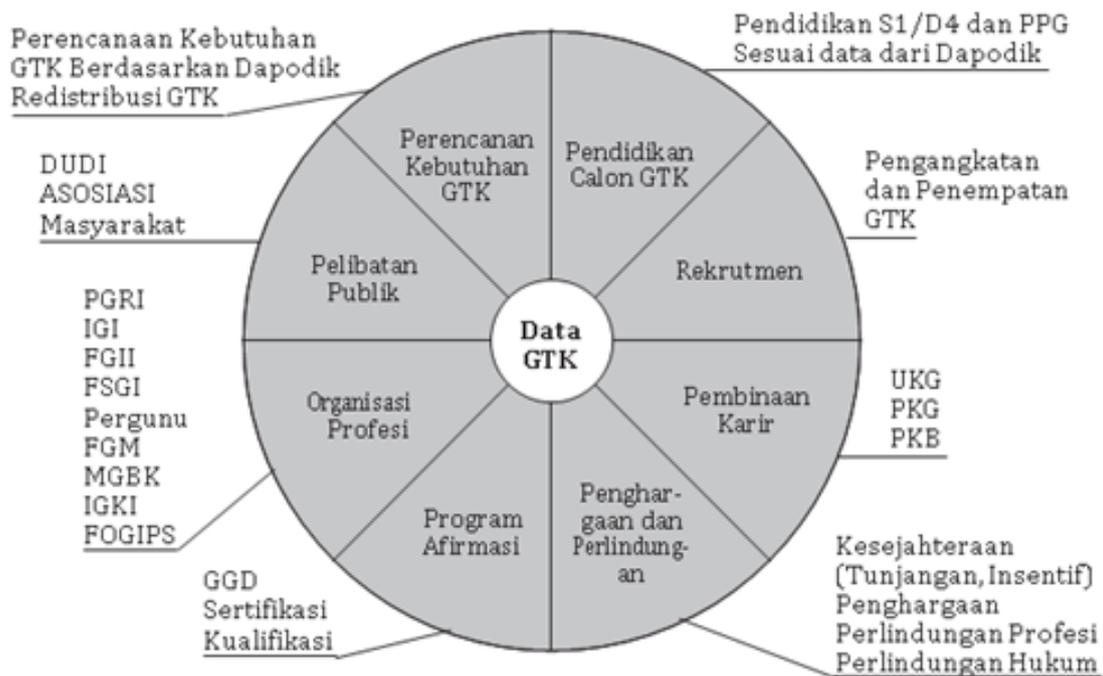
Menurut data Badan Kepegawaian Nasional, dari seluruh PNS yang ada (4.538.154), sekitar 1.712.848 (37,74 persen) PNS mempunyai jabatan fungsional tenaga pendidik/guru.³ Data dengan selisih 500-an ribu (1.205.227 PNS GTK) disampaikan oleh Kemendikbud yang juga menyampaikan ada sekitar 962.169 non-PNS GTK di seluruh Indonesia.⁴ Kuantitas SDM yang begitu besar yang harus dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara entitas lingkup tata kelola guru tergambar dalam Gambar 1.

Adapun pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan utamanya tata kelola guru antara pemerintahan pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota dapat dilihat dalam Tabel 1.

Khusus mengenai pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, maka urusan Pemerintah Pusat adalah mengenai

³ "Statistik PNS", diakses di www.bkn.go.id/statistik-pns, pada 29 Mei 2017.

⁴ "Tata Kelola Guru Pendidikan Dasar", Makalah Direktorat Pembinaan Guru Dikdas Tahun Anggaran 2017, BKD, Jakarta, 13 Maret 2017.



Gambar 1. Entitas Tata Kelola Guru dan Tenaga Kependidikan
Sumber: Kemendikbud, 2017.

pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan (lintas daerah provinsi), serta pengembangan karir pendidik. Di tingkat provinsi, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan terutama adalah untuk pemindahan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi. Selanjutnya untuk kabupaten/kota, tata kelola terkait dengan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota yang bersangkutan.

Permasalahan Tata Kelola Guru

Permasalahan umum dalam tata kelola guru berdasarkan temuan di lapangan berdasarkan

hasil wawancara dengan berbagai narasumber terkait dalam FGD yang dilakukan di Kota Yogyakarta dan Kota Makassar bersama SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dinas terkait guru, guru, pengawas sekolah, kepala sekolah organisasi guru serta antara lain adalah persoalan pengaturan terkait guru. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebenarnya sudah jelas mengatur otoritas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan penyelenggaraan pendidikan. Tiga aspek penting dalam pendidikan, yaitu standar pendidikan, kurikulum, serta guru dan tenaga kependidikan harus jelas kewenangannya di masing-masing tingkat. Sebagai contoh,

Tabel 1. Pembagian Urusan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Sub Urusan	Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karir pendidik. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi.	Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karir pendidik. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota

Sumber: UU No. 23 Tahun 2014

di Provinsi Sulawesi Selatan ketika pendidikan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka beberapa perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah provinsi terpaksa akan ditutup paling tidak sampai 2019. Selanjutnya, ruang gerak pemerintah provinsi menjadi terbatas karena sulit merespons kebutuhan berbagai pihak (termasuk dari luar negeri) yang ingin mendirikan perguruan tinggi di provinsinya. Dinas pendidikan (Disdik) provinsi hanya dapat memfasilitasi keinginan tersebut sesuai dengan kewenangannya. Sebelumnya, disdik provinsi dapat secara cepat merespons, melalui penyusunan MoU (*memorandum of understanding*) dengan langkah-langkah yang harus dilalui. Selain itu, menurut pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, ketika pendidikan menengah dan pendidikan khusus setingkat SMA, SMK, dan SMP diserahkan kepada disdik provinsi, sempat terjadi permasalahan di awal implementasi, antara disdik provinsi dengan disdik kabupaten/kota. Untuk permasalahan aset bahkan dikhawatirkan ada keengganan dari disdik provinsi menyangkut aset yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sebagai contoh, bantuan aset dalam bentuk ruang kelas, laboratorium, dsb. Tiba-tiba datang dari pusat langsung ke satuan pendidikan, tanpa diketahui oleh disdik provinsi. Ketika ada persoalan terhadap aset tersebut, yang akan diaudit adalah disdik provinsi. Disdik akan berada dalam posisi yang dilematis karena sejak awal tidak mengetahui permasalahan aset tersebut. Realita di lapangan menunjukkan ada sekolah-sekolah yang tiap tahun mendapatkan bantuan karena mempunyai privilese akses terhadap pemerintah pusat. Sementara itu, ada juga sekolah yang tidak pernah mendapatkan bantuan sama sekali. Untuk guru dan tenaga kependidikan, ada guru yang setahunnya mengikuti lima kali pelatihan, tetapi ada juga guru yang sejak diangkat menjadi PNS hanya mengikuti pelatihan prajabatan saja. Selanjutnya jika pun guru mendapatkan pelatihan, tidak ada pemantauan lanjutan atau evaluasi capaian saat telah diterapkan di sekolah. Di tingkat provinsi,

dinas terkadang mengambil jalan tengah dengan membuat peraturan daerah mengenai penyelenggaraan pendidikan, seperti ditemui di Provinsi Sulawesi Selatan. Titik beratnya adalah para guru sebagai ujung tombak pendidikan mendapatkan atmosfer, struktur, kondisi, konstruksi, realitas, dan bangunan lingkungan yang menunjang pelaksanaan tugas profesionalnya. Tata kelola guru sebenarnya ada kaitannya dengan bagaimana semua persyaratan dipersiapkan dalam menjawab tuntutan UU Pemerintahan Daerah. Pembagian kewenangan ini seharusnya juga diikuti dengan anggaran yang sesuai dengan wewenang masing-masing. Upaya pemerintah pusat untuk mendengarkan masukan dari daerah, masih tergolong kurang, termasuk juga koordinasi antara kementerian dengan dinas di daerah. Tidak hanya untuk masalah guru, tetapi juga perihal lain seperti kurikulum dan ujian nasional. Oleh karena itu, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan bersama-sama.

Permasalahan umum kedua yang ditemukan adalah persoalan definisi guru. Dalam diskusi yang dilakukan dengan MGMP PAI di Kabupaten Gunungkidul, seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Keluasan tersebut ditambah lagi dengan praktik di lapangan yang mengharuskan guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan pengawas. UUGD tidak memunculkan kata 'pengawas', dan hal ini menyebabkan tidak adanya pengakuan terhadap pengawas sebagai kelompok profesi yang juga adalah guru. Di satu sisi pengawas masuk ke dalam kelompok pegawai biasa, sehingga tidak mendapatkan libur ketika guru libur semester. Di sisi lain jika ada keinginan ikut 'libur' dengan mengambil

cuti, maka pada saat cuti para pengawas tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi.

Kejelasan definisi juga diperlukan melihat keberadaan guru BK (bimbingan konseling) yang sempat mengalami permasalahan karena sebelum ada sertifikasi guru, ada gagasan agar guru BK dijadikan sebagai guru pembimbing dan kemudian mempunyai profesi sebagai Konselor. Tetapi begitu ada program sertifikasi guru dengan berbagai peluang perbaikan kesejahteraan, maka para guru BK kembali ingin dimasukkan ke dalam kelompok guru, dan bukan konselor. Untuk lebih mengangkat profesinya, para guru BK sebaiknya tetap dimasukkan ke dalam profesi konselor (profesi baru) dengan tunjangan profesi yang perlu diperjuangkan dan dilindungi dengan regulasi tersendiri.

Permasalahan umum terkait tata kelola guru ketiga adalah perubahan kurikulum yang kerap terjadi. Dinas provinsi serta SKPD yang membidangi pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan mengungkapkan dengan adanya perubahan kurikulum telah menghilangkan beberapa mata pelajaran yang kemudian berdampak pada ketidakrelevanan tugas guru. Selain itu, terkait pelaksanaan Kurikulum 2013 yang sudah diterapkan secara baik di beberapa sekolah di kabupaten/kota yang ditunjuk, ketika sekolah yang dijadikan sekolah percontohan belum menghasilkan lulusan dari Kurikulum 2013, atau belum ada evaluasi, kurikulum sudah langsung diberlakukan di sekolah lain pada semester berikutnya. Siklus perubahan sebaiknya dilaksanakan secara menyeluruh, yang jika dibiarkan secara parsial akan mengakibatkan kekhawatiran dan kegamanan bagi para guru dalam menjalankan profesinya.

Disdik Provinsi Sulawesi Selatan melihat bahwa penetapan kurikulum secara nasional untuk pendidikan menengah, terutama untuk muatan lokal, sebaiknya diserahkan ke dinas provinsi. Keinginan ini muncul setelah belajar dari pengalaman saat kementerian melakukan analisis konteks terhadap

penyusunan materi muatan lokal bahasa dan budaya. Kementerian masih memegang peran yang besar, dengan tenaga ahli, penyusun, dan narasumber yang didatangkan dari pusat. Pada saat kajian, muncul berbagai istilah yang dirasakan aneh oleh para peserta dan tidak sesuai dengan kondisi di provinsi masing-masing. Sepertinya tidak ada koordinasi antara kementerian dengan disdik provinsi dan disdik kabupaten/kota dalam pengambilan kebijakan.

Kekhawatiran lain yang saat ini juga dirasakan dinas kabupaten/kota di Provinsi DIY adalah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Isi dari Permendikbud tersebut dikhawatirkan akan memunculkan tuntutan pengajaran pendidikan untuk kepercayaan selain enam agama yang diakui pemerintah, sementara guru yang mengajar tidak tersedia dengan memadai. Selanjutnya secara khusus permasalahan tata kelola guru yang dihadapi di lapangan terangkum pada tiga hal yaitu persoalan kuantitas, kualitas, penghargaan dan perlindungan, kesejahteraan, serta organisasi profesi.

Permasalahan Kuantitas Guru

Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pertumbuhan jumlah guru yang sangat cepat menjadikan jumlah guru di Indonesia berlebih. Artinya, memang terjadi kelebihan guru secara kuantitas. Tetapi organisasi guru mengungkapkan hal yang berbeda di lapangan, sebenarnya (untuk tingkat menengah) terjadi kekurangan guru mata pelajaran. Misalnya untuk pelajaran kewarganegaraan dan ekonomi, terjadi kelebihan guru, sementara untuk pelajaran agama, terjadi kekurangan guru. Akhirnya muncul kasus guru yang hanya mengajar 4 jam pelajaran, dan sisanya dihabiskan untuk piket hari Senin s.d. Jumat.

Dalam diskusi bersama MGMP PAI

Kabupaten Gunungkidul dipaparkan bahwa kuantitas guru agama (PAI) di Kabupaten Gunungkidul yang sangat kurang memaksa kekosongan tersebut untuk diisi oleh guru dari luar kabupaten bersangkutan. Muncul harapan agar guru agama yang dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag) diperbanyak kuotanya, mengingat kuota guru PAI di Kabupaten Gunungkidul yang dialokasikan oleh Kemenag lebih dari 90 persen sudah diangkat oleh daerah sebagai PNS.

Idealnya, jika sekolah yang satu berlebih, sementara sekolah yang lain kekurangan, maka guru yang ada di sekolah pertama dapat dipindahkan ke sekolah kedua. Untuk satu kabupaten/kota, hal ini mungkin tidak terlalu sulit dilakukan. Permasalahan yang saat ini sering ditemui adalah untuk sekolah di perbatasan antara kabupaten/kota yang satu dengan kabupaten/kota yang lain.

Secara nasional, pemerintah seharusnya tidak membedakan status guru (swasta/honorer/negeri) karena guru adalah ujung tombak pembinaan generasi penerus, sehingga tujuan utama adalah tercapainya guru yang berkualitas. Tetapi ada baiknya jika pemerintah, melalui undang-undang yang ada, mengatur jumlah guru swasta agar kualitasnya tidak turun. Pengaturan dapat dimulai dari formasi, pengangkatan, dan sertifikasi agar pertumbuhan guru yang begitu cepat akibat animo masyarakat umum yang sangat luar biasa dapat dikelola dengan baik.

Selain itu perlu juga diingatkan agar jangan sampai guru dibayar murah atau mau dibayar murah. Sebagai contoh guru yang mengajar di SLB, mayoritas mengajar dengan ikhlas tanpa bayaran, terutama mengingat yayasan yang menaungi bersifat nonprofit. Harapan dari para guru, terutama guru non-PNS adalah jika ada pengangkatan PNS, ada baiknya yang diutamakan adalah para guru honorer yang telah lama mengajar di sekolah, baik negeri maupun swasta. Distribusi dan pengangkatan guru honorer

telah ada di dalam sistem pendidikan kita. Disdik dapat menginisiasi pembentukan peraturan daerah mengenai distribusi guru dengan konsekuensi hukum yang mengikat pemerintah daerah dan juga guru itu sendiri.

Selanjutnya terkait dengan pengadaan guru untuk keperluan program pengadaan guru, telah diserahkan kepada LPTK untuk melaksanakannya. Berdasarkan informasi dari salah satu LPTK di Provinsi DIY, anggaran disediakan oleh pemerintah dan kemudian dialokasikan kepada masing-masing LPTK. Dalam praktiknya, ada pedoman khusus, dalam bentuk buku, seperti Buku Pedoman Program Sertifikasi Guru dan Penetapan Peserta SM-3T PPG.

LPTK perlu menjaga agar jangan sampai kualitas guru menjadi rendah karena saat ini banyak pendidikan calon guru yang diselenggarakan di perguruan tinggi yang tidak jelas hasilnya. Kualitas guru yang dihasilkan oleh LPTK tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Perlu juga dijadikan pertimbangan bahwa lulusan beberapa sekolah guru lebih rendah secara kualitas jika dibandingkan lulusan perguruan tinggi umum karena metode belajarnya kurang baik. Oleh karena itu, pendidikan tinggi pencetak guru harus betul-betul diingatkan untuk mencetak calon guru yang berkualitas.

Selain itu persoalan kuantitas guru juga menyangkut jabatan fungsional guru. Mekanisme pindah jabatan dari fungsional guru ke jabatan struktural belum diatur secara jelas. Tetapi jika seorang guru ingin pindah ke jabatan struktural, maka jabatan fungsional harus dilepaskan. Selain itu syarat kualifikasi jabatan baru harus terpenuhi, terutama keharusan lulus pendidikan dan pelatihan sebagai penentu lolos atau tidaknya seperti tertuang dalam PP Nomor 13 Tahun 2002. Untuk guru yang pindah tugas antar provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) mengajukan permohonan mutasi ke

daerah tujuan. Setelah menerima jawaban permohonan dengan pernyataan akan diterima oleh daerah atau provinsi tujuan, maka proses mutasi akan dilanjutkan. Hal yang sama berlaku juga untuk mutasi antar kabupaten atau antar kota. Jika pindah tugas yang dimohonkan masih di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan, maka dinas pendidikan kabupaten/kota yang bersangkutan akan melihat proyeksi/perencanaan kebutuhan terlebih dulu dengan mempertimbangkan pemerataan mutu pendidikan di sekolah.

Selanjutnya persoalan beban kerja guru. Beban kerja guru disusun dalam PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang merupakan turunan dari UUGD. Tugas guru dapat dikatakan sangat berat, mulai dari mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, membimbing siswa, dan melaksanakan tugas tambahan lainnya. Sebagai profesi, kewajiban sejak perencanaan hingga evaluasi akan terlihat sederhana. Tetapi dalam praktiknya, muncul berbagai tuntutan, sehingga jika dijabarkan akan ada puluhan tugas yang harus dilaksanakan guru, selain juga tuntutan mengajar minimal 24 jam pelajaran dan prosedur administrasi kerja yang harus juga dilaporkan.

Kemendikbud sudah menginisiasi alternatif bahwa jam kerja guru dapat berjumlah 16 jam saja. Pengaturan tetap 24 jam dengan 17 s.d. 24 dihitung berdasarkan konversi, misalnya ketika guru sedang piket atau mengajar ekstrakurikuler di sekolahnya sendiri. Kepala Sekolah juga tidak dibebankan dengan keharusan mengajar dari yang saat ini perlu mengajar 6 jam. Kepala Sekolah melaksanakan fungsi manajerial dengan penekanan pada *controlling*.

Guru diharapkan mampu menjadi bagian dari sistem tata kelola pendidikan yang mewajibkan guru untuk menguasai proses penyelenggaraan pendidikan termasuk penganggaran. Guru sebagai bagian inti dari proses pendidikan yang *core business*-nya adalah pembelajaran,

sering terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan yang mengharuskan mereka berurusan dengan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana yang rumit. Para guru pada akhirnya harus berlutut dengan permasalahan administrasi yang tidak ada hubungannya dengan tugas pokok. Mereka harus mampu secara administratif melaporkan anggaran untuk kegiatan pembelajaran yang tidak mampu mereka pahami komponen-komponennya.

Guru juga dihadapkan pada tantangan perkembangan teknologi. Pemerintah terus melakukan program peningkatan kualitas guru dengan memanfaatkan teknologi (jarak jauh) selain melalui buku/modul. Penguasaan teknologi penting bagi guru mengingat saat ini, di tengah perkembangan global dan kemajuan teknologi, kemajuan suatu peradaban tidak lagi diukur dari segi materil, seperti sumber daya alam, kemajuan industri, pabrik, persenjataan, dan infrastruktur lainnya, tetapi diukur atas kualitas SDM. Untuk ukuran kualitas SDM, terdapat dua hal utama yang amat penting untuk direbut dan dikuasai, yaitu informasi dan pengetahuan. Tantangannya tidak semua guru melek teknologi, tetapi tetap ada harapan perbaikan kondisi ini di masa yang akan datang.

Permasalahan Kualitas Guru

Kesempatan meningkatkan dan mengembangkan karir tentunya juga diidamkan oleh guru. Ada keinginan untuk meningkatkan karir ke jenjang yang lebih tinggi yang sekaligus meningkatkan kesejahteraannya sebagai hasil jerih payahnya, tetapi masih banyak berita yang kita dengar bahwa sebagian guru mendapatkan kesulitan untuk naik pangkat. Jalan untuk naik pangkat harus dilalui dengan penuh liku dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Ada anggapan ketika guru naik pangkat ada keharusan menyusun karya tulis seperti skripsi atau karya tulis ilmiah lainnya. Padahal arahnya adalah tulisan dalam bentuk jurnal harian yang memuat *plan, do, check*.

Pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru secara nasional diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) No. 16 Tahun 2009, sedangkan berdasarkan UU Otonomi Daerah, guru menjadi milik daerah. Dinas pendidikan kabupaten/kota mengelola guru untuk pendidikan dasar dan dinas pendidikan provinsi mengelola guru untuk pendidikan menengah. Kondisi ini sedikit menyulitkan karena tidak terpusatnya guru dikelola oleh pemerintah pusat. Pelatihan oleh guru di tingkat daerah (yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah) terkadang tidak bisa dihadiri oleh pemerintah pusat. Guna menyiasatinya, pemerintah pusat menyelenggarakan *Training of Trainers* (ToT) dengan peserta yang diharapkan dapat mentransfer ilmunya kembali ke guru-guru di daerah.

Saat ini, untuk pembinaan karir guru, Kemendikbud memberikan bantuan *block grant* dengan pendekatan yang lebih difokuskan pada penguatan karakter dan kemampuan penulisan soal untuk Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Untuk guru yang mengajar di tingkat SMP, pembinaan dilakukan untuk bidang studi IPS dan PKN, melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam bentuk bimbingan teknis. Secara perorangan, animo guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister sebenarnya cukup tinggi. Sebagai contoh, di Provinsi Sulawesi Selatan, pendaftaran untuk S-2 di UNM tercatat membludak dilihat dari latar belakang calon mahasiswa. Masalah lain mengenai kualitas guru adalah program sertifikasi guru. Peraturan mengenai sertifikasi guru dapat ditemui di Permendiknas No 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, dan Permendikbud No 29 Tahun 2016 tentang Sertifikasi untuk Guru yang Diangkat Sebelum 2016.

Sebagai upaya untuk menempatkan profesi guru sebagai profesi yang strategis

dan menjanjikan, UUGD ditindaklanjuti dengan serangkaian regulasi turunan sebagai bentuk penjabaran. Yang sangat menyejukkan adalah pelaksanaan program sertifikasi guru yang diikuti dengan pemberian tunjangan profesi guru (TPG). Hal ini adalah *effort* dari penyelenggara negara untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Walaupun ada kritik tajam dari para pemerhati pendidikan karena belum ada indikator yang menyebutkan bahwa ada korelasi antara pemberian tunjangan profesi dengan peningkatan kualitas kinerja guru, pemberian tunjangan profesi adalah upaya revolusioner pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang secara simultan juga diharapkan meningkatkan kualitas pendidikan. Pemberian tunjangan profesi kepada guru memang tidak secara instan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran mereka tetapi upaya ini pantas didukung dengan segala catatan tambahan. Sempat ada usulan agar sertifikasi guru dilakukan secara berulang untuk menjaga kualitas. Artinya bukan hanya sekali lulus sertifikasi, kemudian tidak ada lagi sertifikasi berikutnya yang oleh jabatan fungsional lain sering disebut *maintenance*.

Persoalan lain adalah kompetensi guru. Di tengah suasana yang tidak kondusif dalam bidang pendidikan, jarang para pengambil kebijakan pendidikan dan masyarakat akan mempertanyakan sejauh mana peran guru dalam menangani persoalan yang menjadi wilayah tugas pokok dan fungsinya. Sebagai contoh, ketika banyak siswa tidak lulus dalam Ujian Nasional (UN), akan timbul pertanyaan sejauh mana guru mampu membelajarkan materi yang telah diamanatkan dalam standar kompetensi lulusan (SKL). Guru dianggap gagal dalam menerjemahkan SKL dan gagal memahami siswa serta akan segera menjadi *scapegoat* (kambing hitam) dalam gegap gempita kegagalan tersebut.

Menurut Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud dalam

FGD mengenai Tata Kelola Guru, Guru perlu menjalankan tugas profesional dan disebut sebagai sebuah profesi atau disebut sebagai pekerja profesional, karena pekerjaannya membutuhkan kompetensi. Untuk itu guru perlu disiapkan secara serius. Pekerjaan guru bukan pekerjaan sampingan atau serabutan. Sebagai sebuah profesi, maka guru harus memiliki kompetensi dengan sistem seleksi dan promosi yang jelas. Pelaksanaan UKG menjadi penting karena untuk mengukur kualitas guru.

Guru yang kompeten sudah menjadi keharusan jika kita ingin generasi bangsa ini dapat bersaing dengan bangsa lain. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah telah menerbitkan Permendiknas No 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yang memuat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Selain harus berkualifikasi minimal S-1 sederajat, guru juga harus memiliki empat kompetensi yaitu: kompetensi pedagogik; kompetensi kepribadian; kompetensi sosial; dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik berkaitan dengan aspek-aspek pembelajaran dari kemampuan menguasai karakteristik peserta didik sampai dengan pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Bagaimana guru mampu mengidentifikasi potensi peserta didik, melakukan layanan pembelajaran yang proporsional kepada peserta didik, merancang kurikulum adalah ranah kompetensi pedagogik ini.

Kompetensi kepribadian berhubungan dengan moralitas, integritas, dan etika profesi. Kompetensi sosial merepresentasikan kemampuan menempatkan diri di dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara kompetensi profesional terkait dengan pengembangan wawasan keilmuan terhadap mata pelajaran yang diampu. Jika keempat kompetensi tersebut benar-benar dipahami, dimiliki, dan diamalkan oleh guru, diyakini bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang cerdas dan bermoral. Mengingat besarnya angka guru, maka pembinaan terhadap guru

yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah berdasarkan hasil asesmen UKG. UKG diakui masih memiliki kekurangan karena hanya melihat dari dua sisi, tetapi untuk saat ini, UKG masih merupakan indikator terbaik.

Di masa yang akan datang diharapkan UKG tidak menjadi satu-satunya indikator pemetaan karena penilaian UKG hanya sebagian dari keahlian yang dimiliki guru. Sebagai contoh, guru pendidikan jasmani dan seni tidak diujikan untuk mata pelajaran yang diampunya, padahal dimungkinkan berkurangnya nilai UKG karena mata pelajaran yang diampu tidak dijadikan pertimbangan. UKG yang dilaksanakan di tahun 2015, dari 2,9 juta guru yang ada pada saat itu, lebih dari 90 persen mengikuti UKG yang dimaksudkan untuk melihat potret kebutuhan guru saat itu. UKG sebelumnya yang diselenggarakan pada 2012 sampai dengan 2014 menjadi uji kompetensi awal ketika jumlah guru telah mencapai 3,2 juta sementara yang menjalani UKG hanya 1,6 juta. Dari UKG 2015 para guru dikelompokkan ke dalam empat kelompok besar yang selanjutnya diintervensi untuk memperbaiki melalui 10 modul yang disiapkan Kemendikbud.

Saran utama yang disampaikan dalam diskusi adalah pentingnya guru sebagai garda dan benteng terdepan dapat terus meningkatkan kualitas dirinya guna meningkatkan mutu pendidikan. Artinya, bukan infrastruktur yang diutamakan, tapi mutu guru (suprastruktur) sebagai penyangga utama bangunan sistem pendidikan. Mutu guru meliputi kualifikasi pendidikan, kepangkatan, kepemimpinan, produk (*output*) yang dihasilkan dari pekerjaannya, dan yang utama adalah kompetensi atau keahlian.

Penghargaan dan Perlindungan

Secara umum Penghargaan diberikan kepada guru yang mengikuti kegiatan ajang guru berprestasi dan mendapatkan juara 1, 2 dan 3, baik tingkat kota, propinsi maupun tingkat

nasional. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan di luar yang di fasilitasi oleh pemerintah seperti penulisan karya ilmiah guru, Forum Ilmiah Guru (PIG) dan lain-lain. Pemerintah pusat mencoba mengapresiasi kinerja guru dalam berbagai ajang perlombaan yang diharapkan dapat memfasilitasi kreativitas guru dalam berkarya. Termasuk di dalamnya simposium penulisan jurnal karya tulis ilmiah untuk guru yang berpresesi.

Perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas ditemui dalam Permendikbud No 10 Tahun 2017 yang mana secara tegas disebutkan siapa saja yang berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada guru apabila ada permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugasnya, dalam Pasal 3 Permendikbud No 10 Tahun 2017, perlindungan dimaksud merupakan kewajiban Pemerintah; Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; Satuan Pendidikan; Organisasi Profesi; dan/atau Masyarakat.

Kemendikbud telah menandatangani MoU dengan Kejaksaan Tinggi, KPK, dan juga dengan Kepolisian terkait dengan gelar perkara internal antarpihak yang berkasus sehingga tidak langsung keluar pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap (P21) di Kejaksaan. Selain itu, sudah ada pedoman berdasarkan Permendikbud No 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang menginisiasi dibentuknya tim pencegahan kekerasan di sekolah dan juga penyusunan SOP jika terjadi kekerasan di sekolah.

Berdasarkan temuan di lapangan melalui diskusi bersama guru, organisasi guru, serta pemerintah daerah yang membidangi guru di Provinsi DIY dan Sulawesi Selatan, sampai hari ini, berbagai peristiwa telah merusak martabat dan penghargaan masyarakat terhadap guru. Hal ini dikarenakan tidak ada konstruksi sosial dalam bentuk regulasi yang ditetapkan pusat, selanjutnya ditindaklanjuti di tingkat daerah, untuk kemudian direalisasikan di tingkat satuan pendidikan terutama melalui sosialisasi ke orang tua siswa.

Perlindungan terhadap guru sulit dilakukan oleh pemerintah pusat karena penanganan masalah guru di daerah menjadi tugas pemerintah daerah, tetapi pengaturan ini tidak menyebabkan berkurangnya pengaduan para guru yang bermasalah ke pemerintah pusat.

Tidak hentinya Kemendikbud mengingatkan para guru akan keberadaan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga upaya pendisiplinan anak tidak dilakukan secara kasar. Terlebih karena informasi dengan cepat tersebar ke mana-mana. Harapan dari para guru adalah penguatan perlindungan karena tujuan utama guru jika melakukan hukuman sebenarnya adalah untuk memperbaiki siswa itu sendiri.

Secara keseluruhan mulai dari UU sampai PP maupun Permen sebenarnya sudah menjelaskan tentang pentingnya perlindungan guru, atau guru harus dilindungi secara hukum. Akan tetapi penjelasan teknis atau lebih spesifik terkait perlindungan hukumnya tidak ada. Hal ini mendorong adanya penguatan yang dijabarkan dalam bentuk lokal, seperti melalui Perda atau Pergub/Perbup/Perwali.

Perlindungan akan rasa aman juga sangat menentukan profesionalisme guru. Jika kita melihat beberapa kasus yang terjadi pada guru belakangan ini, terlebih dengan mudahnya kelompok masyarakat yang mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat bahkan media massa yang ikut andil, secara umum kita merasa khawatir dan menyimpulkan bahwa ada kecenderungan kondisi ideal belum sepenuhnya terwujud. Ada beberapa kasus penganiayaan profesi guru seperti pelecehan profesi, pemukulan fisik guru. Perlakuan dari sebagian masyarakat atau orang tua yang kadang kurang mendukung rasa aman guru dalam menjalankan tugas, misalnya ada pengaduan atau protes terhadap tindakan hukuman yang dilakukan guru di mana orang tua bereaksi keras bertindak di luar batas tanpa

melalui prosedur hukum. Akibatnya, guru menjadi enggan mengambil tindakan dan terjadi pembiaran. Memang diakui guru pun sebagai manusia biasa tentu mengalami kekhilafan tertentu, namun dapat dipastikan guru tersebut tidak bermaksud menyakiti muridnya sebagaimana seorang pejabat melakukan penganiayaan.

Salah satu organisasi profesi guru di Provinsi Sulawesi Selatan mengungkapkan keinginan dari beberapa kelompok guru agar pemerintah menyediakan dukungan dari organisasi advokasi bagi para guru yang dihadapkan dengan masalah hukum. Keinginan tersebut berangkat dari pengalaman guru yang berada di daerah rawan atau paling rawan (seperti di Kabupaten Gowa untuk Provinsi Sulawesi Selatan). Pengalaman tersebut juga membawa kesimpulan pada perlunya pengaturan secara nasional dalam bentuk undang-undang mengenai perlindungan guru. Isi dari pengaturan mengenai perlindungan guru dapat mengadopsi dari berbagai praktik baik organisasi guru yang ada.

Kesejahteraan Guru

Satu faktor yang sangat terkait dengan kinerja guru adalah kesejahteraan. Salah satu indikator kesejahteraan adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu imbalan jasa. Faktor imbalan jasa guru, baik yang bersifat materi maupun nonmateri, diakui masih jauh untuk dikatakan memuaskan. Walaupun sebenarnya harkat dan martabat guru bukan terletak pada aspek materi atau simbol-simbol lahiriah. Kenyataannya masyarakat menilai seseorang dari aspek materinya. Dari sudut inilah para guru sangat mengidamkan agar suatu saat “imbalan jasa” dapat disesuaikan dengan syarat kualitas hidup yang memadai. Beberapa temuan yang diperoleh baik di Provinsi DIY maupun Provinsi Sulawesi Selatan masih ditemukan imbalan jasa yang

masih jauh dari harapan. Harapan ini bagi sebagian guru sangat sulit dijangkau jika kita melihat kenyataan para guru dengan upah kecil tetapi masih dibebani berbagai potongan. Hal ini menunjukkan penghargaan terhadap guru masih rendah.

Tidak berlebihan jika kemudian para guru melihat fenomena *brain-drain* merupakan langkah paling logis yang ditempuh para profesional (termasuk guru) yang sempat mengenyam pendidikan di luar negeri. Kerja sebagai pegawai pemerintah ditinggalkan karena tidak ada jaminan kehidupan yang lebih baik. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, semua guru harus diperhatikan betul kebutuhannya. Saat ini, untuk mereka yang menginginkan menjadi guru, harus sudah menyelesaikan pendidikan S-1 dan pendidikan profesi guru. Berdasarkan masukan dari berbagai kalangan guru, utamanya guru non-PNS, perlu lebih diperhatikan jenjang karir yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka, mengingat mereka tidak mempunyai jabatan fungsional dan akibatnya tidak mendapatkan tunjangan fungsional.

Permasalahan juga ditemui untuk guru yang mengajar di sekolah swasta dengan yayasan induk (dari dalam maupun luar negeri) yang mapan secara keuangan dengan yang kurang mapan. Perlu ada standar dan pemerintah mempunyai data yang *up-to-date* agar terlihat kemampuan masing-masing sekolah untuk memberikan kesejahteraan kepada para gurunya. Jika dimungkinkan, ada kewajiban dari pemerintah (baik pusat maupun daerah) untuk memberikan subsidi kepada sekolah yang secara ekonomi kurang agar ada standar baku untuk kesejahteraan para guru. Selain itu diharapkan ada perjanjian kerja di depan untuk guru non-PNS dengan melihat pemenuhan UMR di masing-masing sekolah sebagai bentuk perlindungan dan juga agar tidak ada kesenjangan pendapatan dengan profesi lain.

Di sisi lain adanya tunjangan profesi guru diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2016, Perpres 97 Tahun 2016 tentang RAPBN, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 40/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. Pemberian tunjangan profesi memicu timbulnya sikap desakralisasi guru akibat munculnya hedonisme dalam orientasi kehidupan guru. Guru dianggap tidak lagi mengajar dengan hati tetapi mengajar demi sertifikasi. Guru telah kehilangan kewibawaan di mata masyarakat. Masyarakat menganggap guru sama saja dengan pekerjaannya. Sempat ada tuntutan masyarakat yang ‘merasa’ sudah berbuat seperti guru (sebagai contoh para pendidik PAUD) yang berupaya mendapatkan sertifikasi guru dan selanjutnya menuntut TPG. Bahkan guru melaporkan penyelenggara/pelaksana TPG (dinas pendidikan) ke berbagai pihak ketika (karena perilaku guru sendiri) guru kehilangan hak TPG-nya.

Sebelumnya tunjangan khusus bagi guru diproses oleh pemerintah pusat, namun saat ini tunjangan khusus menjadi kewenangan daerah. Tunjangan khusus diberikan karena dedikasi para guru, terutama untuk guru yang bekerja di daerah miskin. Rencananya, akan ada tunjangan yang berbeda untuk guru yang hanya mengajar di batas minimum 12 jam pelajaran, dan untuk yang dapat memenuhi 24 jam mengajar. Berdasarkan informasi dari organisasi guru serta LPTK di Provinsi DIY, selama ini banyak guru yang harus mengajar di dua bahkan tiga tempat untuk memenuhi batas minimal mengajar 24 jam. Rencana ini masih dalam proses diskusi di Kemendikbud. Staf (non-guru) di lembaga pendidikan dan para guru honorer lebih sulit lagi kondisinya. Staf tidak pernah mendapatkan tunjangan dan tidak pernah diperjuangkan, sedangkan untuk guru honorer, tunjangan sertifikasi tersendat-sendat dibarengi dengan isu penghapusan tunjangan. Belum lagi GTT

di sekolah swasta atau yayasan yang lebih tidak jelas lagi tunjangan sertifikasinya, terutama untuk GTT yang sudah lewat usianya untuk mengajukan diri menjadi PNS.

Organisasi Profesi Guru

Salah satu organisasi guru yang telah lama ada di Indonesia (PGRI) sebenarnya telah bekerja sama dengan para guru dalam memberikan perlindungan kepada guru untuk menjalankan profesinya. Sebagai contoh, PGRI Kabupaten Gunungkidul langsung bekerja sama dengan polisi agar ada penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu jika terjadi kasus, artinya tidak langsung menangkap dan memasukkan guru ke dalam penjara. Organisasi profesi guru menurut UUGD adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Organisasi profesi diharapkan dapat memajukan profesi guru, meningkatkan kompetensi, karir, dan wawasan kependidikan para guru, memberikan perlindungan profesi guru dari kejahatan, serta menjembatani pengabdian guru kepada masyarakat. Saat ini, peran perlindungan atau pengayom guru dalam menjalankan profesinya dirasakan sangat kurang dari organisasi profesi yang ada.

Melalui organisasi guru tertua di Indonesia, PGRI, hubungan antarguru dikembangkan melalui program-program yang memupuk rasa kebersamaan, namun dirasakan organisasi guru ini belum menunjukkan komitmennya secara optimal dan konsisten memperjuangkan nasib guru. Bahkan dapat dikatakan bahwa kehadiran PGRI belum dirasakan manfaatnya oleh para guru secara langsung. PGRI seolah-olah dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang tidak terkait dengan perjuangan meningkatkan kesejahteraan guru.

Sejak lahirnya UUGD organisasi profesi guru sebenarnya sudah tidak tunggal lagi.

Organisasi profesi juga sebaiknya tidak hanya berupaya meningkatkan kesejahteraan tetapi juga kompetensi guru. Ada keinginan agar organisasi profesi ini juga berlaku untuk guru dengan bidang studi yang sama. Artinya, jika guru mengajar Bahasa Inggris, maka kiranya organisasi profesi yang ada berisikan guru-guru yang juga mengajar Bahasa Inggris sehingga ada berbagi pengalaman dan saling mendukung karir serta bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri.

Saat ini dirasakan organisasi profesi guru kurang memahami hakikat kompetensi guru, terutama pada kompetensi kepribadian. Kekurangpahaman tersebut terletak pada pengukuran kuantitatif, yakni pada hal-hal yang mencakup kepribadian. Selain itu ada pemahaman bahwa hanya satu organisasi profesi guru yang berhak menandatangani pengusulan kenaikan pangkat guru bidang studi. Di beberapa daerah disdik tidak menerima jika organisasi profesi guru yang menandatangani usulan atau karya ilmiah bukan PGRI. Dari sekian banyak organisasi guru, belum pernah ada asesmen terhadap organisasi tersebut untuk dapat mengelompokkan sebuah organisasi ke dalam organisasi yang benar-benar mewakili. Di daerah (baik provinsi, kabupaten, atau kota) telah beberapa kali terjadi benturan karena menganggap tidak semua organisasi guru mendapatkan akses yang sama ke disdik. Pedoman yang jelas mengenai organisasi guru diperlukan untuk tata kelola guru yang lebih baik.

Diskusi dengan Ikatan Guru Indonesia (IGI) membawa penelitian ke bentuk alternatif dari organisasi guru di Indonesia. IGI merupakan transformasi dari Klub Guru Indonesia yang secara resmi di tingkat nasional mendapatkan pengakuan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) dari Menteri Hukum dan HAM pada 26 November 2009. Beberapa daerah, seperti Provinsi Sulawesi Selatan, langsung menyusun kepengurusan di daerahnya masing-masing. Di tahun 2016, AD dan ART Pengurus IGI mengalami

perubahan, sehingga SK dan Akta Notaris IGI juga diubah tepatnya pada Mei 2016. Pada saat itu terjadi pembaharuan kepengurusan ketika Kongres IGI berlangsung di Makassar. Keberadaan IGI diakui oleh pemerintah setempat dengan adanya Surat Keterangan dari Kantor Badan Kesatuan Bangsa Sulawesi Selatan. Selama tujuh tahun keberadaan IGI, posisinya sudah dapat dikatakan setara dengan PGRI jika dilihat dari kaca mata Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Bahkan pada peringatan hari pendidikan nasional, IGI mendapatkan penghargaan yang disampaikan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga yang memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan SDM-nya.

Selama dua kali kepengurusan, keanggotaan IGI Sulawesi Selatan sudah mencapai sekitar 5.000. Sistem informasi anggota saat ini dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi secara online melalui situs <https://anggota.igi.or.id/>. Selain itu IGI juga mempunyai blog dan Facebook jika ada informasi yang ingin diketahui mengenai IGI. Saat ini secara resmi dalam situs tersebut terdata kurang dari tiga ribu guru, karena ada yang sudah mendaftar tapi belum keluar kartu anggotanya sehingga belum dianggap resmi menjadi anggota. Selain itu, anggota lama masih ada yang belum familiar dengan sistem informasi yang ada. Pendaftaran dikenakan biaya sebesar Rp50.000,00 dan tidak ada iuran berkala. Dari dana yang terkumpul, 50 persen diserahkan ke daerah masing-masing, kemudian 35 persen diserahkan ke wilayah, dan sisanya 15 persen diserahkan ke pusat. IGI juga diterima terbuka oleh guru-guru di daerah terpencil karena semangat berbagi dan *togetherness* dari para anggotanya. Kepengurusan di tingkat pusat akan di-reshuffle jika tidak melaksanakan kegiatan dalam kurun waktu enam bulan.

Keberadaan organisasi yang berupaya mengembangkan potensi dan meningkatkan kompetensi guru dengan semangat dari

anggota dan untuk anggota ini sedikit memunculkan kecemburuan dari organisasi guru lainnya. Tidak jarang anggota IGI mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari oknum pemerintah daerah karena dirasakan menyaingi organisasi lain yang telah lama ada. Tetapi, pengakuan dari pemerintah setempat sudah merupakan dukungan moril bagi IGI. Dukungan lain yang diterima IGI adalah rekomendasi, izin, dan materi terkait pengembangan kompetensi guru yang diterima baik dari Dinas maupun dari Kementerian.

Secara organisasi, IGI mengupayakan dukungan dana secara swadana. Model pengelolaan ini dapat dilihat ketika IGI melaksanakan Kongres Kedua di Makassar, guru-guru Anggota IGI yang bertempat tinggal di Makassar akan menerima guru dari luar kota untuk menginap di rumah mereka.

Ketika IGI melihat berbagai kasus yang menimpa guru, dari sisi advokasi, memang IGI dihadapkan pada batasan-batasan tertentu. Peran IGI adalah memastikan anggotanya mendapatkan pendampingan hukum secara formal dalam menghadapi kasusnya. Ada keinginan dari IGI untuk mendapatkan dukungan dari organisasi advokasi dengan alternatif pendanaan dari dukungan pemerintah provinsi atau swadana. Keinginan tersebut berangkat dari pengalaman Anggota IGI yang berada di daerah rawan atau paling rawan di Sulawesi Selatan, seperti di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bantaeng. Pengalaman tersebut juga membawa kesimpulan pada perlunya pengaturan secara nasional dalam bentuk undang-undang mengenai perlindungan guru.

Pengembangan potensi guru dilaksanakan dalam empat wilayah potensi, yaitu *critical thinking*, komunikasi yang efektif, kolaborasi, dan kemandirian. Pada saat ini baik di pusat maupun di daerah/wilayah, dalam satu minggu bekerja IGI kurang lebih menyelenggarakan 10 s.d. 20 kegiatan secara bersamaan. Kegiatan tersebut mayoritas

adalah *workshop* dengan sasaran tidak hanya *output* tetapi juga *outcome*. Beberapa contohnya adalah workshop SaGuSaKu (Satu Guru Satu Buku), SaGuSaKTI (Satu Guru Satu Karya Tulis Ilmiah), SaGuSaNo (Satu Guru Satu Inovasi), yang saat ini diduplikasi oleh beberapa organisasi/ perkumpulan guru.

Selain itu ada juga program SaGuSaTab (Satu Guru Satu Tab) bekerja sama dengan PT. Samsung (5.000 unit Tablet) yang juga mandiri Rumah Belajar IT dengan fasilitas 54 unit Tablet, SaGuSaLa (Satu Guru Satu Laptop) bekerja sama dengan Axio. Program SaGuSaKu rencananya akan disosialisasikan dalam bentuk penerbitan 1.700 buku saat Hari Guru Nasional nanti. Khusus untuk SaGuSaNo, *workshop* ini diselenggarakan agar guru dapat mempelajari cara membuat media pembelajaran interaktif berbasis android, guna memanfaatkan buku digital. Isi buku digital akan sama dengan buku fisik tetapi mengaksesnya lebih interaktif karena memungkinkan adanya suara dan visual video dengan *link* ke beberapa sumber.

Workshop dilaksanakan secara *roadshow* ke 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan target 10.000 inovasi guru yang rencananya juga akan dipublikasikan pada Hari Guru Nasional Tahun 2017. Selama enam bulan di tahun 2017, IGI Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan *roadshow* di lima kabupaten dan difasilitasi untuk keperluan operasional oleh LP3TK. Jika dihitung secara nasional, dalam satu harinya, IGI melakukan *workshop* di 5 s.d. 7 provinsi. *Workshop* berkembang karena peserta *workshop* juga mengeksplorasi beragam aplikasi yang ada di *smartphone*-nya. Salah satu *workshop* yang juga diminati adalah pengelolaan blog yang dilaksanakan secara *online/digital*. *Workshop* juga mengeluarkan sertifikat yang dapat digunakan sebagai bagian dari portofolio kinerja. 30 jam *workshop* disamakan angkanya dengan 1 angka kredit.

Melalui kerja sama dalam mengembangkan potensi guru cukup

beragam tergantung pilihan masing-masing daerah/wilayah. Di daerah yang satu ada kerja sama dengan BUMD, sedangkan di daerah lain bekerja sama dengan perusahaan swasta. Sebagai organisasi guru, terkadang IGI dimintakan pendapat/rekomendasinya terhadap para calon kepala sekolah di wilayahnya masing-masing. Pengaturan mengenai organisasi profesi guru dalam UUGD diatur di bagian kesembilan mengenai Organisasi Profesi dan Kode Etik. Empat Pasal dengan 12 ayat telah mengatur bahwa organisasi profesi yang dibentuk guru bersifat independen. Setiap undang-undang yang mengatur mengenai profesi, seperti kedokteran, advokat, dan keperawatan hanya mengakomodir satu organisasi profesi. Sebagai contoh, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang memiliki kewenangan sangat besar, termasuk mengatur para dokter yang ingin berpraktik di Indonesia dan membina kompetensi dokter Indonesia. Contoh yang kurang baik adalah organisasi advokat yang terpecah. Masing-masing organisasi, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) mengaku sebagai organisasi profesi yang seharusnya hanya ada satu di Indonesia. Organisasi guru yang ada saat ini dapat belajar dari IDI.

Perlu dipahami bahwa undang-undang mengamanatkan satu organisasi profesinya, tapi membuka kesempatan dibentuknya berbagai organisasi guru. Beragam organisasi guru yang terbentuk ini perlu menyamakan pemahaman akan bentuk organisasi profesi guru seperti apa yang terbaik untuk guru. Apakah nanti akan melebur dengan PGRI, atau menjadi satu organisasi baru dengan bentuk keanggotaannya atau kepengurusan yang (misalnya) bersifat konfederasi. Organisasi profesi ini nantinya akan juga mengatur hak dan kewenangan anggotanya. Organisasi profesi juga dapat mengatur berbagai hal selain yang diamanatkan UUGD, seperti

peluang guru asing mengajar di sekolah di Indonesia, atau juga mengatur sekolah yang dapat bekerja sama dengan lembaga asing. Dengan satu organisasi profesi yang jelas, anggota memperkuat profesinya melalui organisasi.

Klaim satu organisasi sebagai organisasi profesi yang diakui pemerintah berpotensi menjadi penyebab kesulitan pengaturan profesi itu sendiri. Sebuah organisasi didirikan tentunya dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM artinya organisasi tersebut adalah organisasi masyarakat yang diakui di Indonesia. Kelahiran berbagai organisasi di masyarakat berdampak positif terhadap pengembangan modal sosial terutama pengembangan *civil society*. Ketika organisasi muncul, partisipasi masyarakat juga muncul dan berdampak pada pengembangan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Masalah Guru Lainnya

Kondisi lingkungan kerja yang kondusif sangat diinginkan oleh guru. dari berbagai temuan di lapangan baik di Provinsi DIY maupun Provinsi Sulawesi Selatan, lingkungan kerja, baik fisik maupun nonfisik sangat menunjang profesionalitas guru. Tempat mengajar yang tidak layak merupakan faktor yang tidak mendukung kinerja guru. Ruang kelas yang sempit dengan murid yang melebihi jumlah ideal, fasilitas belajar yang minim, lingkungan yang bising, dapat memengaruhi semangat kerja. Mayoritas SMK di Indonesia tidak mempunyai laboratorium dan bengkel. Akibatnya guru lebih banyak mengajar teori di bandingkan praktik. Bayangkan saja bila kondisi SMK seperti ini akhirnya ini bisa menyebabkan tenaga SMK tidak bisa di pakai karena tidak bisa melakukan praktik yang dibutuhkan. Oleh karena itu, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi keharusan dalam upaya pengelolaan guru yang lebih baik. Selain

sarana dan prasarana, peran serta seluruh pemangku kepentingan juga menjadi inti dari pengelolaan guru yang baik. Kepala sekolah sebagai motor penggerak gerbong pendidikan memimpin di depan. Kelembagaan pendidikan mulai dari dinas sampai masyarakat dengan berbagai peluang dan tantangan perlu bersinergi untuk mengelola pendidikan dengan baik, tetapi jangan sampai pengelolaan pendidikan, terutama pengelolaan guru jatuh ke lingkup politik yang tidak steril karena adanya kepentingan parsial pelaku politik.

Penutup

Simpulan

Lahirnya UU Guru dan Dosen menunjukkan bahwa ada penghargaan terhadap profesi guru dan dosen dalam kancah pendidikan nasional. Lahirnya UUGD diharapkan mampu memberikan dorongan bagi pelaku pendidikan terutama dalam hal ini guru sebagai garda terdepan penyelenggaraan pendidikan agar dapat melaksanakan profesinya secara lebih ideal dan professional. Meski telah dikuatkan dalam bentuk Undang-Undang, namun pada pelaksanaannya implementasi tata kelola guru tetap ditemukan berbagai permasalahan yang menjadikan tata kelola guru belum dapat dilaksanakan dengan baik. Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengelolaan guru dimulai dari definisi guru yang sangat luas, pengaturan yang kerap berubah, dan wadah pemersatu yang tidak dirasakan keberadaannya saat dibutuhkan. Belum lagi permasalahan kuantitas yang memengaruhi kualitas guru. Sebagai pendidik profesional, tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Sebagai garda dan benteng terdepan, guru berharap dapat terus meningkatkan kualitas dirinya guna meningkatkan mutu pendidikan dengan dukungan dari pemerintah. Artinya, bukan infrastruktur yang diutamakan, tapi mutu guru (suprastruktur) sebagai penyangga utama bangunan sistem pendidikan. Mutu guru meliputi kualifikasi pendidikan, kepangkatan, kepemimpinan, produk (*output*) yang dihasilkan dari pekerjaannya, dan yang utama adalah kompetensi atau keahlian. Ada keinginan dari beberapa kelompok guru agar pemerintah menyediakan dukungan dari organisasi advokasi bagi para guru yang dihadapkan dengan masalah hukum. Pengalaman juga membawa kesimpulan pada perlunya pengaturan secara nasional dalam bentuk undang-undang mengenai perlindungan guru. Isi dari pengaturan mengenai perlindungan guru dapat mengadopsi dari berbagai praktik baik organisasi guru yang ada.

Khusus mengenai organisasi profesi guru, perlu ada satu organisasi profesi, karena undang-undang mengamanatkan satu organisasi profesi, tapi membuka kesempatan dibentuknya berbagai organisasi guru. Beragam organisasi guru yang terbentuk ini perlu menyamakan pemahaman akan bentuk organisasi profesi guru seperti apa yang terbaik untuk guru. Apakah nanti akan melebur dengan PGRI, atau menjadi satu organisasi baru dengan bentuk keanggotaannya atau kepengurusan yang (misalnya) bersifat konfederasi. Organisasi profesi ini nantinya akan juga mengatur hak dan kewenangan anggotanya. Organisasi profesi juga dapat mengatur berbagai hal selain yang diamanatkan UUGD, seperti peluang guru asing mengajar di sekolah di Indonesia, atau juga mengatur sekolah yang dapat bekerja sama dengan lembaga asing. Dengan satu organisasi profesi yang jelas, anggota memperkuat profesinya melalui organisasi.

Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan guru untuk mendisiplinkan peserta didik dalam bentuk hukuman kerap kali menjadi bumerang bagi guru, karena banyak orang tua siswa yang memperkarakan peristiwa ini menjadi pidana. Pemerintah perlu segera mengantisipasi hal ini dengan upaya memperkuat perlindungan bagi guru dengan peraturan yang setingkat dengan undang-undang. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini tidak memadai untuk melindungi profesi guru.

Sumber daya manusia bermutu merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan dan peningkatan kualitas guru merupakan faktor penting dalam mewujudkan SDM bangsa yang bermutu, yang siap dan mampu bersaing dalam pergaulan dan pasar kerja global saat ini. Diperlukan kebijakan-kebijakan strategis dan terstruktur yang mencakup pelatihan dan pengawasan terhadap kualitas guru.

Persoalan guru merupakan persoalan yang kompleks. Meskipun secara esensial guru dan dosen memiliki karakteristik profesional yang sama, yaitu pengajaran dan pembelajaran, namun memiliki wilayah tanggung jawab yang berbeda. Mengingat perbedaan kompleksitas persoalan dan tanggung jawab yang berbeda, maka sebaiknya undang-undang yang mengatur tentang Guru diatur tersendiri terpisah dengan pengaturan tentang dosen seperti yang ada saat ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim penelitian kelompok bidang Kesejahteraan Sosial dengan tema penelitian mengenai Tata kelola Guru dalam implementasi Guru dan Dosen pada tahun 2017 yaitu Yulia Indahri S.Pd., M.Si., Dr. Ujjianto Singgih P., M.Si., serta Dr. Muchaddam Fahham yang telah

memberikan izin untuk menuliskan hasil penelitian dalam bentuk jurnal. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai narasumber serta informan dalam penelitian di wilayah Provinsi DIY dan Sulawesi Selatan antara lain, Dinas Pendidikan Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, Perwakilan Kepala Sekolah, Perwakilan Pengawas Sekolah, Organisasi Guru IGI, PGRI, Perwakilan MGMP, serta narasumber lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Atmanti, Hastarini Dwi. 2005. "Investasi Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan", *Dinamika Pembangunan*, Vol. 2 No. 1/ Juli 2005: 30–35.
- NN. 2015. Jawab, Hak dan Kewajiban, dan Kompetensi Guru", *Auladuna*, Vol. 2 No. 2 Desember 2015: 221–232.
- Samtono. 2011. "Pembangunan Sumber Daya Manusia di Sektor Pendidikan dengan Segala Permasalahannya", *Among Makarti*, Vol. 4. No. 7, Juli 2011: 120–143.
- Solihin, Agus Iman. 1995. "Investasi Modal Manusia Melalui Pendidikan: Pentingnya Peran Pemerintah", *Mini Economica* 23, 1995, hlm. 6–20.

Buku

- Aldridge, E. J., Sutojo, A. S. 2005. *Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*. Jakarta: Damar Media Pustaka.
- Ali, Mohammad. 2009. *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional*. Bandung: PT Imperial Bhakti Utama.
- Bappenas. 2016. *Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

- Fontana, Andrea & Frey, James H. 2009 “Wawancara Seni Ilmu Pengetahuan” dalam Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. 2009. *Hand Book of Qualitative Research: Edisi Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Idris, Muhamad. 2008. *Kiat Menjadi Guru Profesional*. Cet. I. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. “Tata Kelola Guru Pendidikan Dasar”, Makalah Direktorat Pembinaan Guru Dikdas Tahun Anggaran 2017, BKD, Jakarta, 13 Maret 2017.
- Kusnandar. 2009. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nata, Abuddin. 1997. *Filsafat Pendidikan Islam*, Jilid I. Cet. I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Nurdin, Syafrudin. 2005. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Ciputat: PT Ciputat Press.
- Pasaribu, Rowland B. F. 2013/ *Materi Perkuliahan Kewarganegaran Universitas Gunadarma* 2013.
- Rusn, Abidin Ibn. 2009. *Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan*. Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sanjaya, Wina. 2008. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Bandung: Kencana Prenada Media Group.
- Saud, Udin Sayefudin. 2009. *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Shabir U., M. 2015. “Kedudukan Guru sebagai Pendidik: Tugas dan Tanggung
- Simanjuntak, Payaman J. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tunggal, Imam S. & Tunggal, Amin W. 2002. *Membangun Good Corporate Governance*. Jakarta: PT Prenhalindo.
- UNDP. 1997. “Governance for Sustainable Human Development,” Policy Paper, 1997. Diakses di <http://magnet.undp.org/policy/chapter1.htm#> Maret 2017.
- Uno, Hamzah B. 2009. *Profesi Kependidikan, Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Cet. IV. Jakarta: Bumi Aksara.

Internet

- “Ing Ngarso Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Andayani”, di <https://hsakti.wordpress.com/2007/10/14/ing-ngarso-sung-tulada-ing-madya-mangun-karso-tutwuri-andayani/>, 22 November 2010.
- “Statistik PNS”, di www.bkn.go.id/statistik-pns, 29 Maret 2017.

TEACHING AND RESEARCHING: IDENTIFYING PROBLEMS AND FINDING SOLUTIONS THROUGH CLASSROOM ACTION RESEARCH (CAR)

Pengajaran dan Penelitian: Mengidentifikasi Masalah dan Mencari Solusi Melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

*Yulia Indahri, **Santri E. P. Djahimo

yulia.indahri@dpr.go.id
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto Senayan Jakarta

**Universitas Nusa Cendana, Kupang

Naskah diterima: 21 Desember 2017 | Naskah direvisi: 20 Mei 2018 | Naskah diterbitkan: 30 Juni 2018

Abstract: *This paper presents several key issues about what teachers should do in their English as a foreign language (EFL) classes, in relation to their main job as teachers (i.e. teaching) and additional jobs for their professional development (i.e. researching). The main aim of this paper is to provide insightful information for teachers and teacher candidates about how they can improve themselves through teaching and researching activities, In addition, it also aims to discuss a particular way for them to be able to identify problems as well as find solutions in their own classroom through Classroom Action Research (CAR).*

Keywords: *teacher, teaching, researching, Classroom Action Research (CAR)*

Abstrak: Makalah ini menyajikan beberapa isu utama tentang apa yang harus dilakukan guru dalam kelas yang mengajar bahasa Inggris (EFL) mereka, dalam kaitannya dengan pekerjaan utama mereka sebagai guru (yaitu mengajar) dan pekerjaan tambahan untuk pengembangan profesional mereka (yaitu penelitian). Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk memberikan informasi yang mendalam bagi para guru dan calon guru tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan diri mereka sendiri melalui kegiatan mengajar dan meneliti. Selain itu, tulisan ini juga dimaksudkan untuk membahas cara tertentu bagi mereka untuk dapat mengidentifikasi masalah serta menemukan solusi di ruang kelas mereka sendiri melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

Kata Kunci: guru, pengajaran, penelitian, Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

Introduction

It cannot be denied that teaching is a primary obligation of teachers. Many teachers are so comfortable being in the “teaching only zone” that they tend to escape the importance of other related activities for their professional development, such as conducting research, writing academic papers, attending professional seminars and/or workshops, etc. This group of teachers tends

to focus only on teaching because they want to improve their students’ learning quality without being interrupted by other activities.

However, they are not aware that they can even have double advantages if they step out of their comfort zone and start doing other professional development activities as mentioned earlier. By conducting research and attending professional workshops, they

cannot only improve themselves in teaching performance, but also give much contribution to their students' quality. In this case, the expression of *input equals to output* applies. If the input is good then the output is great, and vice versa. This clearly means that if teachers have good teaching performance, students will have great result.

This paper will focus on one of teachers' professional development activities, that is, researching. It has been previously mentioned that in order to professionally develop themselves, teachers have to conduct research. It is expected that their aim of conducting research is not limited to fulfill one of the requirements to promote themselves to a higher position. It has to go beyond that. Teachers have to broaden their aims to improve and evaluate their teaching performance.

Teaching and Researching

Teaching and researching are two academic activities which are not supposed to be separated. They can support each other in each own way. Teachers as the executors of both activities can conduct them at the same time, in the same place, under the same authority.

Teachers can use their teaching and learning experience as the starting point for their research. They do not have to leave their classes or schools to conduct their research because they can conduct their research while teaching. Many teachers are still confused about the term 'research'. When it comes to their heads, they will think that it is a complicated academic activity which cannot be carried out by them in a school or classroom setting. Let's get a clear picture of what actually 'research' is before we go any further.

The word *research* consists of two parts, they are *re* and *search*. If we check in English dictionaries, *re* means *do again* and *search* means *look for* or *examine something*. So, research can be defined as a process of reflection and evaluation. We look back to the existing phenomenon and try to examine it in order to improve to a better stage. However, when we

are talking about scientific research, it has to be conducted in a set of scientific procedures by using scientific method and approach.

There are many different definitions of the word 'research' given by different experts. In spite of the differences in their views, they have similar points, that it is a scientific activity done in a systematic way in order to bridge the existing gap (Soekanto, 1986; Faisal, 2010; Ary, 1997; Creswell, 2014; Hillway, 1956).

Many technical terms appear around the word 'research'. Some of the terms are: basic/pure research, applied research, descriptive research, experimental research, qualitative research, quantitative research, action research, etc. Many of us sometimes get mixed up with those terms. To make it clear, I will give a brief description of those terms before continuing to discuss about a particular research for teachers.

Research is divided into many kinds and classifications based on its distinctive features. It can be classified based on the purpose, goal, type of analysis, strategies, level of investigation, etc. (Gonda & Aspi, 2014). It can also be classified based on the working field, namely: educational and non-educational research. Action research is an educational research which is, on one hand, classified as a type of applied research based on its goal, on the other hand, categorized as a Classroom Action Research based on its scope. No matter what classification and type of research it belongs to, Classroom Action Research (CAR) is unique by itself. The issues of what Classroom Action Research is and how it is conducted will be discussed further in the following part.

Classroom Action Research (CAR)

What is Action Research? What is Classroom Action Research? The answers to those questions can be found easily nowadays. Many related answers have been given by many experts, as many as related literatures which grow rapidly.

Action research is an actual research method. It consists of two words, *action* and *research*. In a glance, these two nouns can mean taking action in a research activity or

conducting a research through a set of actions. Arguing about its definition, Cohen & Manion (1989) state that it is not easy to comprehend the definition of this term because time, place, and setting are varied between one another. Whatever it means, in this paper, it refers to the integration of teachers' actions into the research activity.

Historically, the movement of action research in education was emerged in the United States in the 1940s (Cohen & Manion, 1989) as one of the research models in the place where the researcher worked, for example: teachers conducted research in classrooms, headmasters carried out research in schools, villages where there were activities of community were the places for illumination providers, etc. and the use of this kind of research was to improve the effectiveness of the doers (Sukardi, 2003).

It has been stated earlier that there are various definitions of action research given by many experts, and two of them are presented here:

Action research is the way groups of people can organize the conditions under which they can learn from their own experiences and make their experience accessible to others (Kemmis and Mc Taggart, 1982 in Sukardi, 2011: 210).

Action research is simply a form of self-reflective enquiry undertaken by participants in social situations in order to improve the rationality and justice of their own practices, their understanding of these practices, and the situations in which the practices are carried out (Carr and Kemmis, 1986: 162).

It can be seen from these definitions that when we are talking about action research, we are still dealing with some general issues because it has not discussed about the classroom setting as a research site, teachers as researchers, and students as research subjects and/or informants yet. When a research is conducted in a classroom by a teacher, then it is called Classroom Action Research (CAR).

Classroom Action Research mainly occurs

in classrooms and/or schools and its main aim is to encourage and motivate teachers to involve in their own practices and to become researchers of their own problems in their own classrooms (Stenhouse in McNiff, 1988).

There are various definitions of Classroom Action Research, and here are several of them:

Classroom action research is an examination of learning activities in the form of an action that is deliberately occurred in a classroom (Arikunto, 2006: 3).

Classroom Action Research is a research that applies scientific method to solve a particular problem in a limited scope (Gonda & Aspi, 2014).

Classroom centered research is just that—research centered on the classroom, as distinct from, for example, research that concentrates on the inputs to the classroom (the syllabus, the teaching materials) or the outputs from the classroom (learner achievement scores). It does not ignore in any way or try to devalue the importance of such inputs and outputs. It simply tries to investigate what happens inside the classroom when learners and teachers come together (Allwright, 1983:191).

The three definitions above are different but they involve some common factors, such as, the setting is in the classroom, the participants are teachers as researchers and students as research subjects, and it basically aims to solve problems in the classroom scope.

To wrap up, Classroom Action Research is an action research method conducted by a teacher as the researcher in his/her classroom where the data is collected. In short, it can be summed up that Classroom Action Research is conducting an action research in a classroom.

Why Classroom Action Research is needed? Because it is simple and practical, and does not need to undergo standard requirement of a research, such as hypothesis

testing, treatment, etc. (Nunan, 1990). He further asserts that it can be done through seven basic steps, they are: (1) identifying potential problems, then surveying and observing using any possible tools; (2) coding or classifying the results of observation based on the problems; (3) determining at least one positive change over the problems to be implemented; (4) starting implementing the change in the class; (5) observing while implementing; (6) repeating the same coding activity over the observation as in step 2; (7) comparing the coded results of the pre- and post- implementation to see whether or not the changing has already been successful (Nunan, 1990).

Other aspects which show simplicity and practicality of Classroom Action Research are, it can be carried out by either individual or group; it puts ideas into practices, and most importantly, it can function as a tool to give better improvement not only to teachers' teaching practice, but also to students' performance in the classroom. In this case, Cohen and Manion (1989) present four *tangible features* of action research, as follows:

- *Situational*; which means the ways to diagnose and solve problems have to be in a line (in terms of contexts).
- *Collaborative*: this can be done by both teachers and practitioners working together on a project.
- *Participatory*; all team members have to participate well in implementing the proposed changing.
- *Self-evaluative*; this kind of research relies on self-reflection and evaluation as one of indicators of success.

Beside the features, Classroom Action Research is unique by its characteristics, which are slightly different from other formal research. Sukardi (2003) claims that there are four characteristics of CAR, as follows: practical problems related to daily work to be identified and solved; well-planned treatment is used to solve the problems to

improve the quality of the research subjects; the steps planned are always in the form of cycles or phrases to be intensively carried out by individual or team; there is a reflective thinking of the researcher either before or after the action. This self-reflection is very important to evaluate what has been treated and its implication on the research subjects.

In addition, Suryabrata (1983) also provides four characteristics of CAR, they are: it is practical and straight to the point; it prepares a well-arranged framework for problem solving and new improvement, and this makes this research more empirical; it is flexible and adaptive, which means that the process and procedure can be adapted and changed during the research period; and it does not have enough scientific orderliness which leads to the weakness of both internal and external validity. Moreover, its objective is situational, the sample is limited and not representative, and the control on the independent variable is very small. Looking at the weaknesses of CAR, it can be said that although the results are good for practical dimension but it does not give direct contribution to the science itself.

There are several purposes of conducting CAR as proposed by Cohen and Manion (1989); to solve problems in a specific context and offer solutions to a better change or improvement; to act as an *in-service training* in giving *new skills and methods*, and improving *analytical powers and self-awareness* of teachers; to change the previous approaches which usually prevent from *innovation and change*; to provide better alternatives, from a *subjective and impressionistic* approach to an approach of *problem-solving in the classroom*.

In carrying out CAR, teachers are usually acted as researchers. Further explanation about who can undertake this type of research is as follows:

- It can be done by a single teacher who carries out the research individually in his classroom. In this case, he wants to change or improve the way teaching,

learning, or organization of the classroom goes by translating his ideas into action in his classroom. In this research, he can be both a researcher and a practitioner.

- It can also be carried out by a team of teachers within one school. This group of teachers works together in conducting this research. An outside researcher may or may not be used as a consultant for the advice and suggestions.
- The third one is mostly used as the main feature recently. In conducting the research, a teacher or some teachers do not work alone but accompanied by a researcher or even researchers from other interested parties, like advisers, university departments, etc.

No matter how many people conducts the research, either individual or team, it has to go through four main stages known as cycles: *planning, acting, observing, and reflecting* (Sukardi, 2003), which will be elaborated below.

Planning

In this stage, the researcher has to make series of action planning by looking at the current condition. This planning aims to improve the previous condition. That is why, the planning has to be future-oriented because whatever planned will be implemented in the stage of acting. Guidance questions in this planning stage are *what, why, when, where, by whom, and how* in relation to the acting stage.

Acting

The second stage is acting, which should be controlled accurately. This phase must be done carefully and it must form a well-planned practical action. A good acting will be supported by a rational and standard planning. There are three important elements to build up a good acting, they are; *the improvement of practice, the*

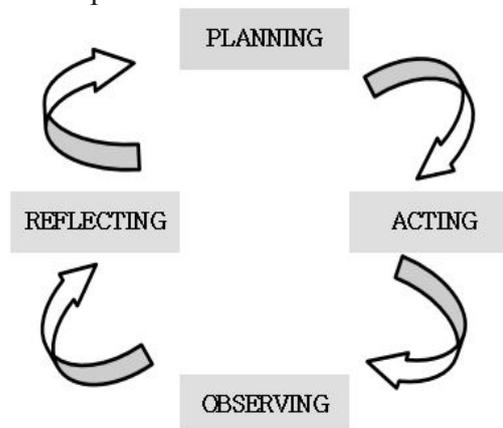
improvement of understanding individually and collaboratively, and the improvement of situation in which the action takes place (Sukardi, 2003). Shortly, this stage has to be carried out based on the plans.

Observing

The use of the observing stage is to record the implication of action implemented. A very careful observation will be needed to overcome the limitation of action taken by the researcher. A good observation must be flexible and open in order to give a room for noting down both expected and unexpected indications.

Reflecting

The fourth stage is reflecting. This stage is seen as an instrument to reinvestigate the previous action used to treat the subjects, which has been recorded in the observing stage. In this stage, evaluation will take place to know whether or not the implementation is successful. If the result is not as expected then the process can be restarted from the



first stage of the next cycle.

The procedures of conducting CAR can be seen in the model suggested by Kurl Lewin Kemis below:

(McNiff, 1988)

There are several important issues related to the procedure as suggested by Wallace (1998):

- Purpose; the teacher researcher has

to consider about why the research is important to be conducted to come to the purpose. The purpose has to be in a line with the professional needs of the researcher(s).

- Topic; what to observe or what area to investigate is an essential question in order to decide the topic. The topic has to be feasible, it must support the professional development of the researcher(s), the source can be from the issues of teaching and learning process in the classroom, such as, classroom management, classroom interaction, students' motivation, etc.
- Focus; research focus comes from the topic. The question, like, _ what specific aspect of area/topic needs to be investigated in detail? _ is needed to determine a research focus.
- Product; what to achieve through the research is considered as the product. This product is resulted from the way the research is conducted.
- Research Modes; how is the research going to be conducted? _ is a good question to choose what research mode to use. Some common research techniques are verbal reports, observation, interviews, questionnaires, case studies, etc., and how to choose the best research modes has a close relationship with the ways of collecting and analyzing data.
- Timing; timetable is suggested to be created in order to know exactly the total period of time for completing the research. How long a research will take entirely depends on the research scope determined by researcher(s).
- Resources; material and people are two types of resources usually used in action research.
- Refocusing / fine-tuning; in the process of conducting a research, the problem(s) set at the beginning might

be slightly or totally changed to some extent.

The flexibility and practicality of CAR can be felt as you step in that type of research. All the points presented in this paper are not static, they can be dynamically used, depends on purpose, topic, research scope, research setting, research subjects, and so on.

Conclusions

Several conclusions can be drawn as the closing part of this paper:

- Teachers do not only do their primary obligation, that is, **teaching**, but they also have to deal with another important job for their professional development, that is, **researching**.
- For teachers. Classroom Action Research implies the way to educate themselves (as practitioners and teacher researchers) by adopting new ideas to be implemented in order to give better changes and improve their own classrooms at the same time.
- This type of research can be easily and practically carried out by a single teacher (individually), a team of researchers (team work), the joining team of teacher/s as practitioner/s and researcher/s from other interested parties.
- **Teaching** and **researching** can be an inseparable parts for teachers; while teaching, they can conduct their research, and vice versa. In teaching, they can **identify problems** which exist in their classroom, and through **Classroom Action Research**, they can find solutions over the problems to improve their teaching-learning quality.

REFERENCES

- Allwright, D. 1983. Classroom-centered research on language teaching and learning: a brief historical overview. *TESOL Quarterly* , 17, 2, 191 – 204.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ary, Donald. 1997. *Introduction to Research in Education*. Harcourt Brace College Publishers.
- Carr, W. and Kemmis, S. 1986. *Becoming Critical. Education, knowledge and action research*. Lewes: Falmer.
- Cohen, L. & Lawrence, Manion. 1989. *Research Methods in Education*. Routledge: London and New York.
- Creswell, John. W. 2014. **Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Fourth Edition**. University of Nebraska, Lincoln, USA
- Faisal, Sanapiah. 2010. *Format-Format Penelitian Sosial*. Rajawali Pers.
- Gonda, Gerlie & Aspi, Rosalina. 2014. Kinds & classification of research. <http://www.slideshare.net/gj27/kinds-classification-of-research>
- Hillway, Tyrus. 1956. *Introduction to Research*. Houghton Mifflin
- Margono, S. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta: Jakarta.
- McNiff, Jean. 1988. *Action Research: Principles and Practice*. Routledge, London & New York,
- Muhammad, F. and Djaali, H. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Restu Agung, Jakarta.
- Nunan, D. 1990. Action research in the language classroom. In J. Richards & D. Nunan (Eds.), *Second language teacher education* (pp. 62-81). Cambridge University Press, Cambridge, England.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sukardi. 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Suryabrata, Sumadi. 1983. *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Wallace, Michael, J. 1998. *Action Research for Language Teachers*. Cambridge University Press.

PEDOMAN PENULISAN

1. Artikel yang dimuat dalam KAJIAN meliputi hasil pemikiran dan hasil penelitian mengenai masalah yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR RI dan/atau tentang isu-isu terkini yang perlu mendapat perhatian DPR RI;
2. Naskah yang dikirim adalah karya tulis asli yang belum pernah dimuat atau dipublikasikan di media lain.
3. Naskah ditulis dengan huruf *Arial* ukuran (*font*) 11, spasi satu setengah, dicetak pada kertas A4. Panjang tulisan 20-25 halaman. Berkas (*file*) dibuat dengan *Microsoft Word*. Pengiriman *file* juga dapat dilakukan sebagai *attachment e-mail* ke alamat: jurnal_kajian@dpr.go.id.
4. Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul artikel. Apabila penulis terdiri dari 4 orang atau lebih, yang dicantumkan di bawah judul artikel adalah nama penulis utama; nama penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki halaman pertama naskah. Penulis dianjurkan mencantumkan alamat *e-mail* untuk memudahkan komunikasi.
5. Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Inggris dengan format *esai*, disertai judul pada masing-masing bagian artikel, kecuali bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul bagian. Judul artikel dicetak dengan huruf besar yang dicetak tebal (*bold*) dan dibuat dalam dwi bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris).
6. Tulisan dilengkapi dengan abstrak dan kata kunci dalam dwi bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris). Abstrak artikel berisi tentang: (a) permasalahan yang diangkat/dikemukakan; (b) bagaimana permasalahan didekati/teori atau kerangka pemikiran apa yang digunakan untuk melihat/menjelaskan permasalahan; (c) bagaimana cara mendapatkan data atau metodologi yang digunakan; dan (d) kesimpulan dari pembahasan yang sudah diuraikan atau temuan/hasil penelitian.
7. Sistematika artikel meliputi:
 - a) Pendahuluan (berisi latar belakang, perumusan masalah, teori, hipotesa (optional), dan tujuan)
 - b) Metode penelitian (berisi waktu dan tempat, bahan/cara pengumpulan data, dan metode analisa data)
 - c) Hasil dan Pembahasan
 - d) Penutup (berisi kesimpulan dan saran)
8. Penulisan sumber rujukan atau kutipan menggunakan sistem catatan kaki (*footnote*), dengan urutan: Nama pengarang/editor (tanpa gelar akademik); judul karangan (ditulis dengan huruf miring/*italic*); kota penerbit; nama penerbit; tahun penerbitan; dan nomor halaman yang dirujuk atau dikutip. Contoh:

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 8-67.

Apabila karangan tersebut merupakan suatu artikel atau bagian dalam suatu buku, jurnal ilmiah, majalah, atau surat kabar, maka judul karangan ditulis di antara dua tanda petik. Contoh:

Inosentius Samsul, "Aspek Nilai dan Kepentingan dalam Pembentukan Undang-undang—Suatu Tinjauan Sosiologis," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, No.10/Th.3.1996, hlm. 54-55.

Juli Panglima Saragih, "Perekonomian Kita di Tengah Globalisasi Ekonomi Dunia," *Surabaya Post*, 1 Oktober 1994, hlm. 4.

Sumber rujukan yang berasal dari internet/*website* harus mencantumkan tanggal akses. Contoh:

Kumaidi, 1998, Pengukuran Bekal Awal Belajar dan Pengembangan Tesnya, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, (*Online*), Jilid 5, No.4, (<http://www.malang.ac.id>, diakses 20 Januari 2000).

9. Daftar Pustaka disusun dengan menggunakan standar APA/*American Psychological Association* dan diurutkan secara alfabetis. Contoh:

Buku:

H.S, Salim & Sutrisno, Budi. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada.

Buku kumpulan artikel:

Saukah, Ali. & Waseso, M.G. (Eds). (2002). *Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah* (Edisi ke-4, cetakan ke-1). Malang: Universitas Muhammadiyah Press.

Artikel dalam buku kumpulan artikel:

Pahlevi, Indra. (2003). Perkembangan Partai Politik di Indonesia: Studi terhadap Ideologi Partai Politik Peserta Pemilu 2004, dalam Susiana S. (Ed), *Pemilu 2004: Analisis Politik, Hukum, dan Ekonomi*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Artikel dalam jurnal atau majalah:

Surbakti, Ramlan. (2002). Identifikasi Partai Politik bagi Kaum Perempuan: Kajian tentang Perempuan dalam Ilmu Politik, *Jurnal Sosial dan Ilmu Politik*, No.6/Tahun III, April.

Artikel dalam surat kabar:

Saragih, Juli Panglima. Perekonomian Kita di Tengah Globalisasi Ekonomi Dunia, *Surabaya Post*, 1 Oktober 1994.

Tulisan/berita dalam surat kabar (tanpa nama pengarang):

Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri, *Jawa Pos*, 22 April 1995.

Dokumen resmi:

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (tanpa tahun). *Pedoman Penulisan Laporan Penelitian*. Jakarta: Depdikbud.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: PT. Armas Duta Jaya.

Buku terjemahan:

Gujarati, Damodar N. & Porter, Dawn C. (2010). *Dasar-Dasar Ekonometrika*, terjemahan oleh Eugenia Mardanugraha, Sita Wardhani, & Carlos Mangunsong. Jakarta: Salemba Empat.

Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian:

Budiasih. (2008). "Fenomena Fear of Floating Nilai Tukar di Indonesia Periode 1998-2007: Identifikasi, Alasan Ekonomi dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Moneter". Disertasi tidak diterbitkan, Depok: Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Makalah seminar, lokakarya, penataran:

Waseso, M.G. "Isi dan Format Jurnal Ilmiah", makalah disajikan dalam Seminar Lokakarya Penulisan Artikel dan Pengelolaan Jurnal Ilmiah, Universitas

Internet (karya individual):

Carr, S. Hitchcock, L. & Hall, W. (1996). A Survey of STM Online Journals, 1990-1995: The Calm before the Storm, (*online*), (<http://journal.ecs.soton.ac.uk/survey/survey.html>, diakses 12 Juni 1996).

Internet (artikel dalam jurnal online):

Kumaidi. (1998). Pengukuran Bekal Awal Belajar dan Pengembangan Tesnya, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, (*online*), Jilid 5, No.4, (<http://www.malang.ac.id>, diakses 20 Januari 2000).

Internet (bahan diskusi):

Wilson, Dave. 20 November 1995, Summary of Citing Internet Sites, NETTRAIN Discussion List, (*online*), (NETTRAIN@ubvm.cc.buffalo.edu, diakses 22 November 1995).

Internet (e-mail pribadi):

Naga, D.S. (ikip-jkt@indo.net.id), artikel untuk JIP, *e-mail* kepada Ali Saukah (jippsi@mlg.ywcn.or.id), 1 Oktober 1997.